



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.  
Hariman Surya Siregar, M.Ag.  
Koko Khoerudin, M.Pd.I.

# Pendidikan LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA



Penerbit **PT REMAJA ROSDAKARYA** Bandung



# Pendidikan LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA

RR.PK0290-01-2015

Penulis Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.,  
Hariman Surya Siregar, M.Ag  
Koko Khoerudin, M.Pd.I  
Editor Pipih Latifah  
Proofreader Nur Asri  
Desainer sampul Toto Rianto  
Layout Deni As.

Diterbitkan oleh PT REMAJA ROSDAKARYA  
Jln. Ibu Inggit Garnasih No. 40  
Bandung 40252  
Tlp. (022) 5200287  
Fax. (022) 5202529  
e-mail: [rosdakarya@rosda.co.id](mailto:rosdakarya@rosda.co.id)  
[www.rosda.co.id](http://www.rosda.co.id)

Anggota Ikapi  
Cetakan pertama, September 2015

Hak cipta dilindungi undang-undang pada Penulis

ISBN 978-979-692-626-8

Dicetak oleh PT Remaja Rosdakarya Offset - Bandung



## PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas anugerah serta karunia-Nya serta nikmat kesehatan yang telah diberikan kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku *Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya* ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selamanya dilimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Saw., kepada keluarganya, para sahabatnya, beserta para pengikutnya hingga akhir zaman, Aamiin.

Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa: “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka perlu ada suatu upaya yang terencana, terarah, dan berkesinambungan yang salah satunya adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang mencukupi.

Sehubungan dengan hal tersebut sebagai salah satu pengayaan bahan perkuliahan Mata Kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya (PLSB), diperlukan buku yang dapat membantu mahasiswa mendapatkan informasi tentang berbagai aspek yang terkait dengan bidang Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu Alamiah Dasar. Dengan demikian, diharapkan dengan hadirnya buku PLSB ini dapat membantu persepsi, penalaran, dan kepribadian mahasiswa agar memperoleh wawasan yang lebih luas dan komprehensif terhadap permasalahan lingkungan sosial, budaya, alam termasuk teknologi. Adapun materi buku ini telah disesuaikan dengan silabus yang digunakan di Perguruan Tinggi Program S-1.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, atas segala kekurangan dan kealpaan kepada para pembaca kiranya dapat memberikan saran serta masukan yang membangun demi kesempurnaan buku ini pada penerbitan selanjutnya.

Pada kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih kepada pihak penerbit khususnya PT Remaja Rosdakarya dan semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini.

Akhirnya semoga buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bandung, September 2015

Penulis



# DAFTAR ISI

**PENGANTAR — iii**

**DAFTAR ISI — v**

**BAB 1 PENDAHULUAN — 1**

- A. Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya — 1
- B. Masalah-Masalah PLSB — 2
- C. Ruang Lingkup Studi PLSB — 6

**BAB 2 MANUSIA DAN PENDIDIKAN — 9**

- A. Konsep Manusia — 9
- B. Konsep Pendidikan — 17
- C. Manusia dan Pendidikan — 28

**BAB 3 ESENSI DAN KONSEP DASAR ILMU SOSIAL,  
BUDAYA, DAN KEALAMAN — 47**

- A. Pengertian Ilmu — 47
- B. Persyaratan Ilmu — 50
- C. Esensi dan Konsep Dasar Ilmu Sosial, Budaya,  
dan Kealaman — 56

**BAB 4 MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK INDIVIDU DAN SOSIAL — 67**

- A. Manusia sebagai Makhluk Individu — 67
- B. Manusia sebagai Makhluk Sosial — 70
- C. Manusia Hubungannya dengan Alam — 73
- D. Peranan Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial — 83
- E. Dilema Antara Kepentingan Individu dan  
Kepentingan Sosial — 84

**BAB 5 HAKIKAT NILAI, NORMA, DAN MORAL SOSIAL — 87**

- A. Nilai Sosial — 87
- B. Norma Sosial — 96
- C. Moral Sosial — 104

**BAB 6 PERANAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI — 111**

- A. Hukum — 111
- B. Demokrasi — 123

**BAB 7 INTERAKSI SOSIAL, KELOMPOK SOSIAL,  
DAN MASYARAKAT — 129**

- A. Interaksi Sosial — 129
- B. Kelompok Sosial — 135
- C. Masyarakat — 156

**BAB 8 PERUBAHAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN — 163**

- A. Perubahan Sosial — 163
- B. Dampak Perubahan terhadap Kehidupan Sosial — 172
- C. Pembangunan — 176

**BAB 9 KERAGAMAN DAN KESEDERAJATAN — 183**

- A. Keragaman dan Kesederajatan — 183
- B. Unsur-unsur Keragaman dalam Masyarakat — 187
- C. Perkembangan Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultural — 189
- D. Keanekaragaman Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultural — 195
- E. Pengaruh Keragaman terhadap Kehidupan Beragama, Bermasyarakat, Bernegara, dan Kehidupan Global — 199
- F. Manusia beradab dalam Keragaman — 201
- G. Faktor-Faktor Terjadinya Perubahan Sosial Budaya — 202

**BAB 10 MODERNISASI DAN GLOBALISASI — 205**

- A. Modernisasi — 205
- B. Globalisasi — 211

**DAFTAR PUSTAKA — 233**

**TENTANG PENULIS — 243**



## BAB 1

# PENDAHULUAN

## A. Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya

Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya merupakan Mata Kuliah Dasar (MKD) dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan sebuah kajian (studi) bukan merupakan disiplin ilmu. Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya (PLSB) bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kepribadian serta wawasan perhatian, pengetahuan, dan pemikiran mahasiswa mengenai berbagai gejala yang ada dan timbul dalam lingkungan, khususnya gejala-gejala berkenaan dengan masyarakat dan lingkungan agar daya tanggap, persepsi, dan penalaran tentang hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya (sosial-budaya-alam-teknologi) berjalan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan mata kuliah PLSB dapat membantu persepsi, penalaran, dan kepribadian mahasiswa agar memperoleh wawasan yang lebih luas dan komprehensif terhadap permasalahan lingkungan sosial budaya termasuk teknologi. Materi PLSB mencakup pembahasan tentang individu dalam hubungannya dengan masalah sosial, budaya, lingkungan, dan teknologi, di antaranya tentang manusia sebagai makhluk individu dan sosial, hubungan nilai-moral-dan hukum, perubahan sosial dan pembangunan,

hubungan kebudayaan dan modernisasi, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) dan hubungan manusia dengan lingkungannya.

Pendekatan pemecahan masalah dalam mata kuliah PLSB adalah dengan menggunakan pendekatan interdisipliner; pendekatan multidisipliner; pendekatan transdisipliner; pendekatan krosdisipliner atau paling tidak dengan menggunakan pendekatan multiaspek/pendekatan multidimensi. Metode yang digunakan dalam PLSB bisa menggunakan metode riset (studi kasus); metode pemecahan masalah, dan metode inkuiri.

Setelah mengikuti perkuliahan PLSB ini, mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk Tuhan dalam mendekati diri kepada-Nya (حبل من الله) meningkat, melalui hubungan sesama manusia dan lingkungan alam; meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk sosial, budaya, dan bagian yang tak terpisahkan dari alam sekitarnya. Meningkatkan kesadaran lingkungan dalam mengembangkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang dengan lingkungan hidup untuk mempertahankan kelestarian kehidupan umat manusia serta kehidupan pada umumnya; meningkatkan kepekaan dan keterbukaan terhadap masalah-masalah lingkungan, sosial, budaya, dan teknologi; serta bertanggung jawab dalam memecahkan masalah tersebut.

## B. Masalah-Masalah PLSB

Permasalahan pokok yang ingin dicarikan pemecahannya melalui studi PLSB ini adalah masalah kealaman, masalah sosial, dan masalah kebudayaan. Secara umum, ketiga masalah itulah yang pada tahap kompleksitas permasalahan dihadapi umat manusia saat ini. Melalui mata kuliah PLSB, permasalahan kealaman, sosial, dan kebudayaan, tidak hanya didekati dari segi pencarian alternatif pemecahan permasalahannya saja, tetapi juga dari segi pendidikannya (pendidikan PLSB) yang ingin/hendak menanamkan kepada mahasiswa sebagai peserta didik fungsi/tujuan pokok pendidikan, yaitu ranah pengetahuan/kognitif/*cognitive domain*, ranah sikap/afektif/*affective domain*, ranah psikomotorik/keterampilan/*psycomotor skill domain* (taksonomi Bloom), dan ranah kemauan/konatif/*conative domain* yang bermuatan, berlandaskan, dan bersumber pada norma, moral, mental, dan nilai yang dijunjung tinggi dalam peradaban (*civilization*) manusia (Astim Riyanto, 2000).

Dengan usaha sadar, ranah-ranah pengetahuan, kemauan, sikap, dan keterampilan melalui pendidikan dalam kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan (lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional) diharapkan keluaran/lulusan (*out put*) perguruan tinggi akan memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah kealaman, sosial, dan kejiwaan yang didukung kemauan dan kemampuan relatif memadai secara bertanggung jawab bisa memberi kontribusi berarti dalam usaha pemerintah dan masyarakat sekitarnya (Ridwan Effendi & Elly M Setiadi, 2010: 5).

Pemecahan masalah kealaman, sosial, dan kebudayaan tersebut di atas, antara lain ditugaskan melalui Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi PLSB. Hal itu sesuai dengan rumusan :*“Education is concerned both with the development of individual and with the welfare of this society”* (Arden N. Frandsen, 1957: 2).

Sejauh ini para ilmuwan sepakat bahwa semua ilmu lahir dari ilmu filsafat. Dari hasil pemikiran manusia yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif berupa filsafat, lahirlah tiga rumpun ilmu (Ridwan Effendi & Elly M Setiadi, 2010:5).

1. Ilmu-Ilmu Kealaman (IIK).
2. Ilmu-Ilmu Sosial (IIS).
3. Ilmu-Ilmu Budaya (IIB).

Dari ketiga rumpun ilmu di atas, di perguruan tinggi diwujudkan menjadi tiga MKDU, yaitu:

1. Ilmu Alamiah Dasar (IAD) diturunkan dari IIK.
2. Ilmu Sosial Dasar (ISD) diturunkan dari IIS.
3. Ilmu Budaya Dasar (IBD) diturunkan dari IIB.

Tugas ketiga MKDU tersebut adalah sebagai berikut.

Ilmu Alamiah Dasar (IAD) bertujuan untuk mengetahui keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam hubungan antara manusia. Untuk mengkaji hal itu digunakan metode ilmiah dengan meminjam dari ilmu-ilmu alamiah, tetapi hasilnya tidak mungkin 100% salah atau 100% benar (Lies Sudibyo, dkk., 2013: 4). Adapun tugas IAD adalah menawarkan alternatif pemecahan masalah yang timbul dalam lingkup kealaman, misalnya banjir dan pencemaran/polusi (*pollution*) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner/multidisipliner terutama dalam lingkup rumpun IIK (Ridwan Effendi & Elly M Setiadi, 2010: 5).

Ilmu Sosial Dasar (ISD) bertujuan untuk mengetahui keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam alam semesta. Untuk mengkajinya, yaitu digeneralisasikan kemudian dibuat prediksi. Hasil penelitiannya adalah 100% benar atau 100% salah (Lies Sudibyo, dkk, 2013: 4). Adapun tugas ISD adalah menawarkan alternatif pemecahan masalah yang timbul dalam lingkup sosial, misalnya kriminalitas, kemacetan lalu lintas, dan sebagainya dengan menggunakan pendekatan interdisipliner/multidisipliner terutama dalam lingkup rumpun IIS (Ridwan Effendi & Elly M Setiadi, 2010: 5).

Ilmu Budaya Dasar bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji hal itu digunakan metode pengungkapan peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan yang bersifat unik, kemudian diberi arti. Peristiwa dan pernyataan yang dimaksud biasanya terdapat tulisan-tulisan. Metode ini tidak ada sangkut pautnya dengan metode ilmiah, tetapi mungkin ada pengaruh dari metode ilmiah (Lies Sudibyo, 2013: 5). Adapun tugas IBD adalah menawarkan alternatif pemecahan masalah yang timbul dalam lingkup kebudayaan kejiwaan, misalnya mentalitas disiplin dan sebagainya dengan menggunakan pendekatan/multidisipliner terutama dalam lingkup rumpun IIB (Ridwan Effendi & Elly M Setiadi, 2010: 5).

Mata Kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya (PLSB) merupakan salah satu Mata Kuliah Umum (MKU) yang merupakan hasil gabungan (fusi) dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar (IAD), Ilmu Sosial Dasar (ISD), dan Ilmu Budaya Dasar (IBD).

Muncul dan pentingnya mata kuliah PLSB secara garis besarnya menurut Riyanto dalam (Ridwan Effendi & Elly M Setiadi, 2010: 5) didukung oleh dua latar belakang, yaitu:

1. perkembangan ilmu pengetahuan yang dari waktu ke waktu semakin cepat, banyak dan terspesialisasi;
2. perkembangan masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin kompleks, ruwet, rumit, dan pelik.

Perkembangan ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu yang akselerasinya cenderung semakin cepat dan terspesialisasi tersebut, tentu saja membawa dampak terhadap kehidupan manusia. Kadang-kadang percepatan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut membuat masyarakat kita mengalami *culture shock*. Menghadapi dilema penerapan ilmu pengetahuan, di satu pihak kita meraih keberuntungan dari penerapannya, tetapi di lain pihak kita menghadapi masalah lingkungan sebagai akibat dari penerapan tadi, kebutuhan kita menjadi tiga kali lipat (Ridwan Effendi & Elly M Setiadi, 2010: 6)

*Pertama* harus menguasai teknologi untuk mempertahankan hidup. *Kedua*, wajib berusaha menstabilkan penduduk untuk menghindari terjadinya ledakan. *Ketiga*, kita wajib mengembangkan pranata sosial yang mengatur kehidupan yang produktif, stabil, dan damai dalam ekosistem yang seimbang serta lestari (Ridwan Effendi & Elly M Setiadi, 2010: 6). Oleh karena itu, meskipun menurut etika ilmiah dinyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu netral, pada penerapannya kita wajib melandaskan pada nilai yang menjamin kehidupan manusiawi sesuai dengan hukum-hukum keseimbangan dan kelestarian. Kita wajib menghindari diri dari perilaku, perbuatan, dan tindakan serakah yang menghancurkan kelestarian lingkungan. Kita wajib sadar dan waspada bahwa semua makhluk termasuk alam memiliki keterbatasan. Jika batas tadi, terutama daya dukungnya terlampaui, maka bencana lah yang kita alami.

Dengan demikian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan itu tidak hanya diarahkan pada pemanfaatan alam dengan sumber dayanya tanpa rencana, melainkan juga wajib diarahkan pada sumber daya tersebut tetap lestari dan seimbang. Ilmu Pengetahuan sebagai produk budaya, dalam pengembangan dan penerapannya, menuntut tanggung jawab. Penerapan dan pemanfaatannya itu wajib diarahkan pada peningkatan kesejahteraan hidup termasuk kelestarian alam lingkungannya, bukan justru sebaliknya untuk membunuh umat manusia serta merusak alam lingkungan tadi. Ilmu pengetahuan dikembangkan dan diterapkan untuk diabdikan pada kesejahteraan umat manusia, kehidupan makhluk pada umumnya dan keseimbangan serta kelestarian alam lingkungan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan ini tidak hanya menjadi alat pemuas kebutuhan manusia, melainkan juga sebagai sarana pengabdian pada kehidupan pada umumnya dan pada akhirnya sebagai wahana bersyukur nikmat kepada Khalik yang maha kuasa (Ridwan Effendi & Elly M Setiadi, 2010:6).

Perkembangan masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin kompleks, ruwet, rumit, dan pelik; banyak menimbulkan masalah sehingga perlu dengan saksama mencermatinya; kadang-kadang masyarakat kita stres, sensitif dalam dinamika kehidupannya. Sebagai contoh: hanya masalah tersengolnya seseorang di jalan, nyawa begitu mudahnya hilang; begitupun masalah urbanisasi dari masyarakat desa ke kota yang berdampak kompleks terhadap penyediaan lapangan kerja, perumahan, pendidikan, kesejahteraan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, PLSB berfungsi untuk merekat dan melahirkan kebersamaan dalam hal memecahkan masalah-masalah dalam berbagai disiplin ilmu (Ridwan Effendi & Elly M Setiadi, 2010: 6).

## C. Ruang Lingkup Studi PLSB

PLSB mata kuliah yang mengkaji permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan lingkungan, sosial, budaya, dan teknologi. Oleh karena itu, PLSB bukanlah mata kuliah disiplin ilmu yang lebih menekankan pada pengembangan ilmu secara akademik, melainkan berusaha mengkaji masalah-masalah kemasyarakatan dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu (Ridwan Effendi & Elly M Setiadi, 2010: 12).

Dengan penjelasan di atas, maka dalam strategi belajar mengajar dan kegiatan belajar mengajarnya tidak terlalu menekankan pada aspek kognitif–teoretik dan keterampilan motorik, melainkan lebih menekankan pada aspek konatif, pembinaan moral-mental-nilai, dan makna kajiannya. Meskipun demikian, konsep, asas, dan materi ilmu yang terlibat dalam PLSB itu, menjiwai pokok-pokok bahasannya. Untuk melihat lebih dekat pada hakikat PLSB serta ilmu apa saja yang menjiوائinya perlu kiranya memperhatikan perincian berikut ini.

1. Pendidikan: proses pendewasaan, pengembangan kepribadian.
2. Lingkungan: aspek interaksi antara makhluk hidup, terutama manusia dengan lingkungannya, yang merupakan kajian ekologi, termasuk ke dalamnya kajian ekologi manusia.
3. Sosial: aspek interaksi sosial dan proses sosial yang merupakan kajian sosiologi, psikologi sosial, dan bidang ilmu sosial lainnya.
4. Budaya: aspek budaya yang merupakan hasil ungkapan dan pengembangan akal budi manusia dengan prosesnya, yang merupakan kajian antropologi, khususnya antropologi budaya dan bidang humaniora.
5. Teknologi: salah satu unsur budaya yang merupakan penerapan praktis ilmu pengetahuan yang membawa dampak kemajuan kesejahteraan (positif) dan ketimpangan (negatif) dalam kehidupan manusia (Ridwan Effendi & Elly M Setiadi, 2010: 12).

Memperhatikan perincian di atas, perkuliahan PLSB melibatkan berbagai ilmu, baik yang tergabung dalam ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kealaman maupun humanitis. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam mata kuliah PLSB adalah pendekatan multidisipliner dan interdisipliner atau paling tidak mutiaspek atau multidimensional. Untuk mengembangkan materi dari tema-tema di atas dapat bertitik tolak dari konsep lingkungan, budaya (teknologi), maupun sosial (Ridwan Effendi & Elly M Setiadi, 2010: 12).

Sebagai mata kuliah dasar umum, Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi (PLSB) bertujuan sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk Tuhan dalam mendekatkan diri kepada-Nya melalui hubungan sesama manusia dan lingkungan alam.
2. Meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk sosial, budaya, dan bagian yang tak terpisahkan dari alam sekitarnya.
3. Meningkatkan kesadaran lingkungan dalam mengembangkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang dengan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan melek IPTEK dalam menerapkannya secara selaras, serasi, dan seimbang dengan lingkungan hidup untuk mempertahankan kelestarian hidup umat manusia serta kehidupan pada umumnya.
5. Meningkatkan kepekaan dan keterbukaan terhadap masalah-masalah lingkungan, sosial, budaya, dan teknologi serta bertanggung jawab dalam memecahkan masalah tersebut.

Untuk mencapai tujuan di atas, mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya (PLSB) materinya mencakup topik-topik inti sebagai berikut.

1. Manusia sebagai individu yang menerapkan pendekatan biologi (aspek fisik biologi) dan psikologi (aspek potensi mental psikologi) dan agama dalam mengungkapkan kelahiran individu yang akan mengembangkan potensinya.
2. Manusia dalam konteks sosial atau manusia sebagai makhluk sosial yang menerapkan pendekatan sosiologi dan psikologi dalam mengungkapkan perkembangan individu mulai dari satuan keluarga, masyarakat sampai ke satuan yang lebih luas. Dalam pokok bahasan ini ditelaah interaksi sosial, proses sosial sampai pada perkembangan mental psikologinya.
3. Manusia dalam konteks budaya atau manusia sebagai makhluk budaya yang menerapkan pendekatan antropologi budaya, psikologi sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lain-lain. Dalam pokok bahasan ini ditelaah perilaku budaya manusia dengan segala perangkat, proses dan permasalahannya.
4. Manusia dalam konteks alam atau manusia sebagai bagian dari alam yang menerapkan pendekatan biologi, geografi fisik, dan agama. Dalam bahasan ini ditelaah hakikat alam raya, kedudukan manusia di alam raya, dan manusia selaku makhluk Tuhan Yang Maha Esa terikat oleh hukum Alam (*sunnatullah*).
5. Manusia dalam konteks lingkungan, baik dalam lingkungan alam (biotik, abiotik) maupun dalam lingkungan sosial dan lingkungan budaya. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan ekologi sebagai subdisiplin biologi, ekologi manusia, dan ekologi budaya.

6. Sumber daya manusia (SDM) yang menerapkan pendekatan psikologi sosial, agama, sosiologi, dan antropologi budaya. Dalam pokok bahasan ini ditelaah keunikan pribadi manusia (kepribadian), kemampuan intelektual dalam menerapkan dan memanfaatkan IPTEK, dan masalah-masalah sosial sebagai ulah perilaku manusia. Dalam hal ini perlu dikemukakan alternatif-alternatif pemecahan masalah dengan jenis serta bobot masalahnya (Ridwan Effendi & Elly M Setiadi, 2010: 13).

Pengkajian PLSB masuk ke dalam kajian ilmiah (*scientific*), tetapi berada pada tataran kajian (*studi*) dan pengetahuan (*knowledge*), bukan pada tataran disiplin ilmu (*science*) tertentu, seperti ekologi, psikologi, sosiologi, atau biologi. Pengetahuan masih bersifat umum, sedangkan ilmu sudah bersifat khusus apalagi untuk disiplin ilmu tertentu. Disiplin ilmu itu semakin mengerucut, semakin tajam, semakin mengkhususkan pada objek yang lebih special (khusus) (Ridwan Effendi & Elly M Setiadi, 2010: 13).

PLSB adalah sebuah kajian atau sebuah studi tentang masalah-masalah lingkungan sosial budaya dan teknologi. Pemahaman tentang kajian dalam konteks PLSBT penting untuk mendudukan di mana letak PLSB dalam konteks kajian keilmuan. Ilmu sangat penting untuk dipelajari, dibina, dan dikembangkan untuk mencapai kehidupan manusia yang lebih baik. Karena PLSBT sebuah kajian, maka ia menyangkut seluruh disiplin yang ada dan relevan sepanjang permasalahan yang ada. Oleh karena itu, dalam mengkaji permasalahan yang timbul dalam PLSB akan melibatkan banyak disiplin ilmu, paling tidak akan melibatkan dari berbagai dimensi atau sisi kehidupan, Astim Riyanto dalam (Ridwan Effendi & Elly M Setiadi, 2010: 14).



## BAB 2

# MANUSIA DAN PENDIDIKAN

### A. Konsep Manusia

Memahami konsep manusia menjadi sangat penting di dalam suatu sistem pemikiran dan di dalam kerangka berpikir seorang tokoh intelektual atau pemikir terutama sebagai dasar peletak praktik pendidikan. Konsep tentang manusia menjadi penting karena ia termasuk bagian dari pandangan hidup seseorang (Muhammad Yasir Nasution, 1999: 1).

#### 1. Hakikat Penciptaan Manusia

Penciptaan adalah proses mewujudkan gagasan dalam pernyataan. Penciptaan adalah suatu aktivitas yang sangat menentukan bagi adanya eksistensi. Eksistensi Tuhan sepenuhnya melekat pada penciptaan. Oleh karena itu, dalam ciptaan Tuhan termuat eksistensi diri Tuhan. Kesempurnaan dan keteraturan serta keseimbangan yang terkandung dalam ciptaan Tuhan merupakan wujud bagi kesempurnaan Tuhan, sedangkan penciptaan bagi manusia adalah aktivitas yang menentukan eksistensinya di dunia ini (Muhammad Yasir Nasution, 1999: 217).

Dalam Al-Quran penciptaan manusia disebutkan dengan memakai kata *khalafa* yang artinya menciptakan atau membentuk. Kata *khalafa* menunjuk pada pengertian menciptakan sesuatu yang baru, tanpa ada contoh terlebih dahulu atau dapat juga menunjuk pada pengertian suatu ketentuan atau ukuran yang tepat (Ibn Manzur, 1968: 889).

Dalam Al-Quran, manusia disebut dengan berbagai nama, antara lain: *al-basyar*, *al-insan*, *bani adam*, *al-ins*, *abdillah*, dan *khalifatullah* (Musa Asy'ari, 1992: 55). Di bawah ini akan diuraikan pengertian manusia dalam berbagai kata dan istilah yang dipakai dalam Al-Quran.

a. Konsep *Al-Basyar* (أَلْبِشَر)

Manusia dalam konsep *al-basyar*, dipandang dari pendekatan biologis pada hakikatnya tidak berbeda dengan makhluk lain yang terdiri dari unsur biotik lainnya walaupun strukturnya berbeda (Muhaimin & Mujib, 1993: 10). Manusia memerlukan makanan serta mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam mencapai tingkat kematangan dan kedewasaan. Selain itu, manusia memerlukan pasangan hidup untuk melanjutkan keturunannya.

b. Konsep *Al-Insan* (أَلْإِنْسَان)

Manusia sebagai makhluk psikis (*al-insan*) mempunyai potensi rohani, seperti fitrah, kalbu, dan akal. Potensi itu menjadikan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kedudukan tinggi dan berbeda dengan makhluk lainnya (Muhaimin & Mujib, 1993: 11). Apabila manusia tidak menjalankan fungsi psikisnya ia tidak ubahnya seperti binatang bahkan lebih hina. Selain itu, manusia termasuk makhluk yang lalai sehingga sering lupa akan tugas dan tanggung jawabnya (Jalaluddin, 2000: 18) sehingga mengakibatkan manusia terjerumus dalam penderitaan hidup.

c. Konsep *Al-Naas* (أَلنَّاس)

Manusia adalah makhluk sosial, ia diciptakan sebagai makhluk yang bermasyarakat, yang berawal dari pasangan laki-laki dan wanita, kemudian berkembang biak menjadi suku bangsa untuk saling mengenal (Jalaluddin, 2000: 22). Peranan manusia dititikberatkan pada upaya untuk menciptakan keharmonisan hidup bermasyarakat, sedangkan masyarakat dalam ruang lingkup yang paling sederhana adalah keluarga, hingga ke ruang lingkup yang lebih luas, yaitu antarnegara dan bangsa.

#### d. Konsep *Bani Adam* (بنی آدم)

Manusia selaku bani adam dikaitkan dengan gambaran peran Nabi Adam a.s. saat awal diciptakan. Di kala Adam a.s. akan diciptakan, para malaikat seakan mengkhawatirkan kehadiran makhluk ini. Mereka memperkirakan dengan penciptaannya, manusia akan jadi biang kerusakan dan pertumpahan darah. Kemudian terbukti bahwa Adam a.s. bersama istrinya Siti Hawa dikeluarkan karena terjebak hasutan setan.

Mengacu dari latar belakang penciptaannya, tampak manusia selaku bani Adam memiliki peluang untuk digoda setan. Namun, lebih dari itu konsep Bani Adam dalam bentuk menyeluruh menitikberatkan pada upaya pembinaan hubungan persaudaraan antara sesama manusia. Menyatukan visi bahwa manusia pada hakikatnya berawal dari nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam a.s. dengan demikian apa pun latar belakang sosial kultural, agama, bangsa, dan bahasa harus dihargai dan dimuliakan (Jalaluddin, 2000: 26).

#### e. Konsep *Khalifatullah* (خليفة الله)

Hakikat penciptaan manusia di muka bumi salah satunya adalah sebagai khalifatullah dalam hal ini Al-Quran menegaskan:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? "Dia berfirman, "sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-Baqarah: 30).

Manusia sebagai *khalifah Allah fi al-ardi* menjadi wakil Tuhan di muka bumi, yang memegang mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi (Musa Asy'ari, 1992: 43).

Sebagai wakil Tuhan, maka Tuhan telah mengajarkan kepada manusia tentang kebenaran-kebenaran dalam segala ciptaan-Nya, dan melalui pemahaman serta penguasaan terhadap hukum-hukum kebenaran yang terkandung dalam ciptaan-Nya semua yang ada di dalam alam ini, maka manusia dapat menyusun konsep-konsep serta melakukan rekayasa membentuk wujud baru dalam alam kebudayaan.

Tugas kekhalifahan pada dasarnya adalah tugas kebudayaan yang berciri kreatif agar selalu dapat menciptakan sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Manusia dianugerahi kelebihan dan kemampuan dalam hal pengetahuan konseptual (berpikir), kemampuannya menerima pelajaran tentang nama-nama benda dan kemampuannya menegaskan nama-nama tersebut. Tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan hidup di muka bumi ini (Abu Tauhid, 2000: 28).

#### f. Konsep *Abdillah* (عبد الله)

Kata *abd* di samping mempunyai arti budak, dalam pengertian negatif, ia juga mengandung pengertian yang positif, yaitu dalam hubungan antara manusia dengan penciptanya. Seorang hamba Tuhan artinya orang yang taat dan patuh terhadap perintah-Nya. Kata *abid* dalam Al-Quran dipakai untuk menyebut semua manusia dan jin.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”(Q.S Adz-Zariyat: 56).

Kata “*ibadah*” diartikan sebagai sesuatu kegiatan penyembahan, atau pengabdian kepada Allah. Dalam pengertian sempit, kata *ibadah* hanya menunjuk pada segala aktivitas pengabdian yang sudah digariskan oleh syariat Islam, baik bentuknya, caranya, waktunya, serta syarat dan rukunnya (Abu Tauhid, 2008: 28).

Dalam pengertian luas, *ibadah* tidak hanya terbatas pada hal-hal yang disebutkan di atas, tetapi mencakup segala aktivitas pengabdian yang ditujukan kepada Allah semata. *Ibadah* dalam Islam lebih merupakan amal saleh dan latihan spiritual yang berakar dan diikat oleh makna yang hakiki dan bersumber dari fitrah manusia (Abdurrahman An-Nahlawy, 1995: 62).

Dari beberapa ayat Al-Quran di atas, dapat disimpulkan, bahwa hakikat penciptaan manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah dan juga sebagai 'abd Allah, bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kekhalifahannya adalah realisasi dari pengabdian kepada Tuhan yang menciptakannya. Kedudukan manusia sebagai khalifah dan 'abd pada dasarnya merupakan kesatuan pembentuk kebudayaan. Kebudayaan dibentuk oleh adanya pemikiran terhadap alam sekitarnya dan pemahaman terhadap hukum-hukumnya yang kemudian diwujudkan dalam tindakan (Musa Asy'ari, 1999: 49).

## 2. Kejadian Manusia dan Tujuan Hidupnya

Hasan Langgulung (1999: 4) menjelaskan kejadian manusia dan tujuan hidup manusia dengan berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (Q.S. ad-Dzariat: 56).*

Kemudian dalam surah lain yang berbunyi:

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ  
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

*"(yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Tuhan kamu: tidak ada Tuhan selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu."(Q.S. Al-An'am: 102).*

Dari dua ayat di atas dapat diambil pengertian, bahwa menyembah dalam dua ayat Al-Quran di atas tidak dimaksudkan sebagai upacara sembahyang yang biasa kita pahami tetapi jauh lebih luas daripada itu yang meliputi segala tingkah laku kita. Ibadah dalam pengertian luas meliputi segala gerak gerak kita. Jadi, ibadah dalam arti luas inilah tujuan kita diciptakan, atau tujuan hidup kita. Seperti ayat yang selalu kita baca: "Sesungguhnya sembahyangku, ibadah hajiku, hidupku, dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian Alam." Jadi, ibadah dalam pengertiannya

yang luas meliputi seluruh gerak gerik kita. Ibadah dalam pengertian luas inilah tujuan kita diciptakan, atau tujuan hidup kita (Hasan Langgulang, 1999: 4).

Manusia sebagai makhluk Allah Swt. merupakan hakikat atau intisari terdahulu dari wujud dirinya. Hakikat itu merupakan hakikat yang pertama dan utama karena tanpa diciptakan manusia tidak akan ada di muka bumi ini. Manusia diciptakan berupa kesatuan substansi tubuh (jasmani) sebagai bentuk dengan substansi roh (jiwa) sebagai isi. Kedua substansi itu berpadu sebagai sebaiknya kejadian atau ciptaan yang sempurna, melebihi semua jenis hewan dan makhluk hidup lainnya yang diciptakan-Nya menjadi penghuni bumi. Dengan kata lain, adanya manusia bukan adanya sendiri, tetapi karena diadakan, yang hanya sungguh-sungguh manusia dalam kemanunggalan tubuh dan jiwanya (Hadari Nawawi, 1993: 80).

Syahminan Zaini (1984: 9-10) menjelaskan tentang penciptaan manusia melalui beberapa tahap berikut ini.

- a. Permulaan Allah menciptakan seorang manusia (Adam), sesudah itu baru Allah menciptakan istrinya dari bahan yang sama. Dari kedua manusia inilah dikembangkan keturunannya yang amat banyak. Dalam Al-Quran disebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا....

*“Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu, yang telah menjadikan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menjadikan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak ....” (Q.S. An-Nisa’: 1).*

- b. Pada awalnya, yang diciptakan Allah dari manusia itu adalah jasadnya, yang dijadikan-Nya dari tanah. Allah berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

*Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk.” (Q.S. Al-Hijr: 28).*

- c. Setelah kejadian jasad ini sempurna barulah ditiupkan oleh Allah roh dari-Nya. Firman Allah dalam Al-Quran:

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَتَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

“Maka apabila telah Aku sempurnakan dia dan Aku tiupkan padanya roh dari (bikinan)-Ku, hendaklah kamu (malaikat) tunduk, sujud kepadanya.” (Q.S. Al-Hijr: 29).

Menurut Wan Mohd Nor Wan Daud (1997:17) Al-Quran berbicara tentang penciptaan manusia dalam dua tahap. *Pertama*, yaitu tahap ghaib (tak terlihat), yang terjadi di zaman primordial atau azali, dan hanya diketahui melalui pengetahuan wahyu. Pada tahap ini manusia diciptakan dari tiada (*creatio ex nihilo*), dari substansi organik yang rendah dengan sebutan tanah liat (*tin*) dan lumpur (*turab*) dan dari tanah liat yang gelap kemudian dibentuk sempurna, Tuhan meniupkan kepadanya ruh-Nya. Adapun tahap kedua, yaitu tahap yang disebut proses biologis alami, yaitu manusia sendiri dapat mengetahuinya melalui pengalaman atau pengetahuan ilmiah.

Senada dengan Langgulong, Muslim Ibrahim (1990: 60) menjelaskan tujuan diciptakannya manusia adalah sebagai berikut.

#### a. Manusia sebagai Hamba Allah (‘Abdullah)

Manusia sebagai hamba Allah, yaitu dengan cara mengabdikan kepada Allah Swt. (Q.S. 51: 56). Sebagai hamba Allah, manusia diwajibkan beribadah kepada Allah, dalam arti selalu tunduk dan taat atas perintah-Nya guna mengesakan dan mengenal-Nya sesuai dengan petunjuk yang telah diberikannya. Ibadah mengandung dua pengertian, yaitu pengertian khusus dan pengertian umum. Dalam pengertian khusus, ibadah adalah melaksanakan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara hamba dan Tuhannya yang tata caranya diatur secara terperinci di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan ibadah dalam arti luas adalah aktivitas yang titik tolaknya ikhlas dan ditujukan untuk mencapai rida Allah berupa amal saleh (Wan Moh. Nor Wan Daud, 1997:17). Dari segi sasarannya, ibadah dapat diklasifikasikan atas tiga macam, yaitu ibadah person, ibadah antarperson dan ibadah sosial (Muhaimin, 2002: 59-65)

#### b. Manusia sebagai Khalifatullah

Kehidupan manusia di dunia adalah sebagai wakil Allah Swt. (Q.S. 2: 30; 38: 26) sebagai pengganti dan penerus person (spesies) yang mendahuluinya, pewaris-pewaris di muka bumi (Q.S. 27: 62). Di samping

itu, manusia adalah pemikul amanah yang semula ditawarkan pada langit, bumi, dan gunung, yang semuanya enggan menerimanya, tetapi dengan ketololannya manusia mau menerima amanah itu (Q.S. 33: 72) (Muhaimin, 2002: 59-61-62).

Manusia diberikan mandat dari Allah dengan maksud untuk:

- 1) patuh dan tunduk sepenuhnya pada perintah Allah Swt. serta menjauhi larangan-Nya;
- 2) bertanggung jawab atas kenyataan dan kehidupan di dunia sebagai pengemban amanah Allah;
- 3) berbekal diri dengan berbagai ilmu pengetahuan, hidayah agama, dan kitab suci;
- 4) menerjemahkan segala sifat-sifat Allah Swt. pada perilaku kehidupan sehari-hari dalam batas-batas kemanusiaannya;
- 5) membentuk masyarakat Islam yang ideal yang disebut dengan “*ummah*”, yaitu masyarakat yang sejumlah perseorangannya mempunyai keyakinan dan tujuan yang sama, yaitu menghimpun diri secara harmonis dengan maksud untuk bergerak maju ke arah tujuan bersama;
- 6) mengembangkan fitrahnya sebagai khalifatullah yang mempunyai kehendak komitmen dengan tiga dimensi, yaitu: kesadaran, kemerdekaan dan kreativitas. Ketiga kehendak itu ditopang oleh ciri idealnya, yaitu kebenaran (pengetahuan), kebajikan (akhlak), dan keindahan (estetika);
- 7) mengambil bumi dan isinya sebagai alat untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam semua aspek kehidupan, serta dalam rangka mengabdikan kepada Allah;
- 8) menjadi penguasa untuk mengatur bumi dengan upaya memakmurkan dan mengelola negara untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dijanjikan kepada seluruh masyarakat yang beriman bukan kepada seseorang atau suatu kelompok tertentu;
- 9) membentuk suasana aman, tenteram, dan damai di bawah naungan rida Allah Swt. sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran, “*baladun Thooyyabtun wa Rabbun Ghofur*”.
- 10) lebih jauh lagi, tugas manusia sebagai khalifatullah adalah menjadi seniman yang islami, yaitu seniman yang terciptakan dalam rangka mengabdikan karena Allah Swt.

### c. Manusia sebagai *Warosatul Anbiya*'

Nabi Muhammad Saw. diutus ke bumi adalah untuk mengemban misi “*rahmatan lil alamin*”(Q.S. 21: 107), yakni misi yang membawa dan mengajak manusia, dan seluruh alam untuk tunduk dan taat pada syariat-

syariat dan hukum Allah Swt., untuk mencapai kesejahteraan, kedamaian, dan keselamatan dunia akhirat.

Misi itu disempurnakan dengan pembentukan pribadi yang Islami, yaitu kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal saleh, serta bermoral tinggi dengan berpijak pada *trichotomi* (tiga kekuatan rohani pokok), yaitu:

- 1) individualitas, yakni kemampuan diri pribadi sebagai makhluk pribadi;
- 2) sosialitas, yakni kemampuan mengembangkan diri selaku anggota masyarakat;
- 3) moralitas, yakni kemampuan mengembangkan diri selaku anggota masyarakat berdasarkan moralitas (nilai-nilai moral dan agama).

Di samping itu, misi tersebut berpijak pada trilogi hubungan manusia, yaitu:

- 1) hubungan dengan Tuhan, karena manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya;
- 2) hubungan dengan masyarakat, karena manusia sebagai anggota masyarakat;
- 3) hubungan dengan alam sekitar, karena manusia merupakan pengelola, pengatur, serta pengguna kekayaan alam.

Dalam melakukan misi sebagai *warosatul anbiya'*, perlu bertolak pada prinsip-prinsip kerasulan, yakni:

- 1) amar makruf dan nahi munkar (Q.S. 3: 105,110);
- 2) menyebarkan misi iman, islam, dan ihsan dengan menjadikan prinsip tauhid sebagai inti pendakwaan;
- 3) memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan primer (*dloruri*), sekunder (*haji*), maupun pelengkap (*tahsini*) (Muhaimin, 2002: 59-63-66).

## B. Konsep Pendidikan

### 1. Pengertian Pendidikan

Istilah “pendidikan” dalam pendidikan Islam kadang-kadang disebut *al-ta’lim*. Al-Ta’lim biasanya diterjemahkan dengan “pengajaran”. Kadang-kadang juga disebut dengan *al-ta’dib*. *Al-ta’dib* secara etimologi diterjemahkan dengan perjamuan makan atau pendidikan sopan santun (Mahmud Yunus, 1987: 149). Al-Ghazali menyebut “pendidikan” dengan sebutan

*al-riyadhat*. Al-riyadhat dalam arti bahasa diterjemahkan dengan olahraga atau pelatihan. Term ini dikhususkan untuk pendidikan masa kanak-kanak sehingga al-Ghazali menyebutnya dengan *riyadha as-shibyan*.

Menurut Mu'jam (Kamus) kebahasaan, kata *al-tarbiyat* memiliki tiga akar kebahasaan, (Ibnu Manzbur, tt: 94-96).

1. *Rabba-Yarbuu-Tarbiyah*: yang memiliki arti tambah (*zad*) dan berkembang (nama). Pengertian ini didasarkan atas Q.S. Al-Rum ayat 39.
2. *Rabbi-Yarbii-Tarbiyah*: yang memiliki arti tumbuh (*nasya'*) dan menjadi besar (*tara ra'a*).
3. *Rabba-Yurabbi-Tarbiyah*: yang memiliki arti memperbaiki (*ashalaha*), menguasai urusan, memelihara, merawat, menunaikan, memperindah, memberi makan, mengasuh, tuan, memiliki, mengatur serta menjaga kelestarian dan eksistensinya (Karim al-Bastani, dkk, 1975: 243-244).

Apabila term *al-tarbiyat* dikaitkan dengan bentuk *madhi-nya rabbayaniy* yang tertera di dalam Q.S. Al-Isra' ayat 24 (*kama rabbayaniy shaghira*), dan bentuk *mudhari-nya – nurabbiy* dan *yurbiy*—yang tertera di dalam Q.S. Al-Syuara ayat 18 (*alam nurabbika fina walida*), dan Al-Baqarah ayat 276 (*yamh Allah Al-riba' wa yurbiy al-shadaqat*), maka ia memiliki arti mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membesarkan, menumbuhkan, memproduksi dan menjinakkan (Muhammad al-Naqib al-Attas, 1988: 66).

Pada masa sekarang, istilah yang populer dipakai orang adalah *tarbiyah* karena menurut Athiyah Abrasyi, *al-Tarbiyah* adalah term yang mencakup keseluruhan kegiatan pendidikan. Ia adalah upaya yang mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna etika, sistematis dalam berpikir, memiliki ketajaman intuisi, giat dalam berkreasi, memiliki toleransi pada yang lain, berkompetensi dalam mengungkap bahasa lisan dan tulis, serta memiliki beberapa keterampilan (Muhammad Athiyah al-Abrasyi, tt : 7-14), sedangkan istilah yang lain merupakan bagian dari kegiatan tarbiyah. Dengan demikian, istilah pendidikan Islam disebut Tarbiyah Islamiah.

Dalam istilah umum pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedagogie* yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak, sedangkan pendidikan dalam bahasa Inggris adalah *education*, berasal dari kata *to educate*, yaitu mengasuh, mendidik. Dalam bahasa Indonesia, kata pendidikan terdiri dari kata didik yang mendapat awalan pen- dan akhiran -an, yang berarti hal atau cara mendidik.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (1) dijelaskan mengenai definisi pendidikan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Mengenai pengertian pendidikan menurut para ahli, di antaranya Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.”

Menurut H. Horne, pendidikan adalah “proses yang terus-menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia.”

Adapun menurut John Dewey, pendidikan adalah “suatu proses pembaruan makna pengalaman, hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok di mana dia hidup.”

Menurut Langgulung pendidikan adalah proses pemindahan nilai pada suatu masyarakat kepada setiap individu yang ada di dalamnya dan proses pemindahan nilai-nilai budaya melalui pengajaran. Pendidikan dapat diartikan dalam tiga macam sebagai berikut.

#### a. Pengertian Pendidikan secara Luas

Pendidikan sama dengan hidup adalah segala situasi dalam hidup yang memengaruhi pertumbuhan seseorang, dan pendidikan adalah pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidup. Dalam arti luas, pendidikan memiliki karakteristik sebagai berikut.

- 1) Pendidikan berlangsung dalam konteks hubungan individu yang bersifat multidimensi, baik dalam hubungan individu dengan Tuhannya, sesama manusia, alam, maupun dengan dirinya sendiri.

- 2) Dalam hubungan yang bersifat multidimensi itu, pendidikan berlangsung melalui berbagai bentuk kegiatan, tindakan, dan kejadian, baik yang pada awalnya disengaja untuk pendidikan maupun yang tidak disengaja untuk pendidikan.
- 3) Pendidikan berlangsung untuk semua orang, semua ras dan etnis, semua umur, serta semua masyarakat dengan beragam status sosialnya.
- 4) Pendidikan tidak terbatas pada kegiatan sekolah saja. Pendidikan berlangsung di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam.

### b. Pengertian Pendidikan secara Sempit

Pendidikan adalah sekolah atau persekolahan dan pengaruh yang diupayakan dan direayasa oleh sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mereka mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial.

### c. Pengertian Pendidikan secara Luas dan Terbatas

Pendidikan adalah pengalaman belajar dalam keseluruhan lingkungan hidup, baik di sekolah maupun di luar sekolah yang sengaja diselenggarakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Dari beberapa pengertian pendidikan menurut ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.

## 2. Batasan tentang Pendidikan

Batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam, dan kandungannya berbeda yang satu dari yang lain. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya.

### a. Pendidikan sebagai Proses Transformasi Budaya

Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain.

Nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ada tiga bentuk transformasi, yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan, misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lain-lain.

## b. Pendidikan sebagai Proses Pembentukan Pribadi

Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah pada terbentuknya kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi melalui dua sasaran, yaitu (1) pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa dan (2) bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri.

## c. Pendidikan sebagai Proses Penyiapan Warga Negara

Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik.

## d. Pendidikan sebagai Penyiapan Tenaga Kerja

Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon karyawan. Ini menjadi misi penting dari pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.

## e. Definisi Pendidikan Menurut GBHN

GBHN 1988 (BP 7 pusat, 1990: 105) memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut: pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

### 3. Tujuan dan Proses Pendidikan

#### a. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.

#### b. Proses Pendidikan

Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilitas segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah pada pencapaian tujuan pendidikan, Kualitas proses pendidikan menggejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya. Pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup makro, meso, dan mikro. Adapun tujuan utama pengelolaan proses pendidikan, yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal.

#### c. Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH)

Pendidikan sepanjang hayat bertumpu pada keyakinan bahwa pendidikan itu tidak identik dengan persekolahan, Pendidikan sepanjang hayat merupakan suatu proses berkesinambungan yang berlangsung sepanjang hidup. Ide tentang Pendidikan sepanjang hayat yang hampir tenggelam, yang dicetuskan 14 abad yang lalu, kemudian dibangkitkan kembali oleh Comelius 3 abad yang lalu (pada abad ke-16). Selanjutnya Pendidikan sepanjang hayat didefinisikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman pendidikan. Pengorganisasian dan penstrukturan ini diperluas mengikuti seluruh rentangan usia, dari usia yang paling muda sampai paling tua (Cropley: 1967). Berikut ini merupakan alasan mengapa pendidikan sepanjang hayat diperlukan: 1) rasional, 2) alasan keadilan, 3) alasan ekonomi, 4) alasan faktor sosial yang berhubungan dengan perubahan peranan keluarga, remaja, dan emansipasi wanita dalam kaitannya dengan perkembangan IPTEK, 5) alasan perkembangan IPTEK, dan 6) alasan sifat pekerjaan.

#### d. Kemandirian dalam Belajar

##### 1) Arti dan Prinsip yang Melandasi

Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Konsep kemandirian dalam belajar bertumpu pada prinsip bahwa individu yang belajar akan sampai pada perolehan hasil belajar.

##### 2) Alasan yang Menopang

Conny Semiawan, dkk. (1988, 14-16) mengemukakan alasan sebagai berikut.

- a) Perkembangan IPTEK berlangsung semakin pesat sehingga tidak mungkin lagi para pendidik (khususnya guru) mengajarkan semua konsep dan fakta kepada peserta didik.
- b) Penemuan IPTEK tidak mutlak benar 100%, sifatnya relatif.
- c) Para ahli psikologi umumnya sependapat bahwa peserta didik mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh-contoh konkret dan wajar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengalami atau mempraktikkannya sendiri.
- d) Dalam proses pendidikan dan pembelajaran pengembangan konsep seyogianya tidak dilepaskan dari pengembangan sikap dan penanaman nilai-nilai ke dalam diri peserta didik.

#### 4. Unsur-Unsur Pendidikan

Proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu: a) subjek yang dibimbing (peserta didik), b) orang yang membimbing (pendidik), c) interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukatif), d) ke arah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan), e) pengaruh yang diberikan dalam bimbingan (materi pendidikan), 4) cara yang digunakan dalam bimbingan (alat dan metode), dan 5) tempat peristiwa bimbingan berlangsung (lingkungan pendidikan).

Adapun uraian unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

## a. Peserta Didik

Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebutkan demikian karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya. Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik adalah sebagai berikut.

- 1) Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik.
- 2) Individu yang sedang berkembang.
- 3) Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi.
- 4) Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.

## b. Orang yang Membimbing (Pendidik)

Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam tiga lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan adalah orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, pelatih, dan masyarakat.

## c. Interaksi Antara Peserta Didik dengan Pendidik (Interaksi Edukatif)

Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan.

## d. Ke Arah Mana Bimbingan Ditujukan? (Tujuan Pendidikan)

### 1) Alat dan Metode

Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara khusus alat melihat jenisnya sedangkan metode melihat efisiensi dan efektivitasnya. Alat pendidikan dibedakan atas alat yang preventif dan kuratif.

## 2) Tempat Peristiwa Bimbingan Berlangsung (Lingkungan Pendidikan)

Lingkungan pendidikan biasanya disebut tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.

## 5. Pendidikan sebagai Sistem

### a. Pengertian Sistem

Beberapa definisi sistem menurut para ahli adalah sebagai berikut.

- 1) Sistem adalah suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisasi; suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh (Tatang Amirin, 1992:10).
- 2) Sistem merupakan himpunan komponen yang saling berkaitan, yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan (Tatang Amirin, 1992: 10).
- 3) Sistem merupakan himpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Tatang Amirin, 1992: 11).

### b. Komponen dan Saling Hubungan antara Komponen dalam Sistem Pendidikan.

Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen. Komponen tersebut, antara lain: *raw input* (sistem baru), *output* (tamatan), *instrumental input* (guru, kurikulum), *environmental input* (budaya, kependudukan, politik, dan keamanan).

### c. Hubungan Sistem Pendidikan dengan Sistem Lain dan Perubahan Kedudukan dari Sistem

Sistem pendidikan dapat dilihat dalam ruang lingkup makro. Sebagai subsistem, bidang ekonomi, pendidikan, dan politik masing-masing sebagai sistem. Pendidikan formal, nonformal, dan informal merupakan subsistem dari bidang pendidikan sebagai sistem dan seterusnya.

## d. Pemecahan Masalah Pendidikan secara Sistematis

### 1) Cara Memandang Sistem

Perubahan cara memandang suatu status dari komponen menjadi sistem ataupun sebaliknya suatu sistem menjadi komponen dari sistem yang lebih besar, tidak lain dari perubahan cara memandang ruang lingkup suatu sistem atau suatu permasalahan.

### 2) Masalah Berjenjang

Semua masalah tersebut satu sama lain saling berkaitan dalam hubungan sebab akibat, alternatif masalah, dan latar belakang masalah.

### 3) Analisis Sistem Pendidikan

Penggunaan analisis sistem dalam pendidikan dimaksudkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan dengan cara yang efisien dan efektif. Prinsip utama dari penggunaan analisis sistem adalah bahwa kita dipersyaratkan untuk berpikir secara sistematis, artinya harus memperhitungkan segenap komponen yang terlibat dalam masalah pendidikan yang akan dipecahkan.

### 4) Saling Hubungan Antarkomponen

Komponen-komponen yang baik menunjang terbentuknya suatu sistem yang baik. Namun, komponen yang baik saja belum menjamin tercapainya tujuan sistem secara optimal, manakala komponen tersebut tidak berhubungan secara fungsional dengan komponen lain.

### 5) Hubungan Sistem dengan Suprasistem

Dalam ruang lingkup besar terlihat pula sistem yang satu saling berhubungan dengan sistem yang lain. Hal ini wajar karena pada dasarnya setiap sistem itu hanya merupakan satu aspek kehidupan, sedangkan segenap segi kehidupan itu kita butuhkan sehingga semuanya memerlukan pembinaan dan pengembangan.

## 6. Keterkaitan Antara Pengajaran dan Pendidikan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari persoalan pengajaran dan pendidikan adalah sebagai berikut.

- a. Pengajaran dan pendidikan dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, masing-masing saling mengisi.
  - b. Pembedaan dilakukan hanya untuk kepentingan analisis agar masing-masing dapat dipahami lebih baik.
  - c. Pendidikan modern lebih cenderung mengutamakan pendidikan sebab pendidikan membentuk wadah, sedangkan pengajaran mengusahakan isinya. Wadah harus menetap meskipun isi bervariasi dan berubah.
- ## 7. Pendidikan Prajabatan (*Preservice Education*) dan Pendidikan dalam Jabatan (*Inservice Education*) sebagai Sebuah Sistem

Pendidikan prajabatan berfungsi memberikan bekal secara formal kepada calon pekerja dalam bidang tertentu dalam periode waktu tertentu, sedangkan pendidikan dalam jabatan bermaksud memberikan bekal tambahan kepada orang-orang yang telah bekerja berupa penataran, kursus-kursus, dan lain-lain. Dengan kata lain, pendidikan prajabatan hanya memberikan bekal dasar, sedangkan bekal praktis yang siap pakai diberikan oleh pendidikan dalam jabatan.

Pendidikan formal yang sering disebut pendidikan persekolahan, berupa rangkaian jenjang pendidikan yang telah baku, misalnya SD, SMP, SMA, dan PT. Pendidikan nonformal lebih difokuskan pada pemberian keahlian atau *skill* guna terjun ke masyarakat. Pendidikan informal adalah suatu fase pendidikan yang berada di samping pendidikan formal dan nonformal.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal, nonformal, dan informal ketiganya hanya dapat dibedakan, tetapi sulit dipisah-pisahkan karena keberhasilan pendidikan dalam arti terwujudnya keluaran pendidikan yang berupa sumber daya manusia sangat bergantung pada sejauh mana ketiga subsistem tersebut berperan.

## C. Manusia dan Pendidikan

Setelah memahami konsep manusia serta konsep pendidikan, maka pada uraian ini akan dijelaskan implikasi dari konsep manusia tersebut terhadap pendidikan, sebagaimana yang diungkapkan Hasan Langgulang (1999: 74-75) sebagai berikut.

### 1. Khalifah Allah di Bumi dan Implikasinya pada Tujuan Pendidikan

Fokus utama Hasan Langgulang ketika membahas kekhalifahan manusia di bumi adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa manusia menempati kedudukan yang istimewa dalam alam semesta ini, yaitu sebagai khalifah di atas bumi. Firman Allah Swt.:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat: “Aku akan menciptakan khalifah di atas bumi ini. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”*  
(Q.S. Al-Baqarah: 30).

Menurut Hasan Langgulang, manusia dianggap sebagai khalifah Allah, ia tidak dapat memegang tanggung jawab sebagai khalifah kecuali kalau manusia dilengkapi dengan potensi-potensi. Ada empat macam ciri yang dimiliki manusia sebagai khalifah (Hasan Langgulang, 2000:74-75). Keempat ciri tersebut adalah:

- fitrah manusia;
- pemuasan terhadap kebutuhan jasmani (biologis) dan ruhani;
- kebebasan manusia;
- akal pikiran.

Menurut Hasan Langgulung, empat ciri inilah yang membedakan manusia yang disebut sebagai khalifah itu dari makhluk-makhluk lainnya. Tujuan tertinggi (*ultimate aim*) pendidikan dalam Islam adalah membina individu-individu yang akan bertindak sebagai khalifah, atau sekurang-kurangnya membawa anak didik ke jalan yang disyariatkan oleh Allah Swt.

Di bawah ini akan diuraikan tentang ciri-ciri khalifah beserta implikasinya dalam pendidikan Islam.

#### a. Fitrah Manusia dan Implikasinya terhadap Pendidikan

Menurut Hasan Langgulung, fitrah adalah potensi yang baik. Hadis yang bermakna “Setiap anak-anak dilahirkan dengan fitrah. Hanya ibu bapaknyalah yang menyebabkan ia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” Namun, hal ini tidak bermakna bahwa manusia itu menjadi hamba kepada lingkungan, seperti pendapat ahli-ahli behaviorisme. Pada dasarnya fitrah manusia asalnya suci dan seharusnya berkembang ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, seorang anak diajar ataupun tidak diajar, dengan sendirinya akan sesuai dengannya, kecuali kalau ia didik dengan sebaliknya yaitu ke arah yang mengingkari agama (Hasan Langgulung, 1985:214-215). Fitrah adalah tiada lain dari sifat-sifat Tuhan yang ditiupkan Tuhan kepada setiap manusia sebelum lahir, dan pengembangan sifat-sifat itu setinggi-tingginya (Hasan Langgulung, 1999: 59).

Senada dengan hal ini, menurut Dr. Jalaluddin, manusia memiliki beberapa potensi utama yang secara fitrah dianugerahkan Allah kepadanya, yaitu hal-hal berikut ini.

##### 1) Hidayat *al-Ghariziyat* (Potensi Naluriyah)

Potensi naluriyah, yaitu dorongan primer yang berfungsi untuk memelihara keutuhan dan kelanjutan manusia. Di antara dorongan tersebut adalah berupa insting untuk memelihara diri, seperti makan, minum, penyesuaian tubuh terhadap lingkungan dan sebagainya.

##### 2) Hidayat *al-Hassiyat* (Potensi Indriawi)

Potensi indriawi erat kaitannya dengan peluang manusia untuk mengenal sesuatu di luar dirinya melalui indra penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, peraba, dan lain-lain.

### 3) Hidayat *al-Aqliyyat* (Potensi Akal)

Potensi akal memberi kemampuan pada manusia untuk memahami simbol-simbol, hal-hal yang abstrak, menganalisis, membandingkan maupun membuat kesimpulan dan dapat memilih hal yang benar atau salah. Akal juga dapat mendorong manusia berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan kebudayaan serta peradaban.

### 4) Hidayat *al-Diniyyat* (Potensi Keagamaan)

Pada diri manusia sudah ada dorongan keagamaan, yaitu dorongan untuk mengabdikan kepada sesuatu yang lebih tinggi, yaitu Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya (Jalaluddin, 2001).

Menurut ahli-ahli pendidikan, untuk mengolah potensi-potensi (*fitrah*) yang tersembunyi itulah tugas utama pendidikan, yaitu mengubah (*transform*) potensi-potensi itu menjadi kemahiran atau keahlian yang dapat dinikmati oleh manusia. Seperti keahlian dalam hal intelektual (*intellectual ability*) tidak ada gunanya kalau hanya disimpan di kepala para ahli ilmu, ia akan berguna kalau keahliannya itu sudah diubah menjadi penemuan-penemuan ilmiah dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan (Hasan Langgulung, 1985: 215).

Potensi-potensi manusia yang meliputi (fisik, mental, dan spiritual) adalah sesuatu yang penting dalam perkembangan manusia itu sendiri baik sebagai individu maupun masyarakat bahkan untuk menciptakan peradaban yang tinggi dan memelihara perdamaian di dunia ini, dengan syarat mereka beriman dan beramal saleh, kalau tidak maka potensi-potensi yang dimiliki manusia akan menjadi tenaga penghancur dan perusak manusia dan kemajuan yang telah diciptakannya sendiri.

Kaitannya dengan fungsi iman dalam Islam adalah menjadi dasar segala nilai kehidupan politik, ekonomi, sosial, ilmu filsafat, dan lain-lainnya yang selanjutnya merupakan aspek penggerak (*motivational aspect*) terhadap segala tindakan manusia (Hasan Langgulung, 1984: 128).

Implikasi lainnya adalah pendidikan diarahkan untuk bertumpu pada tauhid. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang mengikat manusia dengan Allah Swt. Apa saja yang dipelajari anak didik seharusnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid. Untuk itu kurikulum pendidikan Islam harus menekankan pada konsep tauhid ini (Muhaimin dan Abdul Mujib, 1993: 29).

## b. Pemuasan Kebutuhan Jasmani dan Rohani serta Implikasinya terhadap Pendidikan

Menurut Hasan Langgulung, jasmani tempat melekatkannya kebutuhan-kebutuhan bukanlah itu saja. Badan hanyalah salah satu unsur ke mana ditambahkan lagi sesuatu yang berlainan. Interaksi roh dengan badan menghasilkan khalifah. Roh inilah unsur kedua yang penting yang membedakan khalifah itu. Kata roh digunakan dalam Al-Quran, atau seorang malaikat, atau terutama Jibril atau Isa, atau makhluk spiritual yang bersatu dengan badan (Hasan Langgulung, 1999: 218).

Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa kehidupan manusia bergantung pada wujudnya roh di dalam badannya. Hilangnya roh dari badan bermakna mati. Tentang bagaimana bentuk roh itu, dicegah oleh Al-Quran mempersoalkannya, yaitu:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

*Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." (Q.S. Al-Isra: 85).*

Roh merupakan amanah Allah yang diberikan kepada manusia. selanjutnya tugas manusia untuk memelihara dan mengembangkan roh dengan berbagai pendidikan rohaniyah.

Peranan keluarga dalam pendidikan jasmani menurut Hasan Langgulung sangat penting. Anak-anak harus mengetahui pentingnya pendidikan jasmani. Anak-anak harus dibiasakan dalam menjaga kesehatan pribadinya. Sikap ini harus diberikan orang tua kepada anak-anaknya menurut tingkat pemikiran mereka. Peranan keluarga dalam pendidikan jasmani juga dapat dilaksanakan sebelum bayi dilahirkan, yaitu dengan melalui pemeliharaan terhadap kesehatan ibu dan memberinya makanan yang baik dan sehat sebab hal itu berpengaruh pada anak dalam kandungan.

Di antara cara-cara yang dapat membantu untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan jasmani adalah memberi anak-anak makanan yang sehat dan cukup kandungan gizi. Juga harus diperhatikan upaya memberikan pencegahan terhadap penyakit yang biasa menyerang anak-anak. Membiasakan anak-anak berolahraga untuk melatih otot-otot dan anggota tubuh lainnya. Dan, yang terpenting adalah menjaga kebersihan

lingkungan anak-anak yang menjadi kediaman mereka (Hasan Langgulong, 1999: 78). Mengenai pendidikan rohani, ada beberapa jalan yang harus ditempuh dalam mengembangkan roh dengan berbagai pendidikan rohaniah (Muhaimin & Mujib, 1993: 10), seperti berikut ini.

- 1) Memberikan pendidikan Islami untuk mengenal Allah Swt.
- 2) Kurikulum Pendidikan Islam ditetapkan dengan mengacu pada petunjuk Allah yang bersumber dalam Al-Quran dan Sunnah.
- 3) Pendidikan diarahkan untuk mampu mengemban amanah berupa tugas sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah.
- 4) Pendidikan tidak berakhir sampai usia berapa pun, tidak berakhir setelah roh meninggalkan jasad. Untuk itu pendidikan diarahkan pada pendidikan seumur hidup.

### c. Kebebasan Manusia dan Implikasinya terhadap Metode Pendidikan

Aspek ketiga pada sifat-sifat manusia lainnya adalah kebebasan kemauan. Menurut Hasan Langgulong masalah kebebasan kemauan manusia betul-betul mendapat tempat khusus dalam sejarah pemikiran Islam, dan dianggap masalah-masalah intelektual yang pertama kali mendapat perhatian kaum muslimin. Beberapa mazhab telah mengkaji tentang kemauan kebebasan secara mendalam dan sungguh-sungguh sehingga memunculkan berbagai aliran dalam ilmu kalam. Permasalahan yang timbul adalah membuat sintesis antara *aqal* (akal) dan *naql* (wahyu) (Hasan Langgulong, 1991: 268).

Manusia boleh menerima atau menolak untuk percaya kepada Allah. Dia memiliki kebebasan kemauan. Kemauannya yang bebas menyebabkan ia memilih apa yang baik dengan berinteraksi melalui fitrahnya sebagai hamba Allah (Hasan Langgulong, 1991:79).

Kebebasan adalah salah satu hak-hak tab'i manusia. Di antara hak-hak tab'i manusia yang paling menonjol adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk mewakili dan diwakili, hak untuk mendapat ketenteraman, hak untuk mendapat persamaan dan keadilan, dan lain-lain (Hasan Langgulong, 1995: 7).

Hasan Langgulong mengutip pendapat Prof. Dr. Mohammad Omar Asy-Syaibani bahwa kebebasan dalam Islam menuntut pengertian sebagai berikut.

*“Kemerdekaan dan kebebasan dari segala belenggu kebendaan dan kerohanian yang tidak sah yang terkadang dipaksakan kepada manusia tanpa alasan yang benar pada kehidupannya sehari-hari yang menyebabkan ia tidak langsung menikmati hak-haknya yang wajar dari segi hak sipil, agama, politik, sosial dan ekonomi.” (Hasan Langgulung, 1995: 45).*

Namun, lanjut Hasan Langgulung, kemerdekaan yang diberikan Allah kepada manusia tidak mutlak. Bahkan fungsi khalifah pada manusia cukup menafikan kebebasan manusia. Manusia yang memiliki kebebasan kemauan tidak dapat menentukan untuk dirinya sendiri kuasa-kuasa asal apa pun yang dimilikinya. Setiap manusia memiliki ajal yang terbatas, ia tidak dapat memanjangkan atau memendekkannya. Sebaliknya, karena ia sebagai khalifah Allah, maka ia mengangkat dirinya dari segala macam penghambaan kecuali kepada Allah semata (Hasan Langgulung, 1995: 44).

Al-Abrasyi dengan konsep at-Tarbiyah al-Istiqalaliyah, atau pendidikan pembebasan mengatakan:

*“Bahwa asas terpenting at-Tarbiyah al-Istiqalaliyah adalah membiasakan peserta didik berpegang teguh pada kemampuan diri sendiri sebagai refleksi dasar dari sikap percaya diri, percaya dengan pikiran diri sendiri. Asas ini hanya bisa dicapai jika proses pendidikan dilakukan dengan terbuka dan dialogis.” (Hasan Langgulung, 1995: 285).*

Menurut Warid Khan perlunya sikap demokratis dan kebebasan dalam proses pendidikan bertujuan untuk menciptakan produk pendidikan yang memiliki kekuatan demi menggalang perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif, di samping untuk memberikan ketajaman intelektual anak didik (Ahmad Warid Khan, 2000: 202).

Kebebasan yang bertanggung jawab ini memungkinkan manusia berbuat tanpa keterpaksaan pada bidang apa pun, termasuk bidang pendidikan, khususnya metode pendidikan karena metode pendidikan berkaitan erat dengan kreativitas dan aktivitas guru. Dengan variasi aktivitas dan kreativitas guru dalam mengajar, memungkinkan bisa mencapai tujuan pendidikan secara maksimal.

Cara yang harus digunakan manusia dalam mencapai tujuan sebagai khalifah adalah dengan memberinya kebebasan, sebab manusia, dengan bakat yang dimilikinya mungkin salah dalam mengenal *iradah* Allah, mungkin

saja ia mendurhakai Allah. Apabila ia durhaka, ia harus diperingatkan dengan wahyu dari Allah. Dan jika manusia mengerjakan perbuatan yang beradab, yakni berdasar keimanan pada Allah dengan menaati-Nya, dan menjauhi segala larangan-Nya, dan tidak membedakan antara seseorang dengan yang lain, kalau ini berlaku, maka perbuatan ini kreatif dan bertanggung jawab, yaitu jika manusia mengerjakan perbuatan dengan kemauan sendiri dengan penuh tanggung jawab pribadi, maka ia akan menerima balasannya di dunia ini dan di akhirat (Ahmad Warid Khan, 2000: 202).

Implikasi dari konsep kebebasan manusia sudah jelas pada pendidikan Islam. Bila murid percaya bahwa tingkah lakunya telah ditentukan lebih dahulu, maka ia tentu akan memiliki sikap pasif. Mungkin ia tidak mau bekerja keras karena kegagalan atau keberhasilan disebabkan oleh faktor-faktor dari luar, yaitu oleh Tuhan. Namun, kalau kita berpendapat sebaliknya, bahwa bila seseorang percaya pada tanggung jawab terhadap sesuatu tentunya akan memberi makna yang lebih dalam pada pendidikan. Pendidikan menumpukan perhatian untuk menolong murid-murid memilih berbagai pilihan dan memilih yang benar dan baik. Pendidikan tidak dapat dipandang sebagai proses yang memaksakan kehendak di mana guru menentukan setiap langkah yang harus diambil oleh setiap murid. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu memelihara kebebasan lebih bersifat bimbingan daripada sebagai paksaan kepada anak didik (Abdurrahman Abdullah, 1994: 84).

Berkenaan dengan kebebasan kemauan, Ahmad Warid Khan berpendapat bahwa pendidikan pembebasan, menemukan dua konteks pemaknaan dalam proses pendidikan Islam. *Pertama*, pendidikan harus dipahami dalam posisinya secara metodologis, di mana pelaksanaan pendidikan harus dilakukan secara demokratis, terbuka, dan dialogis. Bahwa seluruh aktivitas kehidupan manusia didasarkan atas asumsi adanya kebebasan berkehendak (Ahmad, Warid Khan, 2002: 199).

Praktik-praktik pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan ini, menuntut pada prinsip-prinsip kebebasan ini, yaitu kebebasan berkehendak, kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat secara ilmiah, semua itu berada dalam koridor keterbukaan dan intensitas dialog dalam proses belajar mengajar. Hal ini diperlukan karena dengan adanya penciptaan suasana dialogis, secara psikologis membuat anak didik merasakan dirinya turut terlibat, ikut menciptakan dan bahkan merasa memiliki. Kemungkinan besar akan berdampak positif terhadap berkembangnya potensi-potensi dasar anak sehingga mudah menciptakan gagasan kreatif, mandiri, dan

mampu merekayasa perubahan-perubahan secara bertanggung jawab (Ahmad, Warid Khan, 2002: 200).

Apabila proses pendidikan itu harus mengacu pada prinsip kebebasan, maka sasaran utama pendidikan adalah *al-'itimad 'ala an-nafs* (berpegang teguh dan percaya dengan kemampuan diri sendiri). Seseorang dianggap berhasil mengerjakan sesuatu, kalau ia berpegang teguh dan percaya dengan kemampuannya sendiri (Muhammad Athiyah al-Abrasyi, 1964: 287).

Adapun pengertian makna *kedua*, lanjut Warid Khan bahwa keberadaan pendidikan Islam adalah sebagai proses pewarisan nilai-nilai keislaman atau *transfer of islamic values* (Ahmad Warid, Khan, 2001: 205) Hasan Langgulung dalam hal ini menjelaskan bahwa “pendidikan Islam adalah bagaimana memindahkan (*transmission*) unsur-unsur pokok peradaban ini dari generasi ke generasi supaya identitas umat terpelihara.” (Hasan Langgulung, 1988: 63).

Lanjut Warid Khan bahwa nilai-nilai keislaman yang dimaksud adalah tauhid, dengan pengertian bahwa tidak ada penghambaan kepada selain Allah Swt. yang berarti bebas dari belenggu kebendaan dan kerohanian. Dengan Tauhid melalui kalimat syahadat derajat semua manusia di hadapan Tuhan adalah sama, ia melepaskan dirinya dari belenggu subordinasi apa pun. Dengan demikian, Islam telah menghilangkan *hegemoni* atau *privilege* kepada individu atau kelompok manusia tertentu (Ahmad Warid, Khan, 2001: 205).

Dalam hal metode pendidikan, Iqbal menyatakan bahwa individu bisa mengembangkan seluruh kekuatannya dalam kebebasannya yang diselaraskan dengan kondisi lingkungan, latihan dalam pemilahan dalam metode dan materi, dan pengajaran secara langsung oleh tangan pertama. Dalam proses kreatif terhadap pembentukan kepribadian, manusia harus berlaku aktif dan reaktif sepenuhnya untuk tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi lingkungannya (Mian Muhammad Tufail, 1966:119). Karena metode pendidikan yang berbasis keaktifan secara penuh, lebih kondusif untuk membangun kekayaan sikap intelek atas perkembangan kepribadian (Mian Muhammad Tufail, 1966:121).

Ada beberapa metode pendidikan yang diajarkan dalam Islam, sebagaimana dipaparkan oleh Muhammad Qutb, yaitu pendidikan melalui keteladanan, pendidikan melalui nasihat, pendidikan melalui hukuman, pendidikan melalui kebiasaan, menyalurkan kekuatan, mengisi kekosongan, serta pendidikan melalui peristiwa-peristiwa (Muhammad Qutb, 1993: 180-207).

Secara praktis, memang benar, siswa memiliki kehendak bebas yang memungkinkannya memilih alternatif yang dihadapinya. Namun juga harus diingat, seorang guru juga memiliki kehendak bebas yang harus dimanfaatkan untuk keuntungan murid. Seorang pendidik muslim yang berkepentingan mengarahkan siswa, secara khusus, berkepentingan membentuk kepribadian. Perannya tidak terbatas pada menyusun situasi belajar, dan kemudian membiarkan siswa menentukan pilihannya sendiri, tanpa memikirkan akibatnya. Bila ternyata salah, maka ia tidak boleh diam (Abdurrahman Shalih Abdullah, 2000: 90).

Peran penting (*prominen*) yang diberikan kepada pendidik muslim, memungkinkan menyalahi aturan para pemikir pendidikan yang beranggapan bahwa siswa harus diberi kebebasan lebih dalam menentukan apa yang hendak dipelajari. Mungkin akan dikatakan bahwa seorang guru yang secara emosional, terlibat pembentukan pribadi siswa biasanya cenderung memaksakan gagasan-gagasan pribadinya atas siswanya. Kemauan siswa diabaikan atau dengan kata yang lebih halus, dinomorduakan. Seorang pendidik muslim yang penuh kasih sayang menyerahkan segenap upayanya untuk mengembangkan pribadinya yang sempurna, mungkin pula dipandang sebagai pribadi otoriter yang tidak memberikan perhatian kecuali sedikit terhadap motivasi dalam diri siswanya (Abdurrahman Shalih Abdullah, 2000: 91).

Apa yang diaplikasikan kepada orang yang telah terdidik pun harus diaplikasikan kepada mereka yang masih dalam proses pendidikan. Jika ternyata interes para pelajar bersifat anti *educational*, maka interes tersebut tidak dapat dijadikan sebagai titik tolak. Tugas gurulah untuk menjadikan siswanya tertarik pada aktivitas yang relevan bagi pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Berusaha menjadikan siswa menjadi tertarik pada aktivitas yang berguna adalah masalah metode, dan merupakan akhir pendidikan. Kegagalan untuk membedakan yang demikian, menjadikan para pendidik, seperti para penganut mazhab progresivisme di Amerika Serikat, memberikan tekanan yang lebih besar terhadap kebutuhan segera dan sementara dari siswa.

Bagi umat Islam, konsep *reward* dan *punishment* bukanlah hal asing dan banyak ditemukan dalam kitab suci Al-Quran. Terjemahan kedua kata tersebut dalam bahasa Arab secara berurutan adalah '*iqab* atau '*azab* dan *ajr* atau *isawab* (Abdurrahman Ma'ud, 2000: 93).

Dewasa ini, praktik pendidikan di dunia Islam termasuk di Indonesia agaknya lebih menekankan *Punishment* daripada *reward*. Salah satu bukti adalah ajaran rasul tentang "Pukullah anak bila tidak mau shalat dalam

usia sepuluh tahun” lebih populer daripada ajaran Nabi yang berbunyi “Mengajarlah kalian dan jangan menyakiti siswa, karena seorang pengajar itu lebih mulia dari seseorang yang suka menyakiti.” (Abdurrahman Ma’ud, 2000: 93).

Akhirnya yang didambakan adalah pendidikan Islam yang lebih menekankan sikap lembut, ucapan yang sejuk di telinga siswa serta konsisten mengajak ke nilai-nilai yang benar. Kendatipun Tuhan Maha Mengetahui kekerasan hati Fir’aun yang tidak bisa diubah oleh ajakan kebenaran Nabi Musa A.s., Allah tetap memerintahkan Musa dan Harun untuk bersikap dan berkata lembut, *qaulan layyina* (Q.S. Thaha: 42) karena sikap yang terakhir ini, selain secara psikologis akan mengingatkan dan menyadarkan seseorang, sungguh sikap ini adalah Islami dan pedagogis yang perlu ditegakkan secara konsisten.

#### d. Potensi Akal (*‘aql*) dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam

Dalam pandangan Islam, akal merupakan potensi manusia yang paling penting. Itulah yang mendasari pentingnya akal dalam memahami rukun iman. Dalam Al-Quran kata *‘aql* dengan berbagai bentuknya banyak disebut, seperti kata *ta’qilun/ya’qilun*, terdapat sebanyak 46 ayat, kemudian 14 ayat yang menyebutkan kata *tatafaqqarun*, 13 ayat yang menyatakan *yafqahum*. Ayat-ayat ini menganjurkan untuk berpikir atau peringatan bagi orang yang berpikir (Abdurrahman An-Nahlawi, 1995: 125). Kata *‘Aql* tidak pernah muncul dalam Al-Quran sebagai kata benda abstrak (masdar), tetapi sebagai kata kerja, dengan berbagai bentuknya. Semuanya menunjukkan aspek pemikiran pada manusia, seperti surat di atas (*ta’qilun*) (Hasan Langgulung, 2000: 304).

Keberadaan akal sangat dihargai oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ  
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ  
مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ  
الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَعْقِلُونَ

“*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang Allah turunkan bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan bumi, sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.*” (Q.S. Al-Baqarah: 164).

Salah satu ciri akal adalah keahlian mengamati sesuatu yang bermakna, memahami dan menggambarkan sebab-sebab dan akibat sesuatu. Di antara fungsi akal adalah mencipta yang berpangkal pada berpikir, tetapi lebih tinggi dari itu adalah melalui pengamatan dengan melibatkan unsur yang disebut daya kreativitas (*creativity*).

Berakal menurut Hasan Langgulung, bukan sekadar kecerdasan, tetapi kesanggupan membedakan yang baik dari yang buruk dengan memikirkan kejadian langit dan bumi, sedangkan fungsi akal adalah mencegah manusia supaya jangan menghancurkan diri sendiri. Hal inilah yang belum dikembangkan oleh pendidikan modern (Hasan Langgulung, 2000: 225).

Islam menurut Hasan Langgulung memberikan jawaban, yaitu dengan ihsan. Rasulullah Saw. menjelaskan arti Ihsan adalah “bahwa engkau menyembah Allah seperti engkau melihat Dia, sebab kalau engkau tidak melihat Dia niscaya Dia melihat engkau.” Itulah cara mengembangkan hati nurani (*super-ego*), yaitu bahwa segala tingkah laku (*behavior*) kita berada di bawah pengawasan Allah Swt. (Hasan Langgulung, 2000: 225).

Menurut Hasan Langgulung, pendidikan akal telah dikelola oleh institusi pendidikan, tetapi di dalam keluarga, pendidikan akal mendapat perhatian yang besar. Peranan keluarga tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab ini. Bahkan menjadi tanggung jawab yang besar sebelum anak-anak harus disekolahkan. Keluarga bertugas untuk menolong anak-anaknya menemukan, membuka, dan menumbuhkan kesediaan, bakat, dan minat serta kemampuan-kemampuan akalnya dan membiasakan sikap intelektual yang sehat dan melatih indra kemampuan-kemampuan akal tersebut (Hasan Langgulung, 2000: 366).

Muhaimin berpendapat, bahwa berbagai potensi dasar atau fitrah manusia tersebut harus ditumbuhkembangkan secara optimal dan terpadu melalui proses pendidikan sepanjang hayatnya. Manusia diberi kebebasan/kemerdekaan berpikir untuk berikhtiar mengembangkan potensi-potensi dasar atau fitrah manusia tersebut. Meskipun demikian, dalam pertumbuhan dan perkembangannya tidak bisa dilepaskan dari adanya batas-batas tertentu,

yaitu adanya hukum-hukum yang pasti dan tetap menguasai alam, yaitu takdir (“Keharusan Universal atau kepastian umum” sebagai batas akhir dari ikhtiar manusia dalam kehidupan di dunia).

Di samping itu, pertumbuhan dan perkembangan potensi manusia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor hereditas, lingkungan alam dan geografis, lingkungan sosiokultural, sejarah dan faktor-faktor temporal (Muhaimin, 2002: 19). Dalam ilmu pendidikan, faktor yang menentukan keberhasilan pendidikan itu ada lima yang saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain, yaitu faktor tujuan, pendidik, peserta didik, alat pendidikan, dan *milieu*/lingkungan.

## 2. Penciptaan Manusia dan Tujuan Hidupnya serta Pengaruhnya terhadap Pendidikan

### a. Penciptaan Manusia dan Implikasinya terhadap Pendidikan

Apabila dilihat dari proses kejadian manusia secara khusus, maka *nuthfah* merupakan titik awal yang terus berproses menjadi manusia sempurna (kejadiannya) secara fisik/materi. M. Quraish Shihab sewaktu menyitir ayat Al-Mu'minin ayat 12-14, beliau menyimpulkan bahwa proses kejadian manusia secara fisik/materi ada lima tahap, yaitu (1) *nuthfah*, (2) *'alaqah*, (3) *mudlghah* atau pembentuk organ-organ penting, (4) *'idham* (tulang), dan (5) *lahm* (daging) (M. Quraish Shihab, 1995: 29).

Menurut Muhaimin (2002: 11) dari proses kejadian manusia dapat ditemukan nilai-nilai pendidikan yang perlu dikembangkan dalam proses pendidikan Islam. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Salah satu cara yang ditempuh oleh Al-Quran dalam menghantarkan manusia untuk menghayati petunjuk-petunjuk Allah adalah dengan cara memperkenalkan jati diri manusia itu sendiri, bagaimana asal kejadiannya, dari mana datangnya dan bagaimana ia hidup. Hal ini sangat perlu untuk diingatkan kepada manusia melalui proses pendidikan sebab gelombang hidup dan kehidupan sering kali menyebabkan manusia lupa diri.
- 2) Ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan secara implisit mengungkapkan pula kehebatan, kebesaran dan keagungan Allah Swt. dalam menciptakan manusia. Pendidikan dalam Islam, antara lain diarahkan pada peningkatan iman, pengembangan wawasan atau

pemahaman serta penghayatan secara mendalam terhadap tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah sebagai Sang Khalik.

- 3) Proses kejadian manusia dalam Al-Quran melalui dua proses dengan enam tahap, yaitu proses fisik/materi/jasadi (dengan lima tahap), dan proses nonfisik/imateri dengan satu tahap tersendiri, yaitu tahap pengembusan/peniupan roh pada diri manusia oleh Tuhan. Pada saat itu manusia memiliki berbagai potensi, fitrah, hikmah yang hebat dan unik, baik lahir dan batin. Untuk itu pendidikan dalam Islam, antara lain diarahkan pada pengembangan jasmani dan rohani secara harmonis, serta pengembangan fitrah manusia secara terpadu dan holistik.
- 4) Proses kejadian manusia yang tertuang dalam Al-Quran ternyata semakin diperkuat oleh penemuan-penemuan ilmiah sehingga memperkuat keyakinan manusia akan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Swt., bukan buatan atau ciptaan Nabi Muhammad Saw. Maka dengan hal ini pendidikan dalam Islam, antara lain diarahkan pada pengembangan semangat ilmiah untuk mencari dan menemukan kebenaran ayat-ayat-Nya.

#### b. Tujuan Hidup Manusia dan Hubungannya dengan Tujuan Pendidikan

Hasan Langgulung dalam hal penciptaan manusia dan tujuan hidup, berpijak pada firman Allah dalam Al-Quran:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada-Ku.” (Q.S. ad-Dzariat: 56).*

Tujuan hidup manusia menurut Hasan Langgulung adalah untuk menyembah kepada Allah. Menyembah di sini dimaknai dengan arti luas, yaitu meliputi segala gerak-gerik manusia, sebagaimana ayat yang selalu kita baca “sesungguhnya sembahyangku, ibadah hajiku, hidupku, dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian Alam.” (M. Quraish Shihab, 1995: 4).

Menurut Muslim Ibrahim, bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah sebagai Abdullah, Khalifatullah, dan sebagai warosatul Anbiya. (Muslim Ibrahim, 1990: 60).

Perbedaan tujuan pendidikan Islam dengan tujuan-tujuan pendidikan modern seperti pada mazhab kemanusiaan yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencapai perwujudan diri (*self-actualization*) sebagai tujuan tertinggi pendidikan, sedangkan menurut Islam pengembangan fitrah secara sempurna adalah salah satu aspek utama tujuan pendidikan Islam. Perkembangan spiritual (ruh), kebebasan kemauan dan akal (*'Aql*) adalah aspek-aspek lain yang perlu dikembangkan di samping perkembangan jasmani dan rohani (Hasan Langgulung, 1999: 58-59)

### c. Sifat-sifat Asal Manusia dan Hubungannya terhadap Pendidikan

Menurut Hasan Langgulung, manusia diciptakan adalah untuk mengembangkan sifat-sifat Tuhan yang terangkum pada Al-Quran dengan nama-nama-Nya yang indah (Al-Asmaul Al-Husna) yang berjumlah 99 (Hasan Langgulung, 1999: 263).

Sebagai contoh menyembah dalam pengertiannya yang umum bermakna mengembangkan sifat-sifat ini pada manusia menurut perintah dan petunjuk Tuhan. Misalnya, Tuhan memerintah manusia menjalankan upacara sembahyang kepadanya. Dengan berbuat demikian, manusia menjadi lebih suci, jadi ia meniru sifat Tuhan dalam kesucian, yaitu Al-Quddus. Juga Tuhan adalah Maha Pengasih (Al-Rahman) tetapi Dia memerintahkan manusia supaya bersifat pengasih terhadap-Nya. Tuhan Maha Mengetahui (Al-Alim), tetapi Dia memerintah manusia selalu mencari dan menambah pengetahuan dan berdoa agar Tuhan menolongnya: "Wahai Tuhanku, tambahkan ilmuku." Allah juga memiliki segala kekuasaan (Malikul Mulk), tetapi diberi-Nya kekuasaan politik kepada manusia di bumi (Hasan Langgulung, 1999: 263).

Akan tetapi, sifat-sifat Tuhan itu hanya dapat diberikan kepada manusia dalam bentuk dan cara yang terbatas sebab kalau demikian manusia akan mengaku diri sebagai Tuhan. Sifat-sifat yang akan diberikan kepada manusia itu harus dianggap sebagai amanah, yaitu tanggung jawab yang besar (Hasan Langgulung, 1999: 5).

Sifat-sifat dasar manusia yang juga merupakan kelemahan manusia adalah sifat pelupa. Adam a.s jatuh dari surga adalah juga akibat dari sifat ini, yaitu melupakan sifat-sifat Tuhan sehingga ia dengan mudah dapat digoda oleh setan (Hasan Langgulung, 1999: 8).

Dengan mengetahui sifat-sifat asal manusia yang berasal dari sifat-sifat Tuhan tersebut, maka pendidikan Islam harus dapat senantiasa membina dan menumbuhkembangkan sifat-sifat yang baik pada anak didik, dengan memperhatikan potensi kemampuan bakat asal mereka. Kemudian sifat-sifat yang tidak baik mencerminkan kelemahan manusia, maka akan menyadarkan diri manusia untuk lebih memperhatikan eksistensi dirinya yang serba terbatas jika dibandingkan dengan Sang Maha Pencipta yang serba tak terbatas. Oleh karena itu, pendidikan dalam Islam antara lain bertugas untuk membimbing dan mengarahkan manusia agar menyadari akan eksistensi dirinya sebagai manusia yang serba terbatas, serta menumbuhkembangkan sikap iman dan takwa kepada Allah yang serba Maha Tak Terbatas. Di samping itu, pendidikan juga bertugas untuk membimbing dan mengarahkan manusia agar mampu mengendalikan diri dan menghilangkan sifat-sifat negatif yang melekat pada dirinya agar tidak sampai mendominasi dalam kehidupannya, sebaliknya sifat-sifat positif yang terangkum dalam Asmaul Husna selalu menjadi pedoman dirinya dalam kehidupan sehari-harinya.

#### d. Konsep Amanah dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam

Manusia pada awal penciptaannya, diberikan amanah oleh Allah kepada manusia untuk memikul tanggung jawab, yaitu mengurus dan mengemban misi Tuhan di atas bumi sebagai khalifah. Padahal makhluk Tuhan yang lain, seperti langit, bumi, dan gunung-gunung tidak mampu mengemban amanah yang berat. Konsekuensi dari amanah adalah manusia harus siap menjadi hamba yang selalu menyembah dan mengabdikan kepada Tuhan.

Menurut Hasan Langgulung makna amanah sedikitnya ada dua macam, sebagai berikut.

- 1) Kesanggupan manusia mengembangkan sifat-sifat Tuhan pada dirinya. Maksudnya adalah manusia harus mampu mengembangkan sifat-sifat Tuhan yang diberikan kepada dirinya berupa potensi-potensi, seperti akal, emosi, dan spiritual.
- 2) Berkenaan dengan cara pengurusan sumber-sumber yang ada di bumi (Hasan Langgulung, 1999: 8). Maksudnya adalah manusia sebagai khalifah bertanggung jawab memelihara segala sumber alam yang semua itu diberikan Allah untuk manusia. Namun, manusia dengan segala sifat kelemahannya terkadang menyalahgunakan amanah ini

dengan merusak alam dan menghancurkan sumber daya alam yang seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan umat manusia.

Implikasi konsep amanah dalam pendidikan Islam, antara lain manusia diarahkan untuk dapat mempergunakan potensi dirinya secara optimal dalam rangka lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. Potensi manusia berupa akal dan rasa keberagamaan adalah karunia Tuhan yang harus dimanfaatkan demi kesejahteraan umat manusia. Dalam hal hubungannya dengan alam semesta, pendidikan dalam Islam mengarahkan manusia untuk menjaga alam ini agar senantiasa lestari, dan memanfaatkannya demi kebaikan umat manusia bukan sebaliknya menghancurkan dengan cara mengeksploitasi alam ini tanpa memperhitungkan kerugian yang akan didapatkan dari pengrusakan alam itu sendiri.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya pendidikan Islam itu tidak lain adalah keseluruhan dari proses dan fungsi *rububiyah* Allah terhadap manusia, sejak dari proses penciptaan serta pertumbuhan dan perkembangannya secara bertahap dan berangsur-angsur sampai sempurna, sampai dengan pengarahannya serta bimbingannya dalam pelaksanaan tugas kekhalifahan yang telah diamanatkan kepada manusia. Manusia sendiri bertanggung jawab untuk merealisasikan proses pendidikan Islam tersebut sepanjang kehidupan nyata di muka bumi ini. Dalam hal ini, setiap orang tua atau generasi mudanya, dan membimbing serta mengarahkannya agar mereka mampu mewarisi dan mengembangkan tugas kekhalifahan tersebut secara berkesinambungan.

### 3. Perjanjian antara Tuhan dan Manusia serta Implikasinya terhadap Pendidikan Islam

Menurut Hasan Langgulung, kisah Adam jatuh ke dalam godaan sebab ia lupa sesuatu yang telah diajarkan kepadanya atau telah ia ketahui sebelum itu. Kedua-duanya, menurut pandangan Islam adalah sama. Yang pertama berkenaan dengan melupakan sifat-sifat Tuhan yang telah disebutkan sebelum ini (Hasan Langgulung, 2002: 8).

Menurut Al-Quran, Tuhan sebelum Adam a.s jatuh dalam godaan, telah mengajarkan kepada Adam akan nama-nama ... (Q.S. 2: 32). Nama-nama itu adalah sifat-sifat Tuhan, yang berjumlah 99, telah dilupakan oleh Adam a.s sewaktu berada dalam godaan. Yang kedua berkenaan dengan

perjanjian (*mithaq*) antara Tuhan dan umat manusia yang digambarkan dalam ayat Al-Quran berikut:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

*“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman), “Bukanlah Aku ini Tuhanmu?” mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi.”*  
(Q.S. Al-A’raf: 172).

Dari segi pandangan falsafah lanjut Langgulang, ayat ini menyatakan bahwa adalah wajar pada manusia atau sekurang-kurangnya sebagian dari wataknya (*nature*) adalah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Penguasa. Malah ahli-ahli pikir Islam melangkah lebih jauh lagi dan menyatakan bahwa ayat ini bermakna, kelemahan manusia, dan posisi Tuhan sebagai penguasa yang telah diakui memberi kepada manusia itu wahyu sebagai petunjuk jalan hidupnya. Selanjutnya Dia berjanji membela orang-orang yang percaya kepada-Nya, firman Allah dalam Al-Quran:

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ . . . .

*“...Dan Kami telah berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.”*  
(Q.S. Ar Rum: 47).

Agar manusia mendapat petunjuk dalam mengurus amanah, melaksanakan tugas dan kewajiban, dan terutama mengingatkan manusia kepada perjanjiannya dengan Tuhan, maka Tuhan mengutus wahyunya kepada manusia. Jadi, wahyu itu merupakan peringatan untuk mengimbangi kelemahan manusia, yaitu sikap pelupa (Hasan Langgulang, 2002: 8). Manusia mudah lupa dan banyak salah, karena itu manusia disebut sebagai insan (bahasa Arab) serumpun dengan kata *nisyan* berarti lupa atau lalai.

Berkenaan dengan perjanjian Tuhan dengan manusia, bahwa manusia sejak diciptakan telah berjanji dengan menjadi saksi bahwa Tuhan yang sepatutnya disembah adalah Allah, konsekuensi dari hal ini manusia harus bertauhid kepada Allah, bahwa segala bentuk penyembahan dan penghambaan hanya untuk Allah. Dalam hal pendidikan dalam Islam

diarahkan, antara lain adalah menanamkan keimanan kepada setiap peserta didik. Bahwa segala apa yang dilakukan adalah semata-mata merupakan bentuk rasa keimanan kita kepada Allah, beriman kepada hal-hal yang gaib, seperti adanya hisab, hari pembalasan, surga, neraka, dan lain-lain (M. Ja'far, 1981: 104).

Allah juga berjanji kepada manusia bahwa Dia akan menolong kepada para hamba-Nya yang beriman, ini merupakan bukti bahwa Tuhan selalu berada di dekat hambanya yang beriman apabila mendapat kesulitan dalam hidup. Hal ini memiliki implikasi pada pendidikan Islam, antara lain menumbuhkan sikap percaya diri dan rasa optimis dalam menjalankan syariat Allah dan sebagai pengemban amanah Allah, yaitu sebagai khalifah Allah sekaligus sebagai hamba Allah yang selalu mengabdikan dirinya semata-mata hanya menginginkan keridaan Allah Swt.

Dalam pendidikan Islam pembentukan iman seharusnya dimulai sejak anak dalam kandungan, dan dilanjutkan dalam masa pertumbuhan. kemudian pembinaan pendidikan ibadah kepada anak-anak didik harus dilakukan dengan cara persuasi, mengajak dan membimbing anak untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal ini peranan orang tua harus senantiasa mengawasi anak didik dalam masa perkembangan untuk selalu dibimbing dalam suasana keluarga yang mengesankan anak didik tentang pentingnya beribadah kepada Allah (Zakiah Daradjat, 1994: 60).

**READING COPY**



## BAB 3

# ESENSI DAN KONSEP DASAR ILMU SOSIAL, BUDAYA DAN KEALAMAN

### A. Pengertian Ilmu

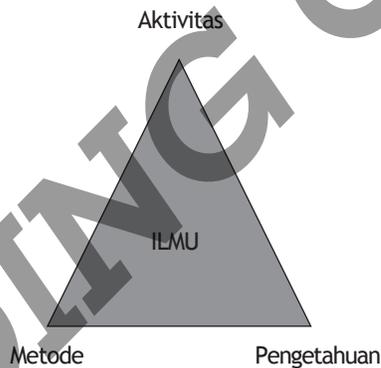
Istilah ilmu dalam bahasa Arab, berasal dari kata kerja (*fi'il*) '*alima* yang memiliki arti mengetahui. Kata ilmu itu adalah bentuk kata benda abstrak atau masdar, dan kalau dilanjutkan lagi menjadi '*alim*, yaitu orang yang tahu (subjek), sedangkan yang menjadi objek ilmu disebut *ma'lum*, atau yang diketahui (Hasan Langgulung, 1995: 132). Adapun menurut cakupannya pertama-tama ilmu merupakan sebuah istilah umum untuk menyebut segala pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai satu kebulatan (The Liang Gie, 2000: 86). Jadi, dalam arti ini ilmu mengacu pada ilmu seumumnya (*science-in-general*). Menurut arti yang lain, ilmu menunjuk pada masing-masing bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu pokok soal tertentu (The Liang Gie, 2000: 86). Dalam arti ini ilmu berarti suatu cabang ilmu khusus, seperti ilmu sosial, ilmu matematika, dan sebagainya.

Kemudian dalam perspektif makna, pengertian ilmu sekurang-kurangnya mencakup tiga hal, yakni pengetahuan, aktivitas, dan metode dalam hal yang pertama ini ilmu sering disebut pengetahuan. Ziauddin Sardar (2000: 22) juga berpendapat bahwa ilmu atau sains adalah "cara mempelajari

alam secara objektif dan sistematis serta ilmu merupakan suatu aktivitas manusia. Kemudian menurut John Biesanz dan Mavis Biesanz dua sarjana ilmu sosial, mereka mendefinisikan ilmu lebih sebagai suatu cara yang teratur untuk memperoleh pengetahuan (*an organized way of obtaining knowledge*) daripada sebagai kumpulan teratur pada pengetahuan (The Liang Gie, 2000: 88). Jadi, ilmu adalah merupakan suatu metode.

Dari uraian pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu mempunyai pengertian sebagai pengetahuan, aktivitas, dan metode. Tiga bagian ini satu sama lain tidak saling bertentangan, bahkan sebaliknya, ketiga hal itu merupakan kesatuan logis yang harus ada secara berurutan. Ilmu tidak mungkin muncul tanpa aktivitas manusia, sedangkan aktivitas itu harus dilaksanakan dengan metode tertentu yang relevan dan akhirnya aktivitas dan metode itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis.

Kesatuan dan interaksi tiga hal, yakni aktivitas, metode, dan pengetahuan yang membentuk diri menjadi ilmu. Bila digambarkan dalam suatu bagan segitiga adalah sebagai berikut.



Bagan di atas memperlihatkan bahwa ilmu dapat dipahami dari tiga sudut, yakni ilmu dapat dihampiri dari arah aktivitas para ilmuwan atau dibahas mulai dari segi metode atau dimengerti sebagai pengetahuan yang merupakan hasil yang sudah sistematis (The Liang Gie, 2000: 88-89). Bagan di atas dapat dipahami secara lengkap bila ketiga segi itu diberi perhatian secara seimbang.

Pada dasarnya ilmu bukan sekadar pengetahuan saja, tetapi ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji kebenarannya menggunakan metode-metode tertentu sesuai dengan bidang yang dikaji. Ilmu pengetahuan juga merupakan proses intelektual dengan tujuan mengembangkan teori-teori

yang mempunyai bobot intelektual yang tinggi (Mahmud, 2010: 140). Pada dasarnya ilmu itu bersumber pada filsafat. Filsafat ini kemudian berkembang lagi sejalan dengan perkembangan zaman menjadi beberapa ilmu-ilmu pokok, yaitu ilmu sosial, ilmu kebudayaan, dan ilmu kealaman.

Kemudian menurut Muslim A. Kadir, “ilmu merupakan kumpulan sistematis sejumlah pengetahuan tentang alam semesta yang diperoleh melalui kegiatan berpikir.” (Muslim A Kadir, 2003: 201). Ilmu merupakan hasil olah pikir manusia secara mendalam sehingga menghasilkan suatu konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ilmu merupakan salah satu dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia, karena ilmu sangatlah penting di dalam kehidupan manusia. Jika seorang manusia tidak memahami akan pentingnya ilmu, maka akan berdampak negatif bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Selain pengertian di atas, secara sederhana ilmu adalah pengetahuan yang sudah tersusun, diklasifikasikan, diorganisasikan, disistematisasi, dan diinterpretasi yang menghasilkan kebenaran objektif yang sudah diuji ulang secara ilmiah. Sementara pengetahuan adalah segala sesuatu atau hal yang diketahui melalui tangkapan pancaindra, rasio, firasat, intuisi, insting, dan pengetahuan sikap. Oleh karena itu, tidak semua pengetahuan adalah ilmu, tetapi semua ilmu adalah pengetahuan.

Adapun Sumber dari semua ilmu pengetahuan bagi umat muslim adalah Allah Swt. Tidak ada pengetahuan selain yang datang dari Allah Swt. (Ahmad Tafsir, 2013: 24) kemudian diturunkan pada filsafat (*philosophia*) sebagai cabang pokok bagi semua ilmu. Plato menjelaskan bahwa filsafat adalah tidak lain dari usaha mencari kejelasan dan kecermatan secara gigih yang dilakukan secara terus-menerus. Kattsoff menjelaskan bahwa filsafat adalah suatu analisis secara hati-hati terhadap penalaran-penalaran mengenai suatu masalah dan penyusunan secara sengaja serta sistematis atau sudut pandangan yang menjadi dasar suatu tindakan, dan hendaknya diingat bahwa yang dinamakan kegiatan kefilosofatan itu sesungguhnya merupakan perenungan atau pemikiran.

Pemikiran filsafat ini meragukan segala sesuatu, mengajukan pertanyaan, menghubungkan gagasan yang satu dengan yang lainnya, menanyakan “mengapa”, mencari jawaban yang lebih baik dibandingkan dengan jawaban yang tersedia pada pandangan pertama. Filsafat sebagai perenungan mengusahakan kejelasan, keruntuhan, dan keadaan memadainya pengetahuan agar kita dapat memperoleh pemahaman.

Kegiatan filsafat adalah merenung, perenungan kefilosofan adalah percobaan untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional, yang memadai untuk memahami dunia tempat kita hidup, maupun untuk memahami diri kita sendiri. Secara sederhana, filsafat berasal dari dua kata Yunani, yaitu *Filo* dan *Sophia* yang berarti mencintai kebijakan.

Immanuel Kant mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan. Menurut Kant ada empat hal yang dikaji dalam filsafat, yaitu apa yang dapat manusia ketahui? (metafisika); apa yang seharusnya diketahui manusia? (etika); sampai di mana harapan manusia? (agama); dan apakah manusia itu? (antropologi).

## B. Persyaratan Ilmu

Ilmu adalah pengetahuan sehingga seseorang itu akan mengetahui penyebab terjadinya dan apa alasannya. Contohnya ilmu alam hanya bisa menjadi pasti setelah lapangannya dibatasi ke dalam hal yang badani (materi saja) atau ilmu psikologi hanya bisa meramalkan perilaku manusia jika membatasi lingkup pandangannya ke dalam segi umum dari perilaku manusia yang konkret. Berkenaan dengan contoh ini, ilmu-ilmu alam misalnya, mampu menjawab pertanyaan tentang berapa jauhnya matahari dari bumi dengan akurat.

Dari contoh di atas, dapat dilihat bahwa tidak semua pengetahuan dapat dijadikan suatu ilmu. Namun, harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku agar ilmu tersebut dapat dipertanggungjawabkan, berguna dan mampu digunakan untuk memprediksi. Untuk itu dibuat suatu metodologi ilmiah yang disesuaikan berdasarkan ruang lingkup ilmu tersebut, beserta syarat-syarat ilmiah sebagai berikut.

1. *Objektif*: Sesuatu dapat disebut ilmu jika dicari dan diteliti secara mendalam sehingga menghasilkan suatu keputusan yang kebenarannya bersifat objektif dan dapat diterima oleh semua orang serta objek yang ditelitinya nyata. Selain itu, kebenarannya dapat diuji secara ilmiah. Jadi, bukan hanya kesimpulan yang diambil secara subjektif oleh peneliti atau subjek penunjang penelitian saja.
2. *Metodis*: Metodis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *metodos* yang berarti cara atau jalan. Dalam menentukan suatu ilmu, harus memiliki cara yang valid dalam kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan

- dalam ilmu yang telah teruji kebenarannya tersebut. Secara umum metodis adalah metode ilmiah untuk menguji kebenaran suatu ilmu.
3. *Sistematis*: Suatu ilmu harus bersifat sistematis. Hal ini dimaksudkan agar objek dari suatu ilmu tersebut dapat terurai secara teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, serta mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat yang menyangkut objek ilmu itu sendiri.
  4. *Universal*: Jelas dalam menemukan suatu ilmu tertentu harus memiliki sifat universal. Hal ini untuk menentukan ilmu tersebut dapat dipergunakan secara luas atau tidak. Seperti ilmu matematika dan ilmu fisika yang memiliki rumus-rumus yang valid sehingga di belahan dunia mana pun, ilmu tersebut dapat digunakan dan dapat diterima secara luas.
  5. Memiliki masyarakat ahli (*community scholar*) atau pakar ilmu tersendiri.

Selain syarat ilmu di atas, berdasarkan pandangan filsafat ilmu, sesuatu dikatakan ilmu bila memenuhi syarat secara epistemologis, ontologis, dan aksiologis (Jujun S Suriasumantri, 2001: 5). Berikut penjelasan dari syarat-syarat tersebut.

## 1. Sebuah Ilmu Memenuhi Syarat secara Epistemologi

Secara etimologi "*epistemologi*" berasal dari bahasa Yunani "*episteme*" dan "*logos*". "*Episteme*" berarti pengetahuan, sedangkan "*logos*" berarti teori, uraian, atau alasan. Jadi, epistemologi berarti sebuah teori tentang pengetahuan (Armai Arief, 2002: 3).

Secara terminologi, Dagobert D. Runes dalam "*Dictionary of philosophy*" mengatakan bahwa "epistemologi sebagai cabang filsafat yang menyelidiki tentang keaslian, pengertian, struktur, mode, dan validitas pengetahuan." (Armai Arief, 2002: 4).

Menurut Harun Nasution dalam bukunya "*Filsafat Agama*", yang dimaksud epistemologi adalah "ilmu yang membahas apa pengetahuan itu dan bagaimana memperolehnya."

Fudryartono mengatakan bahwa epistemologi berarti ilmu filsafat tentang pengetahuan atau dengan kata lain filsafat pengetahuan. Sementara The Liang Gie mengatakan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang bersangkutan dengan sifat dasar dan ruang lingkup pengetahuan,

praanggapan dan dasar-dasarnya serta reliabilitas umum dari tuntutan akan pengetahuan (Anonimous, 1999: 129).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa epistemologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari hal-hal yang bersangkutan dengan pengetahuan dan dipelajari secara substantif. Oleh karena itu, epistemologi bersangkutan dengan masalah-masalah yang meliputi hal-hal berikut ini.

- a. Filsafat, yaitu sebagai cabang ilmu dalam mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan.
- b. Metode, memiliki tujuan untuk mengantarkan manusia mencapai pengetahuan.
- c. Sistem, bertujuan memperoleh realitas kebenaran pengetahuan (Armai Arief, 2002: 4).

Dengan demikian, secara sederhana epistemologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempunyai pendekatan dan metodologinya sendiri mengenai bagaimana atau dengan cara apa ilmu itu disusun, dibina, dan dikembangkan.

## 2. Setiap Ilmu Memenuhi Syarat secara Ontologis

Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata, yaitu *ta onta* berarti “yang berada”, dan *logi* berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Maka ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang keberadaan (Surajiyo, 2005: 118-119).

Akan tetapi, pada dasarnya *term ontology* pertama kali diperkenalkan oleh Rudolph Goclenius pada tahun 1636 M untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis. Dalam perkembangannya Cristian Wolff membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum dimaksudkan sebagai istilah lain dari ontologi (A. Susanto, 2001: 91)

Bidang pembicaraan teori hakikat luas sekali, segala yang ada yang mungkin ada, yang boleh juga mencakup pengetahuan dan nilai (yang dicarinya adalah hakikat pengetahuan dan hakikat nilai). Nama lain untuk teori hakikat adalah teori tentang keadaan. Hakikat adalah realitas, realitas adalah kerealan, real artinya kenyataan yang sebenarnya, jadi hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya, keadaan sebenarnya sesuatu, bukan

keadaan sementara atau keadaan yang menipu, bukan keadaan yang berubah (Ahmad Tafsir, 2003: 28).

Ontologi menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara yang berbeda di mana entitas (wujud) dari kategori-kategori yang logis yang berlainan (objek-objek fisik, hal universal, abstraksi) dapat dikatakan ada dalam rangka tradisional. Ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum dari hal ada, sedangkan dalam hal pemakaiannya akhir-akhir ini ontologi dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada.

Ontologi sering dengan metafisika yang juga disebut proto-filsafiah atau filsafat yang pertama, atau filsafat ketuhanan yang bahasanya adalah hakikat sesuatu, keesaan, persekutuan, sebab akibat, realita, atau Tuhan dengan segala sifatnya (Jalaluddin Abdullah Idi, 1997: 104-105).

Dengan demikian, metafisika umum atau ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip paling dasar atau dalam dari segala sesuatu yang ada. Para ahli memberikan pendapatnya tentang realita itu sendiri, di antaranya Bramel. Ia mengatakan bahwa ontologi adalah interpretasi tentang suatu realita dapat bervariasi, misalnya apakah bentuk dari suatu meja, pasti setiap orang berbeda-beda pendapat mengenai bentuknya, tetapi jika ditanyakan bahannya pastilah meja itu substansi dengan kualitas materi, inilah yang dimaksud dari setiap orang bahwa suatu meja itu suatu realita yang konkret. Plato mengatakan jika berada di dua dunia yang kita lihat dan kita hayati dengan kelima pancaindra kita tampaknya cukup nyata atau real.

Adapun mengenai objek kajian ontologi adalah yang ada, yaitu ada individu, ada umum, ada terbatas, ada tidak terbatas, ada universal, ada mutlak, termasuk kosmologi, dan metafisika dan ada sesudah kematian maupun sumber segala yang ada. Objek formal ontologi adalah hakikat seluruh realitas, bagi pendekatan kualitatif, realitas tampil dalam kuantitas atau jumlah, telahnya menjadi telah *monism*, *paralerisme* atau *plurarisme* (A. Susanto, 2001: 92)

Dengan demikian, secara sederhana apabila ilmu tersebut memiliki objek studi yang jelas. Objek yang dijadikan bahan studi hendaknya dapat diidentifikasi, dapat diberi batasan-batasan, dan dapat diuraikan sifat-sifatnya yang esensial. Objek studi itu hendaknya tidak identik dengan objek studi dari ilmu lain, bukan pinjaman dari ilmu lain. Ia haruslah mandiri, tidak bergantung pada ilmu lain itulah ontologi.

### 3. Sebuah Ilmu Memenuhi Syarat secara Aksiologi

Menurut Kamus Filsafat, Aksiologi berasal dari bahasa Yunani *Axios* (layak, pantas) dan *Logos* (Ilmu). Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Jujun S.Suriasumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh.

Aksiologi berkaitan dengan kegunaan dari suatu ilmu, hakikat ilmu sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang didapat dan berguna untuk kita dalam menjelaskan, meramalkan, dan menganalisis gejala-gejala alam. (Cece Rakhmat, 2010). Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa Aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan.

Bramel (Jalaluddin dan Abdullah, 1997) membagi aksiologi dalam tiga bagian. *Pertama, moral conduct*, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yakni etika. Kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat manusia. Tujuan dari etika adalah agar manusia mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Di dalam etika, nilai kebaikan dari tingkah laku manusia menjadi sentral persoalan. Maksudnya adalah tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab, baik tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, alam, maupun terhadap Tuhan sebagai sang pencipta.

*Bagian kedua* dari aksiologi adalah *esthetic expression*, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya.

Mengutip pendapatnya Risieri Frondiz (Bakhtiar Amsal, 2004), nilai itu objektif ataukah subjektif adalah sangat bergantung pada hasil pandangannya yang muncul dari filsafat. Nilai akan menjadi subjektif, apabila subjek sangat berperan dalam segala hal, kesadaran manusia menjadi tolak ukur segalanya atau eksistensinya, maknanya, dan validitasnya bergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis ataupun fisik. Dengan demikian, nilai subjektif akan selalu memperhatikan berbagai pandangan yang dimiliki akal budi manusia seperti perasaan, intelektualitas dan hasil nilai subjektif akan selalu mengarah pada suka atau tidak suka, senang atau tidak senang.

Selanjutnya nilai itu akan objektif, jika tidak bergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Nilai objektif muncul karena adanya pandangan

dalam filsafat tentang objektivisme. Objektivisme ini beranggapan pada tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya, sesuatu yang memiliki kadar secara realitas benar-benar ada (Bakhtiar Amsal, 2004).

*Bagian ketiga* dari Aksiologi adalah *sosio-political life*, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosiopolitik. Manfaat ilmu sudah tidak terhitung banyaknya bagi manusia dan makhluk hidup secara keseluruhan. Mulai dari zamannya Copernicus sampai Mark Elliot Zuckerberg, ilmu terus berkembang dan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Dengan ilmu manusia bisa sampai ke bulan, dengan ilmu manusia dapat mengetahui bagian-bagian tersembunyi dan terkecil dari sel tubuh manusia. Ilmu telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peradaban manusia, tetapi dengan ilmu juga manusia dapat menghancurkan peradaban manusia yang lain.

Mengutip pendapatnya Francis Bacon dalam Suriasumantri (1999) mengatakan bahwa “pengetahuan adalah kekuasaan.” Apakah kekuasaan itu akan merupakan berkat atau malapetaka bagi umat manusia, semua itu terletak pada sistem nilai dari orang yang menggunakan kekuasaan tersebut. Ilmu itu bersifat netral, ilmu tidak mengenal sifat baik atau buruk, dan si pemilik pengetahuan itulah yang harus mempunyai sikap.

Selanjutnya Suriasumantri juga mengatakan bahwa kekuasaan ilmu yang besar ini mengharuskan seorang ilmuwan mempunyai landasan moral yang kuat.

Untuk merumuskan aksiologi dari ilmu, Jujun S Sumantri merumuskan ke dalam 4 tahapan sebagai berikut.

- a. Untuk apa ilmu tersebut digunakan?
- b. Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral?
- c. Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral?
- d. Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/profesional.

Dari apa yang dirumuskan di atas dapat dikatakan bahwa apa pun jenis ilmu yang ada, semuanya harus disesuaikan dengan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya malahan menimbulkan bencana. Bagi seorang ilmuwan, nilai dan norma moral yang dimilikinya akan menjadi penentu apakah ia sudah menjadi ilmuwan yang baik atau belum. Dengan demikian,

secara sederhana bila ilmu tersebut dapat menunjukkan nilai-nilai teoretis, hukum-hukum, generalisasi, kecenderungan umum, konsep-konsep dan kesimpulan yang logis, sistematis, dan saling berkaitan. Di dalam teori atau konsep itu tidak terdapat kekacauan pikiran, atau pertentangan kontradiktif di antara satu dengan yang lainnya.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam merumuskan suatu ilmu tidak dapat dilakukan secara instan dan apa adanya, tetapi harus dikaji terlebih dahulu apakah ilmu tersebut benar-benar suatu ilmu atau hanya pengetahuan untuk diri sendiri saja.

### C. Esensi dan Konsep Dasar Ilmu Sosial, Budaya, dan Kealaman

Pada dasarnya ilmu pengetahuan jika dilihat dari sasaran pengkajian masing-masing (objek material dan formal) dapat dikelompokkan ke dalam tiga cabang pengetahuan, yaitu: (a) *Social Sciences* (ilmu-ilmu sosial meliputi: sejarah, politik, ekonomi, dan lain-lain), (2) *Humanities* (ilmu-ilmu budaya meliputi: bahasa, agama, kesenian, dan lain-lain), (3) *Natural Science* (ilmu-ilmu alam meliputi: fisika, kimia, biologi, dan lain-lain) (Ramdani Wahyu, 2013: 15).

Adapun sasaran pengkajian ilmu alamiah adalah gejala-gejala perilaku manusia, sedangkan sasaran pengkajian ilmu-ilmu budaya adalah gejala rohani atau aspek-aspek normatif dalam kehidupan manusia (Cik Hasan Bisri, 2006: 256). Pengelompokan ilmu pengetahuan sebagaimana di atas, dikecualikan untuk bidang Ilmu Sosial Dasar (ISD), Ilmu Alamiah Dasar (IAD), dan Ilmu Budaya Dasar (IBD) yang diajarkan pada pendidikan program sarjana. Ketiga bidang studi itu diajarkan pada program studi keahliannya tidak tercakup dalam ketiga rumpun di atas (Ramdani Wahyu, 2013: 15).

Sementara menurut Taufik Abdullah, ilmu pengetahuan terbagi dalam dua kategori besar, yaitu ilmu eksakta dan noneksakta. Khusus ilmu noneksakta dipilah menjadi dua, yaitu ilmu humaniora (*humanities social sciences*) dan ilmu sosial (*social sciences*). Ilmu yang berkaitan dengan filsafat, sastra, seni, dan bahasa dikategorikan dalam ilmu humaniora (*humanities social sciences*), sedangkan di luar itu adalah ilmu sosial. Pendapat serupa disampaikan Helius Syamsudin, bahwa pengetahuan manusia (*human knowledge*) umumnya dapat diklasifikasikan atas tiga kelompok besar, yaitu ilmu-ilmu alamiah (*natural sciences*), ilmu-ilmu sosial (*social sciences*), dan

ilmu-ilmu kemanusiaan (*humanities*). Ilmu alamiah mengkaji lingkungan hidup manusia, ilmu sosial mengkaji manusia dalam hubungannya dengan manusia-manusia lainnya, dan ilmu-ilmu kemanusiaan mengkaji manifestasi-manifestasi (*eksistensi*) kejiwaan manusia. Sebagaimana disinggung di atas, bahwa ilmu-ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam hubungannya dengan manusia-manusia lainnya. Definisi serupa disampaikan Taufik Abdullah (2006: 31), ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan bersama, sedangkan Dadang Supardan (2008:34-35) menyampaikan ilmu sosial (*social science*) adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan aktivitas sosial dalam kehidupan bersama. Jadi, yang dimaksud ilmu-ilmu sosial (*social sciences*) adalah kelompok disiplin ilmu yang mempelajari aktivitas manusia dalam hubungannya dengan sesamanya.

Objek material dari studi ilmu-ilmu sosial adalah berupa tingkah laku dalam tindakan yang khas manusia, ia bersifat bebas dan tidak bersifat *deterministik*, ia mengandung: pilihan, tanggung jawab, makna, pernyataan privat dan internal, konvensi, motif, dan sebagainya (Tim Dosen Filsafat Ilmu). Aktivitas manusia tersebut termasuk berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam menjalin hubungan sosial di antara sesamanya dan bersifat kondisionalitas. Dengan kata lain, objek tersebut sebagai gejala sosial. Gejala sosial memiliki karakteristik fisik, tetapi diperlukan penjelasan yang lebih dalam untuk mampu menerangkan gejala tersebut sebab tidak hanya mencakup fisik, tetapi juga aspek sosiologis, psikologis, maupun kombinasi berbagai aspek.

## 1. Esensi dan Konsep Dasar Sosial (*Social Science*)

### a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial

Ilmu sosial atau ilmu pengetahuan sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Ilmu ini berbeda dengan seni dan humaniora karena menekankan penggunaan metode ilmiah dalam mempelajari manusia, termasuk metode kuantitatif dan kualitatif. Istilah ini juga termasuk menggambarkan penelitian dengan cakupan yang luas dalam berbagai lapangan meliputi perilaku dan interaksi manusia pada masa kini dan masa lalu. Berbeda dengan ilmu sosial secara umum, ilmu sosial tidak memusatkan diri pada satu topik secara mendalam melainkan memberikan tinjauan yang luas terhadap masyarakat.

Ilmu sosial, dalam mempelajari aspek-aspek masyarakat secara subjektif, inter-subjektif, dan objektif atau struktural, sebelumnya dianggap kurang ilmiah bila dibanding dengan Ilmu Alam. Namun sekarang, beberapa bagian dari ilmu sosial telah banyak menggunakan metode kuantitatif. Demikian pula, pendekatan interdisiplin dan lintas disiplin dalam penelitian sosial terhadap perilaku manusia serta faktor sosial dan lingkungan yang memengaruhinya telah membuat banyak peneliti ilmu alam tertarik pada beberapa aspek dalam metodologi ilmu sosial. Penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif telah makin banyak diintegrasikan dalam studi tentang tindakan manusia serta implikasi dan konsekuensinya.

## b. Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial

- Antropologi, yang mempelajari manusia pada umumnya, dan khususnya antropologi budaya, yang mempelajari segi kebudayaan masyarakat.
- Ekonomi, yang mempelajari produksi dan pembagian kekayaan dalam masyarakat.
- Geografi, yang mempelajari lokasi dan variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi.
- Hukum, yang mempelajari sistem aturan yang telah dilembagakan.
- Linguistik, yang mempelajari aspek kognitif dan sosial dari bahasa.
- Pendidikan, yang mempelajari masalah yang berkaitan dengan belajar, pembelajaran, serta pembentukan karakter dan moral.
- Politik, yang mempelajari pemerintahan sekelompok manusia (termasuk negara).
- Psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental.
- Sejarah, yang mempelajari masa lalu yang berhubungan dengan umat manusia.
- Sosiologi, yang mempelajari masyarakat dan hubungan antarmanusia di dalamnya.

## c. Ruang Lingkup Pengetahuan Sosial

Ruang lingkup yang terdapat pada pengetahuan sosial, yaitu:

- 1) sistem sosial dan budaya manusia, tempat, dan lingkungan;
- 2) perilaku ekonomi dan kesejahteraan;
- 3) waktu, keberlanjutan, dan perubahan;
- 4) sistem berbangsa dan bernegara.

## 2. Esensi dan Konsep Dasar Ilmu Budaya (*Humaniora*)

### a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Humaniora

Menurut bahasa latin, *humaniora* disebut *artes liberales*, yaitu studi tentang kemanusiaan, sedangkan menurut pendidikan Yunani Kuno, *humaniora* disebut trivium, yaitu logika, retorika dan gramatika. Pada hakikatnya *humaniora* adalah ilmu-ilmu yang bersentuhan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mencakup etika, logika, estetika, pendidikan pancasila, pendidikan kewarganegaraan, agama dan fenomenologi.

### b. Cara Kerja Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora

Berbeda dengan ilmu alam, ilmu sosial *humaniora* berkembang lebih kemudian dan perkembangannya tidak sepesat ilmu alam. Hal ini karena objek kajian ilmu sosial *humaniora* tidak sekadar sebatas fisik dan material, tetapi lebih di balik fisik dan material dan bersifat abstrak dan psikologis.

Dilihat dari sifat objeknya, cara kerja ilmu sosial *humaniora* bisa dirangkum dalam prinsip-prinsip berikut (Beerling, 1990: 30).

#### 1) Gejala Sosial Humaniora Bersifat Non-Fisik, Hidup, dan Dinamis

Gejala-gejala yang diamati dalam ilmu sosial *humaniora* bersifat hidup dan bergerak secara dinamis. Objek studi ilmu sosial *humaniora* adalah manusia yang lebih spesifik lagi pada aspek sebelah dalam.

#### 2) Objek Penelitian Tidak Bisa Berulang

Gejala-gejala sosial *humaniora* memiliki keunikan-keunikan dan kemungkinan bergerak dan berubahnya sangat besar karena mereka tidak stagnan dan tidak statis. Masalah sosial dan kemanusiaan sering bersifat sangat spesifik dalam konteks historis tertentu. Kejadian sosial mungkin yang dulu pernah terjadi barangkali secara mirip bisa terulang pada masa sekarang atau nanti. Dengan demikian, gejala-gejala sosial *humaniora* cenderung tidak bisa ditelaah secara berulang-ulang karena gejala-gejala tersebut bergerak seiring dengan dinamika konteks historisnya.

### 3) Pengamatan Relatif Lebih Sulit dan Kompleks

Ilmu sosial humaniora mengamati apa yang ada di balik penampakan fisik dari manusia dan bentuk-bentuk hubungan sosial mereka. Misalnya, melihat seseorang tersenyum kepada orang lain adalah hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari, tetapi makna senyum itu bisa bermakna banyak, bisa jadi dia senang kepada orang yang dilihatnya, boleh jadi dia tidak suka, tetapi terpaksa tersenyum karena dia tidak ingin kelihatan sebagai orang yang tidak baik di mata orang-orang di sekitarnya, dan bisa juga tersenyum karena orang yang dilihatnya lucu dan aneh. Oleh karena itu, variabel dalam menelaah sosial humaniora relatif lebih banyak dan kompleks serta kadang-kadang membingungkan.

### 4) Subjek Pengamat Juga sebagai Bagian Integral dari Objek yang Diamati

Dalam ilmu sosial humaniora karena subjek yang mengamati dan objek yang diamati adalah manusia yang memiliki motif dan tujuan dalam setiap tingkah lakunya, maka subjek yang mengamati tidak mungkin bisa mengambil jarak dari objek yang diamati dan menerapkan prinsip objektivistik, dan tampaknya lebih condong ke prinsip subjektivistik. Karena subjek yang mengamati adalah manusia yang memiliki kecenderungan nilai tertentu tentang hidup, maka ia menjadi bagian integral dari objek yang diamati yang juga manusia itu.

### 5) Daya Prediktif yang Relatif Lebih Sulit dan Tak Terkontrol

Suatu teori sebagai hasil pengamatan sosial humaniora tidak serta-merta bisa dengan mudah untuk memprediksikan kejadian sosial humaniora berikutnya pasti akan terjadi. Hal ini karena dalam ilmu sosial humaniora, pola-pola perilaku sosial humaniora yang sama belum tentu akan mengakibatkan kejadian yang sama.

## 3. Esensi dan Konsep Dasar Ilmu Alam (*Natural Science*)

### a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam

Ilmu alam (ilmu pengetahuan alam) adalah istilah yang digunakan, yang merujuk pada rumpun ilmu yang objeknya adalah benda-benda alam

dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapan pun di mana pun (Bachri Ghazali, 2005: 35).

Sains (*science*) diambil dari kata latin *scientia* yang arti harfiahnya adalah pengetahuan. Sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses atau sains adalah kumpulan pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Sains merupakan produk dan proses yang tidak dapat dipisahkan. Sains sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam. Langkah tersebut adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis dan akhirnya menyimpulkan. Dari sini tampak bahwa karakteristik yang mendasar dari sains adalah kuantifikasi, artinya gejala alam dapat berbentuk kuantitas.

Ilmu alam mempelajari aspek-aspek fisik & nonmanusia tentang bumi dan alam sekitarnya. Ilmu-ilmu alam membentuk landasan bagi ilmu terapan, yang keduanya dibedakan dari ilmu sosial, humaniora, teologi, dan seni.

Matematika tidak dianggap sebagai ilmu alam, tetapi digunakan sebagai penyedia alat/perangkat dan kerangka kerja yang digunakan dalam ilmu-ilmu alam. Istilah ilmu alam juga digunakan untuk mengenali "ilmu" sebagai disiplin yang mengikuti metode ilmiah, berbeda dengan filsafat alam. Di sekolah, ilmu alam dipelajari secara umum dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (biasa disingkat IPA). Tingkat kepastian ilmu alam relatif tinggi mengingat objeknya yang konkret, karena hal ini ilmu alam lazim juga disebut ilmu pasti.

Di samping penggunaan secara tradisional di atas, saat ini istilah "ilmu alam" kadang digunakan mendekati arti yang lebih cocok dalam pengertian sehari-hari. Dari sudut ini, "ilmu alam" dapat menjadi arti alternatif bagi biologi, terlibat dalam proses-proses biologis, dan dibedakan dari ilmu fisik (terkait dengan hukum-hukum fisika dan kimia yang mendasari alam semesta).

Ilmu alam adalah ilmu yang membahas tentang gejala-gejala alam (gejala alam yang tidak hidup). Sifat ilmu alam adalah empiris, artinya gejala alam itu dianggap sebagai fenomena yang dapat dibuktikan secara indriawi, dan konkret.

## b. Kedudukan Ilmu Pengetahuan Alam

Ilmu berkembang dengan pesat, yang pada dasarnya ilmu berkembang dari dua cabang utama, yaitu filsafat alam yang kemudian menjadi rumpun ilmu-ilmu alam (*the natural sciences*) dan filsafat moral yang kemudian berkembang ke dalam ilmu-ilmu sosial (*the social sciences*). Ilmu-ilmu alam terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ilmu alam (*the physical sciences*) dan ilmu hayat (*the biological sciences*). Ilmu alam adalah ilmu yang mempelajari zat yang membentuk alam semesta, sedangkan ilmu hayat mempelajari makhluk hidup di dalamnya. Ilmu alam kemudian bercabang lagi menjadi fisika (mempelajari massa dan energi), kimia (mempelajari substansi zat), astronomi (mempelajari benda-benda langit dan ilmu bumi (*the earth sciences*) yang mempelajari bumi kita (Bachri Ghazali, 2005: 38).

## c. Cabang Ilmu Pengetahuan Alam

Cabang-cabang utama dari ilmu alam adalah sebagai berikut. Astronomi adalah cabang ilmu alam yang melibatkan pengamatan benda-benda langit (seperti halnya bintang, planet, komet, nebula, gugus bintang, atau galaksi) serta fenomena-fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer Bumi (misalnya radiasi latar belakang kosmik (radiasi CMB).

Biologi adalah ilmu yang mempelajari aspek fisik kehidupan. Istilah "biologi" dipinjam dari bahasa Belanda, *biologie*, yang juga diturunkan dari gabungan kata bahasa Yunani, *bios* ("hidup") dan *logos* ("lambang", "ilmu"). Istilah "ilmu hayat" dipinjam dari bahasa Arab, juga berarti "ilmu kehidupan". Objek kajian biologi pada masa kini sangat luas dan mencakup semua makhluk hidup dalam berbagai aspek kehidupannya.

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Berasal dari kata Yunani *oikos* ("habitat") dan *logos* ("ilmu"). Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antarmakhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya.

Fisika adalah sains atau ilmu tentang alam dalam makna yang terluas. Fisika mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu.

Geologi adalah ilmu (sains) yang mempelajari bumi, komposisinya, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukannya.

Geografi fisik berbasis ilmu adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan (variasi) keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Ilmu bumi adalah suatu istilah untuk kumpulan cabang-cabang ilmu yang mempelajari bumi.

Kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari (Bahcri Ghazali, 2005: 40).

#### d. Cara Kerja Ilmu Pengetahuan Alam

Cara Kerja ilmu alam dapat terlihat dari tiga contoh proses yang terdiri dari langkah-langkah pengamatan, percobaan, dan penentuan. Ketiga contoh tersebut dapat diamati dalam rangka sejarah penemuannya (*context of discovery*), dan dalam rangka upaya pembenarannya (*context of justification*).

#### Hipotesis

Hipotesis berfungsi untuk merumuskan suatu pemikiran agar menjadi hasil yang mendekati kebenaran nyata atau kesempurnaan hasil pengamatan dan percobaan. Secara analisis tertulis dapat menggunakan rumus silogisme yang telah dipelajari.

##### 1) Perluasan dan Perincian Hipotesis

Untuk membuktikan kesempurnaan hipotesis, maka harus diperluas dengan mencari kemungkinan lain agar tidak dikatakan salah. Kemudian disimpulkan kembali dengan perincian atau dimurnikan, contohnya hipotesis Copernicus, yaitu planet-planet mengitari matahari secara lingkaran diubah menjadi "... secara elipsa".

##### 2) Hipotesis Menuju Hukum Alam

Walaupun para ilmuwan menganggap hal ini kurang empiris, hasil hipotesis yang ada dapat dikatakan sebagai hukum alam pada aspek-aspek yang natural, seperti atmosfer, perputaran bumi, suhu, dan lain-lain.

##### 3) Hukum Alam Menuju Teori Ilmiah

Setelah melalui pembuktian teknologi atau dengan ilmu bumi maupun meteorologi atau ilmu-ilmu lainnya, maka hasil yang awalnya hanya pemikiran dan mampu sampai pada hukum alam, dapat menjadi

teori ilmiah bila lulus uji percobaan dan dapat bersifat statis, kecuali setelah ada pembuktian baru. Oleh karena itu, hasil pemikiran tersebut dapat berfungsi sebagai kajian para pemikir selanjutnya.

Dalam sejarah perkembangan ilmu-ilmu, ilmu alam berkembang lebih awal dan pesat. Sejak di Yunani Kuno, sebelum filsafat muncul sebagai tradisi keilmuan baru, ilmu fisika, matematika, kimia, dan astronomi telah lama menjadi perbincangan di antara pecinta ilmu. Hal ini wajar jika ditilik dari segi kedekatan hubungan manusia dengan dunia yang sifatnya fisik dan material yang secara langsung mudah diamati dan diukur. Selain itu, manfaatnya yang bersifat praktis dan langsung bisa dirasakan, seperti penemuan sepeda oleh orang yang menggunakannya. Manfaat itu bisa dirasakan meskipun dilakukan dalam waktu yang berbeda. Ilmu-ilmu alam sudah barang tentu sangat penting bagi kehidupan manusia terutama untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan material dan praktis manusia.

Dilihat dari sifat objeknya, cara kerja ilmu alam bisa dirangkum dalam prinsip-prinsip seperti berikut ini.

### 1) Gejala Alam Bersifat Fisik-Statis

Seperti diperlihatkan dari segi namanya, ilmu-ilmu alam berkaitan dengan gejala-gejala alam. Ahli ilmu-ilmu alam berhubungan dengan gejala-gejala alam yang sifatnya fisik yang teramati dan terukur. Dari sifat tersebut, gejala-gejala alam memiliki sifat statis atau tetap dari waktu ke waktu. Karena statis, jumlah variabel dari gejala alam sebagai objek yang diamati juga relatif lebih sederhana dan sedikit.

### 2) Objek Penelitian Bisa Berulang

Karena sifat gejala-gejala alam fisikal-statis, penelitian dalam ilmu-ilmu alam tetap. Dengan sifat ini, objek penelitian dalam ilmu-ilmu alam bisa diamati secara berulang-ulang oleh peneliti.

### 3) Pengamatan Relatif Lebih Mudah dan Sempel

Pengamatan dalam ilmu-ilmu alam lebih mudah karena bisa dilakukan secara langsung dan bisa diulang kapan pun. Kata mengamati dalam ilmu alam lebih luas dari sekadar interaksi langsung dengan pancaindra manusia, yang lingkup kemampuannya sangat terbatas. Untuk mengatasi keterbatasan ini manusia menggunakan alat-alat bantu, seperti mikroskop, teleskop, dan sebagainya. Meskipun pengamatan dalam ilmu-ilmu alam

dapat dilakukan berulang-ulang, dimungkinkan juga akan memiliki hasil yang berbeda bergantung pada cara pengamatan yang dipakai, atau secara umum cenderung seragam atau positif.

#### 4) Subjek Pengamat (Peneliti) Lebih sebagai Penonton

Prinsip pengamatan dalam ilmu-ilmu alam adalah positif objektif, artinya kebenarannya disimpulkan berdasarkan objek yang diamati. Dalam pandangan Henry Margenau, prinsip objektif ini menempatkan posisi ilmuwan alam lebih sebagai *the cosmic spectator* daripada *the cosmic spectale*. Ilmuwan alam adalah penonton alam, dia hanya mengamati alam dan kemudian memperlihatkan kepada orang lain hasil pengamatannya. Dalam hal ini sedikitpun ia tidak melibatkan subjektivitasnya, tetapi sekadar menunjukkan hasil tontonannya.

#### 5) Memiliki Daya Prediktif yang Relatif Lebih Mudah Dikontrol

Ilmu-ilmu alam sudah barang tentu tidak akan menarik apabila hanya sebatas mengumpulkan informasi tentang gejala-gejala alam semata kemudian membangun teori. Gejala-gejala alam yang diketahui dan dirumuskan dalam teori-teori itu bisa digunakan untuk memprediksikan kejadian-kejadian yang mungkin akan timbul dari gejala-gejala tersebut.

**READING COPY**



## BAB 4

# MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK INDIVIDU DAN SOSIAL

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk individu, manusia merupakan bagian dan unit terkecil dari kehidupan sosial atau manusia sebagai makhluk sosial yang membentuk suatu kehidupan masyarakat. Jadi, masyarakat merupakan kumpulan dari berbagai individu yang hidup di alam dan lingkungan.

### A. Manusia sebagai Makhluk Individu

Kata “individu” berasal dari kata latin, yaitu *individuum*, berarti “yang tak terbagi”. Dalam bahasa Inggris individu berasal dari kata *in* dan *divided*. Kata *in* salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan *divided* artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi, atau suatu kesatuan (Elly, Kama, Ridwan, 2012: 63). Dalam ilmu sosial paham individu menyangkut tabiatnya dengan kehidupan jiwanya yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Dalam ilmu sosial, individu menekankan penyelidikan pada kenyataan-kenyataan hidup istimewa, yang tak seberapa memengaruhi kehidupan manusia (M. Munandar Soelaeman, 2011: 113).

Individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Dengan demikian, sering digunakan sebutan “orang-seorang” atau “manusia perseorangan”. Sifat dan fungsi orang-orang sekitar kita adalah makhluk-makhluk yang kadang berdiri sendiri, kadang dalam hal lain bersama-sama satu sama lain, tetapi banyak perbedaannya. Sejenis tapi tak sama, makin tua semakin maju dan semakin banyak pula perbedaannya. Pada setiap anggota suatu bangsa yang bermacam-macam tingkat peradabannya, terjadi diferensiasi dengan corak sifat dan tabiat beraneka macam (M. Munandar Soelaeman, 2011: 113).

Timbulnya diferensiasi bukan hanya pembawaan, tetapi melalui kaitan dengan dunia yang telah mempunyai sejarah dengan peradabannya. Hal ini memberikan keuntungan rohani bagi individu, seperti bahasa, agama, adat istiadat, dan kebiasaan, paham-paham hukum, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Semuanya telah ditata dan dipakai oleh generasi sebelumnya. Namun, betapapun besarnya pengaruh lingkungan sosial terhadap individu, manusia tetap mempunyai watak dan sifat tertentu, yang aktif di tengah-tengah sesama manusia lainnya. Sadar akan “aku”-nya dan insaf, serta mengumpulkan kekuatan rohani untuk bertindak sendiri. Bahkan individu yang mempunyai aktivitas sadar lebih dari ukuran rata-rata kebanyakan orang disebut orang yang mempunyai kepribadian istimewa (M. Munandar Soelaeman, 2011: 113).

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Persepsi terhadap individu atau hasil pengamatan manusia dengan segala maknanya merupakan suatu keutuhan ciptaan Tuhan yang mempunyai tiga aspek melekat pada dirinya, yaitu aspek jasmaniah, aspek psikis-rohaniah, dan aspek sosial kebersamaan. Ketiga aspek tersebut saling memengaruhi, keguncangan pada satu aspek akan membawa akibat pada aspek lainnya.

Makna manusia menjadi individu apabila pola tingkah lakunya hampir identik dengan tingkah laku massa yang bersangkutan. Proses yang meningkatkan ciri-ciri individualitas pada seseorang sampai ia adalah dirinya sendiri, disebut proses individualisasi atau aktualisasi diri. Individu dibebani berbagai peranan yang berasal dari kondisi kebersamaan hidup, maka muncul struktur masyarakat yang akan menentukan kemantapan masyarakat. Konflik mungkin terjadi karena pola tingkah laku spesifik dirinya

bercorak bertentangan dengan peranan yang dituntut oleh masyarakat dari dirinya (M. Munandar Soelaeman, 2011: 113).

Individu dalam bertingkah laku menurut pola pribadinya, ada tiga kemungkinan, yaitu menyimpang dari norma kolektif, kehilangan individualitasnya atau takluk terhadap kolektif, dan memengaruhi masyarakat seperti adanya tokoh pahlawan atau pengacau. Mencari titik optimum antara dua pola tingkah laku (sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat) dalam situasi yang senantiasa berubah, memberi konotasi “matang” atau “dewasa” dalam konteks sosial. Sebutan “baik” atau “tidak baik” pengaruh individu terhadap masyarakat adalah relatif.

Selain itu, manusia sebagai makhluk individu memiliki keunikan atau ciri khas masing-masing, tidak ada manusia yang persis sama meskipun terlahir kembar. Secara fisik mungkin manusia akan memiliki banyak persamaan, tetapi secara psikologis akan banyak menunjukkan perbedaan. Ciri khas dan perbedaan tersebut sering disebut dengan kepribadian. Kepribadian seseorang akan sangat dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungannya.

Menurut Nursid Sumaatmadja (Effendi, 2010: 39), kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi bio-psiko-fisikal (fisik dan psikis) yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan, yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya jika mendapat rangsangan dari lingkungan. Dia menyimpulkan bahwa faktor lingkungan (fenotipe) ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Secara normal, setiap manusia memiliki potensi dasar mental yang berkembang dan dapat dikembangkan yang meliputi: (1) minat (*sense of interest*), (2) dorongan ingin tahu (*sense of curiosity*), (3) dorongan ingin membuktikan kenyataan (*sense of reality*), (4) dorongan ingin menyelidiki (*sense of inquiry*), dan (5) dorongan ingin menemukan sendiri (*sense of discovery*). Potensi ini berkembang jika adanya rangsangan, wadah dan suasana kondusif. Jika fenomena sosial di lingkungannya telah tumbuh potensi-potensi mental yang normalnya akan terus berkembang.

Berawal dari potensi-potensi tersebut, manusia sebagai makhluk individu ingin memenuhi kebutuhan dan kehendaknya masing-masing, ingin merealisasikan dan mengaktualisasikan dirinya. Dalam arti ia memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Setiap individu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan jati dirinya yang berbeda dengan yang lainnya, tidak ada manusia yang betul-betul

ingin menjadi orang lain, dia tetap ingin menjadi dirinya sendiri sehingga dia selalu sadar akan keindividualitasannya.

Menurut Zanti Arbi dan Syahrin (Sadulloh, 2009: 81), setiap orang bertanggung jawab atas dirinya, atas pikiran, perasaan, pilihan, dan perilakunya. Orang yang betul-betul manusia adalah orang yang bertanggung jawab penuh. Tidak ada orang lain yang mengambil alih tanggung jawab dalam hidupnya. Kata hatinya adalah kata hatinya sendiri.

Adapun dalam hal ini sebagai pendidik baik orang tua maupun guru kita harus memahami bahwa anak memiliki potensi untuk berkembang ingin menjadi pribadinya sendiri. Anak dalam perkembangannya akan memperoleh pengaruh dari luar, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, tetapi anak akan mengambil jarak terhadap pengaruh-pengaruh tersebut. Dia akan memilihnya sendiri. Pengaruh tersebut akan dia olah secara pribadi sehingga apa yang dia terima akan merupakan bagian dari dirinya sendiri sehingga anak menjadi pribadi individu yang berbeda dan tidak sama dengan yang lainnya. Selain itu, pendidik harus sadar bahwa anak bukan satu-satunya manusia yang berhak untuk mendidik anak tersebut. Pendidikan tidak boleh memaksa anak untuk mengikuti atau menuruti segala kehendaknya karena dalam diri anak ada suatu prinsip pembentukan dan pengembangan yang ditentukan oleh dirinya sendiri.

## B. Manusia sebagai Makhluk Sosial

Menurut kodratnya manusia selain sebagai makhluk individu, mereka juga merupakan makhluk sosial. Adapun yang dimaksud istilah "sosial" berasal dari akar kata bahasa Latin "*socius*", yang artinya berkawan atau masyarakat. Sosial memiliki arti umum, yaitu kemasyarakatan dan dalam arti sempit mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat. Adapun dalam hal ini yang dimaksud manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang hidup bermasyarakat, dan pada dasarnya setiap hidup individu tidak dapat lepas dari manusia lain.

Manusia adalah "makhluk sosial". Ayat kedua dari wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad Saw., dapat dipahami sebagai salah satu ayat yang menjelaskan hal tersebut. *Khalaqal insan min 'alaq* bukan saja diartikan sebagai "menciptakan manusia dari segumpal darah" atau "sesuatu yang berdempet di dinding rahim", tetapi juga dapat dipahami

sebagai "diciptakan dinding dalam keadaan selalu bergantung pada pihak lain atau tidak dapat hidup sendiri." Ayat lain dalam konteks ini adalah surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam ayat tersebut secara tegas dinyatakan bahwa manusia diciptakan terdiri dari lelaki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa menurut Al-Quran, manusia secara fitri adalah makhluk sosial dan hidup bermasyarakat merupakan satu keniscayaan bagi mereka. (M. Quraish Shihab, 2007: 423).

Selama manusia hidup, ia tidak akan terlepas dari pengaruh masyarakat, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan yang lebih besar manusia tidak lepas dari pengaruh orang lain. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain (Elly M Setiadi, 2006: 59-60).

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon Politicon*), artinya manusia sebagai individu tidak akan mampu hidup sendiri dan berkembang sempurna tanpa hidup bersama dengan individu manusia lainnya (Lies dkk, 2013: 5).

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan sesamanya untuk berbagi rasa, bertukar pikiran dan kehendak, baik secara langsung maupun tidak langsung, verbal maupun nonverbal. Hal ini secara alami tertanam dalam diri setiap individu, dan secara alami pula dilakukan sejak lahir. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik secara individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antarmanusia (Onong Uchana Effendy, 2002: 8).

Di dalam konteks sosial, manusia sering disebut masyarakat, setiap orang akan mengenal orang lain. Oleh karena itu, perilaku manusia selalu terkait dengan orang lain, ia melakukan sesuatu dipengaruhi faktor dari luar dirinya, seperti tunduk pada aturan, tunduk pada norma masyarakat, dan keinginan mendapat respons positif dari orang lain.

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan (berinteraksi) dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Kebutuhan untuk berteman dengan orang lain, sering kali didasari atas kesamaan ciri atau kepentingannya masing-masing. Misalnya, orang kaya cenderung berteman lagi dengan orang kaya. Orang yang berprofesi sebagai artis, cenderung untuk mencari teman sesama artis lagi. Dengan demikian, akan terbentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang didasari oleh kesamaan ciri atau kepentingan.

Pada umumnya di tengah-tengah masyarakat pasti akan muncul suatu masalah atau gejala sosial. Masalah sosial merupakan realitas sosial yang kompleks sehingga sumber masalahnya juga bersifat kompleks. Masalah sosial terjadi karena ada sesuatu yang “salah” dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, mendiagnosis masalah sosial berarti mencari apa dan siapa yang dianggap “bersalah” dalam realitas kehidupan sosial tersebut (Soetono, 2011: 3). Oleh sebab itu, sumber penyebab masalah dapat berasal dari level individu maupun sistem. Guna penanganan masalah sosial yang lebih komprehensif, kedua pendekatan tersebut dapat digunakan secara bersama-sama dalam mendiagnosis masalah. Apabila sumber masalahnya berasal pada level sistem, maka pemecahan masalahnya tidak akan efektif jika hanya merupakan penanganan pada individu penyandang masalah.

Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampilkan dirinya dalam berbagai bentuk sehingga dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Seperti kita ketahui bahwa sejak bayi lahir sampai usia tertentu manusia adalah makhluk yang tidak berdaya, tanpa bantuan orang-orang di sekitar ia tidak dapat berbuat apa-apa dan untuk segala kebutuhan hidup bayi sangat bergantung pada luar dirinya seperti orang tuanya khususnya ibunya. Bagi si bayi keluarga merupakan segitiga abadi yang menjadi kelompok sosial pertama dikenalnya. Pada perjalanan hidup yang selanjutnya keluarga akan tetap menjadi kelompok pertama tempat meletakkan dasar kepribadian dan proses pendewasaan yang di dalamnya selalu terjadi “sosialisasi” untuk menjadi manusia yang mengetahui pengetahuan dasar, nilai-nilai, norma sosial, dan etika-etika pergaulan.

Manusia dapat dikatakan makhluk sosial karena pada dirinya terdapat dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, di mana terdapat kebutuhan untuk berteman dengan orang lain yang sering didasari atas kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak.

Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Makhluk sosial adalah makhluk yang terdapat dalam beragam aktivitas dan lingkungan sosial. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, karena beberapa alasan seperti berikut ini.

- a. Manusia tunduk pada aturan, norma sosial.
- b. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain.
- c. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain.
- d. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia (Elly M Setiadi, dkk. 2012: 75).

Perbedaan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dapat dibedakan sebagaimana pada tabel berikut ini.

No.	Makhluk Individu	Makhluk Sosial
1	Timbul dengan sendirinya.	Terdapat unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain, menyatukan antara diri pribadi dengan lingkungannya.
2	berorientasi pada kebebasan diri sendiri.	Memerlukan sesamanya untuk bekerja sama dalam hidupnya, manusia memerlukan sesamanya untuk berbagi.
3	Memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri setiap individu.	Menyatukan beberapa keunikan menuju suatu kecocokan dalam bersosial.
4	Tidak berbagi.	Cenderung berbagi dan mengikuti masyarakat.
5	Diri sendiri yang akan memimpin ke mana ia harus berlaku.	Berlaku aturan, nilai-nilai, dan norma yang mengikat.

### C. Manusia Hubungannya dengan Alam

Secara ekologis, manusia pada hakikatnya merupakan makhluk lingkungan (*homo ekologis*), artinya dalam melaksanakan fungsi dan posisinya sebagai salah satu sub dari ekosistem, manusia adalah makhluk yang memiliki kecenderungan untuk selalu mencoba dan mengerti akan lingkungannya. Kecenderungan seperti ini akan menjadi salah satu ciri utama manusia sebagai makhluk berakal sehat.

Meskipun secara naluri memiliki potensi kepedulian ekologis, pada tingkat aktualitasnya, kepedulian ekologis manusia justru dikuasai oleh akalannya sehingga pengembangan potensi ekologis pada dirinya tersebut memiliki kementakan, *probability* untuk bervariasi. Secara faktual perilaku ekologis manusia bukan bersifat eksklusif melainkan bersifat universal. Maksudnya, perilaku ekologis bukan milik masyarakat tertentu melainkan milik manusia. Hanya saja kadarnya berbeda-beda pada setiap komunitas (kelompok). Pada komunitas masyarakat yang belum maju, baik sains dan teknologinya, serta perindustriannya, tampak lebih kuat perilaku ekologis dan kearifan lingkungannya sehingga mereka dikatakan sebagai masyarakat berimbang, *equilibrium society*, dibandingkan dengan komunitas masyarakat maju (*industrialized*). Pada komunitas maju, sifat kontraekologis dan ketidakarifan lingkungan jauh lebih terlihat sehingga menjadi masyarakat yang kurang (tidak) seimbang.

“Problem lingkungan yang sudah setua umur dunia memang sangat kompleks, tetapi jika diteliti secara saksama sebenarnya bersumber pada 5 aspek, yaitu aspek dinamika kependudukan; pengembangan sumber daya alam dan energi; pertumbuhan ekonomi; perkembangan *science* dan teknologi; benturan terhadap lingkungan. Kelima persoalan tersebut saling kait satu dengan lainnya sehingga menjadi problem serius.” (M.T.Zen, 1980).

Manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya. Manusia mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan ekosistem habitat manusia itu sendiri, tindakan-tindakan yang diambil atau kebijakan-kebijakan tentang hubungan dengan lingkungan akan berpengaruh bagi lingkungan dan manusia itu sendiri. Kemampuan kita untuk menyadari hal tersebut akan menentukan bagaimana hubungan kita sebagai manusia dengan lingkungan kita. Hal ini memerlukan pembiasaan diri yang dapat membuat kita menyadari hubungan manusia dengan lingkungannya.

Secara bahasa manusia berasal dari kata "*manu*" yang merupakan bahasa sansekerta dan *mens* adalah bahasa latinnya, yang berarti berpikir. Namun, secara istilah manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep, fakta, gagasan, ataupun realitas. Dalam hubungan dengan lingkungannya manusia merupakan suatu organisme hidup. Terbentuknya pribadi seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya. Oleh karena itu, lingkungan mempunyai pengaruh besar terhadap manusia itu sendiri.

1. Lingkungan alam yang berfungsi sebagai sumber daya alam.
2. Lingkungan manusia yang berfungsi sebagai sumber daya manusia itu sendiri.
3. Lingkungan buatan yang berfungsi sebagai sumber daya buatan.

Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk pada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan dan mati, dan seterusnya, serta terkait serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik itu positif maupun negatif.

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Swt. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah dengan mempergunakan bermacam-macam istilah, seperti *Turab*, *Thien*, *Shal-shal*, dan *Sualalah*.

Manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Selain kebutuhan pokok primer dan sekunder manusia, yaitu makan, minum, dan tempat tinggal, manusia juga membutuhkan sosialisasi.

Manusia mempunyai kelebihan dari makhluk hidup yang lain, yaitu dalam perkara (*noosfir/akal*). Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumber alam, manusia dapat mengelolanya secara lebih efisien dan efektif dibandingkan makhluk hidup yang lain.

Dengan adanya saling ketergantungan di antara manusia di dalam memanfaatkan dan mengelola sumber alam, maka terjadi kehidupan berkelompok sesuai dengan pembagian kerja dan aktivitas kerja sama kesatuan hidup manusia yang ditandai dengan hidup yang berkelompok menimbulkan keterikatan manusia pada norma-norma, aturan-aturan, dan adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, sehingga membentuk masyarakat.

Tidak bisa disangkal bahwa walaupun manusia hanya merupakan salah satu bagian dari keseluruhan ekosistem, manusia merupakan satu-satunya makhluk yang paling dinamis. Manusia memiliki otak yang lebih besar, kehendak bebas, dan memiliki perasaan. Kualitas-kualitas itu membuat manusia lebih adaptabel dibandingkan dengan makhluk lainnya, terutama dengan makhluk primata nonmanusia. Manusia dengan demikian tidak hanya dideterminasi oleh lingkungannya, tetapi juga dapat merekayasa lingkungannya sesuai dengan kehendaknya sehingga manusia memiliki

pengaruh yang begitu besar terhadap ekosistem baik secara positif maupun negatif.

Manusia di dalam aktivitasnya tidak mempedulikan keseimbangan dan keserasian lingkungan. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, dengan tidak mempertimbangkan bahwa aktivitas yang berlebihan dalam mengeksploitasi lingkungan guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya, akan melampaui kemampuan lingkungan dalam mendukung perikehidupan. Aktivitas berupa eksploitasi yang berlebihan, itulah yang menyebabkan terganggunya keseimbangan dan keserasian lingkungan (Harun M. Husein, 1993: 19).

Manusia mendapatkan unsur-unsur yang diperlukan dalam hidupnya dari lingkungan. Makin tinggi budaya makin beragam kebutuhan hidupnya. Makin besar kebutuhannya yang diambil dari lingkungan, maka berarti makin besar perhatian manusia terhadap lingkungan. Perhatian dan pengaruh manusia terhadap lingkungan makin meningkat pada zaman teknologi maju. Masa ini manusia mengubah lingkungan hidup alami menjadi lingkungan hidup binaan. Eksploitasi sumber daya alam makin meningkat untuk memenuhi kebutuhan dasar industri. Sebaliknya hasil sampingan dari industri seperti asap dan limbah mulai menurunkan kualitas lingkungan hidup. Manusia merupakan komponen biotik lingkungan yang memiliki daya pikir dan daya nalar tertinggi dibandingkan makhluk lainnya. Di sini terlihat jelas bahwa manusia merupakan komponen biotik lingkungan yang aktif. Hal ini disebabkan oleh manusia dapat secara aktif mengelola dan mengubah ekosistem sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kegiatan manusia ini dapat menimbulkan bermacam-macam gejala.

1. Peran manusia yang bersifat negatif adalah sebagai berikut:
  - a. berkurangnya sumber daya alam karena eksploitasi terus-menerus;
  - b. berubahnya profil permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah;
  - c. punahnya jumlah spesies tertentu yang merupakan sumber plasma nutfah.
2. Peran manusia yang bersifat positif:
  - a. melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tetap;
  - b. mengadakan penghijauan dan reboisasi;
  - c. melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah.

Pembangunan berkelanjutan yang selama ini didefinisikan, sifatnya sangat antroposentris. Hal ini dapat dimengerti karena pembangunan merupakan konsep manusia, yaitu dari manusia untuk manusia. Karena

pembangunan memerlukan sumber daya alam, definisi tersebut secara implisit mengandung arti bahwa sumber daya alam itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Berdasarkan konsep di atas, secara lebih luas dapat juga dikatakan, bahwa alam diciptakan untuk manusia. Oleh karena itu, manusia berdiri di atas alam yang merupakan ekosistem biogeofisik. Arus energi, materi, dan informasi dari sistem sosial ke ekosistem biogeofisik merupakan sasaran untuk eksploitasi biogeofisik dengan tujuan memaksimalkan arus energi, materi, dan informasi ke sistem sosial. Arus yang terakhir dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terutama kebutuhan hidup untuk kehidupan manusiawi yang memberi keuntungan ekonomi dan status sosial. Karena manusia merasa berdiri di luar ekosistem, ia tidak peduli akan terjadinya kerusakan ekosistem itu. Kerusakan itu dianggapnya tidak akan memengaruhi dirinya.

Sikap ini berbeda dengan sikap tradisional yang masih banyak dianut oleh masyarakat di negara sedang berkembang. Menurut mereka, sistem biogeofisik merupakan sumber daya bagi manusia, tetapi manusia merasa ada hubungan fungsional antara dirinya menjadi satu kesatuan ekosistem dengan biogeofisik tersebut yang membentuk ekosistem sosio-biogeofisik. Karena manusia adalah bagian dari ekosistem itu, kerusakan pada ekosistem akan memengaruhi kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, arus energi, materi, dan informasi dari sistem sosial ke sistem biogeofisik, bukanlah hanya untuk mengeksploitasi sistem biogeofisik, melainkan lebih ditujukan untuk menjaga keserasian antara sistem sosial dan sistem biogeofisik sehingga keutuhan sistem sosial/biogeofisik dapat terpelihara.

Dari segi ekologi, manusia memang merupakan bagian ekosistem tempat hidupnya, seperti halnya makhluk hidup lainnya, manusia merupakan bagian jaring-jaring kehidupan dan juga salah satu komponen dalam daur materi. Manusia hidup dari komponen lainnya dalam ekosistemnya, oksigen, air, tumbuhan, dan hewan. Sebaliknya manusia juga menghidupi komponen hayati lainnya. Manusia merupakan makhluk bumi yang hidupnya sangat bergantung pada makhluk lainnya, seperti tumbuhan dan hewan, sedangkan tumbuhan dan hewan masih tetap dapat hidup tanpa ada manusia. Oleh karena itu, manusia yang merasa dirinya sebagai makhluk terpenting dan paling berkuasa di bumi, sebenarnya adalah yang paling lemah. Apabila tidak hati-hati dia dapat membuat dirinya punah.

Manusia merupakan salah satu komponen biotik dalam suatu ekosistem yang mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam pengelolaan ekosistem.

Sehingga ekosistem dapat dilestarikan fungsinya demi kesejahteraan manusia, baik secara materiil maupun spiritual.

Manusia mampu menciptakan ekosistem baru, misalnya dengan mengubah padang pasir yang tandus menjadi suatu perkebunan yang subur. Manusia juga mampu menghancurkan ekosistem, misalnya dengan penyemprotan obat antihama yang berlebihan sehingga menyebabkan hewan-hewan turut terbasmi.

Manusia merupakan komponen biotik lingkungan yang memiliki daya pikir dan penalaran yang tinggi. Di samping itu, manusia memiliki budaya, pranata sosial dan pengetahuan serta teknologi yang makin berkembang. Peranan manusia dalam lingkungan ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Peranan manusia yang bersifat negatif adalah peranan yang merugikan lingkungan. Kerugian ini secara langsung ataupun tidak langsung timbul akibat kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Peranan manusia yang bersifat positif adalah peranan yang berakibat menguntungkan lingkungan karena dapat menjaga dan melestarikan daya dukung lingkungan.

1. Peranan manusia yang bersifat negatif, antara lain sebagai berikut.
  - a. Eksploitasi yang melampaui batas sehingga persediaan sumber daya alam makin menciut (*depletion*).
  - b. Punah atau merosotnya jumlah keanekaan jenis biota yang juga merupakan sumber plasma nutfah.
  - c. Berubahnya ekosistem alami yang mantap dan seimbang menjadi ekosistem binaan yang tidak mantap karena terus-menerus memerlukan subsidi energi.
  - d. Berubahnya profil permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah hingga menimbulkan longsor.
  - e. Masuknya energi bahan atau senyawa tertentu ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah. Hal ini berakibat menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pencemaran dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan terhadap manusia itu sendiri.
2. Peranan manusia yang menguntungkan lingkungan, antara lain sebagai berikut.
  - a. Melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana terutama SDA yang tidak dapat diperbarui.
  - b. Mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian aneka jenis flora serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir.

- c. Melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah agar kadar bahan pencemar yang terbuang ke dalam lingkungan tidak melampaui nilai ambang batasnya.
- d. Melakukan sistem pertanian secara tumpang sari atau multikultur untuk menjaga kesuburan tanah. Untuk tanah pertanian yang miring dibuat sengkedan guna mencegah derasnya erosi serta terhanyutnya lapisan tanah yang mengandung humus.
- e. Membuat peraturan, organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan keanekaan jenis makhluk hidup.

Perilaku manusia terhadap lingkungan disebabkan oleh perilaku manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor dasar, pendukung, pendorong, dan persepsi, serta faktor lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Di antara faktor-faktor pengaruh adalah faktor dasar, yang meliputi pandangan hidup, adat istiadat, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat. Faktor pendukung meliputi pendidikan, pekerjaan, budaya, dan strata sosial. Sebagai faktor pendorong meliputi sentuhan media massa baik elektronik maupun tertulis, penyuluhan, tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Sejauh mana penyerapan informasi oleh seseorang bergantung pada dimensi kejiwaan dan persepsi terhadap lingkungan, untuk selanjutnya akan direfleksikan pada tatanan perilakunya (Ritohardoyo, 2006: 51).

Pada dasarnya manusia sebagai anggota masyarakat sangat bergantung pada lahan dan tempat tinggalnya. Di sini terdapat perbedaan antara lahan dan tempat tinggal. Lahan merupakan lingkungan alamiah, sedangkan tempat tinggal adalah lingkungan buatan (binaan). Lingkungan binaan dipengaruhi oleh daur pelaku dan sebaliknya.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup kita juga membutuhkan moralitas yang berarti kemampuan kita untuk dapat hidup bersama makhluk hidup yang lain dalam suatu tataran yang saling membutuhkan, saling tergantung, saling berelasi, dan saling memperkembangkan sehingga terjadi keutuhan dan kebersamaan hidup yang harmonis. Refleksi moral akan menolong manusia untuk membentuk prinsip-prinsip yang dapat mengembangkan relasi manusia dengan lingkungan hidupnya. Manusia harus menyadari kebergantungannya pada struktur ekosistem untuk dapat mendukung kehidupannya itu sendiri. Manusia harus dapat beradaptasi dengan lingkungan hidup yang menjadi tempat ia hidup dan berkembang (Mateus Mali dalam Sunarko dan Eddy Kristiyanto, 2008: 139).

Manusia dan perilakunya merupakan bagian dari lingkungan hidup yang memengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan hidup manusia

serta makhluk-makhluk lainnya, sedangkan manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan sebuah ekosistem, yaitu tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Interaksi di antara sistem tersebut pada gilirannya akan berpengaruh terhadap keseluruhan sistem tersebut.

Hubungan tersebut menurut Sumarwoto, pada awalnya tidak didasarkan pada kaitan eksploitasi, tetapi lebih pada saling melengkapi. Apabila lingkungan hidup dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar, yakni sistem sosial budaya (kepadatan biosfer) dan sistem biogeofisik (daya dukung biosfer), pada awalnya keseimbangan di antara dua sistem tersebut terjaga karena manusia hanya memanfaatkan sistem biogeofisik secukupnya sehingga tidak mengganggu hubungan tersebut.

Seberapa jauh hubungan antara sistem sosial budaya (kepadatan biosfer) dengan sistem biogeofisik (daya dukung biosfer) dapat pula dilihat dari sikap manusia terhadap lingkungannya. Triandis menyatakan bahwa sikap (*attitude*) merupakan suatu kesediaan manusia di dalam bereaksi terhadap suatu objek.

Sikap tersebut terdiri atas 3 komponen, sebagai berikut.

1. Komponen kognitif merupakan pengetahuannya terhadap objek.
2. Komponen afeksi merupakan hubungan emosinya terhadap objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang disukai atau tidak sehingga tumbuh perasaan positif maupun negatif terhadap objek.
3. Komponen tingkah laku merupakan kecenderungannya untuk bertindak sesuai dengan komponen kognitif dan komponen afeksi.

Dalam kaitannya dengan sikap tersebut, Suwandhini menyatakan bahwa faktor sosial ekonomi dan pengetahuan lingkungan menentukan sikap seseorang karena apa yang didengar dan dilakukan seseorang tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan dengan orang-orang di lingkungannya.

Intinya bahwa status sosial ekonomi dan pengetahuan seseorang tentang lingkungan akan memengaruhi sikap orang tersebut. Sikap tersebut pada gilirannya akan memengaruhi tindakan manusia di dalam memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia itu sendiri. Dalam hal ini bisa diinterpretasikan bahwa status sosial ekonomi dan pengetahuan seseorang tentang lingkungan memengaruhi sikap seseorang di dalam kepedulian lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik.

Sebagaimana kita maklumi bahwa manusia dalam pengertian ekologi manusia merupakan sosok yang memegang fungsi dan peranan penting dalam konteks lingkungan hidupnya. Namun, perlu diingat pula bahwa

manusia secara fisik merupakan makhluk yang lemah. Perikehidupan dan kesejahteraannya sangat bergantung pada komponen lain. Artinya, keberhasilan manusia dalam mengelola rumah tangganya dengan baik, ditentukan oleh berhasilnya manusia dalam mengelola makhluk hidup lainnya secara keseluruhan dengan baik pula.

Untuk memperkuat kelemahan manusia, ia diberi kelebihan akal atau alam pikiran (*noosfer*). Dengan akal pikirannya manusia memiliki budaya serta dengan budayanya (yang disebut *extra somatic tool*) manusia mampu menguasai dan mengalahkan makhluk yang lebih besar dan menaklukkan alam yang dahsyat.

Masalahnya apabila *noosfer* dengan perilakunya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan diri dan makhluk hidup lainnya dan didukung oleh rasa tanggung jawab terhadap kelestarian kemampuan daya dukung lingkungannya, maka sejahteralah manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebaliknya dengan *noosfer* (*extra somatic tool*) yang dikembangkan manusia dalam mempermudah hidup dan memenuhi kebutuhan pokok (*primary biological needs*) manusia dapat bersifat tamak, egois, serakah mengeksploitasi sumber daya alam dengan semena-mena, tanpa pertimbangan dampak yang akan terjadi kelak. Bahkan merasa dirinyalah yang paling memerlukan, dengan memanfaatkan sumber daya alam itu yang pada gilirannya mereka terancam hidupnya dan makhluk hidup lain, kini dan generasi mendatang.

Inti etika lingkungan hidup yang baru adalah sikap tanggung jawab terhadapnya (Franz Magnis Suseno, 1993: 151). Tanggung jawab itu memiliki dua acuan. *Pertama*, Keutuhan biosfer yang berarti campur tangan manusia dengan alam yang memang harus berjalan terus selalu dijalankan dalam tanggung jawab terhadap kelestarian semua proses kehidupan yang sedang berlangsung. Terutama manusia, akhirnya menjadi peka terhadap keseimbangan suatu ekosistem. Campur tangan manusia bernapaskan tanggung jawab terhadap kelangsungan semua proses kehidupan. Bagaimanapun, manusia tidak mengurangi kadar kehidupan lingkungan. (Franz Magnis Suseno, 1993: 152). *Kedua*, Generasi yang akan datang yang sudah disadari keberadaannya dan hak-haknya sebagai tanggung jawab manusia. Setiap orang tua yang baik berusaha untuk menjaga rumah, perabot, dan tanah yang dimiliki sebagai warisan bagi anak cucu mereka. Sikap ini harus menjadi sikap umum manusia terhadap generasi yang akan datang. Manusia diberi beban berat untuk mewariskan ekosistem bumi ini dalam keadaan baik dan utuh pada anak cucu nanti. Sikap tanggung jawab itu dapat dirumuskan dalam prinsip tanggung jawab

lingkungan seperti berikut: dalam segala usaha bertindaklah sedemikian rupa sehingga akibat-akibat tindakannya tidak merusak, bahkan tidak dapat membahayakan atau mengurangi kemungkinan-kemungkinan kehidupan manusia dalam lingkungannya, baik yang hidup masa sekarang, maupun generasi yang akan datang (Franz Magnis Suseno, 1993: 152).

Tuntutan suatu etika lingkungan hidup baru dapat dirangkum sebagai berikut.

1. Manusia harus belajar untuk menghormati alam. Alam dilihat tidak semata-mata sebagai sesuatu yang berguna bagi manusia, melainkan yang mempunyai nilai sendiri. Kalau terpaksa manusia mencampuri proses-proses alam, maka tidak seluruhnya dan dengan terus-menerus menjaga keutuhannya.
2. Manusia harus memberikan suatu perasaan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal. Agar lingkungan manusia bersih, sehat, alamiah, sejauh mungkin diupayakan agar manusia tidak membuang sampah seenaknya, hendaknya manusia meninggalkan setiap tempat dalam keadaan bersih, tanpa meninggalkan berbagai macam kotoran.
3. Manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Untuk itu, diperlukan sikap peka terhadap kehidupan. Sekaligus perlu dikembangkan kesadaran mendalam dan permanen, bahwa manusia sendiri termasuk biosfer, merupakan bagian dari ekosistem, bahwa ekosistem adalah sesuatu yang halus keseimbangannya, yang tidak boleh diganggu dengan campur tangan dan perencanaan kasar. Karena menyadari dirinya sebagai partisipan dalam biosfer, manusia tidak akan melakukan apa pun yang mengancam penyebaran dan kelangsungan hidupnya.
4. Etika lingkungan hidup baru menuntut larangan keras untuk merusak, mengotori, dan meracuni. Terhadap alam atau bagiannya, manusia tidak mengambil sikap yang merusak, mematikan, menghabiskan, mengotori, menyalah-nyalakan, melumpuhkan, ataupun membuang. Bukan hanya di hutan dan di taman, melainkan juga di rumah, di sekitar rumah, di jalan, di tempat kerja, di tempat rekreasi, manusia tidak membuang kertas, plastik, ataupun puntung rokok.

“Kerugian materi yang ditimbulkan api selama delapan bulan sungguh memilukan. Intensitas kematian pohon mencapai 50 persen. Yang tragis, pohon-pohon dari kerabat Meranti, yang berkualitas bagus paling tak tahan api.”(Tempo, 19 September 1987: 42).

Semboyan etika lingkungan hidup baru adalah *membangun, tetapi tidak dengan merusak*. Suatu rencana yang hanya dapat terlaksana

dengan menimbulkan kerusakan suatu ekosistem yang tidak terpulihkan, perlu diurungkan.

5. Solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang. Harus menjadi acuan tetap dalam komunikasi dengan lingkungan. Seperti kakek dan nenek tidak mungkin mengambil tindakan terhadap milik yang mereka kuasai tanpa memperhatikan nasib anak cucunya, begitu pula tanggung jawab manusia untuk meninggalkan ekosistem bumi secara utuh dan baik kepada generasi yang akan datang harus menjadi kesadaran yang tetap pada manusia modern (Franz Magnis Suseno, 1993: 154).

## D. Peranan Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial

Sebagai makhluk hidup yang berada di muka bumi ini keberadaan manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dalam arti manusia senantiasa bergantung dan atau berinteraksi dengan sesamanya. Dengan demikian, maka dalam kehidupan lingkungan sosial manusia senantiasa terkait dengan interaksi antara individu manusia, interaksi antarkelompok, kehidupan sosial manusia dengan lingkungan hidup dan alam sekitarnya, berbagai proses sosial dan interaksi sosial, dan berbagai hal yang timbul akibat aktivitas manusia seperti perubahan sosial. Secara sosial sebenarnya manusia merupakan makhluk individu dan sosial yang mempunyai kesempatan yang sama dalam berbagai hidup dan kehidupan dalam masyarakat. Artinya, setiap individu manusia memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dalam menguasai sesuatu, misalnya bersekolah, melakukan pekerjaan, bertanggung jawab dalam keluarga, serta berbagai aktivitas ekonomi, politik, dan bahkan beragama. Meskipun demikian, kenyataannya setiap individu tidak dapat menguasai atau mempunyai kesempatan yang sama. Akibatnya, masing-masing individu mempunyai peran dan kedudukan yang tidak sama atau berbeda. Banyak faktor yang menyebabkan itu bisa terjadi, misalnya kondisi ekonomi (ada si miskin dan si kaya), sosial (warga biasa dengan pak RT, dan lain-lain), politik (aktivis partai dengan rakyat biasa), budaya (jago tari daerah dengan tidak) bahkan individu atau sekelompok manusia itu sendiri. Dengan kata lain, stratifikasi sosial mulai muncul dan tampak dalam kehidupan masyarakat tersebut.

## E. Dilema Antara Kepentingan Individu dan Kepentingan Sosial

Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial selalu terdiri dari dua kepentingan, yaitu kepentingan individu yang termasuk kepentingan keluarga, kelompok, atau golongan dan kepentingan masyarakat yang termasuk kepentingan rakyat. Dalam diri manusia, kedua kepentingan itu satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu kepentingan tersebut hilang dari diri manusia, akan terdapat satu manusia yang tidak bisa membedakan suatu kepentingan, jika kepentingan individu yang hilang dia menjadi lupa pada keluarganya, jika kepentingan masyarakat yang dihilangkan dari diri manusia banyak timbul masalah kemasyarakatan contohnya korupsi. Inilah yang menyebabkan kebingungan atau dilema manusia jika mereka tidak bisa membagi kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Persoalan pengutamaan kepentingan individu atau masyarakat ini memunculkan dua pandangan yang berkembang menjadi paham/aliran bahkan ideologi yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat. Adapun Ariska mengemukakan dua pandangan, yaitu pandangan individualisme dan pandangan sosialisme. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut kami sajikan uraiannya.

### 1. Pandangan Individualisme

Individualisme berpangkal dari konsep bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu yang bebas. Paham ini memandang manusia sebagai makhluk pribadi yang utuh dan lengkap terlepas dari manusia yang lain. Pandangan individualisme berpendapat bahwa kepentingan individu adalah yang harus diutamakan. Yang menjadi sentral individualisme adalah kebebasan seorang individu untuk merealisasikan dirinya. Paham individualisme menghasilkan ideologi liberalisme. Paham ini bisa disebut juga ideologi individualisme liberal.

Paham individualisme liberal muncul di Eropa Barat (bersama paham sosialisme) pada abad ke-18-19, yang dipelopori oleh Jeremy Betham, John Stuart Mill, Thomas Hobben, John Locke, Rousseau, dan Montesquieu. Beberapa prinsip yang dikembangkan ideologi liberalisme adalah sebagai berikut.

- a. Penjaminan hak milik perorangan. Menurut paham ini, pemilikan sepenuhnya berada pada pribadi dan tidak berlaku hak milik berfungsi sosial, mementingkan diri sendiri atau kepentingan individu yang bersangkutan.
- b. Pemberian kebebasan penuh pada individu. Persaingan bebas untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Kebebasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan diri bisa menimbulkan persaingan dan dinamika kebebasan antarindividu. Menurut paham liberalisme, kebebasan antarindividu tersebut bisa diatur melalui penerapan hukum. Jadi, negara yang menjamin keadilan dan kepastian hukum mutlak diperlukan dalam rangka mengelola kebebasan agar tetap menciptakan tertibnya penyelenggaraan hidup bersama.

## 2. Pandangan Sosialisme

Paham sosialisme ditokohi oleh Robert Owen dari Inggris (1771-1858), Louis Blanc, dan Proudhon. Pandangan ini menyatakan bahwa kepentingan masyarakatlah yang diutamakan. Kedudukan individu hanyalah objek dari masyarakat. Menurut pandangan sosialis, hak-hak individu sebagai hak dasar hilang. Hak-hak individu timbul karena keanggotaannya dalam suatu komunitas atau kelompok.

Sosialisme adalah paham yang mengharapkan terbentuknya masyarakat yang adil, selaras, bebas, dan sejahtera, bebas dari penguasaan individu atas hak milik dan alat-alat produksi. Sosialisme muncul dengan maksud kepentingan masyarakat secara keseluruhan terutama yang tersisih oleh sistem liberalisme, mendapat keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan. Untuk meraih hal tersebut, sosialisme berpandangan bahwa hak-hak individu harus diletakkan dalam kerangka kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dalam sosialisme yang radikal/ekstrem (Marxisme/komunisme) cara untuk meraih hal itu adalah dengan menghilangkan hak pemilikan dan penguasaan alat-alat produksi oleh perorangan. Paham Marxisme/komunisme dipelopori oleh Karl Marx (1818-1883).

Paham individualisme liberal dan sosialisme saling bertolak belakang dalam memandang hakikat manusia. Dalam *Declaration of Independent Amerika Serikat 1776*, orientasinya lebih ditekankan pada hakikat manusia sebagai makhluk individu yang bebas merdeka, manusia adalah pribadi yang memiliki harkat dan martabat yang luhur, sedangkan dalam Manifesto Komunisme Karl Marx dan Engels, orientasinya sangat menekankan pada

hakikat manusia sebagai makhluk sosial semata. Menurut paham ini manusia sebagai makhluk pribadi yang tidak dihargai. Pribadi dikorbankan untuk kepentingan negara.

Dari kedua paham tersebut terdapat kelemahannya masing-masing. Individualisme liberal dapat menimbulkan ketidakadilan, berbagai bentuk tindakan tidak manusiawi, imperialisme, dan kolonialisme. Liberalisme mungkin membawa manfaat bagi kehidupan politik, tetapi tidak dalam lapangan ekonomi dan sosial. Sosialisme dalam bentuk yang ekstrem, tidak menghargai manusia sebagai pribadi sehingga bisa merendahkan sisi kemanusiaan. Dalam negara komunis mungkin terjadi kemakmuran, tetapi kepuasan rohani manusia belum tentu terjamin.

Negara Indonesia berfalsafahkan Pancasila, hakikat manusia dipandang memiliki sifat pribadi sekaligus sosial secara seimbang. Menurut filsafat Pancasila, manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, yang secara hakikat bahwa kedudukan manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Bangsa Indonesia memiliki prinsip penempatan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Namun, demi kepentingan bersama tidak harus dengan mengorbankan hak-hak dasar setiap warga negara.



## BAB 5

# HAKIKAT NILAI, NORMA, DAN MORAL SOSIAL

## A. Nilai Sosial

### 1. Pemahaman tentang Nilai

Apa yang dimaksud dengan nilai? Secara sederhana, nilai merupakan suatu hal yang dianggap baik atau buruk bagi kehidupan. Nilai merupakan sesuatu yang abstrak, tetapi hal tersebut menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat. Contohnya, orang menganggap menolong bernilai baik dan mencuri bernilai buruk. Adapun nilai sosial adalah penghargaan yang diberikan masyarakat terhadap segala sesuatu yang terbukti memiliki daya guna fungsional bagi kehidupan bersama. Woods mendefinisikan nilai sosial sebagai petunjuk umum yang telah berlangsung lama, yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap penghargaan akan berbeda, bergantung pada besar atau kecilnya fungsi seseorang, misalnya presiden mendapat nilai sosial yang lebih luas dibandingkan dengan bupati karena fungsi presiden lebih luas dibandingkan dengan bupati. Pesawat terbang akan memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan bus atau kereta api karena fungsinya yang

memberikan ketepatan waktu dan jasa pelayanannya. Demikian juga untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, harus melalui proses menimbang. Hal tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat. Akibatnya, antara masyarakat yang satu dan yang lain terdapat perbedaan tata nilai. Masyarakat perkotaan umumnya lebih menyukai nilai persaingan karena dalam persaingan akan muncul pembaruan-pembaruan. Pada masyarakat pedesaan atau masyarakat tradisional, persaingan cenderung dihindari karena dalam persaingan dapat mengganggu keharmonisan dan tradisi yang sifatnya turun-temurun.

Nilai sosial dapat pula berupa gagasan dari pengalaman yang berarti ataupun tidak, bergantung pada penafsiran setiap individu atau masyarakat yang memberikan atau menerimanya. Pengalaman baik akan menghasilkan nilai positif sehingga nilai yang bersangkutan dijadikan pegangan, seperti menepati janji, tepat waktu, dan disiplin. Adapun pengalaman buruk akan menghasilkan nilai negatif sehingga nilai yang demikian akan dihindari. Misalnya, seseorang mengalami pengalaman buruk, karena dibohongi orang lain, akan menghindari orang tersebut. Hal ini disebabkan oleh pengalaman negatif akan menghasilkan nilai negatif. Dengan demikian, nilai akan menjadi kaidah yang mengatur kepentingan hidup pribadi ataupun kepentingan hidup bersama sehingga nilai dapat dijadikan etika.

Pembahasan tentang nilai pada dasarnya merupakan kajian filsafat, khususnya bidang filsafat yang disebut aksiologi. Pertanyaan atau pemikiran kefilosofan yang cirinya, antara lain kritis dan mendalam, di sini dimulai dengan pertanyaan: Apakah hakikat nilai itu? Dalam berbahasa sehari-hari sering kali kita mendengar atau membaca kata penilaian, yang kata asalnya adalah nilai. Nilai yang dalam bahasa Inggrisnya adalah *value* biasa diartikan sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Maksudnya adalah harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Bambang Daroeso (1986: 20) mengemukakan bahwa nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu, yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Darji Darmodiharjo (1995: 1) mengatakan bahwa nilai adalah kualitas atau keadaan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik lahir maupun batin.

Sementara itu, Widjaja (1985: 155) mengemukakan bahwa menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain (sebagai standar), untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan itu dapat menyatakan: berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, indah atau tidak indah, baik atau tidak baik, dan seterusnya.

Menurut Fraenkel, sebagaimana dikutip oleh Soenarjati Moehadjir dan Cholisin (1989: 25), nilai pada dasarnya disebut sebagai standar penuntun dalam menentukan sesuatu itu baik, indah, berharga atau tidak.

Fronzizi (1963: 1-2) mengemukakan bahwa aksiologi adalah cabang filsafat yang berusaha menjawab pertanyaan, apakah sesuatu itu dikatakan bernilai karena memang benar-benar bernilai, atau apakah sesuatu itu karena dinilai, maka menjadi bernilai? Di antara para ahli terdapat perbedaan pendapat tentang sifat nilai dari sesuatu, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa nilai itu bersifat subjektif dan nilai itu bersifat objektif. Pengertian nilai itu bersifat subjektif, artinya bahwa nilai dari suatu objek itu bergantung pada subjek yang menilainya. Sebagai ilustrasi, pohon-pohon kelapa yang batangnya bengkok di suatu pantai sangat mungkin memiliki nilai bagi seorang seniman, tetapi tidak bernilai bagi seorang pedagang kayu bangunan. Sebuah bangunan tua warisan zaman Belanda yang sudah keropos sangat mungkin memiliki nilai bagi sejarawan, tapi tidak demikian halnya bagi orang lain.

Pandangan bahwa nilai itu subjektif sifatnya, antara lain dianut oleh Bertens (1993: 140-141), yang mengatakan bahwa nilai berperan dalam suasana apresiasi atau penilaian dan akibatnya suatu objek akan dinilai secara berbeda oleh berbagai orang. Untuk memahami tentang nilai, ia membandingkannya dengan fakta. Ia mengilustrasikan dengan objek peristiwa letusan sebuah gunung pada suatu saat tertentu. Hal itu dapat dipandang sebagai suatu fakta, yang oleh para ahli dapat digambarkan secara objektif. Misalnya, para ahli dapat mengukur tingginya awan panas yang keluar dari kawah, kekuatan gempa yang menyertai letusan itu, jangka waktu antara setiap letusan dan sebagainya. Selanjutnya bersamaan dengan itu, objek peristiwa tersebut dapat dipandang sebagai nilai. Bagi wartawan foto, peristiwa letusan gunung tersebut merupakan kesempatan emas untuk mengabadikan kejadian yang langka dan tidak mudah disaksikan oleh setiap orang. Sementara itu, bagi petani di sekitarnya, letusan gunung yang debu panasnya menerjang tanaman petani yang hasilnya hampir dipanen, peristiwa itu dipandang sebagai musibah (catatan: ilustrasi yang dicontohkan oleh Bertens tersebut sesungguhnya masih dapat dikritisi sebab di situ tidak dibedakan antara peristiwa letusan gunung itu sendiri dengan akibat dari letusan gunung).

Berdasarkan ilustrasi tersebut, Bertens menyimpulkan bahwa nilai memiliki sekurang-kurangnya tiga ciri. *Pertama* nilai berkaitan dengan subjek. Kalau tidak ada subjek yang menilai, maka juga tidak ada nilai. *Kedua*, nilai tampil dalam suatu konteks praktis, di mana subjek ingin membuat

sesuatu. Dalam pendekatan yang semata-mata teoretis, tidak akan ada nilai. Dalam hal ini ia mengajukan pertanyaan terhadap pandangan idealis, apakah pendekatan yang murni teoretis dapat diwujudkan? *Ketiga*, nilai menyangkut sifat-sifat yang “ditambah” oleh subjek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh objek. Nilai tidak dimiliki oleh objek pada dirinya.

Sementara itu, menurut para filsuf pada zaman Yunani Kuno, seperti Plato dan Aristoteles, nilai itu bersifat objektif. Artinya, nilai suatu objek itu melekat pada objeknya dan tidak bergantung pada subjek yang menilainya. Menurut Plato, dunia konsep, dunia ide, dan dunia nilai merupakan dunia yang senyatanya dan tetap. Menurut Brandt, sebagaimana dikutip oleh T. Sulistyono (1995: 14), sifat kekekalan itu melekat pada nilai. Demikian pula pandangan tokoh-tokoh aliran Realisme Modern, seperti Spoulding, hakikat nilai lebih utama daripada pemahaman psikologis. Pemahaman manusia terhadap suatu objek hanyalah merupakan bagian dari dunia pengalamannya, yang tidak jarang saling bertentangan serta tidak konsisten. Berbeda dengan manusia yang sifatnya “bergantung”, maka subsistensi nilai itu bebas dari pemahaman maupun interest manusia.

Menghadapi kontroversi pemahaman tentang nilai ini, maka di pihak lain dikenal adanya penggolongan nilai intrinsik dan nilai instrumental. Meskipun telah dibahas sebelumnya, di sini masih perlu dikemukakan pertanyaan, adakah sesuatu yang bernilai, meskipun tidak ada orang yang memberi nilai kepadanya? Ini berarti, apakah nilai itu terkandung di dalam objeknya? Sementara pertanyaan lain, apakah nilai itu merupakan kualitas objek yang diberikan oleh subjek yang memberinya nilai? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Kattsoff (1996: 328-329) memberikan ilustrasi tentang nilai sebuah pisau. Apakah suatu pisau dikatakan baik, karena memiliki kualitas pengirisan atau kualitas ketajaman di dalam dirinya? Atau, apakah suatu pisau saya katakan baik, karena dapat saya gunakan untuk mengiris? Terhadap pertanyaan pertama, jika jawabannya “ya”, maka inilah yang disebut nilai intrinsik. Terhadap pertanyaan kedua, jika jawabannya “ya”, maka inilah yang disebut nilai instrumental. Diskusi ini masih bisa berlanjut sebab dalam kenyataannya ada sesuatu yang diinginkan orang meskipun sesuatu yang diinginkan itu secara intrinsik tidak bernilai atau bahkan bersifat merugikan.

Pendapat yang lebih komprehensif dan sekaligus mengambil jalan tengah dikemukakan oleh Ducasse, yang menyatakan bahwa nilai itu ditentukan oleh subjek yang menilai dan objek yang dinilai. Sebagai contoh, emas dan permata itu merupakan barang-barang yang bernilai, tetapi

nilai dari emas dan permata itu baru akan menjadi nyata (riil) apabila ada subjek yang menilainya. Dengan demikian, nilai itu merupakan hasil interaksi antara subjek yang menilai dan objek yang dinilai.

## 2. Macam-Macam Nilai

Secara aksiologis, nilai itu dibagi macamnya menurut kualitas nilainya, yaitu ke dalam nilai baik dan buruk yang dipelajari oleh etika, dan nilai indah dan tidak indah yang dipelajari oleh estetika. Namun, macam-macam nilai kemudian berkembang menjadi beraneka ragam, bergantung pada kategori penggolongannya. Sebagai contoh, dikenal adanya nilai kemanusiaan, nilai sosial, nilai budaya, nilai ekonomis, nilai praktis, nilai teoretis, dan sebagainya. Nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya termasuk jenis nilai yang didasarkan pada kategori bidang dari objek nilai, sedangkan nilai praktis, nilai teoretis dan sebagainya termasuk jenis nilai yang didasarkan pada kategori kegunaan objek nilai itu. Dengan demikian, ragam nilai dapat menjadi sangat banyak, bahkan semua yang ada ini mengandung nilai. Dengan kata lain, nilai itu dapat melekat pada apa saja, baik benda, keadaan, peristiwa, dan sebagainya.

Robert W. Richey sebagaimana dikutip oleh T. Sulistyono (1991: 15) membagi nilai menjadi tujuh macam, yaitu (1) nilai intelektual, (2) nilai personal dan fisik, (3) nilai kerja, (4) nilai penyesuaian, (5) nilai sosial, (6) nilai keindahan, dan (7) nilai rekreasi. Sementara itu, Notonagoro dalam (Elly M Setiadi dkk, 2013: 118) membagi nilai menjadi tiga macam, sebagai berikut.

- a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia.
- b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas.
- c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, yang meliputi:
  - 1) nilai kebenaran atau kenyataan-kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia (rasio, budi, cipta);
  - 2) nilai keindahan yang bersumber pada rasa manusia (perasaan, estetis);
  - 3) nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada kehendak atau kemauan manusia (karsa, etis);
  - 4) nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan, nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak.

Sementara Bagja Waluya (2009: 27) membagi nilai ke dalam lima aspek, sebagai berikut.

- a. Nilai Sosial, yaitu sesuatu yang sudah melekat di masyarakat yang berhubungan dengan sikap dan tindakan manusia. Contohnya, setiap tindakan dan perilaku individu di masyarakat, selalu mendapat perhatian dan berbagai macam penilaian.
- b. Nilai kebenaran, yaitu nilai yang bersumber pada unsur akal manusia (rasio, budi, dan cipta). Nilai ini merupakan nilai yang mutlak sebagai suatu hal yang kodrati. Tuhan memberikan nilai kebenaran melalui akal pikiran manusia. Contohnya, seorang hakim yang bertugas memberi sanksi kepada orang yang diadili.
- c. Nilai keindahan, yaitu nilai yang bersumber pada unsur rasa manusia (estetika). Keindahan bersifat universal. Semua orang memerlukan keindahan. Namun, setiap orang berbeda-beda dalam menilai sebuah keindahan. Contohnya, sebuah karya seni tari merupakan suatu keindahan. Namun, tarian yang berasal dari suatu daerah dengan daerah lainnya memiliki keindahan yang berbeda, bergantung pada perasaan orang yang memandangnya.
- d. Nilai kebaikan atau nilai moral, yaitu nilai yang bersumber pada kehendak atau kemauan (karsa, etik). Dengan moral, manusia dapat bergaul dengan baik antarsesamanya. Contohnya, berbicara dengan orang yang lebih tua dengan tutur bahasa yang halus, merupakan etika yang tinggi nilainya.
- e. Nilai religius, yaitu nilai ketuhanan yang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber pada hidayah dari Tuhan Yang Mahakuasa. Melalui nilai religius, manusia mendapat petunjuk dari Tuhan tentang cara menjalani kehidupan. Contohnya, untuk dapat berhubungan dengan Tuhan, seseorang harus beribadah menurut agamanya masing-masing. Semua agama menjunjung tinggi nilai religius. Namun, tata caranya berbeda-beda. Hal ini karena setiap agama memiliki keyakinan yang berbeda-beda.

Nilai-nilai tersebut menjadi kaidah atau patokan bagi manusia dalam melakukan tindakannya. Misalnya, untuk menentukan makanan yang baik bagi kesehatan tubuh, kita harus berdasar pada nilai gizi dan bersih dari kuman. Namun, ada nilai lain yang masih harus dipertimbangkan seperti halal tidaknya suatu makanan tertentu. Dengan demikian, nilai berperan dalam kehidupan sosial sehari-hari, sehingga dapat mengatur pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

### 3. Ciri-Ciri Nilai Sosial

Lebih lanjut Bagja Waluya (2009: 28) memberikan ciri-ciri dari nilai sosial secara lebih terperinci sebagai berikut.

- a. Hasil dari proses interaksi antarmanusia secara intensif dan bukan bawaan sejak lahir. Contohnya, seorang anak yang biasa menerima “nilai” menghargai waktu karena didikan orangtuanya yang mengajarkan disiplin sejak kecil.
- b. Ditransformasikan melalui proses belajar meliputi sosialisasi, akulturasi, dan difusi. Contohnya, nilai “menghargai kerja sama” dipelajari anak dari sosialisasi dengan teman-teman sekolahnya.
- c. Berupa ukuran atau peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Contohnya, nilai memelihara ketertiban lingkungan menjadi ukuran tertib tidaknya seseorang, sekaligus menjadi aturan yang wajib diikuti.
- d. Berbeda-beda pada tiap kelompok manusia atau bervariasi antara kebudayaan yang satu dan yang lain. Contohnya, di negara-negara maju manusianya sangat menghargai waktu, keterlambatan sulit ditoleransi. Sebaliknya di Indonesia, keterlambatan dalam jangka waktu tertentu masih dapat dimaklumi.
- e. Setiap nilai memiliki pengaruh yang berbeda-beda bagi tindakan manusia. Contohnya, nilai mengutamakan uang di atas segalanya membuat orang berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, jika nilai kebahagiaan dipandang lebih penting daripada uang, orang akan lebih mengutamakan hubungan baik dengan sesama.
- f. Memengaruhi perkembangan kepribadian individu sebagai anggota masyarakat, baik positif maupun negatif. Contohnya, nilai yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi akan melahirkan individu yang egois. Adapun nilai yang lebih mengutamakan kepentingan bersama akan membuat individu tersebut lebih peka secara sosial.

Dari ciri-ciri tersebut, nilai merupakan suatu kebutuhan manusia yang digunakan untuk pedoman hidup tentang suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan atau suatu perbuatan yang seharusnya dihindari. Pengalaman seseorang akan menjadi sebuah nilai yang dapat bersifat positif dan negatif bagi dirinya, Waluya (2009: 29).

Berdasarkan ciri-ciri nilai tersebut, nilai sosial dapat diklasifikasikan lagi menjadi nilai dominan dan nilai yang mendarah daging (*internalized value*). Adapun pengertian dari nilai dominan adalah nilai yang dianggap

lebih penting dibandingkan nilai-nilai lainnya. Suatu masyarakat yang menganggap suatu nilai dominan atau tidak, didasarkan pada berbagai pertimbangan, sebagai berikut.

- a. Banyaknya orang yang menganut suatu nilai. Contohnya di zaman reformasi saat ini, sebagian besar anggota masyarakat menghendaki adanya perubahan ke arah yang lebih baik di segala bidang, seperti ekonomi, politik, hukum, dan sosial.
- b. Masyarakat telah memegang nilai tersebut dalam waktu yang lama. Contohnya, sejak dulu masyarakat Yogyakarta melaksanakan tradisi “sekatenan” untuk memperingati maulid Nabi Muhammad Saw.
- c. Tinggi rendahnya usaha orang untuk melaksanakan suatu nilai. Contohnya, “pulang kampung” sudah menjadi tradisi masyarakat di Indonesia saat menjelang hari lebaran dan natal.
- d. Adanya kebanggaan dari orang yang melaksanakan suatu nilai. Contohnya memiliki mobil mewah dapat memberikan kebanggaan tersendiri.

Adapun “nilai yang mendarah daging” adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga ketika seseorang melakukannya kadang tidak melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi (bawah sadar). Biasanya nilai demikian telah tersosialisasi dan terbentuk sejak kecil. Jika nilai ini tidak dilakukan, akan muncul rasa malu atau rasa bersalah. Contohnya, seorang siswa yang memiliki kebiasaan rajin belajar akan merasa malu dan bersalah apabila dia gagal dalam mengikuti ujian. Berbeda halnya dengan siswa yang malas, dia tidak akan malu atau merasa bersalah jika gagal ujian (Bagja Waluya, 2009: 29).

#### 4. Fungsi Nilai

Bagi manusia, nilai berfungsi sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam segala tingkah laku, dan perbuatannya. Nilai mencerminkan kualitas pilihan tindakan dan pandangan hidup seseorang dalam masyarakat. Kehidupan bersama di masyarakat memerlukan pengertian yang harus diperhatikan, yaitu pembentukan pribadi manusia sebagai warga masyarakat. Dengan demikian, kemajuan masyarakat dan perkembangan sosial budaya dapat tercapai. Dari ketiga hal tersebut, ditetapkan fungsi nilai sosial sebagai berikut (Bagja Waluya, 2009:29).

## a. Sebagai Faktor Pendorong

Tinggi rendahnya individu dan satuan manusia dalam masyarakat bergantung pada tinggi rendahnya nilai sosial yang menjiwai mereka. Apabila nilai sosial dijunjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat, maka harapan ke arah kemajuan bangsa bisa terencana. Hal ini merupakan cita-cita untuk menjadi manusia yang berbudi luhur dan beradab sehingga nilai sosial ini memiliki daya perangsang sebagai pendorong untuk menjadi masyarakat yang ideal (Bagja Waluya, (2009:29).

## b. Sebagai Petunjuk Arah

Nilai sosial menunjukkan cita-cita masyarakat atau bangsa. Adapun nilai sosial sebagai petunjuk arah tergambar dalam contoh berikut ini.

- 1) Cara berpikir dan bertindak warga masyarakat secara umum diarahkan oleh nilai-nilai sosial yang berlaku. Setiap pendatang baru harus dapat menyesuaikan diri dan menjunjung tinggi nilai sosial masyarakat yang didatanginya agar tidak tercela, yang menyebabkan pandangan masyarakat menjadi kurang simpati terhadap dirinya. Dengan demikian, pendatang baru dapat menghindari hal yang dilarang atau tidak disenangi masyarakat dan mengikuti pola pikir serta pola tindakan yang diinginkan.
- 2) Nilai sosial suatu masyarakat berfungsi pula sebagai petunjuk bagi setiap warganya untuk menentukan pilihan terhadap jabatan dan peranan yang akan diambil. Misalnya, dalam memilih seorang pemimpin yang cocok bukan saja berdasarkan kedudukan seseorang, melainkan juga berdasarkan kualitas yang dimiliki, atau menentukan posisi seseorang sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Nilai sosial berfungsi sebagai sarana untuk mengukur dan menimbang penghargaan sosial yang patut diberikan kepada seseorang atau golongan.
- 4) Nilai sosial berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan orang banyak dalam kesatuan atau kelompok tertentu (Bagja Waluya, 2009:30).

## c. Sebagai Benteng Perlindungan

Pengertian benteng di sini berarti tempat yang kokoh karena nilai sosial merupakan tempat perlindungan yang kuat dan aman terhadap rongrongan dari luar sehingga masyarakat akan senantiasa menjaga dan

mempertahankan nilai sosialnya. Misalnya, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai Pancasila. Pengkhianatan G 30 S/PKI terhadap Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti sejarah bangsa Indonesia, tetapi dengan keyakinan bahwa Pancasila harus tetap tegak dari setiap usaha yang akan meruntuhkannya maka pengkhianatan tersebut dapat dipatahkan.

## B. Norma Sosial

Di dalam masyarakat, selain terdapat nilai yang dijadikan landasan sikap dalam melakukan tindakan dan perilaku, juga terdapat norma yang dijadikan landasan aturan sebagaimana hukum. Norma menjadi pedoman bagaimana individu seharusnya bertindak, bersikap, dan menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan ini muncul secara turun-temurun, dan biasanya akan terus menjadi tradisi dari nenek moyang sampai generasi di bawahnya jika tidak ada pengaruh yang muncul dari luar. Misalnya, kebudayaan barat yang gencar masuk melalui media massa yang ada sekarang. Norma sosial yang ada pun sudah bergeser pada bentuk norma sosial lain yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Pembahasan terhadap norma ini terkesan abstrak, tetapi hal ini sedikit-sedikit bisa kita pahami jika kita teliti membaca pembahasan selanjutnya.

Contoh Studi Kasus:

*Seorang pengendara sepeda bermotor melaju di jalan raya dengan kecepatan tinggi, lebih dari 80 km/jam, dan menerobos lampu merah kemudian dihentikan oleh polisi. Pengendara tersebut ditilang karena melampaui batas kecepatan di jalan raya dan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran tersebut pada akhirnya bisa ditebus dengan uang.*

Bagaimana tanggapan Anda terhadap kasus tersebut, deskripsikan!

Mengapa polisi melakukan tindakan tersebut? Penyebabnya pengendara tadi membahayakan pengguna jalan lainnya, dan penerobosan lampu merah dapat mengakibatkan tabrakan dengan kendaraan lain. Selanjutnya, hal itu merupakan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas sehingga harus diberikan sanksi (Bagja Waluya, 2009: 31).

# 1. Pengertian Norma

Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari, berdasarkan suatu alasan (motivasi) tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi adalah ancaman/akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan (Widjaja, 1985: 168).

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu terdapat aturan atau kaidah yang mengatur kehidupan bersama, baik berupa suatu keharusan, anjuran, maupun larangan. Aturan atau kaidah tersebut sering disebut sebagai norma. Norma merupakan pedoman atau patokan bagi perilaku dan tindakan seseorang atau masyarakat yang bersumber pada nilai.

Ada hubungan yang erat antara nilai dan norma. Norma yang ada dalam masyarakat merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Jika nilai adalah sesuatu yang baik, diinginkan, dan dicita-citakan oleh masyarakat, norma merupakan aturan bertindak atau berbuat yang dibenarkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Jika dianalogikan dengan minum kopi, kenikmatan yang diperoleh dari minum kopi merupakan nilainya. Adapun tindakan mencampurkan kopi dan gula secara proporsional untuk mendapatkan kenikmatan tersebut adalah normanya. Dengan kata lain, norma adalah wujud konkret dari nilai yang merupakan pedoman. Norma berisi suatu keharusan bagi individu atau masyarakat dalam berperilaku. Norma dianggap positif jika dianjurkan atau diwajibkan oleh lingkungan sosialnya. Adapun norma dianggap negatif jika tindakan atau perilaku seseorang dilarang dalam lingkungan sosialnya. Oleh karena norma sosial merupakan ukuran untuk berperilaku agar individu dapat menyesuaikan diri dengan norma yang telah disepakati, maka diperlukan adanya sanksi bagi individu yang melanggar norma.

Norma merupakan standar atau skala yang terdiri atas berbagai kategori perilaku agar terjadi keteraturan di masyarakat. Norma muncul dan tumbuh sebagai hasil dari proses bermasyarakat. Pada mulanya, norma-norma yang terdapat dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja. Namun, lama-kelamaan norma tersebut dibuat dengan sadar dan disengaja. Contohnya, dahulu di dalam perjanjian jual beli, seorang perantara tidak harus diberi bagian dari keuntungan, tetapi lama-kelamaan terjadi kebiasaan bahwa perantara harus mendapat bagiannya. Bahkan, selanjutnya ditentukan siapa yang harus menanggung pembagian tersebut, penjual atau pembeli.

Contoh lain, misalnya dahulu pinjam meminjam uang didasarkan pada saling percaya, tetapi setelah terjadinya penyelewengan-penyelewengan, maka

ditetapkanlah perjanjian secara tertulis sebagai jaminannya. Unsur pokok norma sosial adalah tekanan sosial terhadap anggota-anggota masyarakat untuk menjalankan norma yang berlaku. Apabila di masyarakat terdapat suatu aturan, tetapi tidak dikuatkan oleh desakan sosial, aturan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai norma sosial. Oleh karena itu, aturan dapat dikatakan sebagai norma sosial apabila mendapat sifat kemasyarakatan yang dijadikan patokan dalam tindakan atau perilaku.

Dengan demikian, jika dilihat dari kebudayaan yang berlaku di masyarakat, akan terdapat dua arti norma yang memungkinkan. *Pertama*, disebut norma budaya, yaitu aturan terhadap perilaku individu atau kelompok yang diharapkan oleh masyarakat. *Kedua*, disebut norma statis, yaitu suatu ukuran perilaku yang sebenarnya berlaku di masyarakat, baik yang disetujui maupun tidak (Bagja Waluya, 2009: 32).

## 2. Macam-Macam Norma

Dalam kehidupan umat manusia terdapat bermacam-macam norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan lain-lain. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum digolongkan sebagai norma umum (Widjaja, 1985: 153). Selain itu, dikenal juga adanya norma khusus, seperti aturan permainan, tata tertib sekolah, tata tertib pengunjung tempat bersejarah, dan lain-lain.

### a. Norma Agama

Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan, yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Aturan-aturan itu tidak saja mengatur hubungan vertikal, antara manusia dengan Tuhan (ibadah), tapi juga hubungan horizontal, antara manusia dengan sesama manusia. Pada umumnya setiap pemeluk agama meyakini bahwa barang siapa yang mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan akan memperoleh pahala. Sebaliknya barang siapa yang melanggarnya akan berdosa dan sebagai sanksinya, ia akan memperoleh siksa. Sikap dan perbuatan yang menunjukkan kepatuhan untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya tersebut disebut takwa.

## b. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk, yang berupa “bisikan-bisikan” atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Berdasar kodrat kemanusiaannya, hati nurani setiap manusia “menyimpan” potensi nilai-nilai kesusilaan. Hal ini analog dengan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia karena kodrat kemanusiaannya, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena potensi nilai-nilai kesusilaan itu tersimpan pada hati nurani setiap manusia (yang berbudi), maka hati nurani manusia dapat disebut sebagai sumber norma kesusilaan. Ini sejalan dengan pendapat Widjaja tentang moral dihubungkan dengan etika, yang membicarakan tata susila dan tata sopan santun. Tata susila mendorong untuk berbuat baik, karena hati kecilnya menganggap baik, atau bersumber dari hati nuraninya, lepas dari hubungan dan pengaruh orang lain (Widjaja, 1985: 154). Tidak jarang ketentuan-ketentuan norma agama juga menjadi ketentuan-ketentuan norma kesusilaan sebab pada hakikatnya nilai-nilai keagamaan dan kesusilaan itu berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Demikian pula karena sifatnya yang melekat pada diri setiap manusia, maka nilai-nilai kesusilaan itu bersifat universal. Dengan kata lain, nilai-nilai kesusilaan yang universal tersebut bebas dari dimensi ruang dan waktu, yang berarti berlaku di mana pun dan kapan pun juga. Sebagai contoh, tindak pemerkosaan dipandang sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan, di belahan dunia mana pun dan pada masa kapan pun. Kepatuhan terhadap norma kesusilaan akan menimbulkan rasa bahagia sebab yang bersangkutan merasa tidak mengingkari hati nuraninya. Sebaliknya, pelanggaran terhadap norma kesusilaan pada hakikatnya merupakan pengingkaran terhadap hati nuraninya sendiri sehingga sebagaimana dikemukakan dalam sebuah mutiara hikmah, pengingkaran terhadap hati nurani itu akan menimbulkan penyesalan atau bahkan penderitaan batin. Inilah bentuk sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan.

## c. Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Norma ini biasanya bersumber dari adat istiadat, budaya, atau nilai-nilai masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Widjaja tentang moral

dihubungkan dengan etika, yang membicarakan tentang tata susila dan tata sopan santun. Tata sopan santun mendorong berbuat baik, sekadar lahiriah saja, tidak bersumber dari hati nurani, tetapi sekadar menghargai orang lain dalam pergaulan (Widjaja, 1985: 154). Dengan demikian, norma kesopanan itu bersifat kultural, kontekstual, nasional, atau bahkan lokal. Berbeda dengan norma kesusilaan, norma kesopanan itu tidak bersifat universal. Suatu perbuatan yang dianggap sopan oleh sekelompok masyarakat mungkin saja dianggap tidak sopan bagi sekelompok masyarakat yang lain. Sejalan dengan sifat masyarakat yang dinamis dan berubah, maka norma kesopanan dalam suatu komunitas tertentu juga dapat berubah dari masa ke masa. Suatu perbuatan yang pada masa dahulu dianggap tidak sopan oleh suatu komunitas tertentu mungkin saja kemudian dianggap sebagai perbuatan biasa yang tidak melanggar kesopanan oleh komunitas yang sama. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa norma kesopanan itu bergantung pada dimensi ruang dan waktu. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan adalah berupa celaan, cemoohan, atau diasingkan oleh masyarakat. Namun, sesuai dengan sifatnya yang “tergantung” (relatif), maka tidak jarang norma kesopanan ditafsirkan secara subjektif sehingga menimbulkan perbedaan persepsi tentang sopan atau tidak sopannya perbuatan tertentu. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu ketika seorang pejabat di Jawa Timur sedang didengar kesaksiannya di pengadilan dan ketika seorang terdakwa di ibu kota sedang diadili telah ditegur oleh hakim ketua karena keduanya dianggap tidak sopan dengan sikap duduknya yang “jegang” (menyilangkan kaki). Kasus ini menimbulkan tanggapan pro dan kontra dari berbagai kalangan dan menjadi diskusi yang hangat tentang ukuran kesopanan yang digunakan. Demikian pula halnya ketika advokat kenamaan di ibu kota berkacak pinggang di depan majelis hakim, yang oleh majelis hakim perbuatan itu bukan hanya dinilai tidak sopan, tapi lebih dari itu dinilai sebagai *contempt of court* (penghinaan terhadap pengadilan) sehingga tentu saja mempunyai implikasi hukum.

#### d. Norma Hukum

Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa, demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Sifat “memaksa” dengan sanksinya yang tegas dan nyata inilah yang merupakan kelebihan norma hukum dibanding dengan ketiga norma yang lain. Negara berkuasa untuk memaksakan aturan-

aturan hukum guna dipatuhi dan terhadap orang-orang yang bertindak melawan hukum diancam hukuman. Ancaman hukuman itu dapat berupa hukuman badan atau hukuman benda. Hukuman badan dapat berupa hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara. Di samping itu, masih dimungkinkan pula dijatuhkannya hukuman tambahan, yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan pengadilan. Demi tegaknya hukum, negara memiliki aparat-aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sanksi yang tegas dan nyata, dengan berbagai bentuk hukuman seperti yang telah dikemukakan itu, tidak dimiliki oleh ketiga norma yang lain. Sumber hukum dalam arti materiil dapat berasal dari falsafah, pandangan hidup, ajaran agama, nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat, budaya, sejarah, dan lain-lain.

Dengan demikian, dapat saja suatu ketentuan norma hukum juga menjadi ketentuan norma-norma yang lain. Sebagai contoh, perbuatan mencuri adalah perbuatan melawan hukum (tindak pidana, dalam hal ini kejahatan), yang juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan (asusila), maupun kesopanan (asosial). Jadi, di antara norma-norma tersebut mungkin saja terdapat kesamaan objek materinya, tetapi yang tidak sama adalah sanksinya. Namun, sebagai contoh lagi, seorang yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM, meskipun tidak melanggar norma agama, tetapi melanggar norma hukum.

Selain pembagian norma di atas, Bagja Waluya (2009: 34) menguraikan beberapa norma yang mengatur pola perilaku setiap individu, sebagai berikut.

- a. Norma tidak tertulis (informal) yang dilakukan masyarakat dan telah melembaga, lambat laun akan berupa peraturan tertulis walaupun sifatnya tidak baku dan bergantung pada kebutuhan saat itu di masyarakat. Hal ini dapat juga merupakan gabungan dari *folkways* dan *mores*, seperti pembentukan keluarga, dan cara membesarkan anak. Dari lembaga sosial terkecil sampai masyarakat akan mengenal norma perilaku, nilai cita-cita, dan sistem hubungan sosial. Oleh karena itu, suatu lembaga akan mencakup:
  - 1) seperangkat pola perilaku yang telah distandardisasi dengan baik;
  - 2) serangkaian tata kelakuan, sikap, dan nilai-nilai yang mendukung;
  - 3) sebuah tradisi, ritual, upacara simbolik dan pakaian adat, serta perlengkapan yang lain.
- b. Norma tertulis (formal) biasanya dalam bentuk peraturan atau hukum yang telah dibakukan dan berlaku di masyarakat. Norma ini

umumnya berhubungan dengan kepentingan dan ketenteraman warga masyarakat banyak dan lain-lain. Norma tertulis bertujuan mengatur dan menegakkan kehidupan masyarakat agar merasa tenteram dan aman dari segala gangguan yang dapat meresahkannya. Norma ini disebut juga peraturan atau hukum. Seseorang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dan disetujui masyarakat akan dikenakan sanksi sesuai dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, norma tertulis berupa hukum yang berlaku di masyarakat. Norma tersebut dapat pula berupa peraturan sekolah yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga ketertiban di lingkungan sekolah agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik.

- c. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan individu atau sekelompok masyarakat berupa perbuatan iseng atau meniru tindakan orang lain. Norma ini akan mengaturnya sepanjang perbuatan tersebut tidak menyimpang dari norma masyarakat yang berlaku. Contohnya sebagai berikut.
  - 1) Individu meniru pakaian atau penampilan anggota kelompok musik tertentu yang menjadi idolanya.
  - 2) Potongan rambut gondrong atau dikuncir.
  - 3) Hal yang sifatnya berupa peniruan terhadap mode atau *fashion* yang setiap waktu senantiasa mengalami perubahan (*up to date*) (Bagja Waluya, 2009: 34).

### 3. Kekuatan Norma

Norma-norma yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat memiliki kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang lemah kekuatan mengikatnya, ada juga yang kuat. Berkenaan dengan hal tersebut dikenal ada empat pengertian norma (Bagja Waluya, 2009: 32) sebagai berikut.

- a. Cara (*usage*), yaitu penyimpangan kecil terhadap suatu tindakan, tetapi tidak akan mendapat hukuman yang berat, ganjarannya bersifat hanya celaan. Contohnya, orang yang makan dengan bersuara, atau cara makan tanpa sendok dan garpu.
- b. Kebiasaan (*folkways*), yaitu perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan memiliki kekuatan mengikat yang lebih besar dibandingkan dengan cara. Jika tidak dilakukan dapat dianggap menyimpang dari kebiasaan umum dalam masyarakat. Contohnya, memberi hormat kepada orang lain yang lebih tua, mendahulukan orang lansia ketika sedang antre, dan sebagainya.

- c. Tata kelakuan (*mores*), yaitu kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur.
- d. Adat istiadat (*custom*), yaitu tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat.

Keberadaan norma sangat diperlukan oleh masyarakat dalam hubungan antaranggota masyarakat untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Oleh karena itu, setiap pola kelakuan yang telah dijadikan sebagai norma mengandung unsur “pembenaran,” artinya tindakan tersebut dapat dibenarkan atau diterima oleh banyak orang, dan di luar tindakan tersebut dianggap sebagai kesalahan atau tindakan yang kurang baik. Oleh karena itu pula, norma selalu diikuti dengan sanksi berupa hukuman bagi yang melanggarnya. Sanksi ini diberikan dengan tujuan agar orang mematuhi dan bersamaan dengan itu terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat dapat berlangsung tertib dan aman sesuai dengan yang diharapkan.

#### 4. Fungsi Norma dan Norma Sosial

Norma yang ada dalam masyarakat pada dasarnya adalah untuk mengatur, mengendalikan, memberi arah, memberi sanksi dan ganjaran terhadap tingkah laku masyarakat. Setiap masyarakat selalu memiliki aturan yang mengatur kehidupan agar tertib sosial (Bagja Waluya, 2009: 35). Untuk itu, diperlukan adanya nilai dan norma sosial. Pada dasarnya, masyarakat mengharapkan dan memaksa anggotanya untuk mengikuti norma sosial yang ada. Pelaksanaan nilai dan norma akan selalu dilakukan sejak anak masih kecil. Pada saat pertama kali anak bersosialisasi dengan orang tuanya, mereka akan diajarkan untuk mengikuti perintah orang tuanya, seperti harus membantu orang tua, tidak boleh berbohong, dan berbuat baik kepada orang lain.

## C. Moral Sosial

### 1. Pengertian Moral

Moral diartikan sebagai keadaan baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti dan susila (Anonymous, 2005: 754). Kata moral sendiri berasal dari bahasa Latin *moris* yang berarti adat istiadat, kebiasaan, tata cara dalam kehidupan. Jadi, suatu tingkah laku dikatakan bermoral apabila tingkah laku itu sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam kelompok sosial di mana anak itu hidup (Singgih D Gunarsa, 2003:61).

Moral sering juga disebut dengan istilah watak. Watak adalah ketetapan atau kesamaan dari tingkah laku yang ada hubungannya dengan ukuran-ukuran sosial atau cita-cita spiritual (Carl Witherington, 2003: 61). Dalam terminologi Islam, pengertian moral dapat disamakan dengan pengertian akhlak dan dalam bahasa Indonesia moral dan akhlak maksudnya sama dengan budi pekerti atau kesusilaan.

Kata akhlak berasal dari kata *khalaaqa* (bahasa Arab) yang berarti perangai, tabiat, dan adat istiadat. Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai suatu perangai (watak/tabiat) yang menetap dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa dipikirkan atau direncanakan sebelumnya.

Akhlak menurut Ibn Maskawih adalah suatu keadaan jiwa yang menyebabkan timbulnya perbuatan tanpa melalui pertimbangan dan dipikirkan secara mendalam. Apabila dari perangai tersebut timbul perbuatan baik, maka perbuatan demikian disebut akhlak baik. Demikian pula sebaliknya, jika perbuatan yang ditimbulkannya perbuatan buruk, maka disebut akhlak jelek (Ridwan, 2008: 24).

Dalam pandangan Kohlberg, moral akan dibatasi oleh konstruk lain yang disebut pertimbangan (*judgement*) utamanya karakter formal dari pertimbangan, dan bukan isinya. Pada tingkatan paling tinggi, yaitu *principle* Pertimbangan moral cenderung universal, inklusif, konsisten, impersonal, objektif, dan ideal. Dengan perkataan lain, moral biasanya akan ditentukan tanpa harus mempertimbangkan isi, doktrin atau standar-standar personal tertentu. Oleh karena itu, tidak terlalu salah kalau dikatakan bahwa konsepsi moral menurut Kohlberg tampaknya lebih dekat dengan cara pandang filosofis-formal di mana keadilan dianggap sebagai satu konstruk yang paling tinggi (Cheppy Hericahyono, 1995: 63).

Pertimbangan moral adalah penilaian tentang benar dan baiknya sebuah tindakan. Namun, tidak semua penilaian “baik” dan “benar” itu merupakan pertimbangan moral. Banyak di antaranya justru merupakan penilaian terhadap kebaikan atau kebenaran, estetis, teknologis, atau bijak. Berbeda dengan penilaian terhadap kebijakan atau estetika, penilaian moral cenderung bersifat universal, inklusif, konsisten dan didasarkan pada alasan-alasan yang objektif, impersonal, atau ideal (Lawrence Kohlberg, 1995: 163).

Jadi, moral adalah suatu keadaan baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti, dan susila yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam kelompok sosial.

## 2. Tahap Perkembangan Moral

Menurut Loevenger tahapan perkembangan moral adalah perkembangan ego, yakni perkembangan kualifikasi diri sebagai buah dari berbagai perkembangan internal diri manusia. Kajian moral *orientation* membicarakan masalah dasar/landasan pertimbangan atau perhitungan seseorang dalam menaati, menilai, dan menetapkan ketetapan hati/keputusan akan sesuatu/ sejumlah nilai moral yang dihadapi. Gambaran perkembangan/pertahanan moral (*moral stages*), dan yang melandasi *moral self* atau *moral orientation* adalah *cognitive motivational aspects* dan *affective motivational aspects*.

Adapun faktor yang memengaruhi perkembangan moral, di antaranya kondisi keadaan diri dan lingkungan kehidupannya; waktu dalam pengertian kuantitatif dan kualitatif (darurat/tidaknya); kualifikasi masyarakat/kelompok di mana kita berada; fungsi peran atau kedudukan kita dalam kelompok masyarakat yang bersangkutan; pola dan tatanan nilai moral yang mengikat kita/masyarakat; kualitas diri kita sendiri; dan kebutuhan/interes yang mengikat diri.

### a. Teori Perkembangan

Dalam analisisnya mengenai peraturan permainan, Piaget telah memperlihatkan bahwa anak-anak berkembang melalui tahap rasa hormat pada peraturan, tetapi jalan permainan mereka menunjukkan bahwa mereka hanya meniru saja beberapa aspek dari permainan itu dan tidak memahami keseluruhan peraturan permainan. Pada tahap ini anak sudah sadar akan adanya peraturan, tetapi semua peraturan itu dianggap berasal dari luar

dirinya, sebagai suatu jaringan batasan-batasan yang amat berbelit-belit dan yang mengatur setiap gerak-geriknya. Bila anak sudah berkembang secara sosial dan intelektual, maka akan ada hubungan perkembangan, baik dalam pengertian mengenai peraturan maupun dalam pengertian permainannya sendiri yang harus dimainkan menurut aturan-aturannya.

Dalam bagian mengenai tindakan keliru (*clumsiness*), mencuri dan berbohong, proses perkembangan seperti itu juga kelihatan. Kesadaran anak tentang peraturan merusakkan barang, mencuri dan kesadaran tentang bahasa timbul lebih dahulu daripada pengertian mereka tentang peraturan-peraturan dan kemampuan mereka untuk menerapkan peraturan-peraturan tersebut dalam berbagai situasi. Faktor lain yang menambah kompleksnya perkembangan dalam kehidupan moral anak adalah rasa hormatnya kepada orang dewasa karena orang dewasa yang merumuskan dan memaksakan peraturan-peraturan moral itu kepada anak-anak. Pada tahap-tahap di mana anak hanya sadar akan peraturan-peraturan, tanpa mengertinya benar-benar, pertimbangan anak mengenai benar dan salah didasarkan atas bunyi peraturan. Bila anak telah berkembang secara intelektual dan sosial, maka peraturan-peraturan moral yang berkenaan dengan mencuri, berbuat curang dan berbohong, dipahami dalam konteks kehidupan bersama dan kemudian dijadikan prinsip yang tertanam dalam hati.

Bagian-bagian mengenai pengertian anak tentang keadilan, menunjukkan dengan jelas adanya pengaruh orang dewasa terhadap cara anak mengartikan benar dan salah; menunjukkan juga adanya perbenturan antara pengertian anak dengan otoritas orang dewasa, hal yang esensial bagi perkembangan ke arah otonomi. Anak yang masih kecil menyamakan apa yang *fair* (adil) dengan apa yang diminta atau diperintahkan orang dewasa. Bila anak sudah berkembang secara intelektual dan sosial, penilaiannya mengenai apa yang *fair* ditentukan semata-mata berdasarkan kesamaan hak (*equality*), tanpa memperhitungkan hubungan-hubungan lain, misalnya afeksi, umur atau keadaan badan. Inilah periode pemisahan radikal dari otoritas orang dewasa. Tahap ketiga dalam perkembangan keadilan adalah tahap kesamaan hak dan kewajiban (*equity*). Tahap ini ditandai dengan keinginan anak untuk mempertimbangkan semua hubungan dan keadaan, sebelum menentukan keputusan dalam hal keadilan. Pada saat ini anak sudah melepaskan diri dari pengaruh luar dan dia sudah otonom dalam pertimbangan moralnya.

## b. Teori Kohlberg

Menurut Kohlberg ada empat tahap sifat dalam tahap perkembangan, yaitu: 1) perkembangan tahap selalu sama; 2) dalam perkembangan tahap, subjek tidak dapat memahami penalaran moral tahap di atasnya lebih dari satu tahap; 3) dalam perkembangan tahap, subjek secara kognitif tertarik pada cara berpikir satu tahap di atas tahapnya sendiri; 4) dalam perkembangan tahap, peralihan dari tahap ke tahap terjadi bila diciptakan *disequilibrium* kognitif, yaitu bila pandangan kognitif seseorang tidak mampu lagi menyelesaikan suatu dilema moral yang dihadapinya.

Suatu teori perkembangan diajukan atas dasar tiga asumsi: 1) perkembangan menyangkut perubahan-perubahan dasar dalam struktur, yaitu bentuk, pola organisasi dari suatu respons; 2) perkembangan merupakan hasil dari proses interaksi antara struktur, organisasi dan lingkungan; 3) perkembangan mengarah pada terciptanya *equilibrium* yang semakin besar dalam interaksi antara organisme dengan lingkungan.

## 3. Sosialisasi Nilai-Nilai Moral

Proses belajar ini berlangsung terus-menerus. Melalui proses belajar semacam ini, seseorang juga mempelajari kebiasaan-kebiasaan, norma-norma, perilaku, peran, dan semua aturan yang berlaku di masyarakat. Proses mempelajari unsur-unsur budaya suatu masyarakat inilah yang disebut dengan sosialisasi. Menurut Bruce J. Cohen sosialisasi dipahami sebagai proses pembelajaran seorang individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat sehingga seseorang menjadi bagian dari masyarakat (Joko Sri Sukardi & Arif Rohman, 2009: 100).

Oleh karena itu, sosialisasi menjadi penghubung antara individu dengan masyarakat. Sosialisasi memiliki dua fungsi. Dari pihak individu, sosialisasi merupakan proses sosial yang menjadikan seseorang sebagai bagian dari suatu kebudayaan setelah mengetahui, menghayati, dan melaksanakan seluruh sistem nilai budaya yang ada. Sementara itu, dari kepentingan masyarakat, sosialisasi berfungsi untuk mempertahankan kebudayaan masyarakat tersebut dengan cara mengajar dan membiasakan seseorang agar selaras dengan pelbagai unsur sistem nilai budaya yang berlaku (Joko Sri Sukardi & Arif Rohman, 2009: 100).

Kontradiksi dan disintegrasi antara pendidikan nilai moral di ruang sekolah dan keadaan dalam masyarakat muncul karena beberapa alasan berikut ini.

- a. Penanaman nilai moral dalam dunia pendidikan formal umumnya masih berupa seperangkat teori mentah, terlepas dari realitas hidup masyarakat. Kurang digali akarnya karena terjadinya diskoneksitas antara penanaman nilai moral dan praksis hidup moral dalam masyarakat.
- b. Sebagai lembaga formal yang menyiapkan peserta didik untuk bertindak dan mentransformasi diri sesuai dengan nilai-nilai moral, ternyata sekolah belum memiliki jaringan kerja sama yang erat dengan keluarga asal peserta didik, lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan seluruh masyarakat.
- c. Adanya kesenjangan pandangan hidup antara mereka yang menjunjung tinggi dan melecehkan pesan moral dalam hidup sosial sehari-hari. Masih tumbuh subur kelompok sosial yang menghalalkan dan merestui segala cara dan jalan mencapai sasaran yang digariskan.

Program dalam dunia pendidikan formal akan “berhasil” jika didukung unsur-unsur sosial dalam masyarakat. Tanpa kerja sama dan dukungan antara sosial terkait, sosialisasi nilai-nilai moral sering mendapat kendala. Lembaga apa pun di masyarakat, entah milik pemerintah atau nonpemerintah, perlu mendukung perwujudan nilai-nilai moral yang disemai melalui dunia pendidikan formal. Perilaku yang korup, tak bertanggung jawab, dan manipulatif dengan sendirinya mengkhianati kaidah moral yang ingin diperkenalkan dunia pendidikan formal.

Nilai-nilai moral yang perlu disosialisasikan dan diterapkan di masyarakat kita dewasa ini umumnya mencakup hal-hal berikut ini.

- a. Kebebasan dan otoritas: kebebasan memiliki makna majemuk dalam proses pendidikan formal, nonformal, dan informal. Selama hayat dikandung badan, tak seorang pun memiliki kebebasan mutlak. Manusia perlu berani untuk hidup dan tampil berbeda dari yang lain tanpa melupakan prinsip hidup dalam kebersamaan. Kebebasan manusia pada hakikatnya bukan kebebasan liar, tetapi kebebasan terkontrol. Kebebasan tanpa tanggung jawab mengundang pemegang roda pemerintahan dalam republik ini untuk menyelewengkan kuasa mereka demi kepentingan terselubung mereka. Kekuasaan yang seharusnya diterapkan adalah kekuasaan nutritif yang menyejahterakan hidup rakyat banyak.
- b. Kedisiplinan merupakan salah satu masalah akbar dalam proses membangun negara ini. Kedisiplinan rendah seperti sampah bertebaran; para pemegang kuasa menunjukkan posisi mereka dengan menggunakan “jam karet”; aturan lalu lintas tak pernah sungguh-sungguh ditaati,

tidak sedikit polantas hanya duduk-duduk di bawah pondok di sudut dan mengintai pelanggar lalu lintas; kedisiplinan mengatur lalu lintas memprihatinkan, banyak oknum disiplin dalam tindak kejahatan, seperti korupsi; kedisiplinan dalam penegakan hukum positif terasa lemah sehingga kerusuhan sosial sering terulang di beberapa tempat.

- c. Nurani yang benar, baik, jujur, dan tak sesat berperan penting dalam proses sosialisasi nilai moral dalam negara kita. Hati nurani perlu mendapat pembinaan terus-menerus supaya tak sesat, buta, dan bahkan mati. Para pemegang roda pemerintahan negara kita, para pendidik, peserta didik, dan seluruh masyarakat seharusnya memiliki hati nurani yang terbina baik dan bukan hati nurani “liar” dan sesat. Keadaan sosial negara kita kini adalah cermin hati nurani anak-anak bangsa. Penggelapan dan permainan uang oleh pegawai-pegawai pajak, “pembobolan” uang di bank menunjukkan nurani manusia yang kian korup.

Ternyata bukan tanpa halangan untuk menjalankan pendidikan nilai-nilai moral di tengah kurikulum pendidikan formal yang terasa “mencekik”. Seorang pendidik bisa menanamkan nilai moral dalam sebuah kurikulum dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut.

- a. Terbuka peluang bagi pendidik untuk menggali dan menanamkan nilai-nilai moral di bidang pelajaran yang dipegang selama ini.
- b. Pendidik bisa menyisipkan ajaran tentang nilai moral melalui mitos-mitos rakyat.
- c. Kejelian/kreativitas pendidik menggali identitas nilai moral.

Jelas, penanaman nilai-nilai moral dalam dunia pendidikan formal sama sekali tak bersifat otonom, tetapi selalu terkait dunia lain di luar lingkaran dunia pendidikan formal. Lingkungan keluarga, pengusaha, RT, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, penagih pajak, imigrasi, polisi, tentara, jaksa, pengadilan (negeri, tinggi), mahkamah agung, kabinet, dan presiden seharusnya memiliki dan menghidupi perilaku yang benar-benar mendukung proses penanaman, penerapan, dan sosialisasi nilai-nilai moral yang digalakkan para pendidik. Pemerintah dan masyarakat diharapkan menjadi sekolah yang dapat menyosialisasikan (terutama dalam arti menghidupi) pendidikan nilai-nilai moral.

**READING COPY**



## BAB 6

# PERANAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI

## A. Hukum

### 1. Pengertian Hukum

Hukum merupakan sejumlah norma yang ada di dalam masyarakat atau norma yang akan mengatur tata kelakuan masyarakat (Ramdani Wahyu, 2013: 245). Para ahli hukum memberikan definisi yang berbeda tentang hukum tersebut. Namun, paling tidak ada 8 kategori yang dimaksud dengan hukum, yaitu (1) hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang hukum, (2) hukum adalah sistem ajaran tentang kenyataan, (3) hukum adalah norma atau kaidah, (4) hukum adalah peraturan yang tertulis, (5) hukum adalah keputusan pejabat, (6) hukum adalah petugas, (7) hukum adalah perilaku yang teratur, (8) hukum adalah terjalinya suatu nilai (Soerjono Soekanto, 1984:44).

Dengan demikian, ketika seseorang membahas tentang hukum tentu harus mengacu pada pengertian hukum yang mana yang dijadikan bahasan, seperti halnya orang mengatakan hukum itu tidak adil, maka kata hukum tersebut merujuk pada arti suatu putusan pejabat, bukan hukum sebagai ilmu atau pengertian lainnya (Ramdani Wahyu, 2013: 245).

## 2. Fungsi Hukum dalam Kehidupan Manusia

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Dari pergaulan itu, secara sepintas lalu dia pun mengetahui bahwa dalam pelbagai hal, dia mempunyai persamaan dengan orang lain, sedangkan dalam hal-hal lain dia berbeda dengan mereka dan mempunyai sifat-sifat khas yang berlaku bagi dirinya sendiri. Adanya persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan ini, lama-kelamaan menimbulkan kesadaran pada diri manusia, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat ia membutuhkan aturan-aturan yang oleh anggota-anggota masyarakat tersebut harus dipatuhi dan ditaati, sebagai pegangan atau pedoman yang mengatur hubungan-hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, serta antara manusia dengan masyarakat atau kelompoknya. Pedoman-pedoman itu biasanya diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah (Soerjono Soekanto, 2001: 1-2).

Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, bermacam-macam ragamnya. Di antara sekian banyak kaidah, hukum merupakan salah satu kaidah yang sangat penting di samping kaidah-kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan. Kaidah-kaidah hukum tersebut ada yang berwujud sebagai peraturan-peraturan tertulis, keputusan-keputusan pengadilan maupun keputusan-keputusan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah ini, sosiologi—sebagai ilmu yang membahas tentang masyarakat—secara umum lebih mempunyai kecenderungan untuk memperhatikan alat-alat pengendalian sosial yang informal daripada yang formal. Hal ini karena para sosiolog ingin membuktikan bahwa pendapat yang menyatakan bahwa penerapan hukum harus selalu didukung oleh sanksi-sanksi tidak selamanya benar. Meskipun demikian, para sosiolog tetap mengakui bahwa pelaksanaan hukum yang efektif memerlukan dukungan sosial yang luas. Artinya, hukum akan terlaksana secara efektif, apabila hukum itu dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakatnya. Dengan kata lain, pelaksanaan hukum itu akan berjalan efektif apabila hukum itu dirumuskan atau ditetapkan berdasarkan realitas empiris dan bukan didasarkan pada dunia ide semata (Soetandyo Wignjosebroto, 2002: v).

Dengan demikian, hukum yang berlawanan dengan adat-istiadat yang berlaku di dalam suatu masyarakat, di satu pihak ia tidak mempunyai dukungan yang diperlukan agar penerapannya berjalan dengan efektif,

dan di lain pihak, keadaan yang demikian itu akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat yang justru akan membahayakan kewibawaan hukum itu sendiri karena hukum tidak lagi digunakan sebagai landasan konseptual oleh masyarakat dalam melangsungkan atau menjalankan aktivitas kehidupannya (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002: 7).

Selain itu, dalam kenyataan hidup bermasyarakat tidak ada suatu masyarakat pun yang warganya selalu taat dan patuh terhadap hukum dan kaidah-kaidah lainnya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Apabila hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka dia akan mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada, serta mencari jalan keluar dan atau pertimbangan-pertimbangan lain sebagai landasan konseptual yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002: 8).

Apabila kemungkinan-kemungkinan tersebut di atas benar-benar terjadi, maka sistem hukum akan mendapat sebutan yang tidak menyenangkan, yaitu sebagai dualisme di dalam hukum. Istilah dualisme ini memberikan suatu gambaran tentang kontradiksi-kontradiksi antara hukum dalam teori dengan hukum dalam praktik, antara validitas dan efektivitas, dan antara norma dengan fakta sebagai kenyataan (David N. Schiff, 1987: 259)

Dengan demikian, demi tercapainya cita-cita hukum dan untuk menciptakan kewibawaan hukum, diperlukan adanya telaah hukum dengan tidak hanya menggunakan pendekatan normatif atau studi *law in books*, tetapi lebih dari itu dibutuhkan adanya kajian hukum dengan menggunakan pendekatan sosiologis atau studi *law in action* (Tomasic, 1986: 6).

### 3. Manusia dan Tertib Kehidupan Masyarakat

Berbicara tentang tertib kehidupan manusia dalam masyarakat, tidak bisa terlepas dari pemikiran tentang tertib alam semesta secara keseluruhan, di mana manusia berada di dalamnya. Dalam kaitan ini Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa ada dua paradigma yang menjadi landasan pemikiran tentang tertib kehidupan manusia ini, yaitu paradigma Aristotelian/Aristoteles (384-322 SM) dan paradigma Galilean /Galileo Galilei (1564-1642 M).

Paradigma Aristotelian—yang sering pula disebut paradigma yang *teologik—finalistik* bertolak dari anggapan aksiomatik bahwa seluruh kenyataan alam semesta ini pada hakikatnya adalah suatu totalitas kodrati

yang telah tercipta secara final dalam bentuknya yang sempurna sejak awal mulanya (Soetandyo Wignjosoebroto, 2003: 01). Dengan demikian, menurut paradigma Aristotelian ini, ketertiban tidak dapat direkayasa dan diproduksi karena ia telah terbentuk sejak semula *pre-established harmony*. Sebagai gambaran, Scott Gordon mencontohkan keselarasan suatu orkestra sebagai suatu *pre-established harmony*. Sekian banyak pemusik telah memainkan bagian masing-masing yang sekalipun secara mandiri, tetapi secara totalitas lalu menjadi suatu keselarasan (Scott Gord, 1991: 215). Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716 M), seorang representasi paham Aristotelian yang hidup pada masa maraknya paham Galilean.

Sementara itu, paradigma Galilean bertolak dari anggapan aksiomatik bahwa seluruh alam semesta ini pada hakikatnya adalah suatu himpunan fragmen yang berhubungan secara interaktif dalam suatu jaringan kausalitas yang berlangsung tanpa henti dan tanpa mengenal titik akhir di tengah alam objektif. Di samping objektif, hubungan antarfragmen itu berlangsung pada ranah indriawi yang selalu dapat disimak sebagai sesuatu yang faktual dan aktual (Soetandyo Wignjosoebroto, 2003: 2). Dengan demikian, hubungan kausal antarfragmen itu berlangsung secara mekanistik dan dapat diproduksi. Oleh sebab itu pula, setiap kejadian atau terjadinya peristiwa selalu saja dapat diperkirakan atau bahkan diramalkan.

Paradigma Galilean ini pada masa selanjutnya memberikan pengaruh yang cukup berarti terhadap aliran-aliran pemikiran yang muncul kemudian. Salah satu di antaranya adalah Positivisme (suatu paham falsafati pada abad ke-19 yang dirintis oleh Auguste Comte (1798-1857) seorang pemikir berkebangsaan Prancis yang dilahirkan di kota Montpellier. Dalam kajian filsafat, ia dikenal dengan ajarannya bahwa perkembangan pikiran manusia berlangsung dalam tiga tahap, yaitu teologis, metafisis, dan positif atau ilmiah (Harun Hadiwijono, 1980: 110).

Sebagai suatu paham falsafati dalam alur tradisi Galilean, positivisme mencoba mendayagunakan paradigma Galilean ini untuk menjelaskan kehidupan manusia dalam masyarakatnya. Menurut Comte, konsep dan metode ilmu alam kodrat juga dapat dipakai untuk menjelaskan kehidupan kolektif manusia. Dengan ungkapan lain, dapat dikatakan bahwa sebagaimana halnya kejadian-kejadian di alam semesta yang tunduk pada suatu hukum yang sifatnya universal, menurut Comte, kehidupan manusia itu selalu saja dapat dijelaskan sebagai proses-proses aktualisasi hukum sebab akibat yang universal pula sifatnya. Setiap kejadian atau perbuatan dalam kehidupan manusia dapat dijelaskan dari sisi sebab-sebabnya yang

rasional, alami dan bersifat ilmiah/*scientific*. Setiap perbuatan tidak dapat dimaknakan dari substansinya yang berupa niat dan tujuannya yang metafisikal (Soetandyo Wignjosoebroto, 2003: 3).

Dengan demikian, dalam ihwal metode keilmuan, kaum positivis menganut paham monoisme. Artinya, hanya ada satu metode dalam kajian sains yang lugas itu, baik yang akan digunakan dalam kajian ilmu pengetahuan alam dan hayat (*natural and life sciences*) maupun yang akan didayagunakan dalam kajian ilmu pengetahuan sosial (*social sciences*), sehingga menurut mereka, tidak perlu dibedakan antara mempelajari perilaku benda-benda mati dan mempelajari perilaku manusia yang mempunyai jiwa dan ruh. Kemudian, pengaruh model positivistik seperti ini masuk merasuk ke dalam alam pemikiran para pengelola hukum dan ilmu hukum. Mereka mengklaim diri bahwa ilmu hukum adalah sekaligus juga ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat. Oleh karenanya, maka para penganut positivis ini mencoba menuliskan kausalitas-kausalitas itu dalam wujudnya sebagai hukum perundang-undangan. Di situ dituliskan apa saja yang terbilang sebagai perbuatan hukum, dan dituliskan pula apa saja yang akan menjadi akibat (hukum)-nya. Para pemikir dan pengguna hukum yang positivis ini juga mengklaim bahwa kajian ilmiah mereka tidak lagi sebatas kajian dalam bilangan *jurisprudence* (yang berarti 'kearifan yuris') (Soetandyo Wignjosoebroto, 2005: 1). Lebih dari itu, mereka berbicara mengenai hukum, tidak dalam konsepnya sebagai teks-teks normatif yang positif melainkan sebagai variabel empirik yang eksis dan berfungsi dalam konteks-konteks sosial.

#### 4. Hukum dan Perikelakuan Masyarakat

Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga-warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan (Soerjono Soekanto, 2001: 118). Salah satu masalah yang dihadapi dalam hal ini adalah apabila hukum-hukum yang telah ditetapkan atau dirumuskan ternyata tidak dapat berjalan secara efektif, yakni tidak mampu mengubah perilaku warga masyarakat sebagaimana tujuan yang diinginkan. Gejala-gejala semacam ini tidak serta-merta muncul ke permukaan, tetapi tentu disebabkan oleh adanya faktor-faktor penyebab yang menjadi penghalangnya. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk atau perumus hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, pelaku atau subjek hukum, maupun golongan-golongan lain yang ada di dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 2001: 119).

Faktor-faktor tersebut harus diidentifikasi secara teliti dan saksama untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sebab-sebab yang menjadi kelemahan mendasar dari tidak tercapainya tujuan-tujuan hukum yang ditetapkan. Kalau hukum yang dirumuskan telah ditetapkan sebagai sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka semua proses yang terkait dengan pencapaian tujuan tersebut juga harus mendapat perhatian yang sebenarnya. Di samping pengetahuan dan atau pemahaman yang mantap tentang sifat dan hakikat hukum, juga perlu diketahui pula hal-hal lain yang terkait, seperti batas-batas penggunaan hukum sebagai sarana pengubah perikelakuan masyarakat, filosofi perumusan hukum, situasi dan kondisi subjek hukum, tradisi dan budaya di mana hukum itu dilaksanakan, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang melekat pada diri pelaku hukum.

Salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian tentang hukum sebagai pengatur perikelakuan masyarakat adalah perihal komunikasi hukum (Soerjono Soekanto, 2001: 11). Artinya, bahwa agar hukum itu benar-benar dapat memengaruhi perilaku masyarakat, maka hukum tadi harus disebarakan seluas mungkin sehingga melembaga dalam kehidupan masyarakat. Penyebaran ini dapat dilakukan, baik secara formal, melalui cara-cara yang terorganisasi secara resmi, maupun dengan cara informal melalui cara-cara lain yang mampu mengantarkan informasi hukum kepada masyarakat.

Selanjutnya, hal lain yang perlu dipahami pula adalah bahwa masyarakat terdiri atas pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok, yang dalam mengarungi kehidupannya dihadapkan pada penentuan pilihan terhadap apa yang ada di dalam lingkungan sekitarnya. Pilihan-pilihan yang dapat dilakukannya dibatasi oleh suatu kerangka tertentu yang ada di lingkungannya. Dengan kata lain, lingkungan sekelilingnya memberikan kebebasan-kebebasan sekaligus menyediakan pembatasan-pembatasan bagi pribadi dan kelompok-kelompok sosial (Soerjono Soekanto, 2001: 120-121).

Apakah yang akan dipilih oleh pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok, bergantung pada faktor-faktor fisik, psikologis, dan sosial. Di dalam suatu masyarakat, di mana interaksi sosial menjadi intinya, maka perilaku-perilaku yang diharapkan dari pihak lain, merupakan hal yang sangat menentukan bagi pribadi atau kelompok yang bersangkutan. Misalnya, apabila ada seorang petani yang sangat memerlukan kredit untuk usaha taninya, sedangkan di dalam lingkungannya hanya terdapat kreditur-kreditur yang menetapkan bunga yang sangat tinggi, maka pilihannya hanya terbatas antara meminjam uang dengan bunga yang tinggi dan meneruskan usaha taninya, atau berhenti bertani.

Kasus lain misalnya, ada seorang ayah, dia adalah pengangguran korban PHK yang malang dan melarat, yang karena mendengar tangis anak bayinya semalam suntuk, maka ia tidak bisa menahan diri lagi untuk tidak pergi keluar dengan niat mencuri roti. Anak bayi itu sungguh lapar karena air susu ibunya tidak bisa keluar lagi. Betapa tidak? Si ibu sendiri sudah tiga hari ini tidak makan (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002: ix). Dengan demikian, sang bapak dihadapkan pada pilihan antara keluar rumah untuk mencuri roti dan membiarkan bayinya menangis karena kelaparan. Kasus di atas mirip atau serupa dengan kasus suatu peristiwa pencurian yang dilakukan oleh seorang muslim pada masa khalifah Umar bin Khattab. Orang tersebut melakukan pencurian karena terdesak mencari makan, di mana pada saat itu kaum muslimin ditimpa keadaan kelaparan/paceklik. Kemudian, atas dasar pertimbangan keadaan yang menjadi latar belakang terjadinya pencurian tersebut, akhirnya Umar bin Khattab membatalkan hukuman had (potong tangan) kepada yang bersangkutan (Roibin, 2008: 42).

Masalah-masalah hukum, bagi suatu bangsa yang bertekad untuk membangun tata hukum yang sama sekali baru, tidak bisa dikaji secara terpisah dari konteks sosialnya. Bahkan bisa dikatakan, perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat akan memberikan bebannya sendiri terhadap hukum, sehingga hukum dituntut untuk mengembangkan kepekaannya menghadapi keadaan tersebut (Satjipto Rahardjo, 2010: 18).

Apabila pengembangan kepekaan terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat tersebut dilakukan, maka berarti ahli hukum telah mengikuti filsafat keterkaitan sistemik antara hukum dengan lingkungan serta basis sosialnya. Dalam pemahaman filsafat tersebut, hukum tidak bisa diterima sebagai suatu lembaga yang memiliki kekuasaan otonomi penuh dan mampu merencanakan apa yang ingin dikerjakannya tanpa perlu memperhatikan dan memperhitungkan lingkungannya (Satjipto Rahardjo, 2010: 18). Dengan demikian, filsafat para penyusun hukum memilih untuk berpihak pada pendapat bahwa hukum itu tidak lain adalah bagian dari proses sosial yang lebih besar.

Pengkajian hukum dengan cara ini penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas hukum dalam masyarakat. Dengan melakukan studi ini akan diketahui sampai di manakah masyarakat mengikuti atau menyimpang darinya. Mengingat pentingnya kajian untuk mengetahui efektivitas hukum dalam masyarakat, seyogianya hukum tidak lagi hanya dipahami sebagai yang ada dalam kitab perundang-undangan. Hukum perlu pula dilihat dalam konteks sosialnya, yaitu tempat di mana hukum itu berperan,

dipergunakan serta diciptakan. Hukum diciptakan untuk mengatur pola hubungan tingkah laku manusia atau kelompok dalam proses interaksi antara satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Tidak ada satu masyarakat pun yang dapat hidup dan bertahan, tanpa hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun bentuk ataupun susunan masyarakatnya (baik pada masyarakat modern maupun pada masyarakat sederhana atau bersahaja), hukum itu tetap ada. “*Ubi societas ibi ius*” demikianlah adigium singkat yang melukiskan hubungan antara masyarakat dengan hukum (Mahadi, 1991: v).

Selanjutnya, penelaahan hukum yang dikaitkan dengan kehidupan sosial, atau dengan kata lain hukum jika dipandang dari sudut kenyataan sosial, sesungguhnya dengan cara yang demikian itu kita telah menginjakkan kaki ke dalam “Sosiologi Hukum” (Mahadi, 1991: v) (suatu cabang sosiologi yang melakukan penyelidikan di lapangan sosiologi dengan membahas hubungan-hubungan antara hukum dengan gejala-gejala masyarakat) (William M. Evan (ed.), 1980: 34). Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa dalam sosiologi hukum, penyelidikan ditujukan terhadap proses dan penerapan hukum—baik hukum yang formal maupun yang informal—dalam konteks kehidupan sosial dan bukan pada teks hukum normatif.

Kemudian, salah satu tugas dari sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab-sebab ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan tata tertib masyarakat dalam kenyataannya.

## 5. Penegakan Hukum di Era Orba dan Reformasi

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama tanpa terkecuali. Namun, hal ini tidak berlaku pada era Orde Baru atau pada suatu era di mana rezim Soeharto berkuasa. Pada masa ini seseorang bisa kebal dari hukum apabila mempunyai kekuasaan dan uang. Tuduhan ini bukan tanpa bukti, banyak kasus-kasus pelanggaran hukum serius yang lambat penanganannya karena tersangka utamanya merupakan para penguasa rezim Orba. Kasus-kasus itu, antara lain sebagai berikut.

- a. Kasus kejahatan kemanusiaan pada tahun 1965-1966.
- b. Kasus penyerangan kantor DPP PDI 27 Juli 1996.

- c. Kasus penjarahan toko-toko milik warga Tionghoa.
- d. Kasus korupsi Jamsostek.

Hal yang sama juga terjadi pada era Reformasi, masa yang seharusnya segala sesuatu yang buruk telah diperbaiki. Namun, pada kenyataannya untuk keadilan di bidang hukum belum juga tercipta. Salah satunya adalah Amandemen Kedua UUD'45 Pasal 28I ayat (1): "Bahwasanya seseorang tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut." Dari sedikit petikan bunyi pasal tersebut, dalam ilmu hukum dinamakan prinsip hukum non-retroaktif. Prinsip tersebut bersumber dari asas legalitas von Feuerbach : "Tidak ada tindak pidana, tanpa adanya peraturan yang mengancam pidana lebih dulu." Seperti yang tercantum dalam pasal 1 KUHP kita. Masalah yang muncul apakah prinsip tersebut juga berlaku untuk kejahatan berat? Sebab dalam pasal tersebut tidak membedakan tindak pidana biasa dengan tindak kejahatan kemanusiaan seperti tindak pelanggaran HAM berat. Merujuk pada penjelasan RUU Pengadilan HAM bahwa pelanggaran HAM berat bukan merupakan pelanggaran terhadap KUHP sehingga prinsip non-retroaktif perundang-undangan tidak berlaku pada kejahatan kemanusiaan. Meskipun RUU Pengadilan HAM pasal 37 memberlakukan retroaktif perundang-undangan terhadap kejahatan kemanusiaan, tetap saja RUU tersebut akan gugur karena bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1). Karena sistem hierarki di Indonesia tidak membolehkan hukum yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan yang lebih tinggi.

Akan tetapi, pada era ini juga sudah banyak pejabat yang disidangkan karena kasus korupsi, padahal mereka benar-benar bersalah hanya beberapa saja yang masuk penjara. Ternyata hal ini terjadi penyebabnya tidak lain adalah mau disuapnya aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan.

Fakta-fakta yang terungkap di atas menunjukkan bahwa supremasi hukum pada era Orba sampai era Reformasi belum terwujud. Hal ini terjadi karena sumber hukum dan aparat penegak hukum belum siap mewujudkan keadilan di bidang hukum.

Penegakan hukum menjadi lemah seiring dengan berjalannya sistem demokrasi di Indonesia. Hal yang paling mendasari adalah besarnya pergesekan kekuatan kepentingan kekuasaan dari beberapa titik pemegang kekuasaan negara. Dalam pelaksanaan demokrasi sangat diperlukan adanya supremasi hukum, yaitu menjunjung tinggi peraturan-peraturan yang berlaku untuk mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.

Selain itu, juga diperlukan sistem pemerintahan yang demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat dengan adanya asas dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terakhir adalah HAM (Hak Asasi Manusia), hal ini sangat penting terhadap pelaksanaan supremasi hukum karena berkaitan dengan hak dasar manusia sebagai makhluk Tuhan. Demikianlah hal-hal yang patut diperhatikan dalam pelaksanaan supremasi hukum di Indonesia karena sangat sesuai dan patut pula diperhatikan dalam skala nasional yang bertitik tolak dari UUD 1945 baik Pembukaan, pasal-pasal beserta penjelasannya.

Hubungan antara negara hukum dan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Namun, negara hukum belum tentu negara demokrasi. Negara hukum hanyalah satu ciri dari negara demokrasi. Demokrasi baik sebagai bentuk pemerintahan maupun suatu sistem politik berjalan di atas dan tunduk pada koridor hukum yang disepakati bersama sebagai aturan main demokrasi. Adapun demokrasi sebagai sikap hidup ditunjukkan dengan adanya perilaku yang taat pada aturan main yang telah disepakati bersama pula. Aturan main itu umumnya dituangkan dalam bentuk norma hukum. Dengan demikian, di negara demokrasi, hukum menjadi sangat dibutuhkan sebagai aturan dan prosedur demokrasi. Tanpa aturan hukum, kebebasan dan kompetisi sebagai ciri demokrasi akan liar tidak terkendali. Jadi, negara demokrasi sangat membutuhkan hukum (Winarno, 2007: 128).

Hubungan antara demokrasi dan hukum sangat erat, dapat dikatakan bahwa kualitas demokrasi suatu negara akan menentukan kualitas hukumnya. Artinya negara-negara yang demokratis akan melahirkan pula hukum-hukum yang berwatak demokratis, sedangkan di negara-negara yang otoriter atau nondemokratis akan lahir hukum-hukum yang nondemokratis (Moh. Mahfud, 1999: 53).

Dewasa ini kehidupan ekonomi jauh lebih baik daripada periode-periode sebelumnya berkat pemerintahan yang kuat dan otoritarian sesuai dengan pilihan yang telah dilakukan secara sadar sebagai pecinta hukum. Lahirnya hukum-hukum yang berkarakter responsif tanpa mengorbankan persatuan dan kesatuan serta kebutuhan ekonomi dapat lahir di dalam konfigurasi politik yang demokratis untuk melahirkan hukum-hukum yang responsif itu, diperlihatkan demokratisasi di dalam kehidupan politik. Alasan-alasan untuk melakukan demokratisasi ini sudah cukup jika kesadaran politik masyarakat membaik, Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas oleh orpol dan ormas, dan kehidupan ekonomi masyarakat serta pertumbuhannya sudah memadai. Dengan modal itu, proses demokratisasi tidak akan mengancam stabilitas apalagi persatuan kesatuan bangsa (Moh. Mahfud, 1999: 84).

Peranan hukum, demokrasi, dan HAM terhadap pelaksanaan pemerintahan sangat penting karena supremasi hukum harus ada, sebab negara Indonesia adalah negara hukum atau negara yang sangat menjunjung tinggi hukum ini dapat terlihat juga dari sistem demokrasi yang dianut negara kita, yaitu Republik Konstitusi, maka pemerintahan juga harus menjunjung tinggi hukum dalam menggunakan wewenangnya. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan aspirasi rakyat dalam membuat keputusan bagi rakyatnya karena bagaimanapun negara kita adalah negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Jadi, keinginan rakyat tidak bisa dikesampingkan begitu saja oleh pemerintah. Oleh karena itu, badan eksekutif dan badan legislatif dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat yang bisa melanggar atau membatasi HAM dari rakyat itu sendiri.

## 6. Menciptakan Supremasi Hukum yang Ideal

Pada pembahasan sebelumnya perkembangan penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan. Sejak Indonesia merdeka hingga pemerintahan sekarang masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan maupun penyelewengan hukum dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia. Ini berarti bahwa supremasi hukum belum tercipta di Negara Indonesia. Penegakan hukum sangat perlu, yaitu untuk diarahkan pada pola pencegahan segala pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat ataupun badan hukum. Bukti-bukti nyata yang terjadi dalam pemerintahan Indonesia, justru pelanggaran hukum banyak dilakukan oleh kalangan atas, seperti kehakiman, kepolisian, dan pejabat-pejabat. Kasus-kasus, seperti korupsi, penyuapan, dan bermacam pelanggaran hukum masih sering terjadi. Artinya, Indonesia adalah negara hukum yang belum sukses mewujudkan supremasi hukum.

Integritas kepemimpinan kepolisian, kejaksaan, dan mahkamah agung turut pula dipertanyakan karena sebagai lembaga, penegak hukum juga ternyata dominan dengan nuansa politik. Ada kemungkinan niatan yang dilandasi politik akan berujung pada upaya penegakan hukum, atas produk hukum yang kemudian tak sekadar kertas bertinta emas, tetapi pengejawantahan kehidupan ketertiban hukum agar terpelihara integritas sosial yang melingkupi masyarakat, pasar, dan negara. Bila ini tak terjawab dengan memuaskan, maka akan menimbulkan rasa miris bagi siapa pun yang mengetahui kondisi ini. Namun, semuanya hanya tinggal mimpi

untuk menerapkan supremasi hukum di tengah embusan demokrasi yang didengungkan negara ini, ataukah masih menyisakan harapan bagi terwujudnya negara hukum (<http://supremasihukum.htm>.2015/04/10).

Keberadaan hukum merupakan posisi yang unik dan dapat memberikan dampak bagi lingkungan sekitar, terutama bagi dinamisasi kehidupan masyarakat, antara hukum dengan masyarakat, penjahat dengan pejabat, orang baik-baik, atasan dan bawahan, seharusnya tidak ada tirai pembatas. Oleh karena itu, sifat hukum harus dogmatis dan universal.

Beberapa poin penting untuk bisa mencapai supremasi hukum, bergantung pada bagaimana pelaksanaan hukum itu sendiri. Ada beberapa pendapat tentang tujuan hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mencapai supremasi hukum yang ideal.

1. Teori etis, mengatakan bahwa hukum itu semata-mata menghendaki keadilan. Isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.
2. Geny, mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sebagai unsur keadilan, ada kepentingan daya guna dan kemanfaatan (Budyanto, 2004: 54).

Beberapa pendapat di atas menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan keadilan. Dengan terciptanya keadilan ini, maka supremasi hukum dapat terwujud. Namun, dengan banyaknya penyelewengan hukum di Indonesia dapat dikatakan bahwa penerapan keadilan belum terwujud.

Untuk dapat mencapai keadilan hukum, maka penegakan hukum sangat perlu. Hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum tentang HAM (Sunarso, 2008: 150).

Dengan adanya praktik politik, maka hal ini juga berpengaruh pada keadaan hukum di Indonesia. Konfigurasi politik tertentu melahirkan produk hukum dengan karakter tertentu, yakni konfigurasi politik yang demokratis senantiasa melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter melahirkan produk hukum yang berkarakter konservatif. Karakter responsif maupun konservatif salah satunya ditandai dalam pembuatan produk hukum yang responsif menyerap aspirasi masyarakat seluas-luasnya (partisipatif), sedangkan produk hukum yang konservatif lebih didominasi lembaga-lembaga negara terutama pihak eksekutif (sentralistik) (Moh. Mahfud, 1999: 295).

Hukum harus mampu mencerna segala perubahan secara tenang dan baik-baik. Globalisasi, dunia tanpa pembatas, skenario elite politik,

sukses, korupsi, kolusi, nepotisme, supremasi hukum, demokratisasi, HAM, disintegrasi bangsa dan intrik-intrik politik, semuanya harus dihadapi oleh hukum. Hukum harus mampu secara langsung berhadapan dengan perilaku yang muncul tersebut sehingga hukum berfungsi sebagai alat kontrol masyarakat dengan segala perundang-undangan yang berlaku dan harus ditaati masyarakat. Dalam menghadapi perubahan perilaku masyarakat, maka hukum harus dengan cepat beradaptasi dalam perubahan tersebut. Jika terjadi keterasingan masyarakat terhadap hukum, maka citra hukum akan menurun, sebagai konsekuensi, maka sangat diperlukan hukum yang selalu mengikuti konsep, orientasi, dan masalah-masalah yang setiap saat bisa berubah secara cepat. Dengan kata lain, supremasi hukum jangan dijadikan hanya sebagai simbol dalam suatu pemerintahan. Hukum tidak hanya merupakan unsur tekstual saja, yang dipandang dari kaca mata undang-undang. Namun, hukum merupakan unsur kontekstual yang dapat dilihat dari perspektif yang lebih luas. Dalam suasana perubahan yang serbacepat ini, perwujudan supremasi hukum akan memenuhi lebih banyak para pelaksana hukum yang mampu bertanggung jawab, berdedikasi, dan bermoral serta mempunyai intelektual tinggi yang mampu mengatasi berbagai permasalahan (<http://bataviase.co.id/content/membangun-supremasi-hukum>).

Hal itulah yang menjadi poin agar supremasi hukum dapat mencapai standar ideal, unsur-unsur penegak hukum yang seperti itulah yang dibutuhkan untuk menghadapi segala permasalahan agar supremasi hukum dapat terwujud dengan cepat.

## B. Demokrasi

Masalah demokrasi merupakan pembicaraan (*discourse*) yang cukup urgen. Meskipun demikian, suatu hal yang tidak kalah mendasarnya adalah soal penerapan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Hal ini merupakan fenomena menarik yang akhir-akhir ini menjadi diskursus panjang-lebar dan bahkan menjadi perdebatan yang cukup melelahkan. Salah satu dimensi persoalan yang selalu melahirkan sudut pandang berbeda adalah menyangkut bagaimana demokrasi seharusnya menempatkan diri dalam sistem sosial-politik di negeri ini. Banyak para pemikir politik klasik, modern hingga neo-modern, yang mencoba memberikan sebuah penjelasan mengenai konsep demokrasi, dengan beragam cara pendekatan dan metode yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting kiranya dalam karya ilmiah ini dijelaskan pula pengertian demokrasi.

# 1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi (pemerintahan oleh rakyat) semula dalam pemikiran Yunani berarti bentuk politik di mana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik (Lorens Bagus, 2002: 154). Secara garis besar demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada dewasa ini.

Menurut pakar hukum tata negara M. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya (A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2006: 130-131).

Wacana demokrasi yang berkembang saat ini dan telah dijadikan sebagai sistem negara di Indonesia, merupakan hasil reduksi dari pemikiran atau pendapat para filsuf mulai dari Plato hingga pasca Renaissance. Pandangan beberapa filsuf tentang demokrasi, adalah sebagai berikut.

- a. Plato memandang demokrasi dekat tirani, dan cenderung menuju tirani. Ia juga berpendapat bahwa demokrasi merupakan yang terburuk dari semua pemerintahan yang berdasarkan hukum dan yang terbaik dari semua pemerintahan yang tidak mengenal hukum.
- b. Aristoteles melihat demokrasi sebagai bentuk kemunduran politeia, dan yang paling dapat ditoleransi dari ketiga bentuk pemerintahan yang merosot; dua yang lain adalah tirani dan oligarki.
- c. Sesudah Renaissance berkembanglah ide kedaulatan, teori kontrak sosial dan doktrin hak-hak alamiah. Perkembangan ini mendukung berkembangnya demokrasi. Meskipun demikian, banyak pendukung, termasuk Locke sendiri tetap menganut monarki terbatas.
- d. Montesquieu, perintis ajaran tentang pemisahan, lebih suka monarki konstitusional. Sebenarnya ia berkeyakinan bahwa bentuk pemerintahan ideal adalah demokrasi klasik yang dibangun di atas kebajikan kewarganegaraan. Ia berkeyakinan pula bahwa yang ideal itu tidak akan tercapai.
- e. Rousseau mendukung kebebasan dan kedaulatan manusia. Menurutnya, bentuk pemerintahan harus didasarkan pada aneka macam pengkajian historis. Bersamaan dengan itu, analisis dan penegasannya pada kebebasan menunjang pemikiran demokratis.

- f. Amerika Serikat mencoba mengambil ide-ide dari sebagian besar pandangan yang terurai di atas, sambil membangun sebuah “demokrasi perwakilan” yang kekuasaannya berasal dari rakyat. Pemerintahan secara perwakilan tidak saja sesuai dengan ukuran negara. Itu juga menyediakan obat pemberantas penindasan oleh mayoritas (A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2006: 155-156).

Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata Yunani, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Gabungan dua kata *demoscratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) memiliki arti suatu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat (Lorens Bagus, 2002: 155-156).

Adapun pengertian demokrasi menurut istilah atau terminologi adalah seperti yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut.

- a. Joseph. A. Schemer mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- b. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat biasa.
- c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka yang telah terpilih (A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2006: 132).

Dari beberapa pandangan dan pengertian di atas, maka demokrasi bisa diartikan dengan suatu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat (A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2006: 131).

## 2. Ruang Lingkup Demokrasi

Prinsip terpenting demokrasi adalah kewarganegaraan (*citizenship*). Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan sama dengan orang lain, berkenaan dengan pilihan-pilihan bersama dan kewajiban pihak yang berwenang melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggung jawab serta membuka akses terhadap seluruh rakyat. Sebaliknya, prinsip ini juga membebaskan kewajiban kepada rakyat untuk menghormati keabsahan pilihan-pilihan bersama secara sengaja dan hak penguasa untuk bertindak dengan kewenangan untuk mendorong efektivitas pilihan-pilihan ini, serta untuk melindungi negara dari ancaman-ancaman atas kelangsungannya (Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter, 1993: 8-9).

Untuk mencapai demokrasi yang ideal, menurut Robert Dahl, setidaknya lima prasyarat yang harus dipenuhi. *Pertama*, dalam membuat keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat, hak istimewa setiap warga negara harus diperhatikan secara seimbang dalam menentukan keputusan akhir. *Kedua*, dalam setiap proses pengambilan keputusan kolektif, maka setiap warga negara harus mempunyai hak yang sama untuk menyatakan hak-hak politiknya. *Ketiga*, adanya pembeberan kebenaran. Di sini setiap warga negara harus mempunyai peluang yang sama dalam penilaian yang logis demi mencapai hasil yang diinginkan. *Keempat*, adanya kontrol terakhir terhadap agenda. Di sini warga negara juga memiliki kekuasaan eksklusif untuk menentukan yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses yang memenuhi ketiga hal di atas. Hal ini untuk menghindari adanya pengambilan-pengambilan keputusan yang dibuat dengan cara-cara tidak demokratis. *Kelima*, pencakupan atas semua elemen masyarakat yang meliputi semua orang dewasa dalam kaitan penegakan hukum (Ma'mun Murod Al-Brebesy, 1993:60).

Menurut Lincoln, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik tertinggi (*supreme political authority*) dan kedaulatan (*sovereignty*) ada di tangan rakyat. Rakyat yang memiliki "*sovereignty*" berhak untuk memerintah. Oleh karena itu, pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang mendapat persetujuan rakyat atau pemerintahan yang sudah memiliki mandat untuk memerintah dari rakyat (*democratic government by and with the consent of the people*). Dalam sistem pemerintahan rakyat atau yang oleh Lincoln disebut "*government by people*" tersebut direpresentasi dalam bentuk lembaga perwakilan yang mengatasmakan kepentingan rakyat (Gregorius Sahdan, 2004: 12).

Ada banyak definisi tentang demokrasi, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Namun, yang paling populer adalah yang dirumuskan oleh Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di sini demokrasi harus dilihat dari beberapa sisi. *Pertama*, sisi substansial (nilai hakiki), di mana demokrasi hanya bisa tegak kalau ada nilai-nilai atau budaya yang memungkinkan rakyat bisa memiliki kedaulatan dalam arti yang sesungguhnya. Misalnya, adanya kebebasan (*freedom*), budaya menghormati kebebasan orang lain, adanya pluralisme, toleransi, dan anti intimidasi (kekerasan). *Kedua*, sisi dimensi prosedural (aturan atau tata cara), di mana demokrasi hanya bisa tegak jika ada prosedur-prosedur formal yang memungkinkan nilai dan budaya demokrasi itu ada dan berjalan. Pemilihan umum yang bebas, adanya DPR yang kuat, lembaga yudikatif yang independen adalah termasuk bagian dari aspek prosedural demokrasi (Eman Hermawan & Umaruddin Masdar, 2000: 28-29).

Selain pengertian di atas, demokrasi prosedural menurut Huntington adalah demokrasi sebagai persoalan tata cara memerintah, sedangkan demokrasi substansial adalah nilai-nilai yang terkandung dalam esensi demokrasi, seperti kebebasan, keadilan, persamaan hak, dan sebagainya yang menekankan peranan agen (individu) sebagai determinan pokok (Mohtar Maso'ed, 1999: 24).

Pada abad XIX, pengertian demokrasi mengikuti tradisi pemikiran Schumpeterian, di mana demokrasi dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang penuh melalui Pemilu yang bebas, jujur, dan adil guna memilih kandidat-kandidat yang berhak memangku jabatan politik (Mohtar Maso'ed, 1999: 7).

Demokrasi modern memiliki spesifikasi yang luar biasa terhadap sistem pemerintahan. Untuk membentuk pemerintahan yang demokratis diperlukan institusionalisasi nilai-nilai demokrasi yang substansial menjadi nilai yang terlembagakan. Demokrasi prosedural mengharuskan adanya Pemilu sebagai salah satu ruang bagi warga negara berkontestasi dan berkompetisi secara sehat dalam pemerintahan (Gregorius Sahdan, 2004: 12).

Dalam konteks keindonesiaan, demokrasi tidak bisa dilepas dari dua sisi di atas, yaitu substansi dan prosedur. Prosedur sebagai cara untuk mencapai substansi sehingga keduanya tidak saling menegasikan, serta berjalan sendiri-sendiri. Dengan demikian, demokrasi dapat tumbuh dan berkembang jika substansi dan prosedur berjalan beriringan.

**READING COPY**



## BAB 7

# INTERAKSI SOSIAL, KELOMPOK SOSIAL, DAN MASYARAKAT

### A. Interaksi Sosial

Dalam Al-Quran sendiri dinyatakan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal-mengenal (QS. Al-Hujurat ayat 13). Ayat ini secara implisit menegaskan bahwa manusia ditakdirkan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal-mengenal. Proses terjadinya suku bangsa berawal dari interaksi antarindividu dan antarkelompok manusia sehingga membentuk satu komunitas sosial yang lebih besar (Said Agil Husain Al-Munawir, 1993: 77). Hal ini berarti bahwa memiliki kecenderungan untuk memperkenalkan dirinya dan mengenal orang lain, yang mungkin lebih populer dengan istilah proses sosialisasi. Sosialisasi ini tidak mungkin terwujud tanpa ada proses interaksi.

Kehidupan manusia selalu dihadapkan pada berbagai fenomena pluralitas. Pluralitas warna kulit, pluralitas etnik, pluralitas agama, dan pluralitas bahasa (M. Amin Abdullah, 2000: 68-69). Dengan pluralitas tersebut sering menjadi pemicu terjadinya konflik. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, diperlukan berbagai macam akomodasi yang dapat mempertemukan perbedaan-perbedaan tersebut sehingga terjadi

kesepahaman dan pengakuan akan eksistensi terhadap suatu budaya. Dalam konteks keindonesiaan yang identik dengan pluralistik. Tentunya berbagai permasalahan dapat memicu terjadinya konflik sosial. Oleh karena itu, penulis dalam makalah ini akan mengungkap berbagai permasalahan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial, tentunya dengan mengetahui permasalahan-permasalahan yang dapat memicu konflik sosial, diharapkan masyarakat dapat meminimalkan potensi-potensi konflik tersebut.

## 1. Pengertian Interaksi Sosial

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial, kenyataan tersebut menyebabkan manusia tidak akan dapat hidup normal tanpa kehadiran manusia yang lain. Hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial. Adapun pengertian interaksi sosial menurut para ahli dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan orang perorangan, kelompok perkelompok, maupun perorangan terhadap perkelompok ataupun sebaliknya (Elly M Setiadi & Usman Kolip, 2011: 63).
- b. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok (Soerjono Soekanto, 2010: 55).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengertian interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok.

## 2. Ciri-Ciri Interaksi Sosial

Proses interaksi sosial dalam masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Adanya dua orang pelaku atau lebih.
- b. Adanya hubungan timbal balik antarpelaku.
- c. Diawali dengan adanya kontak sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas.

### 3. Syarat Terjadinya Interaksi Sosial

Proses interaksi sosial dalam masyarakat terjadi apabila terpenuhi dua syarat berikut ini.

- a. Kontak sosial, yaitu hubungan sosial antara individu satu dengan individu lain yang bersifat langsung, seperti dengan sentuhan, percakapan, maupun tatap muka sebagai wujud aksi dan reaksi.
- b. Komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun dengan alat bantu agar orang lain memberikan tanggapan atau tindakan tertentu.

### 4. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial

Interaksi sosial dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif.

#### a. Asosiatif

Interaksi sosial bersifat asosiatif akan mengarah pada bentuk penyatuan. Interaksi sosial ini terdiri atas beberapa hal berikut.

##### 1) Kerja Sama (*Cooperation*)

Kerja sama terbentuk karena masyarakat menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama sehingga sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pelaksanaannya terdapat empat bentuk kerja sama, yaitu *bargaining* (tawar-menawar), *cooptation* (kooptasi), koalisi, dan *joint-venture* (usaha patungan) (Soerjono Seikanto, 2010: 65-68).

- a) *Bargaining* adalah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih.
- b) *Cooptation*, yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan.
- c) *Coalition* adalah kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu karena dua organisasi atau lebih tersebut mungkin mempunyai struktur yang berbeda satu sama lain.

d) *Joint venture*, yaitu kerja sama dengan pengusaha proyek tertentu untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagi menurut proporsi tertentu.

## 2) Akomodasi

Akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok guna mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan dan kekacauan. Proses akomodasi dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut.

- a) *Coercion*, yaitu suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan.
- b) Kompromi, yaitu suatu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat masing-masing mengurangi tuntutanannya agar dicapai suatu penyelesaian terhadap suatu konflik yang ada.
- c) Mediasi, yaitu cara menyelesaikan konflik dengan jalan meminta bantuan pihak ketiga yang netral.
- d) *Arbitration*, yaitu cara mencapai *compromise* dengan cara meminta bantuan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau oleh badan yang kedudukannya lebih dari pihak-pihak yang bertikai.
- e) *Adjudication* (peradilan), yaitu suatu bentuk penyelesaian konflik melalui pengadilan.
- f) *Stalemate*, yaitu suatu keadaan di mana pihak-pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang dan berhenti melakukan pertentangan pada suatu titik karena kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi maju atau mundur.
- g) Toleransi, yaitu suatu bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan formal.
- h) *Consilliation*, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak-pihak yang berselisih bagi tercapainya suatu persetujuan bersama (Soerjono Seokanto, 2010: 68-71).

## 3) Asimilasi

Proses asimilasi menunjuk pada proses yang ditandai adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok dalam masyarakat serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Asimilasi timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda,

saling bergaul secara intensif dalam jangka waktu lama sehingga lambat laun kebudayaan asli mereka akan berubah sifat dan wujudnya membentuk kebudayaan baru sebagai kebudayaan campuran (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011: 81).

#### 4) Akulturasi

Proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri (Jabal Tarik Ibrahim, 2003: 22).

#### b. Disosiatif

Interaksi sosial ini mengarah pada bentuk pemisahan dan terbagi dalam tiga bentuk sebagai berikut.

##### 1) Persaingan/Kompetisi

Persaingan atau kompetisi adalah suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif, tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lawannya (Joko Sri Sukardi & Arif Rohman, 2009: 63).

Persaingan merupakan proses sosial yang ditandai oleh adanya saling berlomba atau bersaing antarindividu atau antarkelompok tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan untuk mengejar suatu nilai tertentu agar lebih maju, lebih baik, atau lebih kuat. Persaingan mempunyai dua bentuk, yaitu *personal competition* dan *impersonal competition*. *Personal competition* menunjuk pada persaingan antara individu dengan individu lainnya. Misalnya, Angga dan Dewi bersaing merebut gelar siswa teladan SMA tingkat kabupaten, sedangkan *impersonal competition* mengacu pada persaingan yang tidak melibatkan satu per satu individu, seperti persaingan antara satu sekolah dengan sekolah lain dalam hal menarik minat masyarakat untuk masuk ke sekolah tersebut (Joko Sri Sukardi & Arif Rohman, 2009: 63).

Gillin dan Gillin seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto (1989) memberikan empat fungsi persaingan, yaitu: 1) sebagai penyalur keinginan individu atau kelompok yang bersifat kompetisi, 2) sebagai cara agar nilai-

nilai dan sesuatu yang terbatas dapat diperebutkan secara baik, 3) sebagai alat untuk mengadakan seleksi, serta 4) sebagai alat untuk menyaring warga dalam mengerjakan tugas-tugas sehingga terjadi pembagian tugas (Joko Sri Sukardi & Arif Rohman, 2009: 63).

## 2) Kontravensi

Kontravensi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontravensi, antara lain sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan seperti perbuatan menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat, provokasi, dan intimidasi yang ditujukan terhadap perorangan atau kelompok atau terhadap unsur-unsur kebudayaan golongan tertentu. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik.

Leopold von Wiese dan Howard Becker seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto (1989) menyebut empat subproses kontravensi, yaitu: 1) proses yang umum terjadi berupa perbuatan-perbuatan, seperti penolakan, keengganan, perlawanan, perbuatan menghalang-halangi, protes, gangguan-gangguan, perbuatan kekerasan, dan perbuatan mengacaukan rencana pihak lain; 2) proses yang sederhana, seperti menyangkal pernyataan orang lain di muka umum, memaki-maki orang lain, penolakan melalui surat selebaran, memfitnah, dan sebagainya; 3) proses yang intensif, seperti perbuatan berkhianat, mengumumkan rahasia pihak lain, dan sebagainya; 4) proses yang bersifat taktis perbuatan, seperti memprovokasi, intimidasi, mengejutkan lawan, membingungkan pihak lain, dan sebagainya (Joko Sri Sukardi & Arif Rohman, 2009: 64).

## 3) Konflik

Konflik adalah proses sosial antarperorangan atau kelompok masyarakat tertentu, akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah yang mengganjal interaksi sosial di antara mereka yang bertikai tersebut (J. Swi Narwoko & Bagong Suyanto, 2011: 65-71).

Pertentangan adalah suatu proses sosial dalam rangka memenuhi tujuan individu atau kelompok dengan cara menentang pihak lain yang disertai ancaman atau kekerasan. Setiap individu dan kelompok menyadari adanya perbedaan-perbedaan, misalnya ciri-ciri badaniah, emosi, unsur-unsur kebudayaan, dan pola perilaku. Perasaan yang berwujud amarah

dan kebencian akan mempertajam perbedaan ini. Oleh karena itu, konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang negatif. Contohnya, pertentangan antarkampung yang menggunakan kekerasan. Menurut Soerjono Soekanto (1989) sebab-sebab terjadinya pertentangan adalah sebagai berikut.

- a) Perbedaan antarindividu, seperti perbedaan pemikiran, pendirian, ideologi, kepentingan, dan lain-lain.
- b) Perbedaan kebudayaan, seperti adanya perasaan yang menganggap kebudayaannya yang paling unggul dan meremehkan kebudayaan lain dapat memicu perbedaan kebudayaan.
- c) Perbedaan kepentingan, seperti pertentangan antara eksekutif (pemerintah) dengan legislatif (DPR) adalah contoh nyata perbedaan kepentingan.
- d) Perubahan sosial. Pergeseran nilai dan norma sosial merupakan bentuk perubahan sosial. Apabila perubahan sosial itu berlangsung sangat cepat dapat menimbulkan pertentangan antarkelompok, terutama antara kelompok yang menginginkan perubahan dengan kelompok yang pro *status quo* (antiperubahan) (Joko Sri Sukardi & Arif Rohman, 2009: 65).

## B. Kelompok Sosial

Tidak selamanya kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi hanya dengan mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Sering kali kebutuhan hidup tersebut harus diusahakan secara bersama-sama dengan warga masyarakat yang lain. Interaksi sosial yang terjalin melahirkan berbagai bentuk kelompok, lembaga sosial, dan organisasi sosial (Joko Sri Sukardi & Arif Rohman, 2009: 65). Guna memperoleh pemahaman mengenai ketiga hal tersebut, ikutilah pembelajaran berikut ini.

### 1. Pengertian Kelompok Sosial

Kelompok sosial adalah sebuah naluri manusia sejak ia dilahirkan. Naluri ini yang selalu mendorongnya untuk selalu menyatukan hidupnya dengan orang lain dalam kelompoknya. Naluri berkelompok itu juga yang mendorong manusia untuk menyatukan dirinya dengan kelompok yang lebih besar dalam kehidupan manusia lain di sekelilingnya bahkan

mendorong manusia menyatu dengan alam fisiknya. Untuk memenuhi naluri manusia ini, maka setiap manusia melakukan proses keterlibatannya dengan orang lain dan lingkungannya, proses ini dinamakan adaptasi. Adaptasi dengan kedua lingkungan tadi; manusia lain dan alam sekitarnya itu, melahirkan struktur sosial baru yang disebut dengan kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kehidupan bersama manusia dalam himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang umumnya secara fisik relatif kecil yang hidup secara guyub (Burhan Bungin, 2009: 48).

Maclver dan H. Page mengungkapkan bahwa kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut, antara lain menyangkut timbal balik yang saling memengaruhi dan juga kesadaran saling menolong (Elisanti & Titin Rostini, 2009: 75). Soerjono Soekanto menambahkan bahwa berdasarkan pendapat Maclver dan Page, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan antara mereka (Elisanti & Titin Rostini, 2009: 75). Horton dan Hunt (1996: 214-215), mendefinisikan kelompok ke dalam beberapa artian, sebagai berikut.

- a. Kelompok sebagai kumpulan manusia secara fisik. Dalam hal ini kelompok memiliki ikatan kebersamaan dan jarak fisik yang dekat.
- b. Kelompok sebagai sejumlah orang yang memiliki persamaan ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri jenis kelamin, kebiasaan, pekerjaan, antara lain disebut juga kelompok klasifikasi.
- c. Kelompok adalah sejumlah orang yang memiliki pola interaksi yang terorganisasi dan terjadi secara berulang-ulang. Dalam hal ini, setiap bentuk hubungan kolektif antara beberapa orang yang berinteraksi berulang-ulang menurut pola-pola kegiatan dan jaringan tertentu.
- d. Kelompok sebagai setiap kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Dua atau beberapa orang dikatakan sebagai kelompok jika mereka sudah memiliki kesamaan kepentingan.

Dari beberapa definisi di atas hakikat keberadaan suatu kelompok sosial tidaklah terletak pada kedekatan jarak fisik, tetapi pada adanya satu kesadaran untuk berinteraksi. Kesadaran untuk berinteraksi merupakan hal yang sangat prinsip bagi setiap anggota kumpulan manusia. Adapun yang menjadi persyaratan kelompok sosial harus mengandung unsur-unsur berikut, seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1997: 125-126).

- a. Setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Kesadaran anggota merupakan hal

- yang penting dalam sebuah kelompok. Hal itu akan menimbulkan rasa memiliki yang pada gilirannya akan memelihara keutuhan kelompok.
- b. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Kekompakan atau solidaritas antara anggota akan memberikan kontribusi bagi perkembangan kelompok.
  - c. Ada faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan mereka bertambah erat. Rasa senasib sepenanggungan atau sehidup semati dalam berkelompok bisa menimbulkan semangat untuk bekerja sama demi tujuan bersama.
  - d. Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Susunan kelompok, dan norma atau peraturan tidak akan terpisah dari sebuah ikatan guna menjaga kelangsungannya.
  - e. Bersistem dan berproses. Dimaksudkan, terdiri atas unsur yang saling menunjang satu dengan lainnya. Juga terdapat runtutan di dalam perkembangannya.

Dari berbagai persyaratan di atas sebenarnya bisa dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, merupakan syarat terbentuknya kelompok yang tidak disengaja atau tumbuh secara alamiah, misalnya marga dalam sistem kekerabatan. *Kedua*, menunjuk kepada kelompok yang dibentuk dengan sengaja, seperti persatuan sepak bola. Dengan mengklasifikasikan persyaratan tersebut akan terlihat mana yang termasuk kelompok yang terbentuk secara alami dan mana yang dibentuk dengan sengaja (Elisanti & Titin Rostini, 2009: 76).

## 2. Klasifikasi Kelompok Sosial

Untuk memudahkan mengkaji aneka kelompok sosial, beberapa sosiolog mencoba melakukan klasifikasi. Salah satu di antaranya, yaitu Ferdinand Tonnies seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto (1989) yang mengklasifikasi kelompok sosial menjadi dua, yaitu *gemeinschaft* dan *gesselschaft*. Kedua jenis kelompok sosial ini perlu dikaji karena cakupan pengertian *gemeinschaft* dan *gesselschaft* sangat luas (Joko Sri Sukardi & Arif Rohman, 2009: 69).

### a. *Gemeinschaft*

*Gemeinschaft* (paguyuban) digambarkan sebagai kehidupan bersama yang intim dan pribadi. Anggota *gemeinschaft* diikat oleh hubungan batin

yang murni dan bersifat alamiah, serta kekal. Dasar hubungannya adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis sehingga dapat diumpamakan dengan organ tubuh manusia. *Gemeinschaft* mempunyai tiga ciri, yaitu *intimate*, *private*, dan *exclusive*. Pengertian *intimate* menunjuk pada suatu hubungan menyeluruh di antara anggota kelompok yang mesra sekali. *Private* artinya hubungan bersifat pribadi, khusus untuk orang-orang dalam kelompok itu saja. Orang di luar kelompok itu tidak diperlakukan dengan akrab, sedangkan *exclusive* artinya hubungan tersebut hanyalah untuk kita saja dan tidak untuk orang-orang lain di luar kita (Joko Sri Sukardi & Arif Rohman, 2009: 65).

Apabila terjadi pertentangan antaranggota dalam *gemeinschaft*, maka pertentangan tersebut tidak akan dapat dibatasi hanya dalam satu hal saja. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan yang menyeluruh antaranggota. Tidak mungkin suatu pertentangan yang kecil dibatasi karena pertentangan tersebut akan menjalar ke bidang lainnya. *Gemeinschaft* dibagi menjadi *gemeinschaft by blood*, *gemeinschaft of mind*, dan *gemeinschaft of place*. Pengertian *gemeinschaft by blood* mengacu pada keluarga dan kekerabatan. Pernikahan menjadi salah satu sarana terbentuknya *gemeinschaft by blood*. Melalui pernikahan terbentuklah keluarga inti (*nuclear family*) serta bersatulah keluarga besar (*extended family*) dari kedua mempelai. Penarikan garis keturunan patrilineal pada masyarakat Batak. Anak dimasukkan ke dalam marga ayahnya, sedangkan di masyarakat Minang, berlaku penarikan garis keturunan matrilineal, yang memasukkan anak ke dalam kaum kerabat ibunya. Sementara itu, *gemeinschaft of mind* menunjuk pada kelompok yang dibentuk berdasar kesamaan minat, hobi, profesi, atau keyakinan agama. Misalnya, ada klub penggemar motor Harley Davidson, kelompok peminat musik jazz, Ikatan Sarjana Sosiologi Indonesia, ataupun jamaah At-Taubah. Adapun *gemeinschaft of place* mengacu pada kedekatan tempat tinggal. Misalnya dasa wisma, kelompok arisan remaja, rukun tetangga, dan rukun warga (Joko Sri Sukardi & Arif Rohman, 2009: 65).

#### b. *Gessellschaft*

Berbeda dengan *gemeinschaft*, *gessellschaft* (patembayan) digambarkan sebagai ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu pendek, bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka (imajiner), serta strukturnya bersifat mekanis sebagaimana sebuah mesin. Bentuk *gessellschaft* tampak dalam hubungan perjanjian yang didasarkan ikatan timbal balik.

Orang menjadi anggota *gesselschaft* karena dia mempunyai kepentingan-kepentingan secara rasional (Joko Sri Sukardi & Arif Rohman, 2009: 70).

Dengan demikian, kepentingan individual berada di atas kepentingan hidup bersama. Terdapat *public life* yang menunjuk pada hubungan untuk semua orang. Batas antara "kami" dengan "bukan kami" kabur. Pertentangan yang terjadi antaranggota dapat dibatasi pada bidang-bidang tertentu sehingga suatu persoalan dapat dilokalisasi. *Gesselschaft* bersifat abstrak dan semu. Misalnya, kelompok orang yang sedang menyaksikan konser Siti Nurhaliza atau Iwan Fals. Hadirin tidak merasa harus saling kenal. Mereka pun tidak harus terus berkumpul setelah konser selesai. Akan tetapi, mereka yang hadir memiliki satu keperluan sama, yaitu menyaksikan pertunjukan musik itu (Joko Sri Sukardi & Arif Rohman, 2009: 71).

Sementara Robert Bierstedt dalam Bagja Waluya (2009: 90) menggunakan tiga kriteria untuk membedakan jenis kelompok, yaitu ada tidaknya organisasi (formal), hubungan sosial di antara anggota kelompok, dan kesadaran jenis. Bierstedt membedakan empat jenis kelompok, sebagai berikut.

- a. Kelompok statistik (*statistical group*) merupakan kelompok yang tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut. Kelompok statistik hanya ada dalam arti analisis dan merupakan ciptaan para ilmuwan sosial. Contohnya, pengelompokan penduduk berdasarkan usia, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian.
- b. Kelompok kemasyarakatan (*societal group*) merupakan kelompok yang hanya memiliki satu kriteria, yaitu kesadaran akan adanya persamaan di antara anggotanya. Di dalam kelompok ini belum ada kontak dan komunikasi antaranggota kelompok, juga belum ada pengorganisasian. Contohnya, kelompok berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan kelompok orang-orang miskin dan kaya.
- c. Kelompok sosial (*social group*) merupakan kelompok yang memiliki dua kriteria, yaitu kesadaran jenis dan antaranggota saling berhubungan, tetapi belum ada pengorganisasian. Contohnya, kelompok teman, kelompok kerabat, dan kelompok-kelompok pada masyarakat tradisional, seperti kesenian, olahraga, keagamaan atau majelis ta'lim.
- d. Kelompok asosiasi (*associational group*) dalam kelompok ini para anggotanya memiliki kesadaran jenis, yaitu dijumpainya persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Selain itu, para anggota asosiasi saling berhubungan melalui kontak dan komunikasi akibat adanya ikatan organisasi formal. Contohnya, sekolah, organisasi

politik, Persatuan Guru Republik Indonesia, ikatan alumni suatu sekolah atau perguruan tinggi.

Didasarkan pada faktor-faktor yang melatarbelakanginya, kelompok-kelompok di masyarakat menurut (Bagja Waluya, 2009: 90) diklasifikasikan sebagai berikut.

a. Didasarkan Atas Kepentingan Bersama Tanpa Pengorganisasian (Kelompok Tidak Teratur)

Kelompok manusia yang dalam mekanismenya tanpa pengorganisasian atau kelompok sosial tidak teratur dikelompokkan ke dalam dua golongan besar, yaitu sebagai berikut.

1) Kerumunan Sosial

Kerumunan sosial atau *social aggregate* adalah sekumpulan orang yang berada di suatu tempat, tetapi di antara mereka tidak berhubungan secara tetap. Pengelompokan manusia seperti itu disebut juga kolektivitas, yaitu kumpulan manusia pada suatu tempat dan suatu waktu yang sifatnya sementara. Suatu kelompok manusia disebut kerumunan apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

- a) Orang-orang dalam suatu kerumunan sosial tidak saling mengenal.
- b) Kehadiran orang-orang di tempat berkumpul hanya bersifat fisik atau tidak ada kontak batin.
- c) Motivasi berkumpul disebabkan adanya sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum dan terjadi secara kebetulan.
- d) Antara individu yang satu dan individu lainnya tidak terorganisasi.
- e) Interaksi antarindividu bersifat spontan, tidak terduga, sangat lemah, dan singkat. Orang-orang yang hadir dan berkumpul mempunyai kedudukan sosial yang sama (tidak berstruktur) walaupun berasal dari status sosial yang berbeda.
- f) Setiap orang bebas masuk atau keluar dari tempat kerumunan.
- g) Kerumunan terwujud pada tempat tertentu dan hanya untuk sementara.
- h) Orang dalam kerumunan identitas pribadinya hilang karena pengaruh kumulatif atau sengaja menghilangkan identitas pribadinya untuk menyembunyikan status sosial yang sebenarnya (Bagja Waluya, 2009: 90).

Bentuk kerumunan yang dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat, adalah sebagai berikut.

- a) Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial
  - (1) *Formal audience* atau khalayak penonton atau pendengar formal merupakan kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan. Contohnya, penonton film, orang-orang yang menghadiri khotbah keagamaan.
  - (2) *Expressive group* atau kelompok ekspresif adalah kerumunan yang perhatiannya tidak begitu penting, tetapi mempunyai persamaan tujuan yang terpusat dalam aktivitas kerumunan tersebut serta kepuasan yang dihasilkannya. Fungsinya adalah sebagai penyalur ketegangan yang dialami orang karena pekerjaannya sehari-hari. Contohnya, orang yang berpesta atau berdansa.
- b) Kerumunan yang bersifat sementara (*casual crowd*)
  - (1) *Inconvenient aggregations* atau kumpulan yang kurang menyenangkan. Dalam kerumunan tersebut kehadiran orang lain merupakan penghalang terhadap tercapainya maksud atau tujuan seseorang. Contohnya, orang-orang yang antre untuk membeli karcis, orang-orang yang menunggu bus, dan sebagainya.
  - (2) *Panic crowds* adalah kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik. Mereka merupakan orang-orang yang berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Dorongan dalam diri masing-masing individu dalam kerumunan tersebut cenderung mempertinggi rasa panik.
  - (3) *Spectator crowds* atau kerumunan penonton ingin melihat kejadian tertentu, kegiatan yang dilakukan umumnya tidak terkendali. Contohnya, kerumunan yang menyaksikan suatu kecelakaan atau musibah bencana alam (Bagja Waluya, 2009: 91).
- c) Kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum (*lawless crowds*)
  - (1) *Acting mobs* atau gerombolan adalah kerumunan yang bertindak emosional, sifatnya tidak terkendali karena setiap orang tidak mampu mengontrol diri (secara fisik ataupun psikis). Suatu gerombolan cenderung melakukan perbuatan yang destruktif, antisosial bahkan dikategorikan pada pemberontakan. Timbulnya gerombolan disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat membakar emosi massa, seperti konflik sosial karena unsur SARA, cemburu sosial, hasutan dan adu domba, kebijaksanaan pemerintah, kekecewaan, dan sebagainya. Contohnya, gerombolan pedagang kaki lima mengamuk dan merusak fasilitas umum karena dilarang

berjalan di suatu tempat yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

(2) *Immoral crowds* adalah kerumunan yang tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat. Contohnya, kumpulan orang yang sedang mabuk.

d) Kerumunan pasif atau *crowd*

Dalam kerumunan ini, individu-individu hanya berkumpul secara fisik, tenang atau tidak mengganggu orang lain, dan tidak mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Orang-orang yang berkumpul di tempat tersebut dilatarbelakangi berbagai alasan atau motivasi. Contohnya, orang-orang yang menonton tukang sulap, dan tukang obral.

e) Manifestasi umum (*demonstration*) atau unjuk rasa

Kerumunan jenis ini bersifat lebih teratur daripada himpunan penonton. Artinya sebelum melakukan kegiatan tersebut orang-orang membuat rencana terlebih dahulu walaupun organisasinya sering kurang tegas. Contohnya, demonstrasi menentang kebijaksanaan pemerintah Orde Baru.

f) Kerumunan berdasarkan tempat tinggal atau *residential aggregate*

Kerumunan ini merupakan kesatuan manusia yang mempunyai tempat tinggal yang sama, tetapi tidak saling mengenal. Lokasinya ditemukan di kota-kota besar. Di tengah kota besar banyak orang yang tidak mengenal tetangganya sehingga tidak terjadi hubungan di antara mereka, di pinggiran kota besar, ditemukan kerumunan orang yang disebut gelandangan.

g) Kerumunan fungsional atau *functional aggregate*

Kerumunan fungsional terdiri atas sekumpulan orang yang mempunyai tugas atau fungsi tertentu, tetapi mereka tidak dapat dimasukkan dalam pengertian kelompok sosial atau komunitas sosial. Contohnya, daerah-daerah di perkotaan yang dijadikan tempat perdagangan atau pasar (Bagja Waluya, 2009: 91).

2) Publik

Publik merupakan kelompok yang bukan merupakan kesatuan. Interaksi berlangsung melalui alat-alat komunikasi dan tidak langgeng. Contohnya, pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus atau gosip, surat kabar, radio, televisi, film, dan sebagainya. Dengan alat-alat penghubung seperti ini mungkin publik mempunyai pengikut yang luas dan berjumlah besar. Setiap aksi publik diprakarsai oleh keinginan individual, misalnya pemungutan suara dalam pemilihan umum.

### 3) Massa

Massa diartikan sebagai keseluruhan dari kerumunan sosial. Pengertian massa timbul sejalan dengan perkembangan masyarakat yang mengarah pada pola kehidupan modern. Oleh karena itu, pengertian massa menjadi ciri khas masyarakat modern yang pada umumnya bertempat tinggal di perkotaan. Ciri massa yang menonjol adalah suatu kumpulan orang yang heterogen sehingga identitasnya sulit diketahui. Keanekaragaman massa tampak dari diferensiasi status sosial, taraf hidup, pendidikan, keturunan, pekerjaan, dan agama (Bagja Waluya, 2009: 92).

#### b. Didasarkan Atas Kepentingan Bersama dengan Pengorganisasian (Kelompok Teratur)

Kelompok manusia yang dalam mekanismenya berlangsung secara terorganisasi atau dengan pengorganisasian (Bagja Waluya, 2009: 94).

##### 1) Kelompok Dasar (*Basic Group*)

Kelompok dasar adalah kelompok yang dibentuk secara spontan dari bawah untuk melindungi anggota-anggotanya terhadap tekanan negatif dari masyarakat besar dan sekaligus berfungsi sebagai sumber kegiatan bagi pembaruan masyarakat besar (induk) itu sendiri (Bagja Waluya, 2009: 94). Suatu kesatuan manusia dikategorikan sebagai kelompok dasar apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a) Kelompok dasar pada umumnya merupakan kelompok yang relatif kecil dan terdiri atas orang-orang yang tidak puas terhadap masyarakat sekitarnya.
- b) Kelompok dasar dibentuk dari bawah secara spontan, tidak didasarkan atas perintah atau desakan unsur pimpinan masyarakat yang sedang memegang kekuasaan. Sering pembentukan kelompok dasar tidak direstui pemerintah karena bertentangan dengan kehendak pemerintah.
- c) Kelompok dasar dibentuk khusus guna melindungi anggota kelompoknya dan secara umum melindungi masyarakat luas dari tekanan anonim unsur kekuasaan yang merugikan lapisan bawah.
- d) Kelompok dasar dapat berfungsi sebagai pembaru masyarakat besar (masyarakat politik atau negara dan masyarakat agama) yang dirasa telah kehilangan vitalitasnya dalam menjalankan fungsi-fungsi sosialnya. Contoh kelompok dasar yang terdapat di masyarakat di antaranya kelompok yang berlandaskan agama. Kelompok agama muncul karena

unsur-unsur penting telah kehilangan fungsinya bagi masyarakat (Bagja Waluya, 2009: 95).

## 2) Kelompok Besar (*Big Group*) dan Kelompok Kecil (*Small Group*)

Besar kecilnya suatu kelompok ditentukan oleh kriteria tugas-tugas sosial dan jumlah anggotanya. Suatu kelompok disebut besar apabila bobot tugas yang ditangani atau tugas-tugas sosial yang dilaksanakannya penting dan universal. Tugas-tugas tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar guna mempertahankan kehidupan masyarakat. Kelompok besar adalah kelompok yang memiliki jumlah anggota relatif besar dan biasanya terbentuk dari beberapa kelompok kecil yang masing-masing kelompok menangani tugas tertentu. Kebutuhan sosial yang dinilai umum sebagai kebutuhan dasar harus selalu ada dalam setiap masyarakat, yaitu ekonomi, politik, pendidikan, keagamaan, kesenian, dan sebagainya.

Kelompok kecil adalah kelompok yang jumlah anggotanya relatif kecil (paling sedikit dua orang) dan dibentuk atas dasar kebutuhan atau kepentingan kecil dan spesifik. Kelompok-kelompok kecil selalu timbul atau pasti akan timbul di dalam kelompok yang lebih besar dan luas. Hal ini terjadi karena manusia mempunyai kepentingan yang berbeda. Manusia memerlukan bantuan dan perlindungan dari sesamanya. Manusia mempunyai kemampuan yang terbatas dan sebagainya. Keadaan yang demikian menyebabkan timbulnya kelompok kecil (*small group*). Contohnya, kelompok belajar dan kelompok diskusi merupakan kelompok kecil dari suatu kelompok pendidikan (sekolah) (Bagja Waluya, 2009: 95).

Kelompok kecil mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelompok besar sebab memiliki beberapa alasan, yaitu sebagai berikut.

- a) Kelompok kecil mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat dan perilaku setiap individu. Kelompok kecil, di mana seseorang menjadi anggota, tidak saja merupakan sumber simpati, tetapi juga sebagai sumber ketegangan, tekanan, dan kekecewaan.
- b) Dalam kelompok kecil, pertemuan antara kepentingan sosial dengan kepentingan individu berlangsung secara tajam dan jelas.
- c) Kelompok kecil pada hakikatnya merupakan sel yang menggerakkan suatu organisme yang dinamakan masyarakat.
- d) Kelompok-kelompok kecil merupakan bentuk khusus dalam kerangka sosial secara keseluruhan. Kelompok kecil seolah-olah miniatur masyarakat yang mempunyai pembagian kerja, kode etik, pemerintahan, prestise, ideologi, dan sebagainya (Bagja Waluya, 2009:95)

### 3) Kelompok Primer (*Primary Group*) dan Kelompok Sekunder (*Secondary Group*)

Kelompok primer (*primary group*) adalah kesatuan hidup manusia yang ditandai dengan hubungan antaranggotanya yang berlangsung secara tatap muka, saling mengenal, mesra dan akrab, kerja sama yang erat dan bersifat pribadi (Bagja Waluya, 2009: 95). Faktor-faktor yang memungkinkan hubungan manusia dalam suatu kelompok berlangsung secara akrab dan mesra di antaranya sebagai berikut.

- a) Jumlah anggota relatif kecil sehingga mereka saling mengenal kepribadian masing-masing.
- b) Adanya rasa solidaritas yang tinggi di antara anggota-anggotanya. Mereka merasa mempunyai kepentingan yang sama, memegang nilai-nilai budaya yang sama, berasal dari keturunan yang sama.
- c) Merasa mempunyai nasib yang sama karena pengalaman sejarah yang sama. Contohnya, kelompok primer, yaitu keluarga beserta kerabatnya.

Kelompok sekunder (*secondary group*) adalah kelompok yang hubungan antaranggotanya kurang akrab, renggang bahkan tidak saling mengenal. Dalam kehidupan masyarakat setiap orang pada umumnya memiliki dua keanggotaan sekaligus. Selain sebagai anggota kelompok primer, dia juga sebagai anggota kelompok sekunder. Faktor yang menyebabkan terbentuknya kelompok sekunder adalah hasrat dan kebutuhan hidup. Hasrat dan kebutuhan hidup itulah yang mendorong manusia untuk hidup berkelompok.

Manusia merupakan makhluk yang selalu ingin hidup bersama dan tidak mungkin dapat bertahan hidup tanpa manusia lain. Pada saat suatu kebutuhan tidak bisa dipenuhi oleh diri sendiri atau kelompoknya (primer), manusia akan membentuk atau memasuki kelompok sekunder. Manusia sebagai pribadi dalam kelompok sekunder kurang mendapat perhatian sebab yang menjadi pusat perhatian adalah tugas dan prestasi kerja. Contohnya, dalam sebuah perusahaan, aspek yang dihargai dari seseorang adalah kepandaian, keterampilan, keluwesan bekerja sama, dan kepemimpinannya. Demi efisiensi, prinsip utamanya adalah menempatkan seseorang untuk melakukan suatu jenis pekerjaan sesuai dengan keahliannya (Bagja Waluya, 2009: 95).

#### 4) Kelompok Dalam (*In-Group*) dan Kelompok Luar (*Out-Group*)

Istilah *in-group* atau kelompok dalam muncul ketika para anggota suatu kelompok merasa bahwa mereka mempunyai suatu tujuan dan cita-cita yang sama, menaati norma-norma yang sama, nasib yang sama. Kelompok tersebut menganggap inilah kelompok kami atau orang-orang kita. Dalam ucapan, sikap, dan perilakunya terkandung makna bahwa orang lain yang bukan termasuk kelompoknya (orang luar). Contohnya, kami warga RT 007, sedangkan mereka warga RT 10; "Kami semester VII, sedangkan dia Semester IV."

Sikap *out-group* atau kelompok luar ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonisme atau antipati. Hubungan dengan orang-orang yang bukan anggota kelompoknya berlangsung kurang akrab, dan berhati-hati. Perasaan *in-group* dan *out-group* atau perasaan dalam dan luar kelompok merupakan suatu sikap yang dinamakan fanatisme, yaitu suatu sikap untuk menilai orang lain dengan menggunakan nilai-nilai dan norma kelompok sendiri. Mereka beranggapan bahwa segala sesuatu dalam kelompoknya adalah yang terbaik. Menilai kelompok lain sering kali bersifat stereotip, yaitu gambaran atau anggapan dari suatu kelompok terhadap kelompok lain yang bersifat merendahkan objek tertentu atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sikap stereotip mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti agama atau kepercayaan, etnis, pekerjaan, dan sebagainya. *In-group* dan *out-group* dapat dijumpai di semua masyarakat walaupun kepentingannya berbeda-beda. Dalam masyarakat bersahaja mungkin jumlahnya tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan masyarakat kompleks sebab perbedaan unsur-unsur sosial tidak tampak secara jelas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap kelompok sosial adalah *in-group* bagi anggotanya dan *out-group* bagi anggota kelompok (Bagja Waluya, 2009: 95).

#### 5) Paguyuban (*Gemeinschaft*) dan Patembayan (*Gesselschaft*)

Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama yang para anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal (Bagja Waluya, 2009: 94). Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Kehidupan tersebut bersifat nyata dan organis yang dapat diumpamakan tubuh manusia atau hewan. Bentuk paguyuban akan dijumpai di dalam keluarga, kelompok kerabat, rukun tetangga, dan sebagainya. Suatu kelompok dinamakan paguyuban apabila mempunyai beberapa ciri berikut.

- a) *Intimate*, hubungan menyeluruh dan akrab.
- b) *Private*, hubungan yang bersifat pribadi, yaitu khusus untuk beberapa orang saja.
- c) *Exclusive*, hubungan tersebut hanya untuk kita saja dan tidak untuk orang lain di luar kita.

Di dalam paguyuban terdapat suatu kemauan bersama. Ada suatu pengertian serta kaidah-kaidah yang timbul dengan sendirinya dari kelompok tersebut (Bagja Waluya, 2009: 95). Menurut Tonnies, dalam setiap masyarakat selalu dapat dijumpai salah satu di antara tiga tipe paguyuban.

- a) Paguyuban karena ikatan darah (*gemeinschaft by blood*), yaitu paguyuban yang terbentuk didasarkan pada ikatan darah atau keturunan. Contohnya, keluarga, kelompok kekerabatan.
- b) Paguyuban karena tempat (*gemeinschaft of place*), yaitu suatu paguyuban yang terdiri atas orang-orang yang berdekatan tempat tinggalnya sehingga dapat saling menolong. Contohnya, rukun tetangga, rukun warga, atau arisan.
- c) Paguyuban karena jiwa dan pikiran (*gemeinschaft of mind*) merupakan suatu paguyuban yang terdiri atas orang-orang yang walaupun tidak mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggalnya tidak berdekatan, tetapi mereka mempunyai pikiran dan ideologi yang sama (Bagja Waluya, 2009: 96).

Patembayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran berkala serta strukturnya bersifat mekanis sebagaimana dapat diumpamakan dengan sebuah mesin (Bagja Waluya, 2009: 96). Bentuk *gessellschaft* terutama terdapat di dalam hubungan perjanjian yang berdasarkan ikatan timbal balik. Contohnya, ikatan pedagang, organisasi pengusaha, atau serikat buruh.

## 6) Kelompok Informal (*Informal Group*) dan Kelompok Formal (*Formal Group*)

Kelompok informal adalah kesatuan hidup manusia yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan berulang kali dan pertemuan tersebut menjadi dasar bagi bertemunya kepentingan-kepentingan dan pengalaman yang sama. Contohnya, Klik (*clique*), yaitu suatu kelompok kecil tanpa struktur formal yang sering timbul dalam kelompok-kelompok

besar. Klik tersebut ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan timbal balik antaranggota, biasanya bersifat antara kita saja (egalitas).

Kelompok formal adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Hubungan antaranggota berlangsung secara terkoordinasi melalui usaha-usaha untuk mencapai tujuan berdasarkan bagian-bagian organisasi yang bersifat spesialisasi. Kegiatannya didasarkan pada aturan-aturan yang sebelumnya sudah ditentukan. Organisasi biasanya ditegakkan pada landasan mekanisme administratif. Staf administratif bertanggung jawab memelihara organisasi dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan organisasi. Contohnya, unit kepolisian lalu lintas terdiri atas bagian-bagian, yaitu bagian administrasi, lapangan atau patroli, logistik, pembinaan atau penyuluhan.

#### 7) Kelompok Okupasional (*Occupational Group*) dan Kelompok Volunter (*Voluntary Group*)

Kelompok okupasional adalah kelompok yang terdiri atas orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Kelompok okupasional biasa terdapat pada masyarakat heterogen (Bagja Waluya, 2009: 98). Pada masyarakat ini berkembang sistem pembagian kerja yang semakin didasarkan pada pengkhususan atau spesialisasi. Warga masyarakat melakukan pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Melalui keahliannya, mereka membantu masyarakat untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Oleh karena itu, muncul kelompok-kelompok profesi yang terdiri atas kalangan profesional yang seolah-olah mempunyai monopoli terhadap bidang ilmu dan teknologi tertentu.

Semakin berkembangnya sistem komunikasi mengakibatkan ruang jangkauan suatu masyarakat semakin luas. Secara praktis tidak ada masyarakat yang tertutup terhadap dunia luar. Hal ini menyebabkan semakin heterogennya masyarakat tersebut sehingga tidak semua kepentingan individual warga dapat dipenuhi secara mantap. Salah satu akibat dari tidak terpenuhinya kepentingan-kepentingan tersebut, baik material maupun spiritual adalah munculnya kelompok-kelompok volunter. Kelompok volunter mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan sama, tetapi tidak mendapatkan perhatian masyarakat yang daya jangkauannya semakin luas. Mereka mencoba memenuhi kepentingan anggota dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga tidak mengganggu kepentingan masyarakat secara luas (Bagja Waluya, 2009: 98).

Kelompok-kelompok volunteer mungkin didasarkan pada kepentingan-kepentingan primer yang mencakup kebutuhan pangan, sandang, dan papan, keselamatan jiwa dan harta benda, harga diri, mengembangkan potensi diri, kasih sayang, dan sebagainya. Selain itu, kepentingan primer juga didasarkan pada kepentingan sekunder, misalnya kebutuhan rekreasi. Dengan berbagai landasan tersebut, timbul aneka macam kelompok volunteer yang mungkin berkembang menjadi kelompok-kelompok yang mantap dan diakui masyarakat umum.

#### 8) Kelompok Keanggotaan (*Membership Group*) dan Kelompok Acuan (*Reference Group*)

Kelompok keanggotaan (*membership group* atau *appurtenance group*) adalah kelompok yang menunjukkan seseorang secara resmi dan secara fisik menjadi anggota (Bagja Waluya, 2009: 99). Orang lain dapat dengan mudah dan pasti menentukan dari kelompok mana orang tersebut berasal atau sebagai anggota kelompok mana melalui tanda pengenal yang dimilikinya. Contohnya, Andi berprofesi sebagai guru, bukti yang menunjukkan dia sebagai anggota dari *membership group* adalah Kartu Anggota PGRI yang menjelaskan bahwa Andi telah diterima secara sah sebagai anggota PGRI.

Dalam masyarakat yang belum mengenal administrasi secara baik, keanggotaan seseorang ditunjukkan dengan keberadaannya secara fisik yang selalu bersama-sama dengan anggota kelompok. Kelompok acuan (*reference group*) adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang (bukan anggota kelompok) untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Seseorang yang bukan anggota kelompok (orang dari luar kelompok) menerima pengaruh dari suatu kelompok, dia menjalin ikatan batin dan berusaha menyesuaikan diri serta mengidentifikasi diri dengan kelompok tadi karena dia berpandangan bahwa kelompok tersebut berguna untuk mengembangkan kehidupannya. Contohnya, Andi sebagai anggota PGRI menjalin hubungan secara tersembunyi atau terang-terangan dengan koperasi yang ada di daerahnya. Walaupun bukan anggota koperasi tersebut, dia berusaha mengembangkan prinsip-prinsip koperasi dalam kehidupannya karena terbukti bahwa koperasi sangat bermanfaat bagi pengembangan ekonomi keluarganya. Koperasi dalam hal ini merupakan *reference group* bagi Andi. Kenyataan sosial menunjukkan bahwa jumlah anggota masyarakat yang menjadi *reference group* jumlahnya relatif banyak, terutama dengan kelompok keagamaan. Artinya, tidak menjadi

anggota resmi agama tertentu, tetapi mereka berusaha menyesuaikan diri dengan ajaran agama yang secara hakiki dapat menciptakan ketenangan dan kebahagiaan hidup (Bagja Waluya, 2009: 99).

Dalam keadaan tertentu, antara *reference group* dan *membership group* agak sulit dipisahkan. Contohnya, seorang anggota partai politik menjadi anggota DPR. DPR merupakan *membership* baginya, tetapi jiwa dan jalan pikirannya tetap terikat pada partainya. Hal ini sering menampakkan segi-segi negatif karena anggota dewan yang terhormat terlampau berpegang pada prinsip-prinsip *reference group* (partainya) (Bagja Waluya, 2009: 99).

#### 9) Kelompok Penekan (*Pressure Group*)

Kelompok penekan adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya bertujuan memperjuangkan kepentingan mereka di tengah masyarakat luas dengan cara menggunakan tekanan sosial (Bagja Waluya, 2009: 99). Kelompok penekan termasuk kelompok sekunder dan umumnya mempunyai anggota relatif besar, tetapi yang digunakan sebagai penekan hanyalah sebagian kecil dari anggota kelompoknya. Mereka terdiri atas orang-orang potensial yang mampu menguasai dan mengendalikan masyarakat sehingga mampu mempromosikan kepentingannya. Kelompok penekan umumnya terdapat dalam masyarakat yang menganut sistem demokrasi liberal, yaitu setiap individu sebagai anggota masyarakat mempunyai kebebasan yang sangat besar untuk menyampaikan aspirasinya.

#### c. Kelompok Teritorial atau Komunitas Sosial

Kata komunitas (*community*) berasal dari bahasa Latin *communire* atau *communia* yang berarti memperkuat (Bagja Waluya, 2009: 100). Dari kata ini, dibentuk istilah komunitas yang artinya persatuan, persaudaraan, kumpulan, masyarakat. Komunitas sosial adalah suatu kelompok teritorial yang membina hubungan para anggotanya dengan menggunakan sarana-sarana yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Komunitas merupakan kelompok sosial yang memiliki ciri tersendiri dalam hal kebersamaannya. Komunitas merupakan bagian dari masyarakat, tetapi berbeda dengan kolektivitas atau kerumunan (Bagja Waluya, 2009: 100).

Menurut Soerjono Soekanto, istilah komunitas atau *community* dapat diterjemahkan sebagai "masyarakat setempat". Istilah yang menunjuk pada warga sebuah desa, sebuah kota, suku, atau suatu bangsa. Apabila anggota suatu kelompok baik kelompok besar maupun kelompok kecil

hidup bersama sedemikian rupa sehingga mereka merasakan bahwa kelompok tersebut memenuhi kepentingan hidup yang utama, kelompok tersebut disebut dengan masyarakat setempat (Slamet Santosa, 204: 83). *Community* berasal dari bahasa Latin yang artinya komunitas. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi timbulnya *community*, antara lain sebagai berikut: (Slamet Santosa, 204: 83).

- a) Adanya suatu interaksi yang lebih besar di antara anggota yang bertempat tinggal di satu daerah dengan batas-batas tertentu.
- b) Adanya norma sosial manusia di dalam masyarakat, di antaranya kebudayaan masyarakat sebagai suatu ketergantungan yang normatif, norma kemasyarakatan yang historis, perbedaan sosial budaya antara lembaga kemasyarakatan dan organisasi masyarakat.
- c) Adanya ketergantungan antara kebudayaan dan masyarakat yang bersifat normatif. Demikian juga norma yang ada dalam masyarakat akan memberikan batas-batas kelakuan pada anggotanya dan dapat berfungsi sebagai pedoman bagi kelompok untuk menyumbangkan sikap dan kebersamaannya di mana mereka berada.

Salah satu fungsi penting yang dijalankan *community*, yaitu fungsi mengadakan pasar karena aktivitas ekonomi. Selain sebagai pusat pertukaran jasa-jasa di bidang politik, agama, pendidikan, rekreasi, dan sebagainya. Di samping itu, di dalam komunitas ditandai dengan adanya hubungan sosial antara anggota kelompok masyarakat. Secara ringkasnya dapat disimpulkan sebagai ciri-ciri komunitas (Slamet Santosa, 204: 83), yaitu:

- a) daerah atau batasan tertentu;
- b) manusia yang bertempat tinggal;
- c) kehidupan masyarakat;
- d) hubungan sosial antara anggota kelompoknya.

Komunitas memiliki beberapa komponen. Komponen yang termasuk dalam komunitas adalah sebagai berikut.

- a) Masyarakat sebagai kelompok atau himpunan orang-orang yang hidup bersama terjalin satu sama lain ketika orang-orang tersebut menjadi anggotanya.

- b) Kebudayaan sebagai alat pemuasan kebutuhan manusia baik jasmani maupun rohani yang terdiri dari hasil pemuasan dan binaan manusia baik berupa benda maupun bukan benda.
- c) Kekayaan alam sebagai sumber-sumber materi bagi kelangsungan hidup manusia.

### 1) Ciri-Ciri Komunitas Sosial

- a) Kesatuan Hidup yang Tetap dan Teratur  
Sebagai suatu kelompok sosial, komunitas merupakan kesatuan hidup manusia yang tetap dan teratur (Bagja Waluya, 2009: 100). Hubungan antaranggotanya berlangsung secara akrab, kekeluargaan, saling mengenal (*face to face*), saling menolong.
- b) Bersifat Teritorial  
Unsur utama dan khas yang menunjukkan suatu kelompok sosial sebagai komunitas sosial adalah daerah yang sama tempat kelompok tersebut berada. Oleh karena itu, komunitas sering disebut masyarakat setempat. Contohnya, kelompok sosial yang bertempat tinggal di lingkungan RT, RW, desa. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam komunitas tidak mengandung pengertian regionalisme atau daerah yang luas seperti kabupaten atau provinsi (Bagja Waluya, 2009: 100).

### 2) Jenis Komunitas Sosial

- a) Komunitas Pedesaan  
Orang-orang memberikan pengertian tentang desa didasarkan pada sudut pandang masing-masing. Ditinjau dari sudut administrasi, desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah kepemimpinan seorang kepala desa dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan suatu negara. Secara geografis, desa adalah hasil perpaduan antara kegiatan kelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu adalah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi dalam hubungannya dengan daerah lain (Bagja Waluya, 2009: 101). Phillips Ruop mengemukakan bahwa secara sosiologis, desa merupakan:
  - (1) daerah yang sama dilihat dari segi geografis dan administratif;
  - (2) nilai sosial yang sama, artinya seluruh anggota masyarakat desa menganut nilai-nilai sosial yang sama;

(3) kegiatan yang sama terutama dalam sistem mata pencaharian. Masyarakat desa pada umumnya di bidang pertanian yang tidak lepas dari pengaruh lingkungan alam, seperti, tanah, iklim dan morfologi (dataran, pegunungan, pantai); dan tata kelakuan. Corak kehidupan di desa didasarkan pada kekeluargaan yang erat dan termasuk pada masyarakat paguyuban (Bagja Waluya, 2009: 101).

b) Komunitas Perkotaan

Para sarjana sosiologi memberikan definisi tentang kota secara berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing (Bagja Waluya, 2009: 102).

(1) Max Weber

Suatu tempat disebut kota apabila penduduk atau masyarakatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal.

(2) Wright

Kota adalah pemukiman yang relatif besar, padat, dan permanen, serta dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Akibatnya hubungan sosial menjadi longgar, acuh tak acuh, dan tidak bersifat pribadi.

(3) Haris dan Ulman

Kota merupakan pusat pemukiman dan pemanfaatan bumi oleh manusia. Kota-kota sekaligus merupakan paradoks. Pertumbuhannya cepat dan luasnya kota-kota menunjukkan keunggulan dalam mengeksploitasi bumi. Di pihak lain, berakibat munculnya lingkungan miskin bagi manusia (Bagja Waluya, 2009: 102).

Berdasarkan pengertian tersebut, tampak beberapa aspek yang merupakan ciri kehidupan dalam komunitas perkotaan.

(1) Suatu tempat disebut kota apabila penduduk atau masyarakatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal.

(2) Masyarakat perkotaan bertempat tinggal di tempat-tempat yang strategis untuk dua kebutuhan penting, yaitu perekonomian dan pemerintahan. Tempat-tempat yang demikian memberi jaminan terhadap kelancaran transportasi, komunikasi, dan informasi. Misalnya, di sepanjang jalannya, di daerah pantai dan di sekitar sungai besar.

(3) Struktur hidup perkotaan yang mencakup keanekaragaman penduduk, ras, etnis dan kebudayaan.

- (4) Kota merupakan kumpulan kelompok sekunder, seperti asosiasi pendidikan, partai politik, pemerintahan, perekonomian.
  - (5) Pergaulan hidup penduduk kota bersifat individualisme, setiap orang tidak bergantung kepada orang lain. Akibatnya antarindividu tidak saling mengenal, hubungan pribadi berubah menjadi hubungan kontrak, komunikasi dilakukan melalui media komunikasi massa, seperti koran, majalah, radio, televisi, telepon dan sebagainya.
  - (6) Terdapat permukiman yang terbagi dalam beberapa lokasi atau blok sesuai dengan jenis pekerjaan orang yang menempatnya, seperti daerah pertokoan, daerah kemiliteran, daerah kumuh (*slum*).
  - (7) Kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat tampak secara jelas yang tercermin dalam sarana atau prasarana kehidupan penduduk.
  - (8) Pola berpilar bersifat rasional dan cenderung disesuaikan dengan situasi yang berkembang di masyarakat.
  - (9) Memiliki jiwa urbanisme, sikap dan perilaku masyarakat kota selalu berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Bagja Waluya, 2009: 103).
- c) Komunitas Religius
- Komunitas religius adalah suatu bentuk kehidupan bersama yang didasarkan atas motif keagamaan (Bagja Waluya, 2009: 102). Setiap aspek kehidupan dilandasi nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama. Berikut ciri-ciri yang tampak dalam komunitas religius.
- (1) Sikap dan perilaku yang diwujudkan dalam tindakan dan interaksi sosial senantiasa memperhatikan norma-norma yang sesuai dengan agama yang dianutnya.
  - (2) Simbol-simbol yang digunakan dalam pakaian, tempat ibadah serta benda lain diwarnai ajaran agamanya.
  - (3) Menciptakan keseimbangan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat.
  - (4) Bertempat tinggal di lingkungan tempat-tempat ibadah atau tempat menuntut ilmu keagamaan (Bagja Waluya, 2009: 103).
- d) Komunitas Ekonomi
- Komunitas ekonomi adalah suatu bentuk hidup bersama yang sebagian besar kegiatan penduduknya berorientasi di bidang ekonomi (Bagja Waluya, 2009: 102). Setiap aspek kehidupan dilandasi dengan hal-hal yang memiliki nilai-nilai ekonomi. Komunitas ekonomi pada umumnya berada di kawasan perindustrian, perdagangan, dan jasa. Contohnya, masyarakat Cibaduyut di Kota Bandung, hampir seluruh anggota

masyarakatnya berprofesi sebagai pengrajin sepatu (*home industry*). Beberapa ahli sosiologi juga mengklasifikasikan kelompok sosial ke dalam beberapa jenis sebagai berikut.

(1) Emille Durkheim membagi kelompok sosial yang didasarkan pada Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik. Solidaritas mekanik merupakan ciri dari masyarakat yang sederhana dan belum mengenal adanya pembagian kerja. Tiap-tiap kelompok dapat memenuhi keperluan mereka sendiri tanpa memerlukan bantuan atau kerja sama dengan kelompok di luarnya (Bagja Waluya, 2009: 103).

Pada masyarakat dengan solidaritas mekanik, yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan sikap. Kesadaran kolektif menjadi dasar ikatan seluruh warga masyarakat, yaitu suatu kesadaran bersama yang mencakup keseluruhan kepercayaan dan perasaan kelompok yang ada di luar warga dan bersifat memaksa. Solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat yang telah mengenal adanya pembagian kerja (masyarakat kompleks) sehingga unsur-unsur di dalam masyarakat tersebut saling bergantung. Pada masyarakat dengan solidaritas organik, ikatan utama yang mempersatukan masyarakat adalah kesepakatan yang terjalin di antara berbagai profesi (Bagja Waluya, 2009: 103).

(2) Ferdinand Toennies memberi penjelasan bahwa kelompok di dalam masyarakat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*. *Gemeinschaft* atau paguyuban adalah kehidupan bersama yang anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, alamiah, dan kekal. Contohnya, keluarga dan rukun tetangga. Adapun *Gesellschaft* atau patembayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek dan dinamis. Contohnya, ikatan antara pedagang dan pembeli atau organisasi buruh dalam suatu pabrik (Bagja Waluya, 2009: 104).

(3) Charles H. Cooley dan Ellsworth Farris berpendapat bahwa di dalam masyarakat terdapat kelompok primer yang ditandai dengan hubungan antaranggotanya berlangsung secara bertatap muka, saling mengenal, mesra, dan akrab, kerja sama yang erat dan bersifat pribadi. Ruang lingkup terpenting kelompok ini adalah keluarga, teman sepermainan, rukun tetangga. Pergaulan yang intim ini menghasilkan keterpaduan individu dalam satu kesatuan yang membuat seseorang hidup dan memiliki tujuan kelompok bersama (Bagja Waluya, 2009: 104).

- (4) W.G. Sumner membagi kelompok menjadi dua, yaitu *in-group* (kelompok dalam) dan *out-group* (kelompok luar) (Bagja Waluya, 2009: 104). Kelompok sosial yang individu mengidentifikasi dirinya merupakan *in-group*-nya dalam kelompok tersebut. Adapun *out-group* diartikan oleh individu sebagai kelompok yang menjadi lawan *in-group*-nya. Sikap *in-group* biasanya didasarkan pada faktor simpati, kedekatan dengan anggota kelompok, kerja sama, keteraturan, dan kedamaian. Sikap *out-group* selalu ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonisme atau antipati. Jika kelompok dalam berhubungan dengan kelompok luar, maka terjadi rasa kebencian, permusuhan, perang atau perampokan. Rasa kebencian ini terus diwariskan hingga membentuk perasaan kelompok dalam (*in-group feeling*). Anggota kelompok dalam menganggap kelompok mereka sendiri sebagai pusat segalanya (etnosentris). Kajian Sumner tersebut dapat dijelaskan dalam masalah tawuran antarsiswa. Di kalangan siswa dari suatu sekolah dapat muncul *in group feeling* yang kuat dan terwujud dalam rasa solidaritas, kesetiaan, dan pengorbanan. Perasaan tersebut memunculkan etnosentrisme sehingga mereka memandang siswa dari sekolah lain dengan penuh rasa permusuhan yang terus diwariskan ke adik kelasnya.

## C. Masyarakat

### 1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri, yaitu: 1) interaksi antar warga-warganya, 2) adat istiadat, 3) kontinuitas waktu, 4) rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118).

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Maclver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006: 22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas, sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 1984: 11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang di dalamnya terdapat beberapa unsur. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4. mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Menurut Emile Durkheim (dalam Djuretnaa Imam Muhni, 1994: 29-31) keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari prinsip-prinsip fundamental, yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial di dalam bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antarmanusia. Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama di mana manusia memandang sesama manusia sebagai tujuan bersama.

Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya (Soerjono Soekanto, 2006: 22). Beberapa pendapat para ahli di atas

dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *society*. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

## 2. Proses Terbentuknya Masyarakat

Masyarakat terbentuk karena manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Hal ini didasari karena manusia memiliki dua keinginan pokok, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lainnya, dan keinginan untuk menyatu dengan lingkungan alamnya. Manusia memiliki naluri untuk selalu berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan tersebut menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Pergaulan tersebut menghasilkan pandangan mengenai kebaikan dan keburukan. Pandangan-pandangan tersebut merupakan nilai-nilai manusia yang kemudian sangat berpengaruh terhadap cara dan pola perilakunya.

Untuk terbentuknya suatu masyarakat, paling sedikit harus terpenuhi beberapa unsur berikut (Bagja Waluya, 2009:10).

- a. Terdapat sekumpulan orang.
- b. Berdiam atau bermukim di suatu wilayah dalam waktu yang relatif sama atau kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seorang anggotanya.
- c. Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran.
- d. Adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada.
- e. Kesetiaan pada suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama.
- f. Akibat dari hidup bersama dalam jangka waktu yang lama itu menghasilkan kebudayaan berupa sistem nilai, sistem ilmu pengetahuan, dan kebudayaan kebendaan.

Suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai *community* (masyarakat setempat) apabila memiliki syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Adanya beberapa rumah atau rumah tangga yang terkonsentrasi di suatu wilayah geografis tertentu.

- b. Warganya memiliki taraf interaksi sosial yang terintegrasikan.
- c. Adanya rasa kebersamaan, yang tidak perlu didasarkan pada hubungan kekerabatan (Bagja Waluya, 2009: 11).

Kesatuan masyarakat setempat lama-kelamaan akan bertambah besar, maka frekuensi interaksi antaranggotanya akan semakin berkurang dan menurun, akhirnya menjadi masyarakat secara umum. Sistem sosial itu sendiri merupakan organisme yang terdiri atas bagian-bagian yang saling bergantung antara satu dan yang lainnya, disebabkan masing-masing memiliki fungsi dalam satu sistem. Bagian-bagian tersebut merupakan elemen-elemen sosial yang terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu-individu untuk mengadakan interaksi satu dengan lainnya. Dari individu-individu yang berinteraksi dan bersosialisasi, kemudian muncul proses sosial atau hubungan sosial yang terjadi sehingga membentuk struktur sosial yang nantinya bisa dilihat karakteristik masyarakat tersebut.

Masyarakat merupakan sebuah sistem sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur yang saling berhubungan. Berikut ini dijelaskan unsur-unsur dalam sistem sosial tersebut (Bagja Waluya, 2009: 12).

#### a. Kepercayaan dan Pengetahuan

Unsur kepercayaan dan pengetahuan merupakan unsur yang paling penting dalam sistem sosial karena perilaku anggota dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh hal yang mereka yakini dan hal yang mereka ketahui tentang kebenaran, sistem religi, dan cara-cara penyembahan kepada sang Pencipta Alam Semesta.

#### b. Perasaan

Perasaan adalah keadaan jiwa manusia yang berkenaan dengan situasi alam sekitarnya termasuk di dalamnya sesama manusia. Perasaan terbentuk melalui hubungan yang menghasilkan situasi kejiwaan tertentu, yang jika sampai pada tingkat tertentu, harus dikuasai agar tidak terjadi ketegangan jiwa yang berlebihan. Perbedaan latar belakang budaya suatu masyarakat akan membedakan keadaan kejiwaan masyarakat yang membentuk suatu sistem sosial.

### c. Tujuan

Sebagai makhluk sosial, dalam setiap tindakannya, manusia memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Tujuan itu sendiri adalah hasil akhir atas tindakan dan perilaku seseorang yang dicapai melalui perubahan-perubahan atau dengan cara mempertahankan suatu keadaan yang sudah mantap.

### d. Kedudukan (status) dan Peran (*role*)

Kedudukan (status) seseorang dalam masyarakat ditentukan berdasarkan pergaulan, prestasi, hak, dan kewajiban dalam interaksinya dengan orang lain. Di dalam setiap sistem sosial dijumpai bermacam-macam kedudukan, baik yang diperoleh secara turun-temurun, usaha sendiri, maupun kedudukan yang diberikan sebagai penghargaan dari lingkungan. Adapun peran (*role*) adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Kedudukan menentukan sesuatu yang harus diperbuatnya bagi masyarakat dan tidak harus memiliki hierarki.

### e. Kaidah atau Norma

Norma adalah pedoman tentang perilaku yang diharapkan atau pantas menurut kelompok atau masyarakat. Kadang-kadang bisa juga disebut peraturan sosial. Norma-norma sosial merupakan patokan tingkah laku yang diwajibkan atau dibenarkan dalam situasi tertentu dan merupakan unsur paling penting untuk meramalkan tindakan manusia dalam sistem sosial. Norma-norma sosial dipelajari dan dikembangkan melalui sosialisasi sehingga menjadi pranata-pranata sosial yang menyusun sistem itu sendiri.

### f. Kekuasaan

Kekuasaan adalah setiap kemampuan untuk memengaruhi pihak-pihak lain. Seseorang yang memiliki kekuasaan biasanya diikuti oleh wewenang apabila kekuasaannya tersebut mendapatkan dukungan dan diakui oleh masyarakat.

### g. Sanksi

Sanksi adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang diberikan terhadap seseorang atas perilakunya. Sanksi dapat berupa hadiah (*reward*)

dan dapat pula berupa hukuman (*punishment*). Sanksi diberikan atau ditetapkan oleh masyarakat untuk menjaga tingkah laku masyarakat supaya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Setiap masyarakat akan menerapkan sanksi kepada anggotanya, baik yang positif maupun sanksi yang negatif. Akan tetapi, wujud dan tingkatan sanksi yang diberikan sangat bergantung pada peradaban masyarakat tersebut.

## h. Fasilitas

Fasilitas (sarana) adalah semua bentuk cara, metode, benda-benda yang digunakan manusia untuk menciptakan tujuan sistem sosial itu sendiri. Dengan demikian, fasilitas di sini sama dengan sumber daya material atau kebendaan dan sumber daya immaterial berupa ide atau gagasan. Apakah yang dimaksud dengan konsep struktur sosial dalam realitas sosial budaya? Struktur sosial adalah suatu rangkaian yang kompleks dari relasi-relasi sosial yang berwujud dalam suatu masyarakat. Di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial yang tersusun secara teratur guna membentuk suatu kesatuan yang sistematis. (Bagja Waluya, 2009: 12).

Dasar yang penting dalam struktur sosial adalah relasi-relasi sosial untuk membantu pemahaman tentang tingkah laku manusia dalam kehidupan sosial. Apabila relasi atau hubungan sosial tidak dilakukan, masyarakat itu tidak berwujud lagi. Bagaimana sebetulnya unsur-unsur sosial itu terbentuk, berkembang, dan dipelajari oleh individu dalam masyarakat? Semua itu dapat dilakukan melalui proses-proses sosial. Proses sosial itu sendiri adalah hubungan timbal-balik antara bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat dan memahami norma-norma yang berlaku. Konsep struktur sosial juga dapat dilihat dari segi status, peranan, nilai-nilai, norma, dan institusi sosial dalam suatu sistem relasi (Bagja Waluya, 2009: 13).

**READING COPY**



## BAB 8

# PERUBAHAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN

### A. Perubahan Sosial

#### 1. Pengertian Perubahan Sosial

Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. MacIver membedakan antara *utilitarian elements* dengan *culture elements* yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan manusia yang primer dan sekunder. Semua kegiatan dan ciptaan manusia dapat diklasifikasikan ke dalam kedua kategori tersebut. Artinya, semua mekanisme dan organisasi yang dibuat manusia dalam upaya menguasai kondisi kehidupannya, termasuk di dalamnya sistem-sistem organisasi sosial, teknik, dan alat-alat material (Soerjono Soekanto, 1990: 301).

Menurut Talcott Parsons, masyarakat akan mengalami perkembangan menuju masyarakat transisional. Masyarakat akan berkembang melalui tiga tingkatan utama, yaitu primitif, *intermediate*, dan modern. Dari tiga tahapan ini, oleh Parsons dikembangkan lagi ke dalam subklasifikasi evolusi sosial sehingga menjadi 5 tingkatan, yaitu primitif, *advanced primitif* and

*archaic, historis intermediate, seedbed societies, dan modern societies.* Parsons meyakini bahwa perkembangan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan keempat unsur subsistem utama, yaitu kultural (pendidikan), kehakiman (integrasi), pemerintahan (pencapaian tujuan), dan ekonomi (adaptasi) (J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, 2004: 350),

Beberapa definisi perubahan sosial (Ruswanto, 2009: 2) adalah sebagai berikut.

- a. Menurut Kingsley Davis  
Perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.
- b. Menurut Gillin and Gillin  
Perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.
- c. Menurut MacIver  
Perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial.
- d. Menurut Selo Soemardjan  
Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berubah adalah struktur dan fungsi sosialnya.

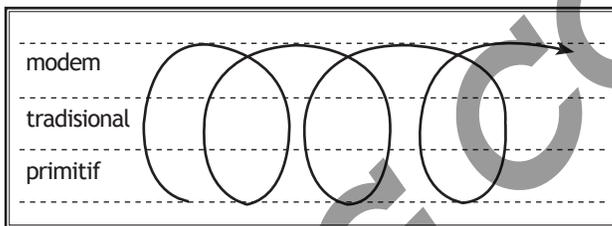
*Contoh:* Perubahan dalam struktur adalah perubahan jumlah penduduk, perubahan status sosial, perubahan pelapisan sosial, sedangkan perubahan dalam fungsi sosial, antara lain ayah di rumah dan ibu bekerja. Di sini terjadi perubahan fungsi ayah dengan fungsi ibu.

## 2. Teori Perubahan Sosial

Ada dua teori utama mengenai perubahan sosial, yaitu teori siklus dan teori perkembangan (Ruswanto, 2009: 2). Kedua teori perubahan sosial itu akan dijelaskan dalam uraian berikut.

## a. Teori Siklus

Teori siklus menjelaskan bahwa perubahan sosial bersifat siklus, artinya berputar melingkar. Menurut teori siklus, perubahan sosial merupakan sesuatu yang tidak bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tertentu, tetapi berputar-putar menurut pola melingkar. Pandangan teori siklus ini, yaitu perubahan sosial sebagai suatu hal yang berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang akan memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang ada pada zaman dahulu. Di dalam pola perubahan ini tidak ada proses perubahan masyarakat secara bertahap sehingga batas-batas antara pola hidup primitif, tradisional, dan modern tidak jelas. Perubahan siklus merupakan pola perubahan yang menyerupai spiral seperti gambar berikut ini.



(Sumber: Kuswanto)

Gambar 8.1

Arah perubahan dalam pola siklus dan spiral. Di dalam perubahan ini tidak ada batas yang jelas antara pola hidup tradisional dan modern

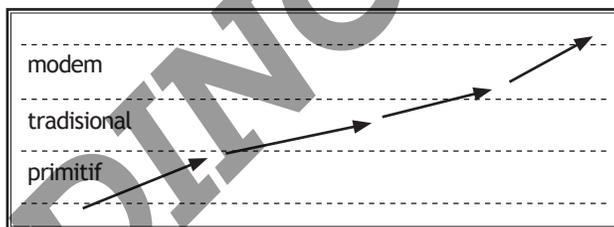
Pandangan teori siklus sebenarnya telah dianut oleh bangsa Yunani, Romawi, dan Cina Kuno jauh sebelum ilmu sosial modern lahir. Mereka membayangkan perjalanan hidup manusia pada dasarnya terperangkap dalam lingkaran sejarah yang tidak menentu. Seorang filsuf sosial Jerman, Oswald Spengler, berpandangan bahwa setiap peradaban besar menjalani proses penahapan kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Selanjutnya, perubahan sosial akan kembali pada tahap kelahirannya kembali (Ruswanto, 2009: 4).

Seorang sejarawan sosial Inggris, Arnold Toynbee, berpendapat bahwa *sejarah peradaban* adalah rangkaian siklus kemunduran dan pertumbuhan. Namun, masing-masing peradaban memiliki kemampuan meminjam kebudayaan lain dan belajar dari kesalahannya untuk mencapai tingkat peradaban yang tinggi. Salah satu contoh adalah kemajuan teknologi di suatu masyarakat umumnya terjadi karena proses belajar dari kebudayaan lain (Ruswanto, 2009: 4).

Kita dapat melihat kebenaran teori siklus ini dari kenyataan sosial sekarang. Misalnya, dari perilaku mode pakaian dan gaya kepemimpinan politik. Sebagai contoh, dalam perubahan mode pakaian, sering kali kita melihat mode pakaian terbaru kadang-kadang merupakan tiruan atau mengulang model pakaian zaman dulu. Dalam bidang politik, kita juga melihat adanya perubahan bersifat siklus. Sering kita melihat upacara-upacara sosial yang dilakukan pemimpin suku pada zaman kuno dilakukan kembali oleh pemimpin politik masyarakat modern sekarang, misalnya melakukan upacara-upacara yang sifatnya memuja dan memelihara tradisi turun-temurun.

## b. Teori Perkembangan/Teori Linier

Menurut teori ini perubahan sosial bersifat linier atau berkembang menuju ke suatu titik tujuan tertentu. Penganut teori ini percaya bahwa perubahan sosial bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tujuan tertentu. Masyarakat berkembang dari tradisional menuju masyarakat kompleks modern. Bentuk perubahan sosial menurut teori ini dapat digambarkan seperti tampak dalam gambar berikut ini.



(Sumber: Kuswanto)

Gambar 8.2

Perubahan sosial menurut linier.

Masyarakat berkembang dari semula primitif, tradisional, dan menjadi modern

Pandangan tentang teori linier dikembangkan oleh para ahli sosial sejak abad ke-18, bersamaan dengan munculnya zaman pencerahan di Eropa yang berkeinginan masyarakat lebih maju. Teori linier dapat dibagi menjadi dua, yaitu teori evolusi dan teori revolusi. Teori evolusi melihat perubahan secara lambat, sedangkan teori revolusi melihat perubahan secara sangat drastis. Menurut teori evolusi bahwa masyarakat secara bertahap berkembang dari primitif, tradisional, dan bersahaja menuju masyarakat modern. Teori ini dapat kita lihat di antaranya dalam karya

sosiolog Herbert Spencer, Emile Durkheim, dan Max Weber. Herbert Spencer seorang sosiolog Inggris, berpendapat bahwa setiap masyarakat berkembang melalui tahapan yang pasti. Herbert Spencer mengembangkan teori evolusi Darwin untuk diterapkan dalam kehidupan sosial (Ruswanto, 2009: 4).

Menurut Spencer orang-orang yang cakap akan memenangkan perjuangan hidup, sedangkan orang-orang lemah akan tersisih sehingga masyarakat yang akan datang hanya diisi oleh manusia-manusia tangguh yang memenangkan perjuangan hidup. Emile Durkheim mengetengahkan teorinya yang terkenal bahwa masyarakat berkembang dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik. *Solidaritas mekanik* merupakan cara hidup masyarakat tradisional yang di dalamnya cenderung terdapat keseragaman sosial yang diikat oleh ide bersama. Sebaliknya, *solidaritas organik* merupakan cara hidup masyarakat lebih maju yang berakar pada perbedaan daripada persamaan. Masyarakat terbagi-bagi secara beragam atau terjadi proses diferensiasi kerja. Teori revolusioner dapat kita lihat dalam karya Karl Marx sebagai sosiolog. Karl Marx juga melihat masyarakat berubah secara linier, tetapi bersifat revolusioner. Semula masyarakat bercorak feodal lalu berubah secara revolusioner menjadi masyarakat kapitalis. Kemudian, berubah menjadi masyarakat sosialis-komunis sebagai puncak perkembangan masyarakat (Ruswanto, 2009: 3).

Max Weber berpendapat bahwa masyarakat berubah secara linier dan masyarakat yang diliputi oleh pemikiran mistik menuju masyarakat yang rasional. Terjadi perubahan dari masyarakat tradisional yang berorientasi pada tradisi turun-temurun menuju masyarakat modern yang rasional.

### 3. Bentuk-Bentuk Perubahan

Bentuk perubahan sosial dan kebudayaan adalah sebagai berikut.

- a. Perubahan Kecil  
Perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial, yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contoh: perubahan mode, baik mode pakaian, mode rambut, dan lain-lain.
- b. Perubahan Besar  
Perubahan sosial dan kebudayaan yang membawa pengaruh langsung terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. Contoh: modernisasi, industrialisasi, liberalisasi, dan globalisasi.

- c. Evolusi  
Perubahan yang berjangka waktu lama, dari serangkaian perubahan kecil yang saling berhubungan dan saling memengaruhi. Contoh: evolusi masyarakat agraris menjadi industri.
- d. Revolusi  
Perubahan yang berlangsung secara cepat, dari serangkaian perubahan yang menyangkut sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Contoh: revolusi Industri di Inggris.
- e. Perubahan yang Dikehendaki  
Suatu tahapan perubahan sosial dan kebudayaan yang telah direncanakan oleh agen perubahan atau *agent of change*. Contoh: pembangunan rumah sakit.
- f. Perubahan yang Tidak Dikehendaki  
Suatu dampak dari perubahan sosial dan kebudayaan yang telah direncanakan. Contoh: pembangunan sarana jalan raya yang membawa dampak angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi. (Ruswanto, 2009: 5-6).

#### 4. Faktor Penyebab Perubahan

Faktor penyebab perubahan sosial dan kebudayaan digolongkan menjadi dua (Ruswanto, 2009: 5-6), yaitu faktor dari dalam masyarakat dan faktor dari luar masyarakat.

##### a. Faktor dari Dalam Masyarakat

Faktor dari dalam masyarakat meliputi sebagai berikut.

- 1) Pertambahan Penduduk  
Pertambahan penduduk menyebabkan perubahan dalam pola tempat tinggal, yang semula terpusat pada lingkungan kerabat, berubah terpecah yang berorientasi pada pekerjaan.
- 2) Pertentangan dalam Masyarakat  
Konflik antarkelompok sosial atau golongan sosial dalam masyarakat menyebabkan perubahan masyarakat yang bersangkutan. Contoh: konflik yang berlatar belakang *SARA* pada masyarakat majemuk, menyebabkan retaknya persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Terjadi Pemberontakan/Revolusi  
Pemberontakan/revolusi menyebabkan perubahan peta politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh: pemberontakan G 30 S/

PKI tahun 1965 membawa perubahan dalam sistem politik Indonesia dan dilarangnya ajaran komunis di Indonesia.

4) Berkurangnya Penduduk

Semakin berkurangnya penduduk menyebabkan pertumbuhan masyarakat secara keseluruhan. Contoh: perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi menyebabkan sulitnya mendapatkan tenaga muda di desa.

5) Penemuan Baru

Suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar yang terjadi dalam jangka waktu tertentu tidak terlalu lama disebut penemuan baru atau *inovasi*. Penemuan baru yang merupakan penyebab perubahan dibedakan menjadi dua, yaitu *discovery* dan *invention*. *Discovery* adalah suatu penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik alat maupun ide yang diciptakan individu/kelompok individu. *Invention* adalah suatu penemuan baru yang telah diakui, diterima, dan diterapkan/digunakan masyarakat.

6) Peranan Nilai yang Diubah

Nilai yang diubah membawa perubahan dalam masyarakat, misalnya pembudayaan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) di Indonesia mampu mencegah pertumbuhan penduduk.

7) Peranan Tokoh Kharismatik

Tokoh kharismatik membawa pengaruh dalam perubahan masyarakat, misalnya pengaruh Nabi Muhammad Saw. terhadap umat Islam di seluruh dunia (Soerjono Soekanto, 1990: 351).

## b. Faktor dari Luar Masyarakat

Faktor dari luar masyarakat meliputi sebagai berikut.

1) Pengaruh Lingkungan Alam

Alam fisik yang subur dan tandus, membawa pengaruh berbeda dalam tingkat kemakmuran masyarakatnya. Contoh: pengaruh pembangunan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri terhadap masyarakat tani di Sukoharjo dibandingkan sebelum dan sesudah dibangun waduk.

2) Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain

Kontak kebudayaan antarmasyarakat akan menyebabkan pengaruh positif dan negatif. Contoh: kontak kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan barat. Pengaruh positif berupa transformasi iptek, sedangkan pengaruh negatif sikap *westernis* sekelompok masyarakat Indonesia.

### 3) Peperangan

Perang menyebabkan perubahan negatif seluruh aspek kehidupan masyarakat. Contoh: perang Afganistan yang membawa derita berkepanjangan masyarakat (Soerjono Soekanto, 1990: 351).

Sementara Muhammad Iqbal (2006: 11) menyebutkan bahwa penyebab perubahan sosial meliputi hal-hal berikut ini.

- 1) *Innovation* (Inovasi) merupakan penemuan baru dan pembaruan yang memengaruhi kondisi individu maupun kelompok.
- 2) *Adaptation* (Adaptasi), yaitu penyesuaian secara sosial budaya.
- 3) *Adoption* (Adopsi), yaitu penggunaan dari penemuan baru dalam bidang teknologi yang memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Soerjono Soekanto (1990: 309) sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari acap kali tidak mudah untuk menentukan letak garis pemisah antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan, karena tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan yang tidak terjelma dalam suatu masyarakat sehingga walaupun secara teoretis dan analisis pemisah antara pengertian-pengertian tersebut dapat dirumuskan, dalam kehidupan nyata garis pemisah tersebut sukar dipertahankan, yang jelas perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan mempunyai satu aspek yang sama, yaitu kedua-duanya bersangkut paut dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Faktor-faktor yang memengaruhi jalannya suatu proses perubahan, antara lain kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya orang lain dan keinginan-keinginan untuk maju, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang, sistem terbuka lapisan masyarakat, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, serta orientasi ke masa depan dan nilai-nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki dirinya (Soekanto, 2006: 326-330).

Perubahan sosial yang dimaksud di sini adalah perubahan yang disebabkan oleh aspek ekonomi akibat perkembangan industri. Namun, tidak menutup kemungkinan perubahan tersebut akan saling terkait dengan aspek-aspek lain. Seperti yang dikatakan Agus salim, bahwa perubahan sosial yang berasal dari aspek ekonomi akan selalu terkait dengan perubahan perilaku yang berasal dari aspek nonekonomis, seperti politik, pendidikan, dan lain-lain (Salim, 2002: 19).

Sebagai bagian dari perubahan, maka peralihan mata pencaharian terjadi akibat adanya faktor-faktor pendorong dan penarik, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Peralihan mata pencaharian menjanjikan pendapatan yang lebih baik.
- 2) Upaya peralihan mata pencaharian merupakan penerapan teknologi baru.
- 3) Peralihan mata pencaharian dapat memberi variasi pada sistem mata pencaharian yang sudah ada.

Peralihan mata pencaharian sebagian masyarakat desa dari sektor Agraris ke Pertambangan dianggap merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Karena keadaan menjadi petani sendiri dianggap sudah tidak terlalu menjanjikan seperti dahulu sehingga masyarakat beralih mata pencaharian dari petani lada ke penambang timah untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

## 5. Faktor Pendorong dan Penghambat Perubahan

### a. Faktor Pendorong Perubahan

- 1) Sikap menghargai hasil karya orang lain dan kehendak untuk maju.
- 2) *Deviasi*, yaitu toleransi terhadap perbuatan menyimpang asal bukan merupakan dalih/pelanggaran.
- 3) Kontak dengan kebudayaan lain.
- 4) Sistem pendidikan formal yang maju.
- 5) Sistem terbuka dalam lapisan masyarakat.
- 6) Penduduk yang heterogen.
- 7) Rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu.
- 8) Orientasi ke masa depan.
- 9) Sikap optimis dalam hidup (Ruswanto, 2009: 8).

### b. Faktor Penghambat Perubahan

- 1) Rasa takut akan terjadinya kegoyahan dan memengaruhi integrasi kebudayaan.
- 2) Sikap tertutup dan berprasangka terhadap hal-hal baru.
- 3) Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain.
- 4) Perkembangan iptek yang terlambat.
- 5) Sikap *fatalistik* masyarakat.

- 6) *Vested-interested* adanya kepentingan-kepentingan individual yang tertanam kuat pada diri agen perubahan.
- 7) Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis.
- 8) Hambatan dari faktor adat atau kebiasaan.
- 9) Sikap pesimis dalam hidup (Soerjono Soekanto, 1990: 351).

## B. Dampak Perubahan terhadap Kehidupan Sosial

### 1. Proses Disintegrasi sebagai Akibat Perubahan Sosial

Dalam kehidupan bersama, masyarakat dengan kebudayaannya tidak akan lepas dari perubahan. Perubahan yang terjadi akan membawa dua akibat yang berbeda sebagai berikut (Ruswanto, 2009: 8).

#### a. Berakibat Positif

Terjadi apabila masyarakat dengan kebudayaannya mampu menyesuaikan diri dengan gerak perubahan. Keadaan masyarakat yang memiliki kemampuan dalam penyesuaian disebut *adjustment*, sedangkan bentuk penyesuaian masyarakat dengan gerak perubahan disebut *integrasi* (Ruswanto, 2009: 9).

#### b. Berakibat Negatif

Terjadi apabila masyarakat dengan kebudayaannya tidak mampu menyesuaikan diri dengan gerak perubahan. Ketidakmampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan disebut *maladjustment*. Akibat dari *maladjustment*, akan menimbulkan *disintegrasi*. Disintegrasi, yaitu proses memudarnya nilai dan norma dalam masyarakat sehingga berakibat adanya perubahan dalam lembaga kemasyarakatan. Dalam masyarakat Indonesia yang multimajemuk, sangat majemuk pula daya tahan/kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan. Mereka yang siap menghadapi perubahan akan tetap *survival* (tetap hidup) dalam gerak perubahan, sedangkan yang tidak siap dan tidak mampu akan terbawa arus gelombang perubahan. Disintegrasi terjadi, apabila masyarakat sebagai agen perubahan, tidak mampu menyesuaikan/menyosialisasikan diri dengan

nilai-nilai baru yang berkembang dalam masyarakat (Ruswanto, 2009: 9). Gejala-gejalanya dapat diamati dari sebagai berikut.

- 1) Nilai dan norma, tidak berfungsi seperti harapan masyarakat.
- 2) Lembaga-lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi sesuai dengan peranannya (Ruswanto, 2009: 10).

## 2. Bentuk-Bentuk Disintegrasi

### a. Pergolakan Daerah

Pergolakan daerah adalah suatu gerakan sosial vertikal dan horizontal, yang dilakukan serentak dengan berbagai cara untuk memaksakan kehendak atau cita-cita (Ruswanto, 2009: 11). Penyebab terjadinya pergolakan daerah adalah sebagai berikut.

- 1) Perbedaan ideologi antargolongan dalam masyarakat.
- 2) Adanya pertentangan-pertentangan sosial, yang berkepanjangan dan sulit diatasi.
- 3) Tindakan sewenang-wenang dari pihak pemegang kekuasaan.
- 4) Adanya tokoh sebagai pendorong dan simbol pergolakan (Ruswanto, 2009: 11).

Adapun akibat pergolakan daerah adalah sebagai berikut.

- 1) Merugikan diri sendiri, masyarakat, dan negara baik yang bersifat materiil maupun nonmateriil.
- 2) Mobilitas dan aktivitas masyarakat terganggu atau macet.
- 3) Timbulnya berbagai kerawanan dan gangguan keamanan.
- 4) Terjadinya perubahan-perubahan yang cenderung negatif terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat (Ruswanto, 2009: 11).

### b. Demonstrasi

Demonstrasi adalah suatu gerakan massal yang bersifat langsung dan terbuka, dilakukan secara lisan, tulisan, dan tindakan dalam memperjuangkan kepentingan/tuntutan (Ruswanto, 2009: 11). Contoh: demonstrasi mahasiswa minta penurunan harga BBM, minta pejabat negara turun/lengser. Sebab-sebab demonstrasi adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya penyimpangan dalam sistem.
- 2) Terjadinya perubahan dalam sistem yang inkonstitusional.
- 3) Tidak berfungsinya sistem yang dipilih.

Adapun akibat-akibat demonstrasi adalah sebagai berikut.

- 1) Mengganggu stabilitas di bidang ipoleksosbud dan hankam.
- 2) Mendorong timbulnya tindak kejahatan politik dan kejahatan ekonomi.
- 3) Menghambat pembangunan dan modernisasi (Ruswanto, 2009: 12).

### c. Aksi Protes

Aksi protes adalah suatu tuntutan individual atau kelompok, yang dilakukan dengan lisan atau tulisan untuk memperjuangkan kepentingan atau objek tindakan (Ruswanto, 2009: 12). Sebab-sebab aksi protes adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan.
- 2) Rasa tidak puas/kecewa atas suatu putusan.
- 3) Munculnya pihak yang berprasangka.

Akibat aksi protes sebagai berikut.

- 1) Menghambat kerja sama dalam aktivitas bersama.
- 2) Menimbulkan bibit konflik.
- 3) Timbulnya kelompok primordial (Ruswanto, 2009: 12).

### d. Kriminalitas

Kriminalitas adalah setiap pelanggaran norma hukum yang dapat diancam sanksi pidana, sedangkan *kriminologi* adalah suatu ilmu yang mempelajari tindak/perilaku jahat (Ruswanto, 2009: 12). Sebab-sebab kriminalitas adalah sebagai berikut.

- 1) Kepadatan dan komposisi penduduk.
- 2) Perbedaan distribusi kekayaan.
- 3) Pertentangan dan persaingan kebudayaan.
- 4) Perbedaan ideologi politik.
- 5) Perbedaan kekayaan dan pendapatan.
- 6) Mentalitas yang labil.

Adapun akibat-akibat kriminalitas adalah sebagai berikut.

- 1) Merugikan negara. Misalnya, kolusi dan korupsi.
- 2) Mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.
- 3) Merugikan pihak lain, baik materiil maupun nonmateriil. Misalnya, pencurian, perampokan dengan pembunuhan, dan lain-lain.
- 4) Merugikan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain (Ruswanto, 2009: 13).

### e. Kenakalan Anak/Remaja

Kenakalan adalah suatu perbuatan antisosial yang dilakukan oleh anak dan seandainya dilakukan orang dewasa dikategorikan tindak kejahatan (Ruswanto, 2009: 13). Tanda-tanda anak nakal adalah sebagai berikut.

- 1) Siswa bandel, kasar, dan sukar diatur.
- 2) Berbuat cabul, menyimpan/membaca buku, melihat gambar, dan film porno.
- 3) Bolos sekolah.
- 4) Melarikan kendaraan di luar batas kecepatan (ngebut).
- 5) Minum-minuman keras, memakai obat terlarang dan lain-lain.

Anak berbuat nakal menurut Drs. Kuswanto ada dua motivasi, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Motivasi ekstrinsik*, yaitu berbagai kenakalan yang disebabkan pengaruh luar dari diri anak, meliputi:
  - a) faktor rumah tangga,
  - b) faktor pendidikan dan sekolah,
  - c) faktor pergaulan anak, dan
  - d) faktor media massa.
- 2) *Motivasi intrinsik* atau penyebab dari dalam diri anak meliputi:
  - a) faktor inteligensia,
  - b) faktor usia,
  - c) faktor jenis kelamin, dan
  - d) faktor kedudukan anak dalam keluarga (Ruswanto, 2009: 13).

Kenakalan anak membawa akibat yang merugikan diri sendiri dan masyarakat, antara lain sebagai berikut.

- 1) Mengganggu ketertiban umum.
- 2) Mendorong tindak kriminalitas.
- 3) Mendorong perbuatan asusila.
- 4) Merusak nama baik diri sendiri, orang tua, sekolah, dan daerah.
- 5) Meresahkan masyarakat sekitar (Ruswanto, 2009: 13).

## 3. Proses Perubahan Sosial dan Akomodasi Baru

Proses perubahan sosial adalah serangkaian perubahan yang dilalui dalam perkembangan masyarakat (Ruswanto, 2009: 14). *Akomodasi baru* adalah serangkaian perubahan yang dilalui oleh masyarakat dalam melakukan

penyesuaian-penyesuaian (Ruswanto, 2009: 14). Proses perubahan sosial dan akomodasi baru sama artinya dengan proses perubahan sosial dan penyesuaian sosial. Perubahan sosial dan akomodasi baru akan terjadi dalam masyarakat apabila ada yang disesuaikan, misalnya nilai-nilai baru, penemuan baru, atau hal-hal lain yang dianggap baru oleh masyarakat. Tanpa ada nilai baru, tidak ada penyesuaian walaupun ada perubahan dalam proses perubahan dan penyesuaian sosial. Proses perubahan dan penyesuaian sosial ada dua, sebagai berikut.

- a. Individual proses adalah serangkaian perubahan dan penyesuaian sosial seorang individu terhadap penemuan baru/nilai-nilai baru (Ruswanto, 2009: 14).
- b. Kolektif proses adalah serangkaian perubahan dan penyesuaian sosial sekelompok masyarakat terhadap penemuan baru/nilai-nilai baru (Ruswanto, 2009:14).

Dapat disimpulkan bahwa proses perubahan sosial dan akomodasi baru akan terjadi bilamana individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat menerima serta mampu menyesuaikan dengan nilai-nilai yang baru.

## C. Pembangunan

### 1. Konsep Pembangunan

Pembangunan adalah sebuah usaha dalam meningkatkan segala kemampuan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) atau Sumber Daya Alam (SDA), hal ini dilakukan dalam rangka menyejahterakan dan memmanusiakan masyarakat yang sering kali hanya dijadikan batu loncatan untuk meraih sebuah kesuksesan baik oleh masyarakat, kelompok maupun individu (Sunyoto Usman, 2004: 6).

Pembangunan masyarakat pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kekuatan masyarakat baik yang berupa materiil maupun nonmateriil agar dapat mempertahankan hidupnya sendiri dan orang lain (Azyumardi Azra, 2000: 137).

Konsep pembangunan ditujukan untuk masyarakat dan tidak hanya bermaksud membina hubungan dan kehidupan setiap orang untuk hidup bermasyarakat, melainkan juga untuk membangun masyarakat karena setiap satuan masyarakat mempunyai kekuatan sendiri yang disebut *Community*

*Power* oleh Nelson W, misalnya kerukunan, keakraban, solidaritas, dan kebersamaan. *Community Development* menjadi lebih penting lagi jika diingat bahwa masyarakat atau *community* perlu dipersiapkan untuk memasuki bentuk masyarakat yang disebut *society*, sehingga kedua bentuk ideal tersebut merupakan sebuah *continuum*, *community-society continua*.

Dalam teori-teori tentang perubahan sosial umumnya menaruh perhatian pada arah dan wujud perubahan sosial. Stewart dan Glynn (1988) berpendapat bahwa paling tidak ada tiga pandangan tentang perubahan sosial.

- a. Teori daur ulang (*cyclical theory*).
- b. Teori garis lurus (*linear theory*).
- c. Teori pertentangan (*conflict theory*).

Menurut teori daur ulang (*cyclical theory*), setiap masyarakat selalu berada pada suatu titik tertentu di dalam suatu lingkaran evolusi. Setiap kemajuan dan kemunduran selalu melalui titik-titik lain dalam lingkaran evolusi dan kembali pada kedudukan yang kurang lebih sama sebagaimana sebelumnya. Adapun teori garis lurus (*linear theory*) mengatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan-tahapan tertentu karena kebudayaan manusia dengan sendirinya akan mengikuti suatu evolusi yang berbentuk garis lurus dan teori ini yakin bahwa perubahan sosial secara evolusioner selalu menuju keadaan yang lebih baik (*linear progress*). Pada teori pertentangan sangat dipengaruhi oleh pemikiran dialektika yang menurut George Hegel, dialektika ini terdiri atas tiga tahapan berikut ini.

- a. Tahapan tesis atau gagasan awal.
- b. Tahapan antitesis atau gagasan penentang.
- c. Tahapan sintesis atau pemecahan melalui suatu pernyataan kedua gagasan yang bertentangan (Mudjia Rahardja, 2007: 26-27).

Pembangunan masyarakat dilakukan berdasarkan 3 asas sebagai berikut.

- a. Asas pembangunan integral adalah pembangunan yang seimbang dari semua segi masyarakat (pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya) sehingga menjamin suatu perkembangan yang selaras dan yang tidak berat sebelah. Namun, perlu diingat bahwa untuk masa permulaan titik berat terutama harus diletakkan dalam pembangunan ekonomi.
- b. Asas kekuatan sendiri adalah bahwa tiap-tiap usaha pertama-tama harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa itu sendiri, dengan tidak menunggu-nunggu pemberian dari pemerintah.

- c. Asas permufakatan bersama diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilaksanakan dalam lapangan-lapangan yang benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan oleh anggota-anggota masyarakat desa yang bersangkutan, sedangkan putusan untuk melaksanakan proyek itu bukannya berdasarkan atas perintah atasan, melainkan merupakan putusan bersama anggota masyarakat desa (Moeljarto Tjokrowinoto, 1996: 36).

## 2. Pembangunan sebagai Proses Perubahan

Perubahan bertujuan membentuk manusia seutuhnya dan bagi seluruh masyarakat Indonesia, berarti pula menjaga dan melanjutkan kesinambungan masyarakat Indonesia (Ruswanto, 2009: 15). Apabila tujuan itu tercapai maka tercapai pula kesinambungan masyarakat Indonesia.

### a. Bentuk Perubahan

Perubahan yang dilakukan secara terencana dan terarah disebut juga dengan istilah pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan dikategorikan sebagai perubahan yang direncanakan. Ini artinya, perubahan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan. Perubahan bagi masyarakat Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sejak zaman dahulu, tetapi perubahan yang bersifat direncanakan bagi masyarakat sebagai bangsa dimulai sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Mulai saat itu, bangsa Indonesia telah menyatakan kehidupan masyarakat yang merdeka, berdaulat, dan bebas dari pengaruh bangsa lain (Ruswanto, 2009: 15).

Bangsa Indonesia berhak mengubah nasibnya sendiri sesuai dengan kepentingan hidup masyarakat. Untuk itu, ditetapkan UUD 1945 sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Untuk melanjutkan kesinambungan masyarakat Indonesia, terus dilakukan perubahan atau pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan dapat dibedakan menjadi enam periode. Keenam periode itu adalah sebagai berikut.

- 1) Periode Revolusi Fisik (1945-1949).
- 2) Periode Konsolidasi (1950-1955).
- 3) Periode Rencana Lima Tahun (1956-1960).

- 4) Periode Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun (1961-1969), yang berhenti dengan adanya G 30 S/PKI pada tahun 1965.
- 5) Periode Orde Baru (1966-1999).
- 6) Periode Reformasi (1999-sekarang) (Ruswanto, 2009: 15).

Masyarakat Indonesia dalam menanggapi perubahan yang terjadi dewasa ini, mempunyai kecenderungan sebagai berikut.

- 1) Masyarakat Indonesia Cenderung Bertahan Tak Berubah  
Maksudnya masyarakat akan menolak nilai-nilai baru yang akan mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tetap dipertahankan Pancasila serta UUD 1945 (Ruswanto, 2009: 15).
- 2) Masyarakat Indonesia Cenderung Berubah  
Maksudnya masyarakat Indonesia akan menerima nilai-nilai baru/hal-hal baru yang membawa manfaat menuju terjaminnya kesinambungan masyarakat Indonesia (Ruswanto, 2009: 16).

Suatu perubahan sosial akan menjamin kesinambungan masyarakat Indonesia apabila sebagai berikut.

- 1) Adanya Perubahan Sistem Budaya  
Maksudnya dari sistem budaya yang ada di Indonesia yang meliputi:
  - a) sistem budaya etnik,
  - b) sistem budaya agama besar,
  - c) sistem budaya Indonesia, dan
  - d) sistem budaya asing (Ruswanto, 2009: 16).
- 2) Perubahan Sosial yang Terjadi Mendukung Program Kependudukan  
Contoh: pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan melalui program Keluarga Berencana.
- 3) Perubahan Sosial yang Terjadi Mendukung Program Lingkungan  
Contoh: setiap usaha dalam meningkatkan kemakmuran, melalui pengembangan sumber daya alam dan energi, harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan.
- 4) Adanya Perubahan Sistem Ekonomi  
Contoh: melakukan penyesuaian kebijaksanaan pembangunan ekonomi terhadap pengaruh liberalisasi dan globalisasi (Ruswanto, 2009: 17).

Untuk menjamin kesinambungan masyarakat Indonesia perlu dikembangkan dengan cara mengadopsi dan mengadaptasi iptek negara-negara maju agar tercapai peningkatan sumber daya manusia Indonesia.

Satu hal yang harus dimengerti bahwa perubahan yang diharapkan tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi masyarakat Indonesia harus mampu mengubahnya.

### b. Pemeliharaan Nilai-Nilai Luhur sebagai Upaya Mempertahankan Kesenambungan Masyarakat Indonesia

Dalam mewujudkan kesinambungan masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat yang modern, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan modal saja tidak cukup. Nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian bangsa yang menggambarkan kebudayaan nasional harus kita pertahankan dan pelihara tanpa perlu mengalami perubahan. Nilai-nilai luhur tersebut merupakan identitas atau jati diri kita sebagai suatu bangsa, sedangkan nilai-nilai lain atau nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, lebih-lebih yang dapat merusak kepribadian bangsa, harus mampu untuk kita tolak.

Oleh karena itu, salah satu persoalan pokok bangsa adalah pewarisan dan pelestarian nilai-nilai yang kita anggap luhur yang menjadi kepribadian sendiri kepada generasi berikutnya. Di sinilah aspek kehidupan yang mengalami perubahan dalam menuju masyarakat modern itu harus mengadakan penyesuaian terhadap nilai-nilai yang luhur tadi. Dalam proses penyesuaian situasi dan kondisi masyarakat umumnya rawan karena nilai-nilai lama mulai ditinggalkan, sedangkan nilai baru belum melembaga. Segala perubahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diharapkan akan tetap menjaga keutuhan dan kesinambungan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang berkesinambungan adalah masyarakat yang kuat, bersatu, dan dinamis.

### 3. Faktor-faktor Budaya yang Menghambat Pembangunan

Proses pembangunan tidak selalu berjalan mulus karena dihadapkan pada beberapa permasalahan, salah satunya adalah permasalahan mentalitas atau budaya. Ada budaya-budaya yang menghambat proses pembangunan itu sendiri (Ridwan Effendi, 2010). Salah satu contoh hambatan budaya itu seperti keterkaitan orang Jawa terhadap tanah yang mereka tempati.

Tanah secara turun temurun diyakini sebagai pemberi berkah kehidupan. Mereka enggan meninggalkan kampung halamannya atau beralih pola hidup sebagai petani. Padahal hidup mereka umumnya miskin. Hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang, misalnya pada awal program Keluarga Berencana terjadi penolakan oleh sebagian masyarakat. Mereka beranggapan bahwa banyak anak adalah banyak rezeki. Hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologis, seperti upaya untuk mentransmigrasikan penduduk dari daerah yang terkena bencana alam banyak mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan oleh adanya kekhawatiran penduduk bahwa di tempat yang baru, belum tentu bisa hidup (Ridwan Effendi, 2010).

Masyarakat daerah-daerah terpencil yang kurang komunikasi dengan masyarakat luar karena pengetahuannya serba terbatas seolah-olah tertutup untuk menerima program-program pembangunan. Sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. Sikap ini sangat mengagungkan budaya tradisional sedemikian rupa, yang menganggap hal-hal baru itu akan merusak tatanan hidup mereka yang sudah mereka miliki secara turun-temurun (Ridwan Effendi, 2010).

Sikap Etnosentrisme, yaitu sikap yang mengagungkan budaya suku bangsanya sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Sikap semacam ini akan mudah memicu timbulnya kasus-kasus sara, yakni suku, agama, ras, dan antargolongan. Sikap seperti ini akan menghambat terciptanya integrasi nasional (Ridwan Effendi, 2010).

**READING COPY**



## BAB 9

# KERAGAMAN DAN KESEDERAJATAN

## A. Keragaman dan Kesederajatan

### 1. Makna Keragaman

Keragaman, kemajemukan, dan pluralitas adalah suatu keadaan dalam sebuah masyarakat yang terdiri atas berbagai suku, golongan, agama, ras, dan budaya (Ramdani Wahyu, 2013: 191). Indonesia adalah negara yang majemuk, beragam, dan plural, yaitu sebuah masyarakat negara yang terdiri atas lebih dari 500 suku bangsa yang dipersatukan oleh sebuah sistem nasional bangsa dalam wadah sebuah Negara Kesatuan Indonesia (Parsudi Suparlan, 2000) dalam buku (Ramdani Wahyu, 2013: 191).

Keragaman berasal dari kata ragam, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003: 920-921) arti ragam dikaitkan dengan (1) tingkah; laku; ulah; lain orang lain ragamnya; (2) macam; jenis; dan seterusnya, sedangkan keragaman diartikan perihal beragam-ragam; berjenis-jenis; perihal ragam-perihal jenis. Dengan demikian, yang dimaksud keragaman dalam masyarakat adalah sebuah keadaan yang menunjukkan perbedaan yang cukup banyak macam atau jenisnya dalam masyarakat.

Keragaman merupakan tanda *Sunnatullah* yang harus dikelola agar satu sama lain bisa saling mengenal, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang pada intinya menyebutkan di antara manusia yang multibudaya ini diperintahkan untuk saling mengenal (Ramdani Wahyu, 2013: 192).

Struktur masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis, antara lain ditandai oleh keragaman suku bangsa, agama, dan kebudayaan. Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa yang begitu banyak, terdiri dari berbagai suku bangsa, mulai dari Sabang hingga Merauke, ada suku Batak, suku Minang, suku Ambon, suku Madura, suku Jawa, suku Asmat, dan masih banyak lainnya.

## 2. Pengertian Kesederajatan

Kesederajatan berasal dari kata sederajat: sama tingkatan (pangkat, kedudukan). Kesederajatan dalam masyarakat adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada manusia tetap memilih satu kedudukan yang sama dan satu tingkatan hierarki (Elly M. Setiadi, dkk, 2012: 6).

Kesederajatan berasal dari kata derajat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia derajat berarti: 1) tingkatan, martabat, pangkat, 2) gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada mahasiswa yang telah lulus ujian.

Sederajat berarti sama tingkatannya (pangkatnya, kedudukannya) dan kesederajatan berarti perihal kesamaan tingkatan. Dengan demikian, konteks kesederajatan di sini adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada pada manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama dan satu tingkatan hierarki termasuk perlakuan yang sama dalam bidang apa pun tanpa membedakan jenis kelamin, keturunan, kekayaan, suku bangsa, dan lainnya. Dalam pandangan Islam, kedudukan manusia itu sama dalam segala hal, dan yang paling mulia kedudukannya di mata Tuhan, adalah didasarkan pada ketakwaannya dan keimanannya.

Konsep kesetaraan adalah konsep yang dipakai dalam sistem komunisme atau sentralistik dan tentu saja konsep ini bertentangan dengan konsep keragaman. Kesetaraan lebih mengacu pada bagaimana perbedaan yang ada harus hidup serasi dan selaras, tanpa harus meninggalkan identitas perbedaan yang ada pada masing-masing individu tersebut.

Tuntutan kesetaraan mungkin belum beberapa abad terakhir ini dimulai oleh manusia. Tentunya seruan dengan suara kecil malah yang hampir tidak terdengar, pada ribuan tahun yang lalu sudah ada. Tingkatannya rakyat jelata, tetapi berkeinginan agar menjadi sepadan dengan para bangsawan, dengan para orang kaya serta berkuasa bahkan menjadi anggota kalangan Sang Baginda Raja. Kalau kita mau memikirkan masak-masak keinginan untuk setara itu, biasanya dan selalu datang dari pihak yang kurang beruntung untuk menyamai kaum yang sedang atau sudah beruntung.

Pengalaman Islam di masa lalu merupakan bukti bahwa keragaman dan kesederajatan dapat dijemakan dalam wujud persatuan. Hal ini dapat dilihat sejak Nabi Muhammad Saw. merintis terbentuknya masyarakat di Madinah melalui *al-Shahifah al-Madinah* (Madinah Charter), Nabi Muhammad Saw. berusaha mencari titik temu antara kepentingan golongan, kabilah, dan agama di Madinah. Langkah pertama Nabi Muhammad Saw. adalah dengan mengakui hak eksistensi kelompok-kelompok dalam dokumen "Konstitusi Madinah". Hal sama juga dilakukan penerus beliau, yaitu Khalifah Umar bin Khatthab dalam sikap baiknya terhadap penduduk Yerusalem yang terdokumentasikan dalam "Piagam Aelia" (nama lain dari Yerusalem) (Ramdani Wahyu, 2013: 196).

Teladan Nabi dan masa keemasan Islam mempunyai nilai relevansi dengan kondisi real bangsa Indonesia. Pluralisme dan kemajemukan di negeri ini semestinya menjadi berkah, bukan masalah. Untuk mencoba mengatasi itu, pemerintah menetapkannya dalam sebuah konstitusi UUD 1945 tentang kesamaan derajat. Pasal-pasal dalam UUD 1945 mengatur agar seluruh manusia Indonesia memiliki kesempatan dan hak yang seimbang (Ramdani Wahyu, 2013: 199).

Pengakuan akan adanya kesamaan derajat manusia itu diatur dalam beberapa peraturan yang menjadi landasan adanya kesamaan derajat, seperti berikut ini.

- a. Landasan Ideal: Pancasila.
- b. Landasan Konstitusional: UUD 1945 yakni pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.

## 1) Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-1, 2, 3, dan 4.

Setiap warga negara berhak mendapatkan hak-hak asasinya yang meliputi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta hak asasi terhadap perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Keseluruhan hak asasi manusia di negara kita tercantum dalam UUD 1945 (Ramdani Wahyu, 2013: 199).

Dalam *alinea pertama ditegaskan* pengakuan hak asasi kebebasan atau kemerdekaan semua bangsa dari segala bentuk penjajahan dan penindasan oleh bangsa lain. Misalnya, kebebasan berpendapat. Jika sedang berbicara dengan teman, berilah kesempatan kebebasan kepadanya untuk mengeluarkan pendapat dan janganlah memaksakan kehendak Anda.

*Alinea kedua* adalah pengakuan hak asasi sosial yang berupa keadilan dan pengakuan hak asasi ekonomi yang berupa kemakmuran dan kesejahteraan. Misalnya, dapat dilihat mengenai hubungan antara majikan/tuan tanah atau pemilik kapal dengan nelayan/pekerja dan pemilik modal dengan buruh.

*Alinea ketiga* adalah hak kodrat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua bangsa. Misalnya, hak untuk memeluk agama, berbicara, dan sebagainya.

*Alinea keempat* memuat tujuan negara. Misalnya, polisi tidak diperkenankan menangkap seseorang tanpa alasan yang jelas, pemerintah harus memajukan kesejahteraan umum dan warga negara Indonesia hendaknya ikut mewujudkan ketertiban dunia dan sebagainya (Ramdani Wahyu, 2013: 200).

## 2) Batang Tubuh

Di dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat beberapa ketentuan yang mengatur persamaan derajat manusia yang dicantumkan sebagai hak dan kewajiban warga negara, yaitu:

- a) setiap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1);
- b) tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2);
- c) kebebasan berserikat, berpendapat, dan berpolitik (pasal 28);

- d) kebebasan memeluk dan melaksanakan agama/kepercayaan (pasal 29 ayat 1);
- e) hak dan kewajiban membela negara (pasal 30);
- f) tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (pasal 31);
- g) amandemen kedua dicantumkan pada pasal 28a-28j (Ramdani Wahyu, 2013: 200).

## B. Unsur-Unsur Keragaman dalam Masyarakat

### 1. Suku Bangsa dan Ras

Di Indonesia, terutama bagian barat mulai dari Sulawesi termasuk ras Mongoloid Melayu Muda (Deutero Malayan Mongoloid). Kecuali Batak dan Toraja yang termasuk Mongoloid Melayu Tua (Proto Malayan Mongoloid). Sebelah Timur Indonesia termasuk ras Austroloid, termasuk bagian NTT, sedangkan kelompok terbesar yang tidak termasuk kelompok pribumi adalah golongan Cina yang termasuk *Astratic Mongoloid* (Elly M. Setiadi, dkk, 2012: 148).

### 2. Agama dan Keyakinan

Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap dengan pancaindra, tetapi mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari (Elly M. Setiadi, dkk, 2012: 148).

Agama sebagai bentuk keyakinan memang sulit diukur secara tepat dan terperinci. Hal ini pula yang barangkali menyulitkan para ahli untuk memberikan definisi yang tepat tentang agama. Namun, apa pun bentuk kepercayaan yang dianggap sebagai agama, tampaknya memang memiliki ciri umum yang hampir sama, baik dalam agama primitif maupun agama monoteisme. Menurut Robert H. Thouless, fakta menunjukkan bahwa agama berpusat pada Tuhan atau dewa-dewa sebagai ukuran yang menentukan yang tak boleh diabaikan (Elly M. Setiadi, dkk, 2012: 149).

Masalah agama tak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya fungsi agama dalam masyarakat, antara lain:

- a. berfungsi edukatif: ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang;
- b. berfungsi penyelamat;
- c. berfungsi sebagai perdamaian;
- d. berfungsi sebagai *social control*.
- e. berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas.
- f. berfungsi transformatif.
- g. berfungsi kreatif.
- h. berfungsi sublimatif (Elly M. Setiadi, dkk, 2012: 149).

Pada dasarnya agama dan keyakinan merupakan unsur penting dalam keragaman bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya agama yang diakui di Indonesia.

### 3. Ideologi dan Politik

Ideologi adalah suatu istilah umum bagi sebuah gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dalam situasi khusus karena merupakan kaitan antara tindakan dan kepercayaan yang fundamental. Ideologi membantu untuk lebih memperkuat landasan moral bagi sebuah tindakan. Politik mencakup baik konflik antara individu dan kelompok untuk memperoleh kekuasaan, yang digunakan oleh pemenang bagi keuntungannya sendiri atas kerugian dari yang ditaklukkan. Politik juga bermakna usaha untuk menegakkan ketertiban sosial (Elly M. Setiadi, dkk, 2012: 149).

Keragaman masyarakat Indonesia dalam ideologi dan politik dapat dilihat dari banyaknya partai politik sejak berakhirnya orde lama. Meskipun pada dasarnya Indonesia hanya mengakui satu ideologi, yaitu Pancasila yang benar-benar mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia (Elly M. Setiadi, dkk, 2012: 148).

### 4. Tata Krama

Tata krama berasal dari bahasa Jawa yang berarti “adat sopan santun, basa-basi” pada dasarnya adalah segala tindakan, perilaku, adat istiadat,

tegur sapa, ucap dan cakap sesuai kaidah atau norma tertentu (Elly M. Setiadi, dkk, 2012: 149).

Tata krama dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat dan terdiri dari aturan-aturan yang kalau dipatuhi diharapkan akan tercipta interaksi sosial yang tertib dan efektif di dalam masyarakat yang bersangkutan. Indonesia memiliki beragam suku bangsa di mana setiap suku bangsa memiliki adat tersendiri meskipun karena adanya sosialisasi nilai-nilai dan norma secara turun-temurun dan berkesinambungan dari generasi ke generasi menyebabkan suatu masyarakat yang ada dalam suatu suku bangsa yang sama akan memiliki adat dan kesopanan yang relatif sama (Elly M. Setiadi, dkk, 2012: 150).

## 5. Kesenjangan Ekonomi

Bagi sebagian negara berkembang, perekonomian akan menjadi salah satu perhatian yang terus ditingkatkan. Namun umumnya, masyarakat kita berada di golongan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Hal ini tentu saja menjadi sebuah pemicu adanya kesenjangan yang tak dapat dihindari lagi (Elly M. Setiadi, dkk, 2012: 150).

## 6. Kesenjangan Sosial

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan bermacam tingkat, pangkat, dan strata sosial yang hierarkis. Hal ini dapat terlihat dan dirasakan dengan jelas, yaitu adanya penggolongan orang berdasarkan kasta. Hal inilah yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang tidak saja dapat menyakitkan, tetapi juga membahayakan bagi kerukunan masyarakat. Tak hanya itu, bahkan bisa menjadi sebuah pemicu perang antaretnis atau suku (Elly M. Setiadi, dkk, 2012: 150).

# C. Perkembangan Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultural

Multikultural berasal dari kata *multi* yang berarti banyak (lebih dari dua) dan *culture* artinya kebudayaan. Secara sederhana, masyarakat multikultural

adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan (Bagja Waluya, 2009: 105). Masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan dasar identitas diri dan integrasi sosial masyarakatnya.

Menurut Fuad Hassan, setiap masyarakat pendukung kebudayaan (*culture bearers*) cenderung menjadikan kebudayaannya sebagai kerangka acuan bagi perikehidupan sekaligus untuk mengukuhkan jati diri sebagai kebersamaan yang unik (Bagja Waluya, 2009: 105). Oleh karena itu, perbedaan antarkebudayaan justru bermanfaat dalam mempertahankan dasar identitas diri dan integrasi sosial masyarakat tersebut. Multikultural masyarakat dalam tatanan sosial agama dan suku bangsa telah ada sejak zaman nenek moyang. Kebhinekaan budaya yang dapat hidup berdampingan secara damai merupakan kekayaan yang tak ternilai dalam khazanah budaya nasional.

Diunggulkannya suatu nilai oleh seseorang atau sekelompok masyarakat bukan berarti tidak dihiraukannya nilai-nilai lain, tetapi kurang dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku dibandingkan dengan nilai yang diunggulkannya. Oleh karena itu, permasalahan multikultural justru merupakan suatu keindahan apabila identitas setiap budaya dapat bermakna dan diagungkan oleh masyarakat pendukungnya, serta dapat dihormati oleh kelompok masyarakat lain. Hal ini untuk kebanggaan dan sifat egoisme kelompok apalagi jika diwarnai kepentingan politik tertentu seperti digunakannya simbol-simbol budaya Jawa yang salah kaprah untuk membangun struktur dan budaya politik yang sentralistik (Bagja Waluya, 2009: 105).

Keragaman atau multikulturalisme merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan pada masa silam, masa kini, dan waktu-waktu mendatang. Multikulturalisme secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Sebaliknya, negara tidak mengandung kebudayaan nasional yang tunggal. Namun, keragaman tersebut hendaklah tidak ditafsirkan secara tunggal. Komitmen untuk mengakui keragaman merupakan salah satu ciri dan karakter utama masyarakat, negara-bangsa (Bagja Waluya, 2009: 105).

Keragaman tidak lantas menjadi sumber kekacauan, destruksi sosial ataupun konflik yang berkepanjangan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya simbol-simbol, nilai-nilai, struktur-struktur, dan lembaga-lembaga dalam kehidupan bersama. Masyarakat Indonesia adalah gabungan semua

kelompok manusia yang hidup di Indonesia. Suatu kenyataan yang tak bisa ditolak bahwa Indonesia terdiri atas berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sederhana dapat disebut sebagai masyarakat “multikultural”. Namun, keadaan multikultural tersebut berhadapan dengan kebutuhan untuk menyusun suatu kebudayaan nasional Indonesia yang dapat menjadi kekuatan pemersatu bangsa.

Pandangan “multikultural” sebenarnya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Prinsip Indonesia sebagai negara “*bhinneka tunggal ika*”, mencerminkan bahwa meskipun multikultural, tetapi Indonesia tetap terintegrasi dalam kesatuan. Pembentukan masyarakat multikultural Indonesia tidak bisa secara *taken for granted* atau *trial and error*, tetapi harus diupayakan secara terprogram, terintegrasi, dan berkesinambungan (Bagja Waluya, 2009: 106). Keragaman suku bangsa merupakan salah satu ciri masyarakat Indonesia yang sering kali dibanggakan. Banyak yang belum menyadari bahwa keragaman tersebut juga menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semuanya ini, memiliki fokus terhadap kolaborasi, kerja sama, dan negosiasi perbedaan-perbedaan untuk menyelesaikan konflik. Sebagian besar masyarakat Indonesia menekankan pada kehidupan bersama, saling mendukung, dan menghormati satu sama lain dalam berbagai hak dan kewajiban personal maupun komunal.

Pada tahap ini, komitmen terhadap nilai-nilai tidak dapat dipandang berkaitan hanya dengan *eksklusivisme personal* dan sosial, atau dengan superioritas kultural, tetapi lebih jauh lagi dengan kemanusiaan (*humanness*), komitmen, dan kohesi kemanusiaan termasuk di dalamnya melalui toleransi, saling menghormati hak-hak personal dan komunal. Manusia, ketika berhadapan dengan simbol-simbol, doktrin-doktrin, prinsip-prinsip, dan pola-pola tingkah laku, sesungguhnya mengungkapkan dan sekaligus mengidealisasikan komitmen kepada kemanusiaan (baik secara personal maupun komunal) dan kebudayaan yang dihasilkannya (Bagja Waluya, 2009: 106).

Dalam konteks ini, multikulturalisme dapat pula dipahami sebagai “kepercayaan” kepada normalitas dan penerimaan keragaman. Pandangan dunia multikulturalisme seperti ini dapat dipandang sebagai titik tolak dan fondasi bagi kewarganegaraan yang beradab. Multikulturalisme dapat dipandang sebagai landasan budaya (*cultural basic*) bagi kewarganegaraan dan pendidikan. Masyarakat Indonesia adalah seluruh gabungan semua kelompok manusia yang hidup di Indonesia. Suatu kenyataan yang tak bisa ditolak bahwa negara-bangsa Indonesia terdiri atas berbagai kelompok etnis,

budaya, agama, dan lain-lain sehingga bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat “multikultural”. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi, alat, atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Sebagai sebuah ide atau ideologi, multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, ekonomi dan bisnis, politik, dan berbagai kegiatan lainnya di masyarakat (Bagja Waluya, 2009: 107).

Kajian mengenai corak kegiatan, yaitu hubungan antarmanusia dalam berbagai manajemen pengelolaan sumber daya, merupakan sumbangan sangat besar dan penting dalam upaya mengembangkan serta memantapkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana, melainkan juga sebuah ideologi yang harus diperjuangkan karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakat. Multikulturalisme bukan sebuah ideologi yang berdiri sendiri, terpisah dari ideologi-ideologi lainnya. Multikulturalisme membutuhkan seperangkat konsep yang merupakan bangunan konsep-konsep untuk dijadikan acuan dalam memahami dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat.

Untuk dapat memahami multikulturalisme, diperlukan landasan pengetahuan berupa konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Konsep-konsep tersebut harus dikomunikasikan di antara para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini.

Kelompok sosial merupakan kelompok yang dinamis. Setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Untuk meneliti gejala tersebut, perlu ditelaah lebih lanjut perihal dinamika kelompok sosial tersebut. Beberapa kelompok sosial bersifat lebih stabil daripada kelompok-kelompok sosial lainnya atau strukturnya tidak mengalami perubahan-perubahan yang mencolok. Ada pula kelompok-kelompok sosial yang mengalami perubahan-perubahan cepat, walaupun tidak ada pengaruh-pengaruh dari luar. Namun pada umumnya, kelompok sosial mengalami perubahan sebagai akibat proses formasi ataupun reformasi dari pola-pola di dalam kelompok tersebut karena pengaruh dari luar.

Keadaan yang tidak stabil dalam kelompok sosial terjadi karena konflik antarindividu dalam kelompok atau karena adanya konflik antarbagian kelompok tersebut sebagai akibat tidak adanya keseimbangan antara

kekuatan-kekuatan di dalam kelompok itu sendiri. Ada bagian atau segolongan dalam kelompok itu yang ingin merebut kekuasaan dengan mengorbankan golongan lainnya; ada kepentingan yang tidak seimbang sehingga timbul ketidakadilan; ada pula perbedaan paham tentang cara-cara memenuhi tujuan kelompok, dan lain sebagainya. Semuanya itu mengakibatkan perpecahan di dalam kelompok hingga timbul perubahan struktur (Bagja Waluya, 2009: 107).

Timbulnya struktur yang baru pada akhirnya juga bertujuan untuk mencapai keadaan yang stabil. Tercapainya keadaan yang stabil sedikit banyak juga bergantung pada faktor kepemimpinan dan ideologi yang dengan berubahnya struktur, mungkin juga mengalami perubahan-perubahan. Kadang-kadang konflik dalam kelompok sosial dapat dikurangi atau bahkan dihapuskan, misalnya dengan mengadakan “kambing hitam” (*scapegoating*) atau kelompok tersebut menghadapi musuh bersama dari luar.

Perubahan struktur kelompok sosial terjadi karena sebab-sebab dari luar. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut.

1. Perubahan situasi atau keadaan di mana kelompok tadi hidup. Perubahan pada situasi dapat pula mengubah struktur kelompok sosial tadi. Ancaman dari luar, misalnya sering kali merupakan faktor yang mendorong terjadinya perubahan struktur kelompok sosial. Situasi membahayakan yang berasal dari luar memperkuat rasa persatuan dan mengurangi keinginan-keinginan para anggota kelompok sosial untuk mementingkan diri sendiri.
2. Pergantian anggota kelompok, contohnya, personalia suatu pasukan. Angkatan bersenjata sering mengalami pergantian dan hal itu tidak selalu mengakibatkan perubahan struktur secara keseluruhan. Namun, ada pula kelompok-kelompok sosial yang mengalami kegoncangan-kegoncangan apabila ditinggalkan salah seorang anggotanya, apalagi kalau anggota yang bersangkutan mempunyai kedudukan penting misalnya, dalam suatu keluarga. Apabila seorang ayah yang menjadi tulang punggung keluarga kemudian meninggal dunia, hal ini dapat menimbulkan guncangan besar terhadap keluarga tersebut. Bisa saja keluarganya jatuh miskin karena tidak ada lagi yang menanggung kebutuhan-kebutuhan hidup mereka.
3. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam situasi sosial dan ekonomi. Misalnya, dalam keadaan depresi suatu keluarga akan bersatu untuk menghadapinya walaupun anggota-anggota keluarga tersebut mempunyai agama ataupun pandangan politik yang berbeda satu dengan lainnya (Bagja Waluya, 2009: 108).

Di dalam dinamika kelompok, mungkin terjadi pertentangan antarkelompok. Apabila terjadi peristiwa tersebut, maka secara hipotesis prosesnya adalah sebagai berikut.

1. Apabila dua kelompok bersaing, akan timbul stereotip.
2. Kontak antara kedua kelompok yang bermusuhan, tidak akan mengurangi sikap bermusuhan itu sendiri.
3. Tujuan yang harus dicapai dengan kerja sama, dapat menetralkan sikap bermusuhan.
4. Di dalam kerja sama mencapai tujuan, stereotip yang semula negatif menjadi positif (Bagja Waluya, 2009: 108).

Konflik antarkelompok mungkin terjadi karena persaingan untuk mendapatkan mata pencaharian hidup yang sama atau terjadi pemaksaan unsur-unsur kebudayaan tertentu. Di samping itu, mungkin ada pemaksaan agama, dominasi politik atau adanya konflik tradisional yang terpendam. Contohnya, adalah hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Reaksi golongan minoritas kelompok mungkin dalam bentuk sikap tidak menerima, agresif, menghindari atau asimilasi. Masalah dinamika kelompok, juga menyangkut gerak atau perilaku kolektif. Gejala tersebut merupakan suatu cara berpikir, merasa dan beraksi suatu kelompok individu yang serta-merta dan tidak berstruktur. Sebab-sebab suatu kumpulan individu menjadi agresif, antara lain:

1. frustrasi selama jangka waktu yang lama;
2. tersinggung;
3. dirugikan;
4. ada ancaman dari luar;
5. diperlukan tidak adil;
6. terkena pada bidang-bidang kehidupan yang sangat sensitif (Bagja Waluya, 2009: 108).

Contoh kasusnya adalah perkembangan yang terjadi dalam dunia politik di negeri kita, yang memperlihatkan partai peserta pemilu dari yang semula berjumlah hanya tiga partai pada masa Orde Baru, kemudian berubah setelah memasuki masa pascareformasi menjadi sistem multipartai yang memunculkan puluhan partai. Hal ini menandakan bahwa dinamika yang terjadi di masyarakat terjadi karena perubahan pola pikir dan sistem pemerintahan. Kelompok dalam bidang politik pada akhirnya memiliki tujuan dan cara yang berbeda dalam melaksanakan kemajuan masing-masing.

Contoh lainnya adalah dalam bidang pendidikan, yaitu terjadinya perubahan kurikulum yang digagas oleh kelompok pendidik yang memiliki gagasan baru dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan.

## D. Keanekaragaman Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultural merupakan masyarakat majemuk yang memiliki lebih dari dua kebudayaan yang timbul akibat adanya kegiatan dan pranata khusus. Kelompok-kelompok sosial yang muncul akibat semakin kompleksnya kegiatan manusia dan banyaknya lembaga (pranata) sosial yang mawadahi kebutuhan dan kegiatannya, telah memunculkan keanekaragaman kelompok sosial sebagai wujud dari masyarakat multikultural.

Keanekaragaman merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan pada masa silam, masa kini, dan waktu-waktu mendatang (Bagja Waluya, 2009: 109). Keanekaragaman kelompok sosial terus tumbuh dan berkembang semakin kompleks dalam kehidupan masyarakat majemuk, yang tidak hanya didasarkan pada perbedaan suku, agama, dan ras. Keanekaragaman kelompok sosial dilatarbelakangi oleh faktor-faktor aktivitas manusia yang semakin kompleks dan pranata-pranata sosial yang semakin beragam untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia.

Keanekaragaman kelompok sosial dalam masyarakat yang majemuk merupakan salah satu ciri masyarakat Indonesia yang sering kali dibanggakan. Banyak yang belum menyadari bahwa di balik kemajemukan juga menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila tidak pandai-pandai dalam mengelolanya. Munculnya berbagai konflik sekarang ini merupakan bukti dari adanya perbedaan tersebut.

Seseorang mengaku sebagai anggota dari suatu suku bangsa karena dia dilahirkan oleh orangtua dari suku bangsa tertentu atau berasal dari daerah tertentu. Berbeda dari berbagai jati diri lainnya (misalnya status sosial) yang diperoleh seseorang dalam berbagai struktur sosial yang sewaktu-waktu dapat dibuang atau diganti, jati diri suku bangsa atau kesukubangsaan tidak dapat dibuang atau diganti. Jati diri suku bangsa akan tetap melekat dalam diri seseorang sejak kelahirannya. Walaupun jati diri suku bangsa dapat disimpan atau tidak digunakan dalam interaksi, ia tidak dapat dibuang atau dihilangkan.

Dalam setiap interaksi, jati diri akan tampak karena adanya atribut-atribut yang digunakan oleh pelaku dalam mengekspresikan jati dirinya sesuai dengan hubungan status sosial atau kedudukan masing-masing (Suparlan, 1999). Seseorang yang dilahirkan dalam keluarga suatu suku bangsa, mau tidak mau akan hidup berpedoman pada kebudayaan suku bangsanya. Sadar atau tidak sadar yang bersangkutan hidup berpedomankan kebudayaan suku bangsanya sebab dalam proses pembelajarannya dari masa anak-anak hingga dewasa dia tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus hidup menurut kebudayaan suku bangsanya seperti yang dimiliki oleh orangtuanya.

Dalam masyarakat Indonesia, suku bangsa dan kesukubangsaan adalah sebuah ide dan kenyataan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ruang lingkup batas-batas kesukubangsaan, stereotip dan prasangka berkembang dan menjadi mantap dalam suatu kurun waktu hubungan antarsuku bangsa yang tidak terbatas. Akibatnya, sering terjadi salah pengertian dalam komunikasi antarsuku bangsa yang menyebabkan semakin lebarnya jarak dan mantapnya batas-batas atau pagar-pagar yang membatasi hubungan antara dua suku bangsa atau lebih. Akibat lebih lanjut dari stereotip dan prasangka ini adalah terwujudnya tindakan-tindakan diskriminatif dalam hak dan kewajiban oleh suku bangsa yang dominan terhadap mereka yang tergolong lemah dan nonpribumi atau minoritas di dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Sebagai contoh, konflik antara orang pribumi dan orang Tionghoa yang tidak pernah dapat dituntaskan (Bagja Waluya, 2009: 111).

Perpindahan dan pertemuan antara kelompok penduduk yang berbeda latar belakang sosial budaya di suatu daerah bukannya tidak membawa dampak terhadap kehidupan sosial. Benturan-benturan antara penduduk asli dan penduduk pendatang sangat dimungkinkan terjadi mengingat latar belakang sosial, budaya, dan agama kelompok-kelompok tersebut berlainan atau bahkan bertentangan satu sama lain. Benturan sosial budaya tersebut akan menimbulkan konflik sosial. Jika tidak segera saling dipertemukan dan dikelola untuk merumuskan konsensus bersama agar terwujud integrasi sosial.

Gejala *etnosentrisme*, prasangka negatif dan perilaku diskriminatif antaretnik, yang menyangkut adat istiadat, bisa menjadi penghambat dalam interaksi serta pergaulan antaretnis. Gejala ini tidak hanya dalam masyarakat tradisional, tetapi juga dalam masyarakat modern. Akibatnya, bisa menimbulkan sikap tegang dan bermusuhan. Hal ini juga ditegaskan oleh Koentjaraningrat yang menyatakan bahwa hubungan dan interaksi

antara etnis yang berbeda merupakan suatu keadaan yang mengandung potensi konflik. Hubungan antara warga yang berbeda biasanya juga dilatarbelakangi oleh sikap prasangka etnis. Selain itu, setiap etnis biasanya sangat terikat pada *folkways* masing-masing dan cenderung memegang kuat identitas diri mereka.

Keterikatan etnis atas nilai-nilai budayanya mengakibatkan semakin kuatnya rasa *in-group* yang cenderung meremehkan kelompok luar. Potensi ini semakin membesar dengan munculnya kristalisasi etnis yang semakin memperkokoh tembok pembatas antara kekitaan dan kemerekaan. Mereka merasa bahwa keyakinan yang dimilikinya adalah yang paling baik. Sikap ini akhirnya akan menimbulkan *chauvinisme*, intoleransi, oposisi terhadap *folkways* lain, penghinaan, prasangka, penafsiran sepihak, dan sebagainya.

Dalam kasus Indonesia, segala konflik yang ada, baik berdasarkan asumsi radikal maupun fungsionalis, mengarah pada konflik etnis. Konflik etnis merupakan gejala sosial politik permanen dalam dunia modern. Hampir tidak ada negara yang bebas dari permasalahan itu. Dalam penelitian yang dilakukan antara tahun 1945-1980, korban jiwa akibat konflik etnis lebih banyak jumlahnya daripada kombinasi konflik lainnya. Renner berpendapat, konflik etnis dalam sebuah negara terjadi karena pemetaan atau pembagian wilayah yang dilakukan kolonialis tidak mempertimbangkan kepentingan kultural. Akibatnya, bangsa yang sama dan semula satu menjadi terpisah-pisah dan tergabung dengan bangsa lain yang asing dengan kultur mereka bahkan bertentangan dan kemudian terjebak dalam konflik permanen.

Eksistensi negara-negara multietnis mempunyai lima kemungkinan terjadinya model regulasi konflik etnis (Bagja Waluya, 2009: 112), sebagai berikut.

1. Partisi, yaitu pemisahan secara tegas antara satu etnis dan etnis lain. Model ini jarang digunakan sebab hanya terjadi ketika sebuah etnis benar-benar hidup terpisah dari garis demarkasi negara.
2. Dominasi satu etnis terhadap etnis lain, yaitu bentuk yang biasanya melalui kekerasan atau tindakan diskriminatif.
3. Asimilasi merupakan bentuk halus dan maju dari model kedua, tetapi dilakukan dengan cara yang alami.
4. Konsolidasi adalah sistem yang mengakui eksistensi setiap perbedaan yang ada dan mencoba untuk mengharmonikan perbedaan-perbedaan itu. Dalam model ini, kelompok mayoritas bukan pihak yang menentukan dalam berbagai hal, tetapi diputuskan berdasarkan konsensus dan kompromi.

5. Akomodasi adalah pengakuan terhadap semua etnis, tetapi tidak memiliki keterkaitan dengan hal-hal yang sifatnya politis. Model ini mungkin lebih tepat disebut sinkretisme; negara berusaha mengakomodasi dan mengapresiasi berbagai perbedaan yang ada dan menganggap semua etnis yang ada memiliki posisi yang sama dan diperlakukan secara adil.

Kerukunan merupakan tujuan yang diharapkan oleh semua masyarakat yang berbeda-beda dalam kelompok tersebut. Kerukunan hidup merupakan konsensus yang harus dicapai yang mencakup kerukunan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kerukunan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok juga kerukunan antara institusi sosial dan kerukunan antara masyarakat dan pemerintah.

Kemampuan masyarakat dalam memberdayakan organisasi dan kelembagaan pada umumnya menunjukkan kondisi yang relatif masih rendah. Hal ini tampak dari masih kuatnya pengaruh budaya tradisional, terutama di kalangan masyarakat petani, nelayan, dan berbagai komunitas lapisan bawah. Dampaknya, ketika terjadi perubahan sosial, ekonomi, politik, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian cepat dan makin canggih, mereka mengalami guncangan budaya (*cultural shock*) yang hebat. Indikasinya, nilai-nilai dan norma lama sudah ditinggalkan sementara nilai-nilai pengganti yang bercorak modern belum ditemukan. Contohnya, budaya gotong royong bergeser menjadi kerja dengan sistem upah yang setiap kegiatan selalu diukur dengan nilai uang (pamrih) dan sikap individualistik.

Fenomena tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran dan pengamalan dalam memaknai berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang saling terkait, seperti aspek ideologi, ekonomi, konflik sosial, politik, pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang masih penuh dengan ketidakpastian dan tantangan berat. Banyak peristiwa konflik sosial yang saling terkait dengan politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru untuk penyelesaian konflik dan penguatan ketahanan masyarakat lokal. Dialog kerukunan antarkomponen masyarakat makin penting diposisikan sebagai subsistem dalam kerangka pembangunan masyarakat. Pihak-pihak yang memegang peranan penting sebagai perancang dan pelaksana dialog adalah para pemimpin masyarakat.

Dialog antarkomponen masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerukunan kehidupan umat manusia yang secara kasatmata menunjukkan bahwa keragaman dan perubahan kebudayaan atau dinamika sosial

sering mengarah pada situasi konflik. Dialog pada masyarakat multikultur mempunyai beberapa fungsi, di antaranya:

1. sebagai wahana komunikasi antara orang-orang yang berada pada tingkat yang relatif sama;
2. merupakan upaya untuk mempertemukan hati dan pikiran antarsesama anggota masyarakat;
3. dapat dijadikan jalan bersama untuk menjelaskan kebenaran atas dasar kejujuran dan kerja sama dalam kegiatan sosial untuk kepentingan bersama dalam menciptakan dan memelihara keseimbangan dan keteraturan hidup bermasyarakat;
4. untuk memahami, mengidentifikasi, dan menyosialisasikan kebijakan, konsep, dan langkah-langkah kerukunan hidup bermasyarakat;
5. untuk pembinaan kerukunan umat manusia dalam rangka pengendalian konflik. (Bagja Waluya, 2009: 113).

## E. Pengaruh Keragaman terhadap Kehidupan Beragama, Bermasyarakat, Bernegara, dan Kehidupan Global

Berdirinya negara Indonesia dilatarbelakangi oleh masyarakat yang demikian majemuk, baik secara etnis, geografis, kultural, maupun religius. Kita tidak dapat mengingkari sifat pluralistik bangsa kita sehingga kita perlu memberi tempat bagi berkembangnya kebudayaan suku bangsa dan kebudayaan beragama dianut oleh warga negara Indonesia. Masalah suku bangsa dan, kesatuan-kesatuan nasional di Indonesia telah menunjukkan kepada kita bahwa negara yang multietnik memerlukan suatu kebudayaan nasional untuk menginvestasikan peranan identitas nasional dan solidaritas nasional di antara warganya. Gagasan tentang kebudayaan nasional Indonesia yang menyangkut kesadaran dan identitas sebagai suatu bangsa telah dirancang saat bangsa kita belum merdeka (Elly M. Setiadi, dkk, 2012: 151).

Manusia secara kodrat diciptakan sebagai makhluk yang mengusung nilai harmoni. Perbedaan yang berwujud baik secara fisik ataupun mental, sebenarnya merupakan kehendak Tuhan yang seharusnya dijadikan sebagai sebuah potensi untuk menciptakan sebuah kehidupan yang menjunjung tinggi toleransi. Di kehidupan sehari-hari, kebudayaan suku bangsa dan kebudayaan agama, bersama-sama dengan pedoman kehidupan berbangsa

dan bernegara, mewarisi perilaku dan kegiatan kita. Berbagai kebudayaan itu beriringan, saling melengkapi. Bahkan mampu untuk saling menyesuaikan (fleksibel) dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sering kali yang terjadi malah sebaliknya. Perbedaan-perbedaan tersebut menciptakan ketegangan hubungan antaranggota masyarakat (Elly M. Setiadi, dkk, 2012: 150).

Jika keterbukaan dan kedewasaan sikap dikesampingkan, besar kemungkinan tercipta masalah-masalah yang menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa seperti terjadinya hal-hal berikut ini.

- a. Disharmonisasi adalah tidak adanya penyesuaian atas keragaman antara manusia dengan dunia lingkungannya. Disharmonisasi dibawa oleh virus paradoks yang ada dalam globalisasi. Paket globalisasi begitu memikat masyarakat dunia dengan tawarannya akan keseragaman global untuk maju bersama dalam komunikasi gaya hidup manusia yang bebas dan harmonis dalam tatanan dunia, dengan mengesampingkan keunikan dan keberagaman manusia sebagai pelaku utamanya.
- b. Perilaku diskriminatif terhadap etnis atau kelompok masyarakat tertentu akan memunculkan masalah yang lain, yaitu kesenjangan dalam berbagai bidang yang tentu saja tidak menguntungkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Eksklusivisme rasialis, bersumber dari superioritas diri, alasannya bahwa secara kodrat ras/sukunya kelompoknya lebih tinggi daripada ras/suku/kelompok lain (Elly M. Setiadi, dkk, 2012: 152).

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari keragaman, yaitu:

- a. semangat religius;
- b. semangat nasionalisme;
- c. semangat pluralisme;
- d. semangat humanisme;
- e. dialog antarumat beragama (Elly M. Setiadi, dkk, 2012: 153).

Membangun suatu pola komunikasi, keterbukaan, kedewasaan sikap, pemikiran global yang bersifat inklusif, serta kesadaran kebersamaan dalam mengurangi sejarah, merupakan modal yang sangat menentukan bagi terwujudnya sebuah bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Menyatu dalam keragaman, dan beragam dalam kesatuan. Segala bentuk kesenjangan didekatkan. Segala keanekaragaman dipandang sebagai kekayaan bangsa, milik bersama. Sikap inilah yang perlu dikembangkan dalam pola pikir masyarakat untuk menuju Indonesia Raya merdeka.

## F. Manusia Beradab dalam Keragaman

Hubungan kebudayaan dengan peradaban sangat erat. Peradaban adalah salah satu perwujudan kebudayaan yang bernilai tinggi, indah, dan harmonis yang mencerminkan tingkat kebudayaan masyarakat yang bersangkutan, misalnya, adab, sopan santun, budi pekerti, budi bahasa, seni dan sebagainya (Elly M. Setiadi, dkk, 2012: 158).

Masyarakat sebagai komunitas yang beragam penuh perbedaan pandangan bahkan kepentingan, Tuhan menciptakan dalam keragamannya. Dalam realita hidup dalam keragaman telah meluas dalam wujud perbedaan status, kondisi ekonomi, relasi, sosial, dan sampai cita-cita perorangan maupun kelompok, tanpa dilandasi sikap arif dalam memandang perbedaan akan menuai konsentrasi panjang berupa konflik dan bahkan kekerasan di tengah-tengah kita. Sebagaimana konsepsi dari SN Kartikasari adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan, pihak yang terlibat di dalamnya bisa perorangan ataupun per kelompok, yang pasti memiliki kepentingan dan sasaran yang hendak dituju (Elly M. Setiadi, dkk, 2012: 150).

Dalam hal ini terdapat teori yang menunjukkan penyebab konflik di tengah masyarakat, sebagai berikut.

1. Teori hubungan masyarakat, memiliki pandangan konflik di tengah-tengah masyarakat disebabkan polarisasi yang terus terjadi ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda, perbedaan bisa dilatarbelakangi SARA bahkan pilihan ideologi politiknya.
2. Teori identitas yang melihat konflik yang mengeras di masyarakat tidak lain disebabkan oleh identitas yang terancam sering berakar hilangnya sesuatu atau penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan.
3. Teori kesalahpahaman antarbudaya, disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi di antara budaya yang berbeda.
4. Teori transformasi yang memfokuskan pada penyebab terjadinya konflik adalah ketidaksetaraan, dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial budaya dan ekonomi (Elly M. Setiadi, dkk, 2012: 159).

Oleh sebab itu, manusia yang beradab harus bersikap terbuka dalam melihat semua perbedaan dalam keragaman yang ada, menjunjung tinggi nilai kesopanan, dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan bangsa, alat pengikat persatuan seluruh masyarakat kebudayaan yang beraneka ragam.

## G. Faktor-Faktor Terjadinya Perubahan Sosial Budaya

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang faktor-faktor terjadinya perubahan sosial budaya ini dan pada uraian berikut ini akan dijelaskan kembali. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial ada dua macam, yaitu yang berasal dari luar masyarakat dan dari dalam masyarakat itu sendiri.

### 1. Faktor yang Berasal dari Luar Masyarakat

- a. Akulturasi atau *acultural contact* berarti suatu kebudayaan yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing melebur atau menyatu ke dalam budaya itu sendiri, tetapi tidak menyebabkan hilangnya kepribadian.
- b. Penetrasi, adalah masuknya unsur-unsur kebudayaan asing secara paksa sehingga merusak kebudayaan bangsa yang didatangi penetrasi itu disebut *penetration violent*. Misalnya, bangsa Spanyol dan Portugis datang ke Amerika latin sehingga kebudayaan Maya dan Inka menjadi musnah.
- c. Diflusi adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan perang dari satu tempat ke tempat lain sedikit demi sedikit hal ini berkaitan dengan terjadinya perpindahan.
- d. Invasi, yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing dengan perang (penaklukan). Penaklukan itu pada umumnya dilanjutkan dengan penjajahan selama penjajahan itu terjadi pemaksaan masuknya unsur-unsur asing ke dalam kebudayaan bangsa-bangsa yang terjajah.
- e. Asimilasi kebalikan dari penetrasi. Asimilasi adalah proses penyesuaian seseorang ataupun kelompok asing terhadap budaya setempat.
- f. Hibridisasi adalah perubahan kebudayaan yang disebabkan percampuran perkawinan antara orang asing dengan orang setempat. Hibridisasi umumnya bersifat individu, walaupun tidak menutup kemungkinan perubahan akibat perkawinan campuran meluas sehingga ke lingkungan masyarakat sekelilingnya, dan mengakibatkan munculnya kebudayaan baru, yaitu setengah kebudayaan asing dan setengah kebudayaan setempat.

- g. Milenarisasi merupakan salah satu bentuk gerakan kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat yang tertindas, telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah dan memiliki ideologi subkultural yang baru (Elly M. Setiadi, dkk, 2012: 161).

## 2. Perubahan yang Terjadi karena Pengaruh dari Dalam

### Sistem Pendidikan yang Maju

- a. *Inovia* adalah pembauran unsur teknologi dan ekonomi dari kebudayaan.
- b. *Discovery* adalah penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat walaupun ide baru yang diciptakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat. Namun, ada pula pendapat lain menyatakan bahwa *discovery* adalah penemuan sesuatu yang sebelumnya telah ada.
- c. *Investasion* adalah pendapat atau perolehan hal-hal baru yang dilakukan melalui usaha yang sungguh-sungguh walaupun melalui *trial and error*.
- d. *Enkulturasasi* atau pembudayaan adalah suatu proses manusia mempelajari menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan sistem norma (meliputi norma susila, adat, hukum, dan agama) yang hidup dalam masyarakat).
  - 1) Menghargai hasil karya orang lain.
  - 2) Adanya keterbukaan di dalam masyarakat.
  - 3) Adanya toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang (*deviation*).
  - 4) Penduduk yang heterogen. (Elly M. Setiadi, dkk, 2012:162)

**READING COPY**



## BAB 10

# MODERNISASI DAN GLOBALISASI

## A. Modernisasi

### 1. Pengertian Modernisasi

Secara bahasa “modernisasi” berasal dari kata modern yang berarti; a) terbaru, mutakhir; b) sikap dan cara berpikir sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian mendapat imbuhan “isasi” yang mengandung pengertian proses. Modernisasi mempunyai pengertian suatu proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan perkembangan zaman (Anonimous, 1989: 589).

Modern berarti mutakhir, atau sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman, sedangkan modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan hidup masa kini (Anonimous, 1994: 589).

Modernisasi sering dikaitkan dengan istilah pembaruan. Istilah “pembaruan” sebagaimana digunakan dalam wacana Islam di Indonesia, mengandung pengertian yang sangat luas. “Modernisme” dalam masyarakat barat mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha mengubah paham-

paham, adat istiadat, institusi lama, dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Jika “modernisme” dipahami sebagai pembaruan dalam Islam, maka modernisme tidak selalu berarti pembaruan yang mengarah pada reaffirmasi Islam dalam berbagai aspek kehidupan kaum Muslim (Azyumardi Azra, 1996: xi).

Azyumardi Azra cenderung menggunakan istilah “modernisme” dengan segala konotasinya. Tentu saja, “modernisme” itu mempunyai berbagai macam ratifikasi, sejak dari modernisme klasik sampai kepada neomodernisme, yang dalam perkembangan terakhir bahkan memunculkan postmodernisme. Begitu juga dalam konteks evolusinya *vis-à-vis* doktrin Islam. Sejak dari modernisme yang berproses ke arah westernisasi dan sekularisasi sampai pada neomodernisme yang lebih menekankan pada pentingnya warisan pemikiran Islam itu sendiri ketimbang modernisme itu sendiri. Sebagaimana dipaparkan Azra dalam kutipan tersebut, dapat dipahami pula bahwa modernisasi tidak dapat terlepas dari adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Modernisasi, yang dalam hal ini dapat dipahami sebagai perubahan menuju yang lebih baik diisyaratkan dalam Al-Quran Surah Al-Ra’du ayat 11:

.... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ

.... Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Modernisasi adalah sebuah era tercapainya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diapresiasi oleh seluruh umat manusia, termasuk juga umat Islam. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam dapat menjawab tantangan modernitas, sebagai aktualitas kehidupan karena

melahirkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Titik simpul pertautan Al-Quran dengan modernisasi terletak pada penggunaan akal pikiran manusia. Baik Al-Quran maupun modernisasi sangat mengagungkan akal pemikiran atau dimensi rasionalitas. Perbedaannya, kalau modernisasi mengagungkan akal pikiran secara absolut, sedangkan dalam Al-Quran akal pikiran itu memperoleh bimbingan wahyu.

Untuk pengertian yang lebih luas lagi dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2007: 307) dalam bukunya "*Sosiologi suatu pengantar*", Modernisasi merupakan suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam artian teknologis serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil.

Adapun menurut beberapa ahli, modernisasi adalah sebagai berikut.

- a. J.W. School menyatakan bahwa modernisasi adalah suatu transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspeknya.
- b. Widjojo Nitisastro, modernisasi adalah suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, ke arah pola-pola ekonomis dan politis.
- c. Soerjono Soekanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan sosial *planning* (Soerjono Soekanto, 2007: 307).

Dengan dasar pengertian di atas, maka secara garis besar istilah modern mencakup pengertian sebagai berikut.

- a. Modern berarti berkemajuan yang rasional dalam segala bidang dan meningkatnya taraf penghidupan masyarakat secara menyeluruh dan merata.
- b. Modern berarti berkemanusiaan dan tinggi nilai peradabannya dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. (<http://id.shvoong.com>, diakses pada 20 Desember 2014).

Modernisasi di suatu wilayah identik dengan berkembangnya teknologi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, kemajuan teknologi dijadikan sebagai tolok ukur modern atau tidaknya suatu wilayah. Tidak ada ciri-ciri khusus yang menunjukkan terjadinya modernisasi di suatu wilayah karena modernisasi yang terjadi di suatu wilayah berbeda dengan yang terjadi di wilayah lainnya. Sebagai contoh, program bebas buta huruf di desa yang terbelakang sudah termasuk modernisasi, berbeda dengan di kota.

Bagi kehidupan kota modernisasi ditunjukkan adanya kemajuan teknologi, misalnya teknologi komunikasi atau *handphone*.

Dengan demikian, pengertian modernisasi secara luas adalah perubahan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat diganti dengan nilai-nilai baru yang dapat menghilangkan nilai-nilai lama atau hanya melengkapi nilai-nilai yang telah ada.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Modernisasi

Modernisasi tidak terjadi begitu saja, tetapi terjadi karena adanya faktor pendukung yang menunjang terjadinya suatu perubahan. Beberapa syarat suatu modernisasi dapat terjadi adalah sebagai berikut.

- a. Cara berpikir ilmiah yang melembaga dalam kelas penguasa maupun masyarakat. Hal ini menghendaki suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dan baik.
- b. Sistem administrasi negara yang baik, yang benar-benar mewujudkan birokrasi.
- c. Adanya pengumpulan data yang baik dan teratur serta terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Hal ini memerlukan penelitian yang kontinu agar mereka tidak tertinggal.
- d. Penciptaan iklim yang *favorable* dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Hal ini harus dilakukan tahap demi tahap karena banyak sangkut pautnya dengan sistem kepercayaan masyarakat (*belief system*).
- e. Tingkat organisasi yang tinggi, di satu pihak berarti disiplin, sedangkan di lain pihak berarti pengurangan kemerdekaan.
- f. Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial (*social planning*). Apabila itu tidak dilakukan, perencanaan akan terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan dari kepentingan-kepentingan yang ingin mengubah perencanaan tersebut demi kepentingan golongan kecil dalam masyarakat, (Soerjono Soekanto, 2009: 306-307).

Dari beberapa syarat modernisasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua masyarakat dapat dengan mudah menerima adanya modernisasi. Beberapa faktor yang menghambat terjadinya modernisasi adalah sebagai berikut.

- a. Perasaan takut akan disintegrasikan. Perasaan ini biasanya muncul pada masyarakat yang masih memegang teguh tradisi nenek moyangnya sehingga modernisasi dianggap akan merusak integrasi atau organisasi masyarakat yang telah ada sebelumnya.
- b. Kurang berkembangnya IPTEK. Masyarakat yang masih berpikiran kolot biasanya menolak adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Adanya *vested interested* (nilai-nilai yang telah tertanam dengan sangat kuat).
- d. Adanya prasangka buruk terhadap budaya luar mereka. Orang yang berprasangka buruk dengan modernisasi akan menolak nilai-nilai baru yang muncul.

Kedua faktor tersebut membuktikan bahwa modernisasi di suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah lain karena dalam suatu wilayah mungkin mendapatkan dukungan, tetapi di wilayah lain belum tentu modernisasi dapat diterima.

### 3. Dampak Modernisasi

Modernisasi yang terjadi dalam suatu wilayah akan memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif modernisasi adalah sebagai berikut.

- a. Berubahnya pola pikir masyarakat. Modernisasi mengubah pola pikir dari yang sebelumnya irasional menjadi rasional.
- b. Berkembangnya IPTEK. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan masyarakat dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikiran maju.
- c. Tingkat pengangguran berkurang. Adanya industri-industri baru yang memproduksi alat-alat komunikasi serta transportasi akan membuka lapangan kerja tersendiri bagi pengangguran.
- d. Meningkatnya produktivitas manusia karena proses produksi dikerjakan menggunakan teknologi/mesin.
- e. Tersedianya berbagai barang konsumsi.

Selain menimbulkan dampak positif, modernisasi juga membawa pengaruh negatif bagi masyarakat, antara lain sebagai berikut.

- a. Urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari desa (kota kecil, daerah) ke kota besar (pusat pemerintahan) (KBBI Online). Hal ini terjadi karena kota mengalami

proses modernisasi lebih cepat sehingga menarik orang-orang desa untuk ke kota. Seperti teknologi komunikasi dan transportasi yang lebih lengkap.

- b. Berkurangnya areal hijau. Area pertanian, hutan-hutan, bukit-bukit yang seharusnya tetap hijau untuk menjaga kelestarian lingkungan malah digunakan untuk mendirikan industri-industri baru sehingga dapat merusak ekosistem lingkungan.
- c. Konsumerisme. Barang-barang konsumsi yang sangat banyak membuat sebagian besar masyarakat hanya menjadi konsumen. Masyarakat menjadi hedonisme atau ingin enak saja, jadi masyarakat tidak perlu tahu bagaimana cara memproduksi, tetapi hanya sekedar memanfaatkan barang-barang yang telah ada. Sebagai contoh semakin banyaknya makanan dan bumbu-bumbu instan.
- d. Kesenjangan sosial. Modernisasi membawa nilai-nilai baru yang tidak semua orang mampu mengikuti gerak laju modernisasi. Jikalau seseorang mampu mengikuti arus modernisasi, sedangkan orang lain tidak, maka akan membuat semakin curamnya jurang pemisah antara individu yang satu dengan individu yang lain.
- e. Kenakalan remaja (seks bebas). Beberapa kenakalan remaja terjadi karena semakin mudahnya akses ke dunia luar. Misalnya, dengan banyaknya internet memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dari seluruh dunia. Di samping itu, juga mudahnya akses membuka situs-situs porno sehingga menimbulkan kenakalan-kenakalan remaja bahkan seks bebas.
- f. Individualistik. Berkembangnya teknologi yang memudahkan manusia dalam beraktivitas membuat sebagian masyarakat menjadi lupa akan kedudukan dirinya sebagai makhluk sosial.
- g. Lunturnya jati diri suatu bangsa. Semakin derasnya arus modernisasi tanpa diimbangi dengan ideologi bangsa yang kuat akan melunturkan jati diri negara tersebut.

#### 4. Akibat Modernisasi

Akibat modernisasi yang dimaksud di sini adalah perubahan yang biasanya terjadi bersamaan dengan usaha modernisasi. Berbagai perubahan sistem stratifikasi telah terjadi pula selama proses modernisasi. Robert H. Lauer (2001: 431-432) melukiskan sembilan jenis perubahan sistem stratifikasi sosial sebagai berikut.

- a. Pembagian kerja menjadi semakin rumpil, bersamaan dengan meningkatnya jumlah spesialisasi.
- b. Status cenderung berdasarkan prestasi sebagai pengganti status berdasarkan asal usul (*ascription*).
- c. Alat yang memadai untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan dari orang yang terlibat dalam produksi menjadi perhatian utama.
- d. Peranan pekerjaan bergeser dari kegiatan yang memberikan kepuasan hakiki ke peranan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan. Artinya, pekerjaan berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan ganjaran ketimbang sebagai ganjaran itu sendiri.
- e. Ganjaran yang tersedia untuk didistribusikan meningkat.
- f. Ganjaran didistribusikan atas dasar yang agak lebih aktif.
- g. Terjadinya pergeseran dalam peluang hidup di berbagai strata sosial.
- h. Terjadinya pergeseran dalam distribusi gengsi sosial, meskipun keuntungan menjadi masyarakat modern dibanding menjadi masyarakat tradisional dalam hal ini masih menjadi tanda-tandanya.
- i. Pergeseran dan masalah serupa terdapat juga dalam distribusi kekuasaan.

## B. Globalisasi

### 1. Pengertian Globalisasi

Di mana-mana orang mengatakan bahwa kita sekarang hidup di zaman dengan kehidupan sosial yang sebagian besar ditentukan oleh proses global. Bahkan sekarang ini telah menjadi mode untuk menganggap bahwa zaman negara bangsa sudah lewat, dan bahwa pemerintahan tingkat nasional tidak efektif lagi untuk menghadapi proses ekonomi dan sosial yang mengglobal (Paul Hirst & Graham Thompson, 2001: 266).

Hampir tidak ada satu pun negara di belahan dunia yang tidak membicarakan globalisasi secara intensif sebab kehadirannya tak mungkin diabaikan dalam upaya memahami prospek kehidupan negaranya di abad ini. Di Prancis, kata globalisasi disebut dengan *mondialisation*. Di Spanyol dan Amerika Latin menyebutnya *globalization*. Sementara di Jerman menyebutnya *globalisierung* (Anthony Giddens 2001: 2).

Dalam memberikan pengertian dan pandangannya tentang globalisasi, beberapa peneliti dan atau ilmuwan telah mengungkap atau telah

memberikan penjelasan tentang pengertian maupun hakikat globalisasi, di antaranya sebagai berikut.

- a. Menurut Mahmud Toha esensi globalisasi pada dasarnya merupakan peningkatan interaksi dan integrasi di dalam perekonomian baik di dalam negara maupun antarnegara, yang meliputi aspek-aspek perdagangan, investasi, perpindahan faktor-faktor produksi, dalam bentuk migrasi tenaga kerja, dan penanaman modal asing, keuangan dan perbankan internasional dan arus devisa (Mahmud Toha, 2002: 2).
- b. Sementara menurut Group of Lisbon, sebagaimana dikutip oleh Mahmud Toha (2002: 4) bentuk globalisasi dapat dikategorikan menjadi tujuh jenis, sebagai berikut.
  - 1) Globalisasi keuangan dan kepemilikan modal melalui deregulasi pasar modal, mobilitas pasar modal internasional, dan merger serta akuisisi.
  - 2) Globalisasi pasar dan strategi ekonomi melalui integrasi kegiatan usaha skala internasional, aliansi strategis, dan pembangunan usaha terpadu di negara lain.
  - 3) Globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengembangan.
  - 4) Globalisasi sikap hidup dan pola konsumsi atau globalisasi budaya.
  - 5) Globalisasi aturan-aturan pemerintah.
  - 6) Globalisasi politik internasional.
  - 7) Globalisasi persepsi dan sosial budaya internasional.
  - 8) Kerakyatan.
- c. Adapun Mochtar Buchori menjelaskan bahwa secara populer "globalisasi" berarti menyebarnya segala sesuatu secara sangat cepat ke seluruh dunia (Mochtar Buchori, 2001: 46).
- d. Menurut Bonnie Setiawan dari International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), globalisasi merupakan gerakan aliran modal yang dimiliki oleh korporasi multinasional dari negara-negara kaya (industri) ke negara-negara miskin melalui investasi perdagangan dan utang luar negeri. Aliran modal ini dengan sendirinya mendominasi perekonomian nasional, yang secara nyata terlihat dari tergusurnya usaha-usaha kecil dan menengah. Misalnya, minuman limun produk nasional yang tergantikan minuman *Coca-Cola* dan *sprite*. Untuk kepentingan investasi dan perdagangan internasional, maka diciptakan peraturan dan sistem ekonomi yang seragam di seluruh dunia, misalnya dengan aturan privatisasi dan aturan antimonopoli. Secara sekilas

aturan ini terlihat menguntungkan, tetapi sebenarnya yang terjadi adalah pembatasan wewenang negara dalam melindungi kepentingan hidup rakyatnya (Bonie Setiawan, 2001: 1).

- e. Menurut Dr. Heru Nugroho, globalisasi adalah proses kebudayaan yang ditandai dengan adanya kecenderungan wilayah-wilayah di dunia, baik geografis maupun fisik, menjadi seragam dalam format sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan sosial proses global telah menciptakan *egalitarianisme*, di bidang budaya memicu munculnya "*internationalization of culture*", di bidang ekonomi menciptakan saling ketergantungan dalam proses produksi dan pemasaran, dan di bidang politik menciptakan "liberalisasi" (Heru Nugroho, 2001: 4).
- f. Menurut Dr. Mansour Fakih, globalisasi pada dasarnya merupakan proses pesatnya perkembangan kapitalisme, yang ditandai dengan globalisasi pasar, investasi, dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan Transnasional (TNCs /*Transnational Corporations*) dengan dukungan lembaga-lembaga Finansial Internasional (IFIs /*International Financial Institutions*) yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Global (WTO/*World Trade Organization*). Menurutnya globalisasi merupakan salah satu fase dari perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal, yang secara teoretis telah dikembangkan oleh Adam Smith. Bahkan globalisasi disebutnya sebagai kelanjutan dari kolonialisme dan developmentalisme sebelumnya. Dengan kebijakan liberalisasi dalam segala bidang yang dipaksakan melalui '*Structural Adjustment Program*' (SAP) oleh lembaga finansial global, dan disepakati oleh rezim GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) telah menjadikan kapitalisme berkembang menuju dominasi ekonomi, politik, dan budaya dalam skala global. (Mansour Fakih, 2002: 192).

James Petras dan Henry Veltmeyer, mengelompokkan perbedaan pemahaman yang tajam dari para sarjana atau ilmuwan tentang globalisasi menjadi dua kelompok, sebagai berikut.

- a. Kelompok yang menganggap globalisasi sebagai suatu serangkaian proses yang saling terkait cenderung melihatnya sebagai keniscayaan, sesuatu yang terhadapnya perlu dan harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam perekonomian dunia dan menempatkan dirinya dalam proses globalisasi dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan.
- b. Kelompok yang menganggap bahwa globalisasi sebagai sebuah proyek kelas, bukannya sebagai proses yang niscaya, cenderung melihat perubahan-perubahan yang berkaitan dengan globalisasi secara berbeda.

Pertama-tama globalisasi dipandang tidak sebagai istilah khusus yang bermanfaat untuk mendeskripsikan dinamika proyek ini, tetapi sebagai alat ideologis yang lebih digunakan untuk preskripsi daripada deskripsi yang akurat (James Petras dan Henry Veltmeyer, 2001: 10).

Dalam konteks ini, globalisasi dapat diganti dengan sebuah istilah yang mengandung nilai *deskriptif* dan kekuatan penjas yang lebih besar, yaitu *imperialism* (James Petras, 2001: 10).

Dalam studinya yang sistematis, James Petras mengatakan bahwa hingga kini ada 3 (tiga) argumen dasar yang selalu dirujuk ketika para pakar sedang menjelaskan perkembangan pesat globalisasi. Ketiga argumen dasar tersebut *pertama*, kemajuan teknologi atau sering disebut dengan revolusi informasi; *kedua*, permintaan pasar dunia; *ketiga*, logika kapitalisme atau *logic of capitalism* (Coen Husain Pontoh, 2001: x – xi).

Akan tetapi, dari ketiga argumen tersebut, Petras berpendapat bahwa ketiga-tiganya gagal dalam menjelaskan perkembangan globalisasi. Argumen bahwa globalisasi adalah hasil revolusi teknologi dan informasi memiliki beberapa kelemahan mendasar. *Pertama*, teknologi komputer memang telah memfasilitasi cepatnya arus informasi, meningkatkan arus transfer uang dan perpindahan modal serta menyediakan jaringan komunikasi dan relokasi penanaman modal yang aman. Namun, teknologi tidak menentukan lokasi investasi ataupun kebijakan investasi. Segala aktivitas ekonomi merupakan keputusan sosial-politik dan hanya dapat dijalankan oleh institusi. Jadi politik dan ekonomilah yang mengontrol teknologi.

*Kedua*, argumen bahwa permintaan pasar yang menciptakan globalisasi adalah argumen yang didasarkan pada pengamatan yang keliru tentang dinamika pasar. Kompetisi antarprodusen dalam memenuhi kebutuhan pasar global bukanlah akibat dari permintaan pasar itu sendiri, tetapi oleh akibat organisasi-organisasi yang telah dikuasai oleh MNC (*Multi National Cooperation*).

*Ketiga*, argumen bahwa "globalisasi" adalah hasil dari logika kapitalisme atau *logic capitalism*, merupakan argumen yang ahistoris dan asosial. Bahkan ide ini, menurut Petras sangat abstrak; *pertama*, karena teori ini mengaburkan peran banyak aktor (pemilik modal) dan begitu banyak negara yang berusaha mengintervensi dan mempertajam gerak modal. *Kedua*, teori ini tidak mampu menjelaskan periode involusi modal, ataupun krisis yang menyebabkan modal harus lari keluar negeri atau kembali ke pasar lokal. *Ketiga*, teori ini gagal menjelaskan perbedaan tingkat modal yang masuk ke perekonomian dunia pada waktu yang berbeda-beda.

Teori *logic capitalism*, bertolak dari konsepsi yang mengandaikan modal bergerak, maju-mundur secara teratur tanpa pemikiran bahwa dia akan naik dan turun. Teori ini juga tidak mempertimbangkan hubungan erat antara modal dengan peran politik, ideologi, dan kebijakan negara dalam menentukan akumulasi modal.

Lebih jelas lagi, Petras mengatakan kekuatan penggerak globalisasi adalah negara - negara imperial pusat, perusahaan-perusahaan multinasional dan bank-bank, dengan dukungan lembaga keuangan internasional. Negara menjadi motor penggerak globalisasi karena ia memiliki kekuasaan dalam mengatur formulasi strategis globalisasi, alokasi sumber daya ekonomi pada aktor-aktor global (James Petras, 2001: 53).

Dari uraian tersebut, kelompok kedua lebih bisa diterima yang menyebutkan bahwa globalisasi pada dasarnya merupakan fase perkembangan atau kelanjutan dari fase-fase sebelumnya, yaitu fase industri, fase modernisasi, fase kolonialisasi, dan selanjutnya berubah menjadi fase globalisasi. Tujuan dari semua fase tersebut adalah sama yakni in-efisiensi dan pencapaian keuntungan maksimal atas akumulasi modal sehingga yang sebenarnya terjadi adalah proses pengalihan kekayaan dari negara miskin ke negara-negara kaya (negara-negara yang tergabung dalam G-7: Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Italia, dan Kanada). Dulu pada abad ke-18, perbandingan kekayaan negara-negara Utara - Selatan adalah 2 banding 1. Pada tahun 1965, perbandingan Utara-Selatan menjadi 30 banding 1, dan kini perbandingan menjadi jauh lebih tajam yakni 80 banding 1 (Susan George, 2002:64.) Kecenderungan ketidaksetaraan dan kesenjangan yang lebih besar ini bukan kebetulan dan bukan merupakan tindakan Tuhan. Kesenjangan tersebut merupakan efek yang terbangun atas liberalisasi, privatisasi, deregulasi, dan integrasi yang dipaksakan ke pasar dunia melalui penyusunan struktural, dan lebih mengandalkan kekuatan pasar, yang memberikan ganjaran atas modal. Situasi demikian oleh Gidden (1999) digambarkan bukan sebagai kampung global (*global village*), melainkan penjarahan global (*global pillage*). Sebab faktanya, seperlima penduduk dunia antara tahun 1989 dan 1998, pendapatannya merosot tajam, dari 2,3 persen menjadi 1,4 persen dari seluruh pendapatan dunia. Sebaliknya, jumlah pendapatan yang diperoleh negara-negara terkaya di dunia (seperlima penduduk dunia) meningkat. Di daerah Afrika sub-Shara misalnya, 20 negara mendapatkan pendapatan riil per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan yang diperoleh pada akhir 1970-an (Antony Giddens, 2001: 11).

## 2. Fase-Fase Perkembangan Globalisasi

Globalisasi yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kalangan akademisi bukan semata-mata merupakan gejala kontemporer, tetapi merupakan proses *lounge durre* atau proses lama dan panjang. Proses global tersebut telah memakan waktu berabad-abad lamanya seiring dengan sejarah perjalanan manusia.

Perbedaannya adalah bahwa globalisasi yang sedang berlangsung sekarang memiliki kecepatan, kekuatan, dan cakupan yang sangat luar biasa. Hal-hal nyata yang terlihat dalam era global adalah meningkatnya integrasi ekonomi antarnegara-negara di dunia, baik antarnegara maju, berkembang maupun antarkeduaanya. Globalisasi dengan demikian diwarnai ekspansi pasar yang dalam bentuk konkret menjelma dalam berbagai penyelenggaraan pasar-pasar bersama regional, seperti AFTA, NAFTA, APEC, EEC, dan sebagainya. Hal ini merupakan ekspansi hubungan dagang serta formasi wilayah pasar terpadu di benua-benua Amerika, Asia, Eropa, Australia, dan lain-lain. Proses perluasan pasar ini merupakan rekayasa sosial dengan skala luas, yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, dengan menggunakan berbagai instrumen, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, institusi sosial, politik, dan kebudayaan (Heru Nugroho, 2001: 4).

Berikut ini sejarah dan fase-fase perkembangan globalisasi menurut sejumlah ilmuwan dan atau peneliti.

### a. Mansour Fakhri

Menurut Mansour Fakhri, krisis pembangunan yang terjadi saat ini pada dasarnya merupakan bagian dari krisis sejarah dominasi dan eksploitasi manusia atas manusia lain, yang diperkirakan telah berusia lebih dari lima ratus tahun. Menurutnya, proses sejarah dominasi tersebut dapat dibagi menjadi tiga periode formasi sosial. Fase-fase tersebut adalah sebagai berikut.

*Fase pertama*, adalah periode “kolonialisme”, yakni fase di mana perkembangan kapitalisme Eropa mengharuskan ekspansi secara fisik untuk memastikan perolehan bahan baku mentah. Melalui fase inilah proses dominasi manusia dengan segenap teori perubahan sosial yang mendukungnya telah terjadi dalam bentuk penjajahan secara langsung selama ratusan tahun. Berakhirnya era kolonialisme ini ditandai dengan berakhirnya perang dunia II, yaitu pada tahun 1949.

*Fase kedua*, adalah fase neokolonialisme dengan nama yang disebut era *developmentalisme*, yakni berakhirnya era kolonialisme, dunia memasuki

era 'neo-kolonialisme', di mana modus dominasi dan penjajahan tidak lagi fisik dan secara langsung melainkan melalui penjajahan teori dan ideologi. Fase ini lebih umum dikenal dengan era developmentalisme. Periode ini ditandai dengan masa kemerdekaan negara-negara Dunia Ketiga secara fisik. Namun, pada era ini dominasi negara-negara bekas penjajah kepada negara-negara bekas koloni mereka tetap dilanggengkan melalui kontrol terhadap teori dan perubahan sosial. Oleh karena itu, sesungguhnya teori pembangunan atau developmentalisme menjadi bagian dari media dominasi karena teori tersebut direkayasa untuk menjadi paradigma dominan untuk perubahan sosial Dunia Ketiga oleh negara-negara Utara. Dengan kata lain, fase kedua ini kolonialisasi tidak terjadi secara fisik melainkan melalui hegemoni, yakni dominasi cara pandang dan ideologi serta *discourse* yang dominan melalui produksi pengetahuan (Gramsci, 1999).

*Fase ketiga:* globalisasi atau neoliberalisme menurut Mansour Fakih, krisis yang terjadi pada awal abad XIX telah menyebabkan krisis yang berkepanjangan hingga memunculkan depresi ekonomi pada tahun 1930-an sehingga pertumbuhan akumulasi kapital dari golongan kapitalis melambat. Salah satu sebabnya adalah proteksi, paham keadilan sosial, kesejahteraan bagi rakyat, tradisi adat pengelolaan sumber daya alam berbasis rakyat, dan sebagainya. Akibatnya tenggelamlah paham liberalisme. Untuk itu kapitalisme memerlukan strategi baru untuk mempercepat pertumbuhan dan 'akumulasi kapital', maka strategi yang ditempuh adalah dengan menyingkirkan segenap rintangan investasi di atas dengan pasar bebas (*free market*), perlindungan hak milik intelektual, *good governance*, penghapusan subsidi dan program proteksi kepada rakyat, *deregulasi*, dan penguatan *civil society* dan anti korupsi, dan lain sebagainya (Mansour Fakih, 2002: 184).

Untuk itu diperlukan suatu tatanan perdagangan global, maka sejak itulah gagasan globalisasi dimunculkan. Dengan demikian, globalisasi pada dasarnya berpijak pada kebangkitan kembali liberalisme, suatu paham yang lebih dikenal sebagai neoliberalisme (Mansour Fakih, 2002: 186).

Paham inilah yang sangat mengglobal dengan mengembangkan 'konsensus' yang dipaksakan, dikenal sebagai globalisasi sehingga terciptalah suatu tata dunia. Arsitek tata dunia ini (ditetapkan sebagai *The Neo-liberal Washington Consensus*, yang terdiri dari para pembela ekonomi privat terutama wakil dari perusahaan-perusahaan besar yang mengontrol dan menguasai perekonomian internasional, serta mempunyai kemampuan untuk mendominasi informasi kebijakan dalam rangka memengaruhi opini publik dunia (Joseph E. Stigliz, 2002: 1-2).

Ada sepuluh ajaran neoliberal, yaitu: (1) disiplin fiskal, yang intinya memerangi defisit anggaran; (2) penghapusan pemotongan anggaran belanja pemerintah untuk subsidi; (3) pembaruan pajak yang diorientasikan pada pemberian kemudahan pembayaran pajak untuk para pengusaha; (4) liberalisasi keuangan, berupa kebijakan bunga bank yang ditentukan oleh pasar; (5) kebijakan penentuan nilai tukar uang tanpa kontrol pemerintah; (6) kebijakan untuk menghilangkan segala yang mengganggu perdagangan bebas, seperti kebijakan bea tarif; (7) kebijakan untuk menyingkirkan segenap aturan pemerintah yang menghambat pemasukan modal asing; (8) privatisasi atau kebijakan untuk memberikan semua pengelolaan perusahaan negara kepada swasta; (9) deregulasi kompetisi; (10) *Intellectual Property Rights* atau paten (Mansour Fakih, 2002: 190). Meskipun globalisasi dikampanyekan sebagai era masa depan yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi secara global dan akan mendatangkan kemakmuran masyarakat dunia, sesungguhnya globalisasi merupakan kelanjutan dari kolonialisme-imperialisme dan developmentalisme sebelumnya. Bahkan para ilmuwan kritis yang menghendaki tata sistem dunia yang adil (*fair market not free market*) mencurigai globalisasi sebagai bungkus baru dari imperialisme dan kolonialisme.

#### b. Paul Hirst, Grahame Thompson, dan James Petrans

Menurut Hirst dan Thompson, era globalisasi bukan baru muncul setelah Perang Dunia II, atau pada tahun 1960-an, melainkan globalisasi telah berlangsung jauh sebelumnya. Kegiatan dagang misalnya, telah ada pada abad pertengahan, barulah di Eropa, muncul kegiatan dagang yang teratur lintas negara, yang sering dilakukan oleh lembaga-lembaga korporasi swasta (meskipun sering kali mendapat dukungan dan bantuan yang besar dari pemerintahnya) (Paul Hirst dan Grahame Thompson, 2001: 33).

Dengan fakta sejarah itu, James Petrans kemudian membagi tahapan perkembangan globalisasi atas tiga fase, yaitu *Fase pertama*, dimulai sejak abad 15 seiring dengan pertumbuhan bersama kapitalisme dan ekspansi mereka ke luar negeri; penaklukan sebuah negeri atau pengisapan atas Asia, Afrika, dan Amerika Latin, dan pendudukan bangsa kulit putih atas tanah di Amerika Utara dan Australia. Dengan demikian, globalisasi pada awal mulanya, tidak dapat dilepaskan dari imperialisme sebab pilar utamanya dibangun atas akumulasi modal kaum kapitalis Eropa yang dicapai dengan mengisap Dunia Ketiga.

*Fase kedua* dari globalisasi dibangun pada era "*inter imperial trade*" (perdagangan antarkaum imperialis); perdagangan antar-Eropa dan selanjutnya dengan Amerika (sekarang melibatkan Jepang), telah menciptakan serangkaian kerja sama lokal dalam satu kawasan untuk mendukung kekuatan dominasi dalam kawasan tersebut. dalam konteks ini globalisasi telah melibatkan kompetisi dan kolaborasi; perjuangan antara perusahaan multinasional di satu negara untuk merebut sebuah pasar dan juga kolaborasi antarmereka sendiri untuk mengeksploitasi pasar tersebut.

*Fase ketiga*, globalisasi masuk ke dalam fase "*international trade*" (perdagangan internasional). Perdagangan internasional atas komoditi dari jaringan pasar global maupun regional telah memberikan karakter kelas dalam globalisasi. Artinya, globalisasi telah menjadi arena konflik kelas dan konflik-konflik perdagangan. (Paul Hirst dan Grahame Thompson, 2001: 11-12).

Dalam perspektif lebih liberal, periodisasi perkembangan globalisasi yang agak berbeda dikemukakan oleh Paul Hirst dan Grahame Thompson (2001: 11-12) yang membedakan perkembangan globalisasi atas dua fase, sebagai berikut.

*fase pertama*, fase antara tahun 1870 hingga 1930. Pada fase ini perekonomian dunia didominasi oleh paham *laissez faire*, di mana intervensi negara terhadap pasar sangat minimal dan pertukaran arus barang dan tenaga kerja hampir tanpa halangan. Fase ini juga ditandai oleh apa yang disebut J. Hobsbawn, sebagai era *age of empire*, yakni ketika kerajaan Inggris menguasai hampir separuh tanah di muka bumi. *Fase kedua*, adalah globalisasi, Fase kedua ini dimulai pada awal tahun 1970-an ketika Amerika Serikat mendominasi kekuatan politik dan ekonomi. Pada fase ini, globalisasi diidentikkan dengan kemenangan kapitalisme dan keruntuhan komunisme (Coen Husain Pontoh, 2001: xv). Dengan mencermati periodisasi perkembangan globalisasi ini nyatalah bahwa globalisasi merupakan suatu yang niscaya dalam sistem kapitalisme. Mendiskusikan fakta globalisasi tanpa meletakkannya dalam konteks kapitalisme, merupakan akar dan manipulasi makna yang terjadi selama ini.

### 3. Ideologi Globalisasi

Banyak respons beragam yang diberikan masyarakat dunia terkait dengan globalisasi. Ada yang setuju, menolak serta tak sedikit yang cuek atau tak peduli terhadap globalisasi yang sedang berjalan. Gerakan

perlawanan globalisasi begitu gencar di belahan dunia, Asia, Eropa, Afrika dan Amerika. Pertanyaannya adalah, mengapa gelombang perlawanan terhadap globalisasi makin lama makin besar. Di Seattle 1999, ribuan demonstran dari berbagai negara baik negara maju maupun negara miskin dan berkembang berunjuk rasa menentang globalisasi bersamaan dengan pertemuan WTO, kemudian aksi-aksi tersebut berlanjut di Washington DC, April 2000, Praha September 2000, Genoa bulan Juli 2001 dan terakhir di Cancun Kanada 2004.<sup>24</sup> (I Wibowo & Francis Wahono, 2003: 85). Sementara itu, di lain pihak, kesadaran akan perlunya kewaspadaan terhadap perangkap globalisasi mulai muncul ke tingkat pemerintahan negara Dunia Ketiga. Mereka mulai sadar bahwa perjanjian-perjanjian dengan WTO maupun dengan IMF dan World Bank tidaklah membawa kebaikan, melainkan menjerumuskan mereka ke dalam situasi yang serba sulit. Hanya karena dominasi dan hegemoni negara-negara maju, maka sulit bagi mereka untuk melepaskan diri dari kebergantungannya selama ini, dan dengan demikian sangat sulit bagi negara-negara berkembang untuk dapat menjalankan atau menerapkan kebijakan yang tidak bersesuaian dengan semangat globalisasi.

Dengan memahami Neo-Liberal maka kita dapat memahami berbagai sepak terjang badan-badan multilateral dunia; kita dapat memahami perubahan kebijakan domestik di negara-negara maju; kita juga dapat memahami mengapa terjadi krisis moneter dan ekonomi yang tidak berkesudahan; kita dapat memahami mengapa Indonesia bisa dikontrol dan ditekan oleh IMF; kita juga dapat memahami mengapa BUMN didorong untuk diprivatisasi; kita dapat memahami mengapa listrik, air, BBM, dan pajak naik; kita juga dapat memahami mengapa impor beras dan bahan pangan lainnya begitu bebas dan membanjiri pasar Indonesia. Nama dari program Neo-Liberal yang terkenal dan dipraktikkan di mana-mana adalah SAP (*Structural Adjustment Program*). Program penyesuaian struktural yang merupakan program utama dari Bank Dunia, IMF, termasuk WTO. Di balik nama sopan "penyesuaian struktural" adalah "penghancuran dan pendobrakan radikal" terhadap struktur dan sistem lama yang tidak bersesuaian dengan mekanisme pasar bebas murni yang tidak akan memberi keuntungan terhadap akumulasi modal negara-negara maju.

Oleh karena itu, secara otomatis pasar akan sangat otoriter sebab terdapat motif *will to power* kekuatan modal asing (Indra Ismawan, 2002: 57). Hayek dan kawan-kawannya sebelumnya merasa gelisah terhadap mekarnya paham Keynes. Paham Keynesian merupakan sebuah aliran ilmu ekonomi oleh John Maynard Keynes. Keynesian dianggap berjasa

memecahkan masalah depresi besar pada tahun 1929 - 1930 sebagai akibat perang dunia I dan II.

Dasar pokok dari ajaran Keynes adalah kepercayaannya pada intervensi negara pada kehidupan ekonomi. Keynes juga menyatakan ketidakpercayaannya pada kepentingan individual yang selalu tidak sejalan dengan kepentingan umum. Sampai tahun 1970-an, aliran ini masih tetap menjadi *dominant economy* (Indra Ismawan, 2002:57). Sementara itu, meskipun paham neo-liberal tidak populer saat itu, Hayek dan kawan-kawannya berhasil membangun basis di tiga universitas utama, yaitu *London School of Economics* (LSE), Universitas Chicago, dan Institut *Univeritaire de Hautes Etudes Internasionales* (IUHEI) di Jenewa. Mereka itulah yang mendirikan lembaga pencetus neo-Liberal, yaitu *Societe du Mont-Pelerin*. Pertemuan-pertemuan mereka telah didanai oleh bankir-bankir Swiss dan didukung oleh penerbitan-penerbitan terkemuka, seperti *Newsweek* dan *Fortune*. Lembaga ini sangat terorganisasi dengan baik untuk menyebarkan *kredo kaum neo-Liberal*, lewat pertemuan-pertemuan internasional secara reguler (Indra Ismawan, 2002: 57). Neo Liberal menginginkan suatu sistem ekonomi di mana kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan sedikit mungkin dari pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Regulator utama dalam kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar, bukan pemerintah. Tiga poin dasar dari Neo-Liberal dalam multilateral adalah pasar bebas dalam barang dan jasa; perputaran modal yang bebas; dan kebebasan investasi. Hampir semua ekonom kini memakai standar dari neo-Liberal, yaitu deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi dan segala jampi-jampi lainnya. Jampi-jampi Neo-liberal inilah yg dipakai oleh IMF dan Bank Dunia untuk mengatasi krisis ekonomi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia melalui Lol dan SAP.

Poin-poin pokok neo-Liberal dapat disarikan adalah sebagai berikut.

- a. Aturan pasar, membebaskan perusahaan-perusahaan swasta dari setiap keterikatan yang dipaksakan oleh pemerintah. Keterbukaan sebesar-besarnya atas perdagangan internasional dan investasi. Mengurangi upah buruh lewat pelemahan serikat buruh dan penghapusan hak-hak buruh. Tidak ada lagi kontrol harga. Sepenuhnya kebebasan total gerak modal, barang, dan jasa.
- b. Memotong pengeluaran publik dalam hal pelayanan sosial. Ini seperti kebijakan pengurangan anggaran untuk subsidi pendidikan, kesehatan dan 'jaring pengaman' untuk orang miskin.
- c. Deregulasi, mengurangi peraturan-peraturan dari pemerintah yang dapat mengurangi keuntungan pengusaha dan menekan pemerintah untuk

mengeluarkan peraturan-peraturan yang menguntungkan kepentingan mereka.

- d. Privatisasi, menjual Badan Usaha-Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang barang dan jasa kepada investor swasta. Termasuk bank-bank, industri strategis, jalan raya, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit, bahkan juga air minum.
- e. Menghapus konsep barang-barang publik (*Public Goods*) atau komunitas. Menggantinya dengan “tanggung jawab individual”, yaitu menekan rakyat miskin untuk mencari sendiri solusinya atas tidak tersedianya perawatan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan lain-lain, serta menyalahkan mereka atas kemalasannya. (Indra Ismawan, 2002: 8-9). Di Indonesia paham neo-liberal mulai terasa pengaruhnya di tahun 1980-an, ketika pemerintah mulai mengadopsi dan menerapkan kebijakan liberalisasi ekonomi karena keterikatan Indonesia kepada IGGI, Bank Dunia, dan IMF. Saat itu Indonesia semakin terbuka kepada kapitalisme global. Sejak krisis ekonomi tahun 1997 dan tak berkesudahan hingga kini, Indonesia telah masuk ke dalam skema SAP dari Bank Dunia dan IMF. Seluruh skema yang disodorkan kepada Indonesia kini telah mengubah Indonesia menjadi hamba sahaya dari badan-badan tersebut. Skema tersebut merupakan pendiktean luar biasa kepada pemerintah Indonesia.

#### 4. Pelaku, Sistem, dan Mekanisme Globalisasi

Kritik terhadap globalisasi sering kali tidak dipahami dengan baik karena adanya propaganda dari pihak korporasi dan dukungan dari para ekonom *mainstream* baik dari praktisi ekonomi maupun dari akademisi. Dukungan dari media massa pun mudah mereka beli dan berhasil menceritakan gerakan antiglobalisasi sebagai kelompok anarkis dan kelompok petualang kelas menengah. Padahal kritik atas globalisasi adalah masalah fundamental, yang merupakan penyatuan pandangan gerakan masyarakat sipil sebagai kelanjutan dari kritik terhadap developmentalisme (pembangunanisme) sejak dasawarsa 1970-an.

Untuk memahami dengan baik kritik atas globalisasi, maka kita perlu mencatat berbagai isu utama yang menjadi karakter dasar dari globalisasi. Sering kali globalisasi dilihat sebagai kemajuan baru oleh orang awam karena yang muncul dalam pandangan publik adalah kemajuan teknologi, media dan telekomunikasi, lewat simbol-simbol; MTV, internet, email, *software*

komputer, telepon seluler dan lain-lain, yang memang memudahkan kehidupan modern. Namun, hal itu hanya mengenai komunikasi, yang juga merupakan kekuatan produksi dari sistem kapitalisme global. Di balik itu semua adalah berbagai organisasi (pemerintah maupun swasta), sistem, dan mekanisme yang kurang diperhatikan atau kurang dipahami publik dengan baik. Kenyataan inilah yang seharusnya diungkap ke publik agar muncul penilaian yang objektif oleh publik terhadap globalisasi yang pada dasarnya tidak lebih dari mesin pengeruk kekayaan negara-negara sedang berkembang (Susan Goeroge, 2002).

Sistem dan mekanisme globalisasi pada dasarnya sangat ditentukan oleh tiga badan dunia multilateral, yaitu IMF - World Bank, dan WTO (William K, 2003: 2). Ketiga badan dunia multilateral tersebut mempunyai pengaruh besar dalam mewujudkan perdagangan bebas. Ketiga badan multinasional tersebut memiliki perannya sendiri-sendiri, tetapi peran itu semua diarahkan untuk menciptakan perdagangan dunia yang sebebaskan-bebasnya. IMF (*International Monetary Found*) dan Bank Dunia didirikan pada tahun 1944, di Hotel Mount Washington, Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat tanggal 1-22 Juli. Saat itu tentara Jerman mulai terdesak di berbagai front di Eropa, sementara di Asia Pasifik, penetrasi bala tentara Jepang juga mulai kendur. Dalam pertemuan Bretton Woods yang dihadiri 44 negara tersebut, terjadi perdebatan soal perekonomian pasca-Perang Dunia dan untuk merestrukturisasi dunia pascaperang. Di samping itu, pertemuan tersebut menyepakati kelahiran IMF dan IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*), sekarang Bank Dunia atau World Bank (Indra Ismawan, 2001: 15). Misi utama IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*), sekarang disebut Bank Dunia adalah untuk membantu pembangunan dan rekonstruksi teritori para anggota Bank Dunia dengan memfasilitasi investasi dan kapital untuk tujuan produksi (Arimbi Heroeputri & Sari Delyani Mochtar, 2000: 1). Jadi, misi utama Bank Dunia adalah pembangunan, mengingat negara-negara di dunia mengalami perang yang melumpuhkan perekonomian dan menghancurkan infrastruktur mereka. Sementara itu, misi IMF adalah merekonstruksi dan menjaga sistem moneter internasional, yang juga pada masa itu sedang kolaps (Arimbi Heroeputri & Sari Delyani Mochtar, 2000: 2).

Mekanisme pengambilan keputusan dalam IMF didasarkan pada jumlah kuota, sedangkan besarnya jumlah kuota ditentukan atau bergantung pada besarnya iuran atau subskripsi. Dari 10 hak suara, Amerika Serikat mempunyai 19,14 persen, Jerman 5,79 persen, Inggris 6,63 persen, Prancis,

4,81 persen, Jepang 4,53 persen, dan Arab Saudi 3,44 persen (Indra Ismawan, 2002: 18). Pada tahun 1960 sampai 1970-an, lembaga keuangan internasional ini masih meletakkan perhatiannya pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan paham utamanya adalah keynesian sebab Bank Dunia saat itu mengeluarkan slogan *redistribution with growth*.

Argumennya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi akan memancing pemerataan pendapatan. Logika ini mirip dengan *trickle down effect* yang menjadi pegangan penting bagi rezim-rezim *developmentalis* yang program pembangunannya bertumpu pada aspek pertumbuhan. Namun, sejak tahun 1980-an bersamaan dengan dominannya paham *neo-liberal*, maka *multilateralisme* termasuk GATT (kemudian menjadi WTO) telah bertukar paham ikut memeluk neo-liberal. Operasi-operasi badan ini telah melabrak kedaulatan nasional negara, mengintervensi kebijakan domestik dan memfasilitasi masuknya TNCs dan MNCs untuk menguasai perekonomian negara yang bersangkutan. Agenda-agenda neo-liberal kemudian diserap dalam LOI (*Letter of Intent*) dan SAP (*Structure Adjustment Program*) yang menjadi paket standar bagi negara-negara yang mempunyai utang besar kepada IMF. LOI merupakan kesanggupan formal untuk menjalankan program penyesuaian yang memungkinkan percepatan liberalisasi perdagangan, keuangan, dan investasi atau poin-poin kebijakan ekonomi neo-liberal. Selanjutnya negara debitur harus menyusun SAP (*Structure Adjustment Program*; Program Penyesuaian Struktural) yang disetujui oleh IMF sebagai upaya strategis untuk menjalankan LOI (Indra Ismawan, 2002: 13-14). Banyak negara justru semakin terperosok dalam krisis setelah mereka menerapkan ramuan dari IMF seperti yang terjadi di negara-negara Asia sebab menurut Joseph E. Stiglitz, kebijakan-kebijakan yang diterapkan IMF kepada negara-negara yang mengalami krisis atau selama masa badai semakin memperburuk situasi. Bahkan menurutnya lembaga tersebut dinilai telah gagal menjalankan fungsinya untuk mencegah, menghindari, dan menangani krisis ekonomi global terutama di negara-negara dunia ketiga (Joseph E. Stiglitz, 2002: 125). Menurut Joseph E. Stiglitz, terjadinya krisis ekonomi dunia 1997 dipicu oleh kebijakan IMF dalam liberalisasi pasar keuangan dan modal yang terlalu cepat. Sekarang IMF telah mengakui sebagian kesalahan-kesalahannya, tetapi mereka sudah sangat terlambat untuk membantu negara-negara yang telah terpengaruh oleh kebijakannya. (Joseph E. Stiglitz, 2002: 126). Lembaga multilateral lain yang juga mempunyai peran besar dalam mewujudkan globalisasi adalah WTO yang dahulunya bernama GATT. Lahirnya GATT pada tahun 1994, merupakan keberhasilan negara-negara kapital untuk menuju pasar

bebas sebab negara-negara maju telah berhasil mendesak negara-negara anggota WTO untuk menandatangani kesepakatan internasional tentang perdagangan internasional pada bulan April 1994 di Marrakesh Maroko, yaitu penghapusan segala kebijakan yang menghambat pengintegrasian ekonomi global, seperti kebijakan tarif dan bea yang dikenal dengan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*).

Selanjutnya pada tahun 1995 berdiri lembaga pengawasan dan kontrol perdagangan internasional yang bernama WTO dan kemudian lembaga inilah yang menggantikan peran dan fungsi GATT. (Mansour Fakih, 2002: 195). GATT atau WTO sesungguhnya merupakan suatu kumpulan aturan internasional yang mengatur perilaku perdagangan antarpemerintah yang tujuannya adalah agar negara-negara anggota tetap konsisten pada perjanjian perdagangan internasional untuk menghilangkan segala kebijakan yang menghambat pasar bebas.

## 5. Dampak Globalisasi terhadap Pendidikan

Sejak fajar peradaban manusia, sedikit demi sedikit “manusia” melangkah maju menuju titik kesempurnaan. Dalam hidupnya sebagai bagian dari alam, mereka tak henti-hentinya berperang dan yang paling kuat itulah yang bertahan hidup. Namun, situasi ini tak selamanya dan manusia harus mencari jalan dan cara untuk hidup berdampingan dan bermartabat. Tanpa itu peradaban manusia tak akan mencapai tingkat yang bermartabat atau manusiawi.

Pikiran serta kehendak manusia secara berangsur-angsur diubah melalui pendidikan, pengajaran, keagamaan, dan teladan dari orang-orang besar, para pembaru dan para nabi. Saling ketergantungan ideologis dan institusional merupakan unsur penting dalam proses berpikir manusia. Kita tidak dapat membayangkan ideologi berakar tanpa institusi, juga tidak dapat memimpikan sebuah institusi berjalan baik tanpa ideologi. Peradaban manusia yang tinggi tidak dengan sendirinya lahir dan hanya dapat dilestarikan, bila unsur-unsur yang menopangnya diwariskan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi, sebagai nilai-nilai budaya yang dianggap benar, tetapi memerlukan institusi atau sarana sebagai media pewarisan dan dialog antargenerasi dan peradaban, yakni pendidikan termasuk pendidikan Islam.

Pendidikan Islam sangat berbeda dengan pendidikan umum. Pendidikan Islam didasarkan pada ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan As-sunnah, sementara pendidikan umum didasarkan pada produk pemikiran spekulatif nalar manusia. Produk pemikiran spekulatif nalar manusia mengandung beberapa kelemahan. *Pertama*, pemikiran tersebut hanya dapat menjangkau kepentingan tujuan yang bersifat semasa, dan untuk kelompok tertentu. *Kedua*, hasil pemikiran terbatas pada tujuan yang berjangka pendek, yaitu untuk kepentingan hidup di dunia (Jalaluddin & Usman Said, 1999: 39). Kini penampilan kebuasan, ketamakan, kerakusan, dan berlakunya kembali hukum rimba dalam era globalisasi di mana pihak yang kuat (sebagai negara yang dinilai mempunyai peradaban tinggi: Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Prancis, Jerman, Kanada, dan lain-lain) selalu menindas pihak yang lemah mengingatkan kita kembali pada peradaban manusia yang terjadi berabad-abad yang lalu, yakni peradaban masyarakat jahiliyah.

Keserakahan, ketamakan, kerakusan, kekejaman yang tampil dalam era globalisasi merupakan bukti nyata bahwa sistem pendidikan belum mampu meningkatkan harkat kemanusiaan untuk mencapai kualitas peradaban manusia yang layak sehingga pendidikan Islam menjadi sangat relevan terhadap kondisi dan situasi seperti saat ini untuk mewujudkan generasi yang lebih manusiawi dan tetap konsisten terhadap amanat yang diberikan Tuhan kepadanya sebagai khalifah di bumi. Dengan demikian, harapan sebagai khairul ummah bagi kaum muslim menjadi kenyataan. Hakikat pendidikan Islam, menurut Prof. Dr. Oemar Muhammad Al-Tahoumy Al-Syaibany yang dikutip oleh Arifin dalam bukunya *Filsafat Pendidikan Islam*, pendidikan Islam adalah usaha mengubah tingkah laku dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan masyarakatnya dan kehidupan dalam alam sekitarnya melalui proses pendidikan dan perubahan itu didasari dengan nilai-nilai Islami (M. Arifin, 1993:14). Adapun menurut Dr. H. Abudin Nata, M.A., mengenai pendidikan Islam menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah upaya membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai Islam (Abudin Nata, 2000: 292). Dengan demikian, pendidikan Islam tidak lepas dari nilai-nilai, prinsip-prinsip Islam yang menjadi salah satu unsur dalam penerapan pendidikan Islam terhadap individu yang menjadi objek dan subjeknya. Nilai merupakan hal yang praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia dan melembaga secara objektif di dalam masyarakat. Dalam pandangan Young yang dikutip oleh Muhaimin dan Abdul Mujib dalam

bukunya *Pemikiran Pendidikan Islam* menerangkan bahwa “nilai” diartikan sebagai asumsi-asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang hal yang benar dan hal-hal yang penting (Muhaimin & Abdul Mujib, 1993: 110), sedangkan menurut Sidi Ghazalba dalam hal ini mengenai nilai, dia menyatakan nilai bersifat ideal, abstrak dan tidak dapat disentuh oleh pancaindra. Sementara yang dapat ditangkap hanya barang atau tingkah laku yang mengandung nilai tersebut (Sidi Ghazalba, 1981: 469). Pendapat senada juga disampaikan oleh JR. Frankel yang dikutip oleh Chabib Thoha dalam bukunya *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, bahwa “a value is an idea a concept about what someone think is important live”, yang artinya nilai adalah suatu konsep yang dipikirkan oleh seorang yang dianggap penting dalam kehidupan (Chabib Thoha, 1996: 60). Dalam setiap kehidupan manusia tidak lepas dari nilai, dan institusionalisasi terbaik dari nilai adalah pendidikan. Menurut pandangan Freeman But dalam bukunya *Cultural History of Western Education* yang dikutip oleh Muhaimin dan Abdul Mujib menyatakan bahwa hakikat pendidikan adalah proses transformasi dan internalisasi nilai, proses pembiasaan terhadap nilai, proses rekonstruksi nilai, serta penyesuaian terhadap nilai (Muhaimin & Abdul Mujib, 1993: 177). Dasar dan nilai-nilai Islam dalam pendidikan Islam menjadi fondasi utama dan pertama dalam pelaksanaan rangkaian sistem di dalamnya serta menjadi dasar dalam pengembangannya sehingga dapat memberikan *output* pendidikan yang berkualitas dari sisi kemanusiaan, akhlak, dan kepemimpinan.

Faktor kemuliaan akhlak dalam pendidikan Islam dinilai sebagai faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pendidikan, yang menurut pandangan Islam berfungsi menyiapkan manusia-manusia yang mampu menata kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Dan, bagian ini dipandang sebagai bagian lebih dari pendidikan Islam dibanding pendidikan non-Islam (umum). *Pertama*, tujuan pendidikan Islam itu bersifat fitrah, membimbing perkembangan manusia sejalan dengan fitrah kejadiannya bahwa manusia mempunyai potensi keilahian (bertuhan) yang tidak mungkin atau bisa diingkari manusia. *Kedua*, tujuan pendidikan Islam merentang dua dimensi, yaitu tujuan akhir bagi keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. *Ketiga*, tujuan pendidikan Islam mengandung nilai-nilai yang universal yang tak terbatas oleh ruang lingkup geografis dan paham-paham (*isme*) tertentu (demokrasi, dan HAM, keseimbangan lingkungan, dan lain-lain) (Jalaluddin dan Usman Said, 1999: 39). Terkait dengan respons yang diberikan oleh kalangan masyarakat di belahan dunia termasuk umat Islam terhadap globalisasi sangat ditentukan kedalaman pandangan

mereka dalam menangkap substansi politik globalisasi dan dampaknya. Secara umum sikap masyarakat muslim terhadap globalisasi masih tetap sebatas sikap mereka terhadap modernisasi dan sekularisasi. Padahal modernisasi dan sekularisasi hanyalah satu sisi dari globalisasi. Dengan demikian, sikap masyarakat muslim terhadap globalisasi dapat dibedakan menjadi tiga macam. *Pertama*, sikap berbalikan atau berlawanan dengan modernisasi dan sekularisasi yang merupakan bagian arus dari globalisasi, yaitu sikap anti (melawan) modernisasi dan pada akhirnya “anti barat”. *Kedua*, terpengaruh oleh modernisasi dan sekularisasi yang berakibat pada pemisahan antara agama dengan urusan politik atau masalah-masalah keduniaan lainnya, kelompok ini bisa disebut sebagai kelompok *status quo* atau *pro* terhadap globalisasi. *Ketiga*, bersikap kritis, tetapi tidak secara otomatis bersikap antimodernisasi dan sekularisasi (A. Qodry Azizy, 2002: 28). Selanjutnya bagaimana globalisasi berpengaruh terhadap pendidikan Islam di Indonesia juga sangat ditentukan oleh cara pandang dan sikap terhadap globalisasi dan respons yang diberikannya.

Pendidikan Islam di Indonesia meliputi beragam kelembagaan, seperti pesantren, madrasah, dan pendidikan Islam yang secara khusus diselenggarakan dalam sistem sekolah Islam dan sekolah umum (Abdul Munir Mulkhan, SU, 2002: 344). Menurut A. Qodry Azizy, untuk melawan globalisasi tidak hanya diperlukan pembangunan SDM yang berkualitas secara keilmuan, tetapi juga kualitas keimanan dan ketakwaan menjadi penting. Oleh karena itu, dalam merespons globalisasi diperlukan landasan kuat untuk menangkal dampak negatifnya. Landasan tersebut tidak lain adalah ajaran agama Islam. Untuk itu menurutnya, pendidikan perlu memberikan suatu kesadaran bagi para peserta didiknya juga kepada masyarakat luas, tentang makna dan hakikat hidup manusia dan implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat yang bermartabat sehingga dalam konteks globalisasi perlu dilakukan hal-hal berikut ini.

- a. Menumbuhkan kesadaran kembali tentang tujuan hidup menurut agama Islam. Manusia baik sebagai hamba Allah Swt. maupun sebagai khalifah Allah, tetap ditempatkan dalam konteks mengabdikan kepada Allah Swt. dan berusaha untuk memperoleh ridha-Nya dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Hal ini menuntut syarat bahwa pemahaman dan kesadaran ini harus benar-benar diimplementasikan dalam setiap aktivitas sosialnya di masyarakat tidak sebatas teori, impian, dan khayalan.
- b. Menumbuhkan kesadaran untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang dilakukan di dunia, baik formalitas administratif sesuai

ketentuan di dunia maupun yang mempunyai konsekuensi di akhirat kelak (A. Qodry Azizy, 2002: 32). Di sinilah kemudian pentingnya etika (ilmu tentang akhlak) dalam semua segi dan aktivitas manusia dan interaksi satu dengan yang lainnya, semisal etika berdagang, etika berpolitik, etika berelasi atau berhubungan, etika bekerja sama, dan sebagainya.

Berikut adalah berbagai respons serta dampak globalisasi terhadap pendidikan Islam di Indonesia.

#### a. Penerapan Prinsip Nondikotomi dalam Ilmu di Lembaga Pendidikan Islam

Ketika pandangan kaum santri (masyarakat muslim) terhadap dunia pendidikan modern dan kehidupan duniawi berubah hampir berbalikan, muncul kritik dan koreksi terhadap modernisasi pendidikan Islam, yakni seolah terdapat pertentangan antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu sekuler atau non-agama (*profan*). Koreksi ini juga dibenarkan oleh Azyumardi Azra, yang menyatakan meskipun Islam pada dasarnya tidak membedakan nilai antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum (non-agama), tetapi dalam praktiknya, supremasi lebih diberikan kepada ilmu-ilmu agama. Hal ini disebabkan oleh sikap keagamaan dan kesalehan yang memandang ilmu-ilmu agama sebagai “jalan tol” menuju Tuhan (Azyumardi Azra, 2002: ix). Fakta ini kemudian direspons dengan memunculkan ide untuk menerapkan model pendidikan yang nondikotomik antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu sekuler atau umum di lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

#### b. Islamisasi Ilmu-Ilmu Sekuler (Umum)

Dalam perkembangannya sekolah-sekolah Islam: madrasah atau sekolah, terus menghadapi problem hubungan Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Masalah ini berkaitan dengan pembedangan ilmu. Selama ini ilmu dibedakan antara ilmu murni dan ilmu terapan, ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora. (Munir Mul Khan, 2002: 184). Lantas muncul pertanyaan di mana letak studi Islam dalam pembedangan ilmu tersebut? Apakah pada ilmu sosial, terapan, atau humaniora? Akibat tajamnya dari pertentangan ini lulusan pendidikan Islam di tingkat dasar sampai perguruan tinggi kalah bersaing dengan lulusan sekolah modern lainnya dan tampak kurang menguasai ilmu dan teknologi modern (umum).

Lembaga pendidikan Islam kemudian mencoba mengakomodasi keduanya tanpa kesatuan dasar epistemologi dan sistem. Islamisasi ilmu-ilmu sekuler dilakukan untuk mengurangi problem ini dan untuk meningkatkan daya saing lembaga pendidikan Islam dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dengan sekolah atau lembaga pendidikan modern lain. Gagasan “Islamisasi ilmu pengetahuan” diprakarsai oleh pemikir semacam Ismail al-Faruqi, atau S.M.N. Alatas (Azyumardi Azra, 1999: 40). Namun, pada kenyataannya islamisasi ilmu-ilmu sekuler menurut Munir Mulkan ternyata tidak cukup untuk menjawab problem pembedaan ilmu secara dikotomik, yaitu antara ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum (Azyumardi Azra, 1999: 185).

### c. Perubahan Radikal Sistem Kelembagaan dari Institut ke Universitas

Dalam peradaban global, mekanisme ekonomi merupakan dasar hubungan sosial yang berinti pada tradisi dan logika pasar. Di sini keberlakuan nilai ditentukan fungsinya bagi pemenuhan kebutuhan pragmatis manusia. Partisipasi manusia dalam keagamaan dan aktivitas sosial ditentukan oleh fungsi pragmatis bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Seluruh doktrin surga dan neraka, dosa dan pahala, dilihat masyarakat dalam logika pasar yang semakin terbuka. Kebenaran teologis bukan lagi jaminan masa depan lembaga pendidikan Islam, tetapi kemampuan kompetitif yang berkeunggulan, dan kemampuan memberi jaminan pemenuhan kebutuhan pragmatis umat dan masyarakat. Sebab bagi publik, kebenaran dan kebaikan Islam, bukan karena bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, melainkan fungsi pragmatismenya (Azyumardi Azra, 1999: 185). Sehingga banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia berusaha untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa ilmu-ilmu keislaman juga berfungsi pragmatis. Salah satu respons yang dilakukan adalah mengubah status lembaga pendidikan, seperti dari institut menjadi universitas (kasus IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN, dan IKIP menjadi universitas).

Perubahan kelembagaan ini tentunya membawa konsekuensi berupa pembukaan fakultas-fakultas dan jurusan-jurusan pendidikan baru yang biasanya hanya terdapat di pendidikan umum yang sebelumnya belum pernah ada, seperti perubahan kurikulum dalam lembaga pendidikan Islam yang berorientasi pada modernitas dan kebutuhan masyarakat. Perubahan orientasi nilai oleh masyarakat pada hal-hal yang lebih pragmatis, tidak semuanya disikapi dengan perubahan status kelembagaan sebab

membutuhkan biaya dan kesiapan struktur kelembagaan yang memadai. Ada juga yang sekadar memasukkan ilmu-ilmu umum sebagai pelajaran tambahan. Penempatan ilmu-ilmu umum tersebut bisa langsung masuk sebagai kurikulum (kasus program minor matematika, kimia, fisika, di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo) atau menjadikannya sebagai materi ekstrakurikuler (kursus-kursus/les). Selain itu, terdapat juga yang langsung membuka program jurusan baru untuk ilmu umum, semisal jurusan D3 perbankan Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, atau juga dengan mengubah orientasi ilmu-ilmu sosial dan agama lebih ke terapan.

#### d. Modernisasi Administrasi Lembaga Pendidikan Islam

Modernisasi pendidikan juga menuntut modernisasi sistem administrasinya terutama menyangkut manajerial. Modernisasi dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan orientasi kelembagaan. Perubahan-perubahan tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa diikuti dengan perubahan manajerial dan administrasi pendidikan secara keseluruhan. Lembaga pendidikan yang masih berpegang pada kerangka administrasi tradisional akan sulit untuk mengembangkan diri secara baik sebab dengan mempertahankan sistem administrasi yang tidak rasional akan menjadi kendala tersendiri dalam perubahan.

#### e. Berkurangnya Jumlah Santri atau Murid pada Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam yang Tidak Mengakomodasi Kecenderungan Modernisasi dan Kebutuhan Masyarakat Industri

Kondisi ini banyak dialami pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah Islam yang tidak melakukan perubahan sebagaimana lembaga pendidikan Islam atau pendidikan umum terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sementara bagi pesantren dan madrasah atau sekolah-sekolah Islam yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap akses pasar kerja relatif bertahan dan berkembang dengan baik.

#### f. Bangkitnya Sekolah Elite Muslim

Secara kuantitatif pesantren mengalami peningkatan jumlah, dari segi fisik pun mengalami kemajuan sehingga citra sebagai tempat pendidikan yang

kumuh dan reyot semakin terkikis. Pesantren baru muncul di mana-mana tidak hanya di Jawa melainkan juga di luar Jawa, seperti di Sumatra. (Azyumardi Azra, 2002: 49). Namun, yang menarik pertumbuhan pesantren ini di kalangan masyarakat urban (kota). Bisa jadi ini merupakan bentuk kekhawatiran para orang tua terhadap efek globalisasi dan modernisme. Para orang tua di daerah urban, merasa perlu pendidikan agama untuk anak-anaknya atau perlu pendidikan komprehensif yang memadukan unsur agama juga unsur pendidikan umum. Pendidikan Islam ini umumnya sangat mahal dan untuk ukuran masyarakat muslim di pedesaan sangat berat. Pendidikan Islam ini berusaha memenuhi harapan para orang tua di kalangan masyarakat urban untuk memberikan pendidikan yang sempurna, agama, maupun umum dengan kualitas yang baik sehingga para orang tua juga tidak khawatir. Meskipun anaknya disekolahkan di lembaga pendidikan Islam, kualitas yang diberikannya tetap tidak akan kalah saing di pasar kerja dengan lembaga pendidikan umum. Contoh kasus di kota Semarang adalah Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar, Yayasan Pendidikan Islam Nasima, Pendidikan Hj. Isriyati, dan lain-lain. Bisa jadi peningkatan pertumbuhan pendidikan Islam di daerah-daerah urban mengisyaratkan secara implisit bahwa dunia Islam tradisi dalam segi-segi tertentu masih relevan di tengah deru modernisasi dan globalisasi.

#### g. Naiknya Biaya Sekolah di Lembaga Pendidikan Islam

Berubahnya orientasi dasar filosofis sebagian lembaga pendidikan Islam sekadar menjadi penyedia jasa untuk pasar kerja dan pencabutan subsidi di bidang pendidikan sebagai akibat dari kesepakatan antara IMF dengan pemerintah Indonesia untuk mengurangi pengeluaran negara yang dianggap tidak efektif dan efisien dalam rangka restrukturisasi ekonomi Indonesia pascakrisis serta untuk mempersiapkan liberalisasi sektor pendidikan, mengakibatkan biaya pendidikan semakin melambung. Masyarakat yang paling menderita lagi adalah kaum muslim yang mayoritas adalah kalangan menengah ke bawah seperti petani. Tentunya akan semakin banyak generasi muda muslim yang tidak dapat menikmati atau putus sekolah sebab pendidikan telah mengabdikan pada industri. Mahalnya pendidikan Islam modern juga turut menciptakan kalangan elite Islam sebagai pihak yang mampu menjangkau biaya pendidikan terutama pendidikan yang berkualitas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Abdullah. 1994. *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Quran*, Terj. H.M. Arifin dan Zainuddin. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan (ed.). 1987. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, terjemah. Rnc. Widyaningsih dan G. Kartasapoetra. Jakarta: Bina Aksara.
- Ahmad, Warid Khan. 2002. *Membebaskan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Wacana.
- Al-Munawir, Said Agil Husain. 1993. *Fikh Hubungan Antar Agama*. Cet. II; Jakarta: Ciputat Press.
- An-Nahlawi, Abdurrahman. 1995. *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: Gema Insani Press
- Anonimous. 2013. Available: <http://graziabrigita.blogspot.com/2015/02/pengertian-kependudukan-dan-pengertian.html>
- Anonymous. 2015. 100 Hari SBY - Boediono, *Supremasi Hukum Masih Lemah*. Available:<http://news.okezone.com/read/100-hari-sby-boediono-supremasi-hukum-masih-lemah>.
- Anonymous. 2015. *Moralitas Pendidikan Islam*. Available <http://ridwan202.wordpress.com>

- Arifien, M. 1993. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ariska, I. 2013. *Manusia sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial*. Available: (<http://iraars-meandmyself.blogspot.com/2012/03/manusia-sebagai-mahluk-individu-dan.html>).
- Armai, Arief. 2002. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Azra, Azyumardi. 1996. *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Beerling. 1990. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Bisri, Cik Hasan. 2006. *Posisi Kontribusi Ilmu dalam Kehidupan Manusia*. Bandung: Gunung Djati Press.
- Buchori, Mochtar. 2001. *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius
- Budiyanto. 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, Burhan. 2009. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana
- C.M. Campbell and Paul Wiles. 1980. "The Study of Law in Society", dalam William M. Evan (ed.), *The Sociologi of Law: A Sosial – Structural Perspective*. New York: The Free Press.
- Cangara, Hafied. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Cet. V. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Coen Husain Pontoh. 2001. "Membongkar Tipuan Globalisasi", dalam pengantar buku *Mcglobal Gombal; Globalisasi dalam Perspektif Sosialis*. Yogyakarta: Cubuc kerja sama dengan Sumbu.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi, R. dan Setiadi, Elly. M. 2010. *Pendidikan Lingkungan, Sosial, Budaya dan Teknologi*. Bandung: UPI Press.
- Effendi, Ridwan & Elly M, Setiadi. 2010. *Bahan Ajar Mandiri Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi*. Bandung: UPI Press
- Effendi Ridwan, Elly Malihah. 2007. *Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi*. Bandung: Yasindo Multi Aspek
- Elisanti & Rostini. 2009 *Sosiologi*. Jakarta: CV Indradjaja

- Elly M. Setiadi, dkk. 2006. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fakih, Mansour. 2002. *Jalan Lain, Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Insits Press dan Pustaka Pelajar
- Ghazalba, Sidi. 1981. *Sistematika Filsafat IV*. Jakarta: Bulan Bintang
- Ghazali, Bachri. 2005. *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- Giddens, Anthony. 2001. *Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gie, The Liang. 1985. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Liberty.
- Gordon, Scott. 1991. *The History and Philosophy of Sosial Science*. London and New York: Routledge.
- Gramsci. 1999. *Restructuring Hegemony and the Changing Discourse of Development*, yang diterjemahkan oleh Muhamad Sugiono "Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Guillermo, O'Donnell dan Philippe C. Schmitter. 1993. *Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, cet. I. Jakarta: LP3ES.
- Gunarsa, Singgih D. 2003. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Hadiwijono, Harun. 1980. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Herichayono, Cheppy. 1995. *Dimensi-Dimensi Pendidikan Moral*. Semarang: Ikip.
- Hermawan, Eman & Masdar, Umaruddin. 2000. *Demokrasi untuk Pemula*. Yogyakarta: KLIK®
- Heroeputri, Arimbi. dan Mochtar, Sari Delyani Penjara. 2000. *Asian Development Bank, Panduan Advokasi bagi Masyarakat*. Jakarta: Dehwatch.
- Ibrahim, Jabal Tarik. 2003. *Sosiologi Pedesaan*, Cet. I. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ibrahim, Muslim. 1990. *Pendidikan Agama Islam untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Erlangga.
- Ismawan, Indra. 2002. *Di bawah Cengkraman IMF*. Solo: Pondok Edukasi.

- I Wibowo, Francis Wahono. 2003. *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Jalaluddin. 2000. *Teologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jalaluddin Abdullah Idi. 1997. *Filsafat Pendidikan*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Jalaluddin dan Usman Said. 1999. *Filsafat Pendidikan Islam Konsep dan Perkembangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Joko Budi Santoso. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Yudhistira.
- Joseph E. Stiglitz. 2002. *Washington Consensus (Kesepakatan Washington)*. Yogyakarta: Infid.
- K. Tabb, William. 2003. *Tabir Politik Globalisasi*. Yogyakarta: Lafald Pustaka.
- Kappara. 2013. *Pengertian Sosial dan Politik*. Available: (<http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/2234715-pengertian-sosial-dan-politik.html>)
- Karim al-Bastani, dkk. 1975. *Al-Munjid fi Lughat wa 'Alam*, Bairut: Dar al-Masyriq
- Kolip, Elly M Setiadi & Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi. Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Cet. II. Jakarta: Kencana.
- Kusumawardhani, Naftalia. 2008. *Cara-Cara Orang Tua Membentuk Karakter Anak Usia 6 - 12 Tahun*. Surabaya: Fakultas Psikologi Unika Widya Mandala.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 1999. *Ketertiban yang Adil, Problematik Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- Langgung, Hasan. 1995. *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisis Psikologi dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Al Husna Zikro.
- \_\_\_\_\_. 1985. *Pendidikan dan Peradaban Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Kreativitas dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- \_\_\_\_\_. 1988. *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21*, Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Asas-Asas pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pemikiran Sosiologi Islam*. Bandung: Sahifa.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: Sahifa.

- Lawrence Kohlberg. 1995. *Tahap-Tahap Perkembangan Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lies Sudibyo, Titik Sidatmi, Agus Sudarhono, Bambang Triyanto. 2013. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Liliweri, Alo. 2003. *Dasar-dasar Komunikasi Antarbudaya*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lorens, Bagus. 2002. *Kamus Filsafat*, cet. III. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. Amin, Abdullah. 2000. *Dinamika Islam Kultural; Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer*, Cet. I. Bandung: Mizan.
- M. Ja'far. 1981. *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Mahadi. 1991. "Kata Pengantar", dalam OK. Chairuddin, Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud. 2013. *Antropologi Pendidikan*. Bandung: Sahifa.
- Manzhur, Ibnu Abiy al-Fadhl al-Din Muhammad Mukarram. tt. Lisan al-Arab, Bairut: Dar al-Ahya', tt), Jilid V.
- Marimba, Ahmad D. 1980. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Maso'ed, Mohtar. 1999. *Negara, Kapital, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Masruri, Siasah, Muhsinatun, dkk. 2002. *Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: UPT MKU UNY.
- Ma'mun, Murod Al-Brebesy. 1993. *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara*. Jakarta: LP3ES.
- Mian Muhammad Tufail. 1966. Iqbal's. *Philosophy and Education*. Lahore: The Bazm Iqbal.
- Moh. Mahfud MD. 1999. *Pergulatan politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Moss, Stewart L. Tubs dan Sylvia. 2000. *Human Communication*, Cet. II. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin & Mujib, Abdul. 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Trigenda Karya.
- Muhaimin, dan Abdul Mudjib. 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofis dan Kerangka dasar Operasionalnya*. Bandung: Tri Genta.
- Muhaimin. 2002. *Paradigma pendidikan Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Muhammad al-Naquib al-Attas. 1988. *Konsep Pendidikan dalam Islam*. Terjemahan Haidar Bagir. Bandung: Mizan
- Muhammad Athiyah al-Abrasyi. tt. *al-Tarbiyah Islamiyah*, cet.3, Dar al-Fikr al-Arabi.
- Muhammad Athiyah al-Abrasyi. tt. *Ruh al-Tarbiyat wa Ta'lim*. Saudi Arabia: Dar al-Ahya".
- Muhammad Athiyah Al –Abrasyi. 1964. *Ruh al-Islam*. Mesir: Mathba'ah Lajnah al-Bayan al-Arabi.
- \_\_\_\_\_. 1969. *Al-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Falasifatuha*. Kahisan: Issa al-Babi al-Halabi.
- Muhammad Qutb. 1993. *Manhaj al-Tarbiyah al-Islamiyah*. Kairo: Dar asy-Syuruq. Dalam jurnal International Journal Ihya 'Ulum al-Din, Vol. 2. No. 1. Semarang: IAIN Walisongo
- Mulkhan, Abdul Munir SU. 2002. *Nalar Spiritual Pendidikan – Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Musthafa al-Maraghiy. tt. *Tafsir al-Maraghiy Bairut*: Dar al-Fikr, Juz 1.
- Narwoko, Dwi & Suyanto, Bagong. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Nata, Abuddin. 2000. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Hakikat Manusia Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Nugroho, Heru. 2001 *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Onong Uchana Effendy. 2002. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Paul Hirst, Graham Thompson. 2001. *Globalisasi Adalah Mitos*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Peter Berger. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES.
- Petras, James dan Veltmeyer, Henry. 2001. *Imprealisme Abad 2001*, terjemahan dari *Globalization Unmaked: Imprealism in the 21" Century*, 2002. Yogyakarta: Cubuc kerja sama dengan Sumbu.
- \_\_\_\_\_. *Globalisasi: Sebuah Perspektif*, dalam buku *Mc-Global Gombal*. Yogyakarta: Cubuc.
- Piliang, Yasraf Amir. 1998. *Dunia yang Dilipat Realitas Menjelang Millenium Ketiga dan Matinya Posmodernisme*. Cet. II. Bandung: Mizan.

- Poerwanti, Endang. 2005. *Pemahaman Psikologi Masyarakat Indonesia sebagai Upaya Menjembatani Permasalahan Silang Budaya*, dikutip dari internet: [www.google.com](http://www.google.com) pada tanggal 15 April 2015.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qodry Azizy, A. 2002. *Melawan Globalisasi-Reinterpretasi Ajaran Islam*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu .
- Rahardjo, Mudjia. 2007. *Sosiologi Pedesaan*. Malang: UIN-Malang Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmat, Jalaluddin dan Deddy Mulyana. 2001. *Komunikasi Antarbudaya; Panduan Komunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*, Cet. VI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riyanto, Astim. 2000. *Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi*. Bandung: Yapemda.
- Roibin. 2008. *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*. Malang: UIN Malang Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1984. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Sadulloh, U. 2003. *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sahdan, Gregorius. 1993. *Jalan Transisi Demokrasi: Pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- Santosa, Slamet. 2001. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Setiadi, Elly. 2006. *Ilmu Dasar Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Setiadi, Elly M. 2006. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Setiawan, Bonie. 2002. *Menggugat Globalisasi*. Jakarta: INFID dan IGJ.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Wawasan al-Quran*. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Mizan.
- Soedjono, D. 1977. *Pokok-pokok Sosiologi Sebagai Penunjang Studi Hukum*. Bandung: Alumni
- Soelaeman, M. Munandar. 2011. *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA.

- \_\_\_\_\_. 2005. *Positivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum, dan Kritik- Kritik Terhadap Doktrin.* (Makalah). Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel.
- Sokanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. Ke-43. Jakarta: Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukardi, Joko & Rohman, Arif. 2009. *Sosiologi*. Jakarta: Intan Prawira.
- Sunarso, dkk. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UNY press.
- Surajiyo. 2005. *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suriasumantri, Jujun. 2001. *Ilmu dalam Perspektif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Susanto. 2001. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suyanto, J. Swi Narwoko & Bagong, Suyanto. 2011. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. edisi keempat, Cet. Ke-5. Jakarta: Kencana.
- Syahminan Zaini. 1984. *Mengenal Manusia Lewat Al-Quran*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Syaifulloh, Moch. Aris. 2013. *Konstruksi Identitas Dalam Komunikasi Antar Budaya (Skripsi)*. Surabaya: Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Tafsir, Ahmad. 2003. *Filsafat Umum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Thoa, Mahmud et.al. 2002. *Gobalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Pustaka.
- Thoha, Chabib. 1996. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Redaksi Pustaka Setia. 2010. *UUD 1945*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tomasic. 1986. *The Sociology of Law*. Lihat: Roman Tomasic, *The ociology of Law*. London: Sage Publication.

- Ubaedillah, A. dan Rozak, Abdul. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE Syarif Hidayatullah.
- Usman, Anang. 2015. *Supremasi Hukum, Kenyataan yang Sulit Terwujud*. Available: <http://forum.polwiltabessurabaya.net/viewtopic.php>.
- Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, S. A. 1997. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyu, Ramdani. 2013. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Pustaka Setia.
- Waluya, Bagja. 2009. *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Jakarta: PT Pribumi Mekar.
- Wan Moh. Nor Wan Daud. 1997. *Konsep Pengetahuan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka.
- Widagdo, Joko, dkk. 1999. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- William M. Evan (ed.). 1980. *The Sociologi of Law: A Sosial – Structural Perspective*. New York: The Free Press.
- Yunus, Mahmud. 1987. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: YP3A.
- Zakiah Daradjat. 1994. *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*. Bandung: CV Ruhama.
- Ziauddin Sardar. 2000. *Merombak Pola Pikir Intelektual Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

**READING COPY**

## TENTANG PENULIS



**Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.,** Guru Besar Sosiologi Pendidikan dan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini lahir di Bekasi 10 April 1962. Pendidikan Dasar dan Menengah diselesaikan di kota kelahirannya, Pendidikan Tinggi ditempuh dari Jurusan PAI IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kemudian meraih Gelar Magister (S-2) Bidang Ilmu sosial dari UNPAD Bandung tahun 2002, dan (S-3) UNPAD Bandung Jurusan Sosiologi tahun 2010.

Pengalaman Jabatan yang pernah dijalani: Sekretaris Jurusan D2 PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (1995-1998), Ketua Jurusan D2 PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (1998-2003), Pembantu Dekan II Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2003-2011), Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2011-2015), dan sekarang menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Karya Ilmiah yang pernah ditulis adalah: *Buku Psikologi Pendidikan Mutakhir*, penerbit Sahifa (2005), *Buku Pemikiran Sosiologi Islam; Perubahan Sosial dan Modernisasi*, penerbit Tsabita (2007), *Buku Kajian Epistemologi, Sistem Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*, penerbit Azkia Pustaka Utama (2008), *Buku Fiqih Ibadah*, penerbit Tsabita (2008), *Buku Teori-Teori Pengetahuan dalam Islam*, penerbit Sahifa (2008), *Buku Tafsir Tarbawi; Memahami Ayat-Ayat Pendidikan*, penerbit Sahifa (2010), *Buku Penelitian Tindakan Kelas*, penerbit Tsabita (2010), *Buku Sosiologi Pendidikan; Individu; Masyarakat, dan Pendidikan*, penerbit Rajawali Press (2011), *buku Sosiologi Pendidikan Teori dan Kajian*, penerbit Sahifa (2011), *Buku*

*Metodologi Penelitian Pendidikan*, penerbit Pustaka Setia (2011), Buku *Antropologi Pendidikan*, penerbit Pustaka Setia (2012), Buku *Al-Qur'an for Success*, penerbit Fajar Media (2012) dan buku yang sekarang *Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya* (PLSB) penerbit PT Remaja Rosdakarya (2015).



**Hariman Surya Siregar, M.Ag.**, lahir di Tasikmalaya (Kaki Gunung Galunggung) 08 Oktober 1974 dari pasangan Mumung (Alm) dan Maesaroh (Alm), Istri Yeni Mulyaningsih, S.Pd. memiliki 2 anak putra dan 1 orang putri.

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama di Kota kelahirannya mulai dari SDN Sukamanah 2 Tasikmalaya Tahun 1987, SMPN Mangunreja Tasikmalaya sambil mengenyam Pendidikan Kepesantrenan di Pondok Pesantren Nurussalam Tahun 1990 dan MA Negeri Darussalam Ciamis Tahun 1993. Meraih Gelar Sarjana Pendidikan Islam dari Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2001. Kemudian Meraih Gelar Magister bidang Pendidikan Islam dari Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan Studi S-3 Prodi Pendidikan Islam pada Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan sekarang sedang menyelesaikan Disertasi.

Pengalaman bekerja mengabdikan mencerdaskan anak bangsa sebagai tenaga Pendidik di Pondok Pesantren Modern Minal Masyrik Salem Brebes Jawa Tengah (1994-1996), Pondok Pesantren Modern Nurul Iman Singapermana Tasikmalaya (1997-1998), Tenaga Pendidik di SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru 2002-2004, Kepala SMP Laboratorium Percontohan UPI Kampus Cibiru (2007-2012). Tenaga pendidik pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2010 s.d. sekarang.

Sekretaris Program Pengembangan Kerja sama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati ini juga aktif menulis jurnal: Ketua Tim penelitian berjudul "*al-Khauf dan al-Khosyiah menurut para mufassir dan implikasinya terhadap pembelajaran*" (2008). Ketua Tim penelitian "*Guru PAI sebagai sentral pendidikan karakter*" (Penelitian terhadap upaya guru PAI di Kabupaten Bandung dalam pembinaan akhlak mulia) (2009),

Anggota Tim penelitian ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan (2010). Selain jurnal, juga buku yang pernah ditulis, yaitu: PAI SD penerbit Reza Grafika, buku *BTAQ SD dan SMP* penerbit Reza Grafika, *Ikhtisar Materi PAI di Sekolah dan Madrasah (Modul)*, *Pendalaman PAI di Madrasah (modul)*, *Pendalaman Fiqh Mu'amalah (modul)*.

Berbagai pendidikan, pelatihan, serta seminar telah diikuti, seperti Diklat Manajerial Kepala-Kepala Sekolah (2009), Pelatihan Teknis Pengisian Data melalui Esbed (2010), Workshop Penelitian Tindakan Kelas untuk Tugas Akhir (2011), Seminar Lesson Study (2008), Lokakarya sistem dan perangkat Pembelajaran (2009), Lokakarya penyusunan bahan ajar (Modul dan Hand Out) (2010), Seminar International tentang Pendidikan Karakter (2010), Lokakarya PTK (2011), Lokakarya Sistem Manajemen Sekolah Berbasis Keunggulan (2011).



**Koko Khoerudin, M.Pd.I.**, adalah pria kelahiran Ciamis, 15 Maret 1979. Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah di kota kelahirannya mulai dari MI Negeri Maparah Panjalu Ciamis tahun 1993, MTs Negeri Maparah Panjalu Ciamis tahun 1997, MA PUI sekarang (MAN) Maparah Panjalu Ciamis tahun 1998. Selama di bangku MI, MTs, dan MA ia mondok di pesantren Gegempalan Maparah Panjalu Ciamis. Kemudian melanjutkan pendidikan Pesantren Khusus 1999-2000 di Pesantren

Miftahul Huda Tasikmalaya. Meraih Gelar Sarjana Pendidikan Islam dari Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2004. Kemudian meraih Gelar Magister Pendidikan Islam dari Prodi PAI Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2014.

Pengalaman bekerja mengabdikan mencerdaskan anak bangsa, sebagai tenaga Pendidik di Al-Ghifari Bandung (2006-2013), Tenaga Pendidik MA Nurul Hidayah Batujajar (2006 s.d. sekarang), Kepala Madrasah Aliyah Nurul Hidayah periode (2015-2016), Tenaga Pengajar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung (2011 s.d. sekarang).

Pengalaman Organisasi Unit Pengembangan Tilawatil Quran (UPTQ) IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2002 sebagai Anggota, Badan Eksekutif Mahasiswa PAI IAIN Sunan Gunung Djati Bandung 2003-2004 sebagai Presiden Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tarbiyah Kab. Bandung tahun 2001 sebagai Kabid Kekaryaannya. Dan, karya ilmiah yang pernah ditulis yaitu: *Buku Pembelajaran Perspektif Islam*, penerbit PT. Remaja Rosdakarya Bandung (2015).

READING COPY